

## BAB 2

### SEJARAH GERAKAN MAHASISWA INDONESIA

Bab 2 ini membahas gerakan mahasiswa di negara-negara lain dan gerakan mahasiswa di Indonesia. Gerakan mahasiswa di negara-negara lain yang dibahas yaitu gerakan mahasiswa di Prancis, Jerman dan Korea Selatan. Sedangkan gerakan mahasiswa Indonesia yang dibahas, yaitu gerakan mahasiswa pada masa Orde Lama dan gerakan mahasiswa pada masa Orde Baru yang dimulai dari pembahasan gerakan mahasiswa pada masa kolonial. Gerakan mahasiswa pada masa kolonial yang dibahas adalah gerakan mahasiswa Angkatan 1908 dan 1928.<sup>1</sup> Gerakan mahasiswa yang dibahas pada masa Orde Lama adalah gerakan mahasiswa Angkatan 1966, sedangkan gerakan mahasiswa yang dibahas pada masa Orde Baru adalah Angkatan 1974, Angkatan 1977, Angkatan 1978, dan gerakan mahasiswa Angkatan 1998.

#### 2.1. Gerakan Mahasiswa di Negara Lain

Gerakan Mahasiswa di negara-negara lain banyak dikaji dan ditulis oleh para akademisi dari luar negeri.<sup>2</sup> Philip G. Altbach secara umum mengkaji gerakan mahasiswa di Eropa Barat dan Amerika Utara pada dasawarsa 60-an, 70-an dan 80-an.<sup>3</sup> Arthur Levine dan Keith R. Wilson telah menulis politik mahasiswa di Amerika.<sup>4</sup> Cyril Levitt menulis “gerakan kiri lama” di Kanada, Amerika Serikat dan Jerman Barat.<sup>5</sup> Raymond Boundon menulis kemunduran gerakan mahasiswa di Prancis.<sup>6</sup> Gianni Statera menulis politik mahasiswa

---

<sup>1</sup> Penggunaan istilah mahasiswa digunakan untuk mengganti penggunaan kaum terpelajar bagi siswa yang duduk baik di perguruan tinggi Hindia Belanda maupun perguruan tinggi di Belanda dan Eropa. Seperti Sekolah Teknik Belanda di Bandung (sekarang ITB), Sekolah Pertanian Belanda di Bogor, Sekolah Kedokteran Belanda di Surabaya, Sekolah Ekonomi di Makassar, Sekolah Hukum di Jakarta, Sekolah Sastra di Jakarta dan lain-lain

<sup>2</sup> Kecuali Yozar Anwar, hampir tidak ada akademisi, penulis dan peneliti dari dalam negeri yang mengkaji atau menulis gerakan mahasiswa di negara lain. Lihat Yozar Anwar, *Pergolakan Mahasiswa Abad ke-20: Kisah Perjuangan Anak-Anak Muda Pemberang*, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1981.

<sup>3</sup> Philip G. Altbach dalam Philip G. Altbach (ed), *Op.Cit*, hal. hal.1-47.

<sup>4</sup> Lihat Arthur Levine dan Keith R. Wilson dalam Philip G. Altbach (ed), *Ibid.*, hal. hal.48-68.

<sup>5</sup> Lihat Cyril Levitt dalam Philip G. Altbach (ed), *Ibid.*, hal.69-95.

<sup>6</sup> Lihat Raymond Boundon dalam Philip G. Altbach (ed), *Ibid.*, hal. 96-115.

di Italia.<sup>7</sup> Wolfe-Dietrich Webler menulis aspek-aspek gerakan mahasiswa di Jerman Barat.<sup>8</sup> Miciya Shimbori menulis gerakan mahasiswa tahun 70-an di Jepang.<sup>9</sup> Pamela J. Yettram menulis kepercayaan dan aktivisme mahasiswa pertengahan tahun 70-an di Inggris.<sup>10</sup> M. Kazamias menulis gerakan mahasiswa di Yunani.<sup>11</sup> Daniel Levy menulis politik mahasiswa di Amerika Latin.<sup>12</sup> N. Jayaram menulis aktivisme mahasiswa di India.<sup>13</sup> Y.G.M Lulat menulis aktivisme politik mahasiswa di Zambia.<sup>14</sup>

Semua penulis tersebut pada hakekatnya sependapat tentang enam hal pokok, yaitu: (1) mahasiswa menunjukkan keaktifannya yang sangat menonjol dalam tahun 1960-an; (2) adanya dampak yang sangat terasa dari gerakan mahasiswa terhadap perubahan sosial dan politik; (3) penguasa atau pemerintah terpengaruh dan berusaha memperhatikan tuntutan mahasiswa; (4) meskipun aktivitas politik mahasiswa di negara-negara industri mereda dalam tahun 1970-an, namun telah terjadi kematangan ideologi dalam gerakan mahasiswa. Di Inggris, Italia dan Jerman gerakan mahasiswanya yang sangat dipengaruhi oleh ideologi sehingga nuansa kekerasan dan radikalisme sangat terasa; (5) penurunan aktivitas politik mahasiswa di sebagian negara-negara berkembang tidaklah setajam di negara-negara industri; (6) akar dari semua gerakan mahasiswa adalah menyangkut keseluruhan masyarakat dan apa yang dirasakan oleh mahasiswa. Situasi sosial dan ekonomi, ketidakadilan sosial, kebijakan luar negeri yang tidak adil dan politik yang tidak demokratis merupakan akar dari gerakan mahasiswa.

Di Prancis, misalnya, gerakan mahasiswa yang berlangsung pada bulan Mei 1968 yang terkenal dengan “revolusi mahasiswa” hampir saja menumbangkan Jenderal De Gaulle. Meskipun tergolong “revolusi” yang gagal, tapi gerakan mahasiswa di Perancis ini merupakan gerakan politik mahasiswa pertama yang berhasil menebarkan wacana tentang kebebasan dan demokratisasi. Bersama

<sup>7</sup> Lihat Gianni Statera dalam Philip G. Altbach (ed), *Ibid.*, hal. 116-131.

<sup>8</sup> Lihat Wolfe-Dietrich Webler dalam Philip G. Altbach (ed), *Ibid.*, hal.132-152.

<sup>9</sup> Lihat Miciya Shimbori dalam Philip G. Altbach (ed), *Ibid.*,153-176.

<sup>10</sup> Lihat Pamela J. Yettram dalam Philip G. Altbach (ed), *Ibid.*, 177-221.

<sup>11</sup> Lihat M. Kazamias dalam Philip G. Altbach (ed), *Ibid.*, hal. 222-238.

<sup>12</sup> Lihat Daniel Levy dalam Philip G. Altbach (ed), *Ibid.*, hal. 239-275.

<sup>13</sup> Lihat N. Jayaram dalam Philip G. Altbach (ed), *Ibid.*, hal. 276-301.

<sup>14</sup> Lihat Y.G.M Lulat dalam Philip G. Altbach (ed), *Ibid.*, hal. 302-335.

dengan kelompok buruh radikal, mahasiswa Perancis melakukan demonstrasi besar-besaran untuk menumbangkan pemerintahan Jenderal De Gaulle yang paling disegani di Eropa.<sup>15</sup>

Meskipun gagal “revolusi mahasiswa” yang berlangsung pada bulan Mei 1968 ciri-ciri wacana idealistik revolusioner berupa radikalisme gerakan. Wacana idealistik revolusioner yang mengambil bentuk verbal ekstrim berupa demonstrasi radikal yang diperankan oleh mahasiswa dan kaum buruh Perancis secara ideologis sangat dekat dengan sosialis-anarkis Perancis Proudhon dan filsafat revolusioner Jerman, Marx. Hal itu dapat dilihat dari demonstrasi yang dilakukan oleh buruh-mahasiswa Perancis yang tampak seperti praktek politik komunis yang menginginkan “revolusi”.<sup>16</sup>

Ada sejumlah faktor yang menyebabkan gagalnya gerakan mahasiswa bulan Mei 1968, empat diantaranya yang paling penting, yaitu: (1) adanya kepercayaan bahwa Jenderal De Gaulle tidak dapat digulingkan membuat tidak seorang pun yang merencanakan menggulingkan Jenderal De Gaulle; (2) Partai Komunis yang diharapkan dapat memetik keuntungan dari kekacauan itu tidak sedang berada dalam kondisi alamiahnya yang revolusioner, sehingga tidak berusaha mengambilalih kekuasaan; (3) rencana pergerakan dilumpuhkan tekanan-tekanan personal yang berlangsung di bawah hubungan-hubungan personal dan persaingan-persaingan doktrinal; (4) para intelektual, mahasiswa, buruh dan profesional sebagian besar memiliki ambisi-ambisi yang seluruhnya reformis.

Kecenderungan yang sama juga terasa dalam gerakan mahasiswa di Jerman.<sup>17</sup> Dari perspektif historis, sejarah mahasiswa Jerman pada abad ke-19 memiliki tradisi sebagai ujung tombak politik dan sebagai elit nasional. Selama abad itu persatuan nasional Jerman dipelopori oleh tiga generasi yang memiliki patriotisme yang terhimpun di dalam *Burschenschaften*. Gerakan mahasiswa di Jerman yang berawal dari Berlin Barat dilakukan oleh kelompok kecil

<sup>15</sup> Pembahasan tentang gerakan mahasiswa Perancis bulan Mei 1968 lihat Patrick Seale dan Maureen McConville, *Pemberontakan Mahasiswa Revolusi Perancis, Mei 1968*, Yogyakarta: Yayasan Litera Indonesia, 2000.

<sup>16</sup> Mengenai kedekatan mahasiswa Perancis dengan Partai Komunis lihat Raymon Boudon, “Tahun 1970-an Di Perancis: Periode Kemunduran Mahasiswa” dalam Philip G. Altbach, *Politik dan Mahasiswa; Perspektif dan Kecenderungan Masa Kini*, Jakarta: Yayasan API-PT Gramedia, 1988, hal. 96-115.

<sup>17</sup> Tentang gerakan mahasiswa di Jerman lihat Yozer Anwar, *Pergolakan Mahasiswa Abad Ke-20 Kisah Perjuangan Anak Muda Pemberang*, Jakarta: Sinar Harapan, 1981, hal. 92-100.

mahasiswa “kiri baru”, yaitu Liga Mahasiswa Sosialis (SDS) yang dipimpin oleh Rudi Dutsch. Di Jerman Barat, organisasi mahasiswa independen terbesar tapi sangat kritis pada kebijakan pemerintah khususnya kebijaksanaan pendidikan adalah *Verband Deutscher Studentenschaften (VDS)*.

Kemunculan gerakan SDS yang difokuskan kepada monopoli kekuasaan (*power monopoly*) dan kontrol pemikiran (*thought control*) dipicu oleh: (1) kemerosotan demokrasi parlementer, dan (2) manipulasi pendapat umum. Mahasiswa yang tergabung dalam SDS tidak puas terhadap monopoli kekuasaan yang dilakukan oleh koalisi dua partai besar, yaitu Partai Kristen Demokrat (CDU) dan Partai Sosialis Demokrat (SPD). Menurut SDS koalisi antara CDU dan SPD tidak hanya melahirkan monopoli kekuasaan, tetapi juga menghilangkan kekuatan oposisi di parlemen yang seharusnya berfungsi sebagai kontrol terhadap kekuasaan. Sebagai upaya untuk memperluas gerakannya, SDS juga mengembangkan suatu teori revolusioner untuk menyerang birokrasi di Jerman Timur dan Jerman Barat yang dinilainya telah menumpulkan kontrol pemikiran.

Di Korea Selatan akar dari gerakan mahasiswa yang meletus pada tanggal 18-19 April 1960 adalah ketidakadilan sosial, ekonomi dan politik yang ditimbulkan oleh Syngman Rhee. Selama 12 tahun pemerintahan Presiden Syngman Rhee, masyarakat Korea Selatan hanya disodorkan korupsi besar-besaran oleh Syngman Rhee dan para pejabatnya. Rakyat Korea Selatan terutama kalangan mahasiswa yang tadinya hanya menyimpan amarah kepada Syngman Rhee mulai meletupkan amarahnya ketika Pemilu Presiden pada tanggal 16 Maret 1960 berlangsung curang.<sup>18</sup>

Namun kejatuhan Presiden Syngman Rhee bersama wakilnya Lee Ki Poong tidaklah disebabkan oleh faktor tunggal berupa merebaknya radikalisme gerakan mahasiswa yang tidak puas terhadap pelaksanaan pemilu pada tanggal 16 Maret 1960 yang berhasil memenangkan kembali Presiden terkuat di Korea Selatan, Syngman Rhee. Melainkan lebih kepada faktor represif aparat kepolisian menangani para demonstran mahasiswa. Para demonstran yang terdiri dari kaum intelektual, mahasiswa yang tadinya hanya marah kepada Presiden Syngman Rhee

---

<sup>18</sup> Tentang gerakan mahasiswa di Korea Selatan tanggal 18-19 April 1960 lihat Yozar Anwar, *Ibid.*, hal 215-221. Tentang gerakan mahasiswa di Jerman Barat lihat Yozar Anwar, *Ibid.*, hal. 92-100.

akhirnya menjadi liar hingga kemudian membakar pos-pos polisi dan rumah-rumah pejabat, karena aspirasinya justru dihadap oleh aparat kepolisian dengan pentungan dan laras senapan. Secara politik kejatuhan Presiden Syngman Rhee bersama Wakil Presiden Lee Ki Poong setidaknya disebabkan oleh empat hal, yaitu: (1) pemerintahan Syngman Rhee yang tidak demokratis dan korup; (2) penanganan represif aparat kepolisian terhadap para demonstran terutama mahasiswa; (3) keberhasilan media menjadi mediator dalam melakukan konsolidasi politik bagi para oposisi; (4) dukungan militer terhadap tuntutan gerakan mahasiswa yang mendesak pemerintahan Syngman Rhee dibubarkan.

## 2.2. Gerakan Mahasiswa Pada Masa Kolonial

Sebelum Negara Republik Indonesia berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945 atau tepatnya pada masa penjajahan Belanda di wilayah Hindia Belanda tercatat ada dua gerakan mahasiswa yang sangat populer, unik dan monumental, yaitu: (1) gerakan mahasiswa tahun 1908 atau yang dikenal dengan Angkatan 08 yang dimotori oleh Boedi Oetomo;<sup>19</sup> (2) gerakan mahasiswa tahun 1928 yang terkenal Angkatan 28, yang dimotori oleh Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI) dan para pemuda pelajar dari berbagai perguruan tinggi di Hindia Belanda, seperti Jong Ambon, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Islamieten Bond, Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Pemuda Kaum Betawi, dan lain-lain.<sup>20</sup>

Gerakan mahasiswa Angkatan 08 dan Angkatan 28 disebut unik, karena meskipun kedua gerakan pemuda pelajar tersebut tidak dapat dipisahkan dari anasir primordialisme; kesukuan, kedaerahan dan agama, namun tetap berbasiskan pada gerakan dengan semangat kemerdekaan untuk sebuah bangsa (*nation*) dan negara (*state*), sehingga sangat kental dengan nuansa nasionalismenya. Begitu

<sup>19</sup> Sebagian sejarawan menyepakati bahwa berdirinya Boedi Oetomo, 20 Mei 1908 adalah tonggak dimulainya era baru dalam sejarah Indonesia. Walaupun di sisi lain, dengan alasan yang objektif, ada beberapa pihak yang menyimpulkan Boedi Oetomo bukanlah organisasi pergerakan yang pertama. Sementara kalangan Islam misalnya ada yang berpendapat bahwa pelopor kebangkitan nasional seharusnya Sarekat Islam (SI), dengan momentum berdirinya Sarekat Dagang Islam (SDI) yang berdiri pada 16 Oktober 1905 di Solo. Untuk hal ini lihat Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1985 hal 114. Tentang Angkatan 08 dan Boedi Oetomo lihat Adi Suryadi Culla, *Patah Tumbuh Hilang Berganti: Sketsa Pergolakan Mahasiswa dalam Politik dan Sejarah (1908-1998)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999 hal 21-22.

<sup>20</sup> Tentang Angkatan 28 lihat Adi Suryadi Culla, *Ibid*, hal 26-28. Tentang PPPI lihat Marwati Djoened Poepongoro dan Nugroho Notosusanto (ed), *Sejarah Nasional Indonesia V*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984, hal 178-194.

uniknya gerakan ini sehingga Angkatan 08 dan Angkatan 28 selalu dan selamanya dilihat oleh para pemuda pelajar sebagai tonggak sejarah persatuan nasional. Juga dianggap paling monumental, karena gerakan-gerakan mahasiswa angkatan-angkatan selanjutnya bukan saja tetap menjadikan nasionalisme sebagai dasar moralnya, tetapi juga selalu menjadikan gerakan kaum terpelajar Angkatan 08 dan Angkatan 28 sebagai rujukannya.

Sebagai gerakan moral, kedua gerakan tersebut selalu dirujuk oleh gerakan-gerakan mahasiswa berikutnya karena dilihat sebagai produk langsung dari perubahan situasi politik akibat gerakan politik. Perubahan sikap politik pemerintah kolonial Hindia Belanda yang menganut politik etis pada tahun 1901 telah mendorong terjadinya perubahan situasi politik.<sup>21</sup> Di satu sisi kedua Angkatan itu merupakan produk dari kebijakan politik etis Belanda, tapi di lain sisi kedua produk itu justru kontra produktif dari gagasan politik etis Belanda. Kontra produktif karena politik etis Belanda berasumsi bahwa ganti rugi atas penderitaan masyarakat selama di bawah pemerintahan kolonial Belanda akan membuat masyarakat diam tanpa perlawanan, sehingga melalui politik etisnya Belanda ingin memperlihatkan diri memerintah atas dasar moral.<sup>22</sup> Kontraproduktif karena ganti rugi penderitaan masyarakat Hindia Belanda telah pula melahirkan legitimasi politik bagi masyarakat untuk menolak dan melawan berbagai bentuk kolonialisme yang dilancarkan oleh Belanda.

Kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang memberikan pendidikan bagi anak-anak Hindia Belanda terutama dari kalangan atas membuka kesempatan seluas-luasnya kepada kaum muda pribumi —terutama dari kalangan masyarakat atas (ningrat) dan yang bekerja pada pemerintah kolonial— untuk mengenyam pendidikan di lembaga-lembaga yang semula hanya boleh dimasuki oleh orang-orang Belanda dan warga asing lainnya. Hasilnya adalah dari para mahasiswa pribumi inilah nantinya muncul kesadaran politik tentang kondisi “bangsanya”

---

<sup>21</sup> Ada tiga hal pokok yang dicakup dari politik etis kolonial Belanda, yaitu: (1) pendidikan (*educatie*); (2) perpindahan penduduk (*emigratie*); (3) irigasi (*irrigatie*) yang mendorong terjadinya perubahan politik. Tentang sejarah diberikannya Politik Etis oleh Belanda lihat H. Baudet dan I.J. Brugmans (peny), *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1987.

<sup>22</sup> Tentang pandangan yang melihat politik etis merupakan ganti rugi atas penderitaan rakyat yang mendiami wilayah Hindia Belanda selama di bawah pemerintahan kolonial Belanda, dan dengan politik ini Belanda ingin memperlihatkan diri memerintah atas dasar moral lihat John Ingleson, *Perhimpunan Indonesia dan Pergerakan Kebangsaan*, Jakarta: Grafiti Pers, 1993.

yang terjajah. Selanjutnya melalui organisasi pergerakan, Boedi Oetomo dan PPPI suasana pemikiran tersebut lalu diorientasikan pada proses penyadaran kemanusiaan dan sosialisasi wacana nasionalisme.

Boedi Oetomo yang didirikan pada tahun 1908 merupakan sebuah wadah perjuangan bagi kaum intelektual Jawa yang pertama kali memiliki struktur pengorganisasian modern. Organisasi ini dimotori oleh para pemuda pelajar dan mahasiswa Jawa yang berasal dari lembaga pendidikan STOVIA, sebuah sekolah kedokteran di Jakarta.<sup>23</sup> Boedi Oetomo juga unik karena meskipun sangat dipengaruhi oleh obsesi kebesaran budaya Jawa dan aksi-aksi atau gerakannya hanya terbatas pada penduduk Jawa dan Pulau Madura saja, tapi kehadirannya merupakan refleksi sikap kritis dan keresahan bagi kaum intelektual khususnya intelektual kampus terhadap lingkungan sosialnya, sehingga isu perjuangannya bersifat universal. Pada kongres pertamanya di Yogyakarta tanggal 5 Oktober 1908, Boedi Oetomo, menetapkan tujuan sebagai sebuah organisasi perkumpulan, yaitu: kemajuan yang selaras buat negeri dan bangsa, terutama dengan memajukan pengajaran, pertanian, peternakan dan dagang, teknik dan industri, serta kebudayaan. Oleh karena itu secara politik tujuan Boedi Oetomo yang dipahami oleh pihak penjajah adalah merumuskan secara samar-samar “kemajuan bagi Hindia Belanda” sebagai bentuk praksis dari kemerdekaan.<sup>24</sup>

Atas pertimbangan isu dan aksi-aksi perjuangannya yang tanpa perdebatan, Boedi Oetomo dengan cepat diterima oleh seluruh intelektual Jawa di hampir seluruh daratan pulau Jawa. Sampai menjelang Kongres Pertama-nya sudah tercatat 8 cabang yang cukup besar, yaitu: Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta I, Yogyakarta II, Magelang, Surabaya dan Probolinggo.<sup>25</sup> Boedi Oetomo terlihat maju pesat pada lima tahun permulaan, dimana pada akhir tahun 1909 telah memiliki 40 cabang dengan jumlah anggota kurang lebih 10.000 orang. Telah tampak bahwa Boedi Oetomo bukan hanya sekedar sebagai perkumpulan bisa dan

---

<sup>23</sup> Tentang STOVIA, lihat Akira Nagazumi, *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia*, Jakarta: Temprint, 1989, hal 43.

<sup>24</sup> Tentang Boedi Oetomo, mengenai sifat dan tujuannya, lihat L.M Sitorus, *Sejarah pergerakan Kebangsaan Indonesia*, Jakarta: 1974, hal 10-11. Lihat juga Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, London: Cornell University Press, 1980, hal 80-81.

<sup>25</sup> Tentang Kongres Pertama Boedi Oetomo, lihat Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*, Jilid 2 Jakarta: Gramedia, 1990, hal. 102. Lihat juga Kahin, *Ibid.*, hal. 81-82.

tempat keinginan-keinginan bergerak maju dapat dikeluarkan, tapi juga sebagai tempat kebaktian terhadap bangsa dinyatakan dan mempunyai kedudukan monopoli.

Pada tahun 1908, para mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Belanda juga membentuk sebuah organisasi perhimpunan yang dinamakannya *Indische Vereeniging*.<sup>26</sup> Semula organisasi ini hanya merupakan pusat kegiatan diskusi bagi para mahasiswa tentang perkembangan situasi tanah airnya, Hindia Belanda. Namun lambat laun kemudian berkembang menjadi wadah yang berorientasi politik, yaitu untuk kemerdekaan Hindia Belanda. Sejalan dengan perubahan orientasinya, dari hanya sekedar sebagai pusat kegiatan diskusi hingga kemudian menjadi wadah perjuangan kemerdekaan, *Indische Vereeniging* berganti nama menjadi *Indonesische Vereeniging* pada tahun 1922 dan hingga akhirnya bernama Perhimpunan Indonesia (PI) pada tahun 1925.<sup>27</sup>

Berdasarkan sejumlah masalah yang diinventarisasikan oleh pengurus Perhimpunan Indonesia (PI) waktu itu, muncul sikap menentang terhadap penjajah, tidak mau berdamai, serta tidak kenal kerjasama. Semangat itu terlihat dalam pernyataan dasar-dasar Perhimpunan Indonesia (PI), yang intinya sebagai berikut:

- “1. Masa depan bangsa Indonesia semata-mata tergantung pada susunan pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat;
2. Untuk mencapai itu, setiap orang Indonesia harus berjuang sesuai kemampuan serta bakatnya, dengan tenaga dan kekuatan sendiri;
3. Untuk mencapai tujuan bersama itu, semua unsur atau lapisan rakyat perlu kerja sama seerat-eratnya.”<sup>28</sup>

Selain *Indische Vereeniging*, berdiri pula sejumlah organisasi-organisasi lain, seperti *Indische Partij* (IP)<sup>29</sup> yang melontarkan propaganda kemerdekaan Indonesia, Sarekat Islam (SI) yang beraliran nasionalis demokratis dengan dasar

<sup>26</sup> Tentang *Indische Vereeniging*, lihat Sudiyo, *Pergerakan Nasional Mencapai dan Mempertahankan Kemerdekaan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004, hal. 24.

<sup>27</sup> Tentang peran Perhimpunan Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan lihat John Ingleson, *Perhimpunan Indonesia dan Pergerakan Kebangsaan*, Jakarta: Grafiti, 1993L lihat juga Sudiyo, *Pergerakan Nasional Mencapai dan Mempertahankan Kemerdekaan*, *Ibid.*, hal. 26.

<sup>28</sup> Sartono Kartodirdjo, “*Perhimpunan Indonesia dan Manifesto Politik*” dalam JB. Kristanto (ed.), *1000 Tahun Nusantara*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2000, hal. 140.

<sup>29</sup> Mengenai sejarah *Indische Partij* (IP) lihat Takashi Shirashi, *Zaman Bergerak, Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1997, hal 78-79.



agama<sup>30</sup>, *Indische Sociaal Democratische Vereeniging* (ISDV) yang berhaluan Marxisme.<sup>31</sup> Kelahiran sejumlah organisasi-organisasi pergerakan itu telah menambah pula jumlah haluan dan cita-cita politik. Kehadiran Boedi Oetomo, *Indische Vereeniging*, Sarekat Islam (SI), *Indische Sociaal Democratische Vereeniging* (ISDV) dan yang lainnya pada masa itu merupakan suatu episode sejarah yang menandai munculnya sebuah angkatan pembaharu dengan kaum terpelajar sebagai aktor kuncinya. Misi utamanya adalah menumbuhkan kesadaran kebangsaan dan hak-hak kemanusiaan bagi masyarakat Hindia Belanda untuk memperoleh kemerdekaan, serta mendorong semangat perjuangan untuk membebaskan diri dari penindasan melalui penerangan-penerangan pendidikan.

Pada pertengahan tahun 1923, sejumlah mahasiswa yang bergabung dalam *Indonesische Vereeniging* kembali ke tanah air. Di Hindia Belanda, *Indonesische Vereeniging* diubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia. Kecewa dengan perkembangan kekuatan-kekuatan perjuangan di Hindia Belanda, dan melihat situasi politik yang dihadapi, para pelopor *Indonesische Vereeniging* lalu membentuk kelompok studi yang kemudian amat berpengaruh lantaran keaktifannya dalam diskursus kebangsaan saat itu. Adapun kelompok studi yang mereka bentuk ada dua, yaitu: (1) Kelompok Studi Indonesia (*Indonesische Studie Club*); (2) Kelompok Studi Umum (*Algemeene Studie Club*). Kelompok Studi Indonesia (*Indonesische Studie Club*) dibentuk oleh Soetomo di Surabaya pada tanggal 29 Oktober 1924. Sedangkan Kelompok Studi Umum (*Algemeene Studie Club*) dibentuk pada tanggal 11 Juli 1925 oleh kaum nasionalis dan bersama mahasiswa Sekolah Tinggi Teknik di Bandung yang dimotori oleh Soekarno.<sup>32</sup>

Sebagai upaya untuk merekatkan berbagai wadah perjuangan yang bercorak kebangsaan maka didirikanlah Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) pada tahun 1926. PPPI dibentuk ketika belum ada prototipe organisasi yang menghimpun seluruh elemen organisasi kaum terpelajar yang bersifat kebangsaan,

<sup>30</sup> Safrizal Rambe, *Sarekat Islam: Pelopor Bangkitnya Nasionalisme Indonesia 1905-1942*, Jakarta: Yayasan Kebangkitan Insan Cendekia, 2008, hal 44-86.

<sup>31</sup> Mengenai *Indische Sociaal Democratische Vereeniging* lihat Imam Soedjono, *Yang Berlawan, Membongkar Tabir Pemalsuan Sejarah PKI*, Yogyakarta: Resist Book kerjasama dengan Yayasan Sapu Lidi Belanda, 2006, hal 18. Penjelasan lebih lanjut lihat Hermawan Sulistyono, *Palu Arit di Ladang Tebu*, Jakarta, KPG, 2006. Lihat juga Sudiyo, *Pergerakan Nasional Mencapai dan Mempertahankan Kemerdekaan, Op., Cit.*, hal 20-41.

<sup>32</sup> Tentang kelompok studi ini, lihat John Ingleson, *Jalan Ke Pengasingan: Gerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927-1934*, Jakarta: LP3ES, 1988, hal. 20-25.

sehingga PPPI dapat dikatakan sebagai organisasi kebangsaan pertama yang bersifat kebangsaan. PPPI kemudian melaksanakan Kongres Pemuda I yang berlangsung pada bulan Mei 1926. Dalam Kongres ini kaum terpelajar berusaha meletakkan dasar komitmen untuk menyisihkan perbedaan-perbedaan primordial diantara mereka dan menciptakan kesatuan bangsa.<sup>33</sup>

Berikutnya PPPI juga menjadi motor pelaksanaan Kongres Pemuda II yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 26-28 Oktober 1928. Kongres Pemuda II inilah yang berhasil mencetuskan sebuah gagasan tentang dasar *state*; wilayah, penduduk (bangsa) dan bahasa yang dikemasnya ke dalam sebuah ikrar kaum terpelajar yang sekarang amat populer dengan istilah Sumpah Pemuda. Gagasan penyelenggaraan Kongres Pemuda II berasal dari PPPI, sebuah organisasi pemuda yang beranggotakan kaum terpelajar dari seluruh daerah-daerah yang ada di wilayah Hindia Belanda. Adapun Susunan Panitia Kongres sebagai berikut:

“Ketua : Sugondo Joyopuspito (dari PPPI)  
 Wakil Ketua : Djoko Marsaid dari Jong Java  
 Sekretaris : Muhammad Yamin dari Jong Sumatranen Bond  
 Bendahara : Amir Sjarifuddin dari Jong Bataks Bond  
 Pembantu I : Djohan Muh. Tjai dari Jong Islamieten Bond  
 Pembantu II : Kotjosungkono dari Pemuda Indonesia  
 Pembantu III : Senduk dari Jong Celebes  
 Pembantu IV : J. Leimena dari Jong Ambon  
 Pembantu V : Rohyani dari Pemuda Kaum Betawi.”<sup>34</sup>

Atas inisiatif PPPI, kongres dilaksanakan di tiga gedung yang berbeda dan dibagi dalam tiga kali rapat. Rapat pertama berlangsung di Gedung *Katholieke Jongenlingen Bond (KJB) Waterlooplein* (sekarang Lapangan Banteng) pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 1928. Dalam sambutannya, Ketua PPPI, Sugondo Djojopuspito, berharap Kongres PPPI dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Moehammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurut Moehammad Yamin ada lima faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia yaitu: (1) sejarah; (2) bahasa; (3) hukum adat; (4) pendidikan; (5) kemauan.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Sartono Kartodirdjo, *Op., Cit.*, hal 82

<sup>34</sup> Marwati Joened Pusponogoro dan Nugroroho Notosusanto, *Op., Cit.*

<sup>35</sup> Tentang Moh Yamin, lihat Restu Gunawan, *Muhammad Yamin dan Cita-Cita Persatuan*, Yogyakarta: Ombak, 2005, hal. 17.

Sedangkan rapat kedua berlangsung di Gedung *Oost-Java Bioscoop* pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 1928. Rapat ini membahas masalah pendidikan. Pada rapat kedua ini, dua pembicara, yaitu: Poernomowoelan dan Sarmidi Mangoensarkoro sama-sama berpendapat bahwa anak-anak harus mendapat pendidikan kebangsaan, harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Rapat penutup kemudian berlangsung di gedung *Indonesische Clubgebouw* di Jalan Kramat Raya 106. Pada rapat penutup ini Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan, sedangkan Ramelan mengemukakan bahwa gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri, suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam perjuangan.<sup>36</sup>

Sebelum kongres ditutup diperdengarkan lagu "Indonesia Raya" karya Wage Rudolf Soepratman yang dimainkan dengan biola tanpa syair, atas saran Sugondo kepada Wage Rudolf Soepratman. Lagu tersebut disambut dengan sangat meriah oleh peserta kongres.<sup>37</sup> Kongres ditutup dengan mengumumkan rumusan hasil kongres. Oleh para pemuda yang hadir, rumusan itu diucapkan sebagai ikrar setia. Para peserta Kongres Pemuda II ini berasal dari berbagai wakil organisasi pemuda yang ada pada waktu itu, seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Batak, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamieten Bond, PPPI, Pemuda Kaum Betawi, dan lain-lain. Selain peserta dari berbagai daerah, juga hadir sejumlah pemuda Tionghoa sebagai pengamat, diantaranya yaitu: Oey Kay Siang, John Lauw Tjoan Hok, Tjio Djien Kwie dan Kwee Thiam Hong yang merupakan wakil dari Jong Sumatranen Bond<sup>38</sup>. Adapun isi Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, yaitu:

“Pertama, Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.

Kedua, Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia..

<sup>36</sup> Tentang rapat kedua yang berlangsung di Gedung *Oost-Java Bioscoop* lihat Ahmaddani G. Martha, Cristianito Wibisono, Yozar Anwar dan tim, *Pemuda Indonesia: Dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa*, Jakarta: Kantor Menpora, hal. 76.

<sup>37</sup> Tentang Lagu “Indonesia Raya” yang dimainkan dengan biola tanpa syair, lihat *45 Tahun Sumpah Pemuda*, Jakarta: Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah Jakarta, 1974, hal 68-72.

<sup>38</sup> Mengenai keikutsertaan orang Tionghoa dalam Sumpah Pemuda lihat Benny G Setiono, *Tionghoa dalam Pusaran Politik*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008, hal 497.

Ketiga Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia.”<sup>39</sup>

Dari kebangkitan kaum terpelajar; mahasiswa, intelektual, dan aktivis pemuda itulah kemudian muncul generasi baru Angkatan 1928. Dalam perkembangan berikutnya, dari dinamika pergerakan nasional yang ditandai dengan kehadiran kelompok-kelompok studi, dan akibat pengaruh sikap penguasa Belanda yang menjadi liberal, muncul kebutuhan baru untuk menjadi partai politik, terutama dengan tujuan memperoleh basis massa yang luas. Kelompok Studi Umum (*Algemeene Studie Club*) menjadi Perserikatan Nasional Indonesia (PNI),<sup>40</sup> sedangkan Kelompok Studi Indonesia (*Indonesische Studie Club*) berubah menjadi Partai Bangsa Indonesia (PBI).<sup>41</sup>

Akan tetapi pemerintahan kolonial Jepang yang jauh lebih represif dibandingkan dengan kolonial Belanda telah membuat kondisi pendidikan maupun kehidupan politik menjadi *vacuum*. Pihak kolonial Jepang melarang berbagai bentuk kegiatan yang berbau politik dengan cara membubarkan semua organisasi kaum terpelajar termasuk membubarkan partai politik. Bahkan insiden kecil saja yang terjadi di Sekolah Tinggi Kedokteran Jakarta justru mengakibatkan mahasiswa dipecat dan dipenjarakan. Dengan kondisi kekosongan (*vacuum*) itu, maka mahasiswa lalu memilih mengarahkan kegiatan dengan berkumpul dan berdiskusi, bersama para pemuda lainnya terutama di asrama-asrama. Ada tiga asrama yang cukup berperan dalam melahirkan sejumlah tokoh, yaitu: (1) Asrama Menteng Raya; (2) Asrama Cikini; (3) Asrama Kebon Sirih. Tokoh-tokoh inilah yang nantinya menjadi cikal bakal generasi 1945 yang menentukan kehidupan bangsa selanjutnya.<sup>42</sup>

<sup>39</sup> Lihat *45 Tahun Sumpah Pemuda, Op. Cit.*, hal 69.

<sup>40</sup> Sejarah berdirinya PNI, lihat Bob Hering, *Soekarno, Founding Father of Indonesia: A Biography*, Jakarta: Hasta Mitra-KITLV Jakarta, 2003, hal. 118-119. Lihat John Ingleson, *Jalan Pengasingan, Op., Cit.* Penjelasan lebih lanjut mengenai peran PNI dalam sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia lihat J. Eliseo Rocamora, *Nasionalisme Mencari Ideologi: Bangkit dan Runtuhnya PNI 1946-1965*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1991.

<sup>41</sup> Sartono Kartodirjo dkk., *Op., Cit.*

<sup>42</sup> Tentang tiga asrama yang cukup berperan dalam melahirkan sejumlah tokoh lihat Ridwan Saidi, *Mahasiswa dan Lingkaran Politik*, Jakarta: LPMI, 1989, hal. 227-229. Lihat juga Suharsih dan Ign Mahendra K, *Bergerak Bersama Rakyat: Sejarah Gerakan Mahasiswa dan Perubahan Sosial di Indonesia*, Yogyakarta: Resist Book, 2007, hal. 60-61.

### 2.3. Gerakan Mahasiswa Pada Masa Orde Lama

Pengaruh Angkatan 08 dan Angkatan 28 terhadap angkatan berikutnya terus berlanjut hingga berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pengaruh Angkatan 08 dan Angkatan 28 terhadap Angkatan 45 adalah kristalisasi nilai-nilai perjuangan kemerdekaan yang menjadi dasar dari perjuangan Angkatan 45. Implementasi nilai-nilai itu dapat dilihat dari peran Angkatan 45 seperti yang tampak dalam Peristiwa Rengasdengklok menjelang tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa Rengasdengklok adalah gerakan kelompok bawah tanah yang dipimpin oleh dua tokoh Angkatan 45 yang sangat terkenal, yaitu Chairul Saleh dan Soekarni. Dengan kristalisasi nilai-nilai perjuangan kemerdekaan yang ada pada dirinya membuat Chairul Saleh, Soekarni dan kawan-kawannya harus menculik dan mendesak Soekarno dan Hatta untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan.<sup>43</sup>

Setelah Republik Indonesia berdiri, sebagian tokoh-tokoh penting Angkatan 08, Angkatan 28 dan Angkatan 45 bergabung ke dalam kekuasaan. Soekarno dan Hatta, misalnya, masuk ke dalam bagian pemerintahan dengan menjadi pucuk pemerintahan. Sementara yang lainnya lagi, seperti Soekarni dan Chairul Saleh memilih berada di luar lingkaran kekuasaan. Meskipun tidak dipilih melalui Pemilihan Umum (Pemilu), Soekarno pada awal-awal periode kekuasaannya memerintah dengan legitimasi yang sangat kuat. PPKI yang mengangkatnya secara aklamasi menjadi Presiden Republik Indonesia pertama dan kemudian diperkuat oleh Ketetapan MPRS menjadi 'Presiden Seumur Hidup' seperti tidak pernah ragu bahwa Soekarno dapat mewujudkan semua cita-cita politik yang ada dalam UUD 1945.<sup>44</sup>

Namun seiring dengan berjalannya waktu, selama perodesasi kekuasaan Soekarno, yaitu masa Orde Lama (1945-1966) berbagai bentuk penyimpangan dilakukan hingga memicu ketidakpuasan berbagai pihak termasuk pihak mahasiswa. Kemunculan gerakan mahasiswa pada tahun 1966 atau yang populer

---

<sup>43</sup> "Penculikan" Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan RI, lihat Donald Wilhelm, *Indonesia Bangkit*, Jakarta: UI Press, 1981, hal. 23. Lihat juga Ahmaddani G. Martha, Cristianto Wibisono, Yozar Anwar dkk., *Pemuda Indonesia: Dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa, Op., Cit.*, hal. 147-150.

<sup>44</sup> Tentang pemilihan Soekarno dan Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden oleh PPKI, lihat Ahmaddani G. Martha, Cristianto Wibisono, Yozar Anwar dan tim, *Pemuda Indonesia: Dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa, Op., Cit.*, hal. 150-151.

dengan Angkatan 66 adalah sebagai akibat dari penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan yang dinilai menyimpang dari cita-cita dasar yang menjadi tujuan dari perjuangan melawan kolonial, yaitu kemerdekaan untuk kemakmuran rakyat. Bentuk-bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno, misalnya dengan membubarkan Parlemen dan menetapkan Konstitusi di bawah Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Selain itu, Soekarno juga menyatakan diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 lewat semboyan "Kembali ke UUD' 45" setelah membubarkan Konstituante yang bertugas untuk menyusun Undang-Undang Dasar baru.<sup>45</sup> Bahkan Soekarno memperkuat kekuasaannya dengan cara memberi posisi penting bagi militer terutama TNI AD dan memadukan tiga unsur paham atau ideologi radikal ke dalam orientasi politiknya, yaitu: Nasionalisme, Agama dan Komunisme (Nasakom).<sup>46</sup>

Kebijakan Soekarno kembali ke UUD 1945 dengan orientasi politik Nasakom merupakan ciri dari periode Demokrasi Terpimpin. Di bawah kontrol sistem Demokrasi Terpimpin, kebebasan dan partisipasi politik, serta kontrol terhadap kekuasaan yang menjadi ciri dari sistem Demokrasi Parlemen benar-benar berhenti bergerak. Perebutan kekuasaan yang menyebabkan kabinet jatuh bangun menjadi dasar Soekarno untuk memilih sistem Demokrasi Terpimpin. Soekarno yang melihat sistem Demokrasi Parlemen atau yang disebutnya sebagai "Demokrasi ala Barat" atau "Demokrasi 50 plus satu" tidak sesuai dengan konteks Indonesia<sup>47</sup>. Soekarno lalu mengintrodusir Demokrasi Barat itu menjadi Demokrasi Terpimpin yang dianggapnya sangat sesuai dengan kehidupan politik Indonesia. Demokrasi Terpimpin yang berintikan musyawarah-mufakat, kekeluargaan dan gotong royong menurut Soekarno merupakan khas demokrasi Indonesia, karena digali dari warisan nenek moyang<sup>48</sup>.

Namun dalam pelaksanaannya apa yang dikatakan dan diinginkan Soekarno itu tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Demokrasi Terpimpin justru

---

<sup>45</sup> Tentang Dekrit Presiden, lihat Herbert Faith, *The Indonesia Elections Of 1955*, Jakarta, KPG, 1999.

<sup>46</sup> Tentang Nasakom lihat Ahmaddani G. Martha, Cristianto Wibisono, Yozar Anwar dan tim, *Pemuda Indonesia: Dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa, Op., Cit.*, hal 259-264.

<sup>47</sup> Wawan Tunggal Alam, *Demi Bangsa: Pertentangan Soekarno Vs Hatta*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal 271-273.

<sup>48</sup> Herbert Faith, & Lance Castles, ed., *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, Jakarta: LP3ES, 1988, hal 84-132.

melahirkan sentralisasi kekuasaan yang sangat besar di tangan Presiden Soekarno. Status dan posisi politik Soekarno sebagai ‘Yang Mulia’, ‘Pemimpin Besar Revolusi’, ‘Panglima Tetinggi Angkatan Bersenjata’, dan ‘Presiden Seumur Hidup’ menjadikan semua kekuasaan berada di tangannya. Pada masa ini partai politik tidak hanya berkurang jumlahnya, tetapi juga tidak fungsional. Terbukti, dari 28 partai politik yang ada dalam sistem Demokrasi Parlementer di era sistem Demokrasi Terpimpin ini hanya tinggal 10 partai politik saja, yaitu: Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Komunis Indonesia (PKI), NU, PSII, Perti, Partai Katolik, Parkindo, IPKI, Murba, dan Partindo.

Kekuasaan Soekarno terus bertambah setelah memperkenalkan sistem demokrasinya yang bercorak kepemimpinan personal. Hal itu dapat dilihat dari kebijakannya yang sangat berani melawan arus demokrasi. Misalnya, DPR hasil Pemilu tahun 1955 dibubarkannya lalu digantinya dengan DPR-Gotong Royong yang anggotanya diangkat langsung oleh Soekarno. Begitu pula dengan Kabinet, Soekarno juga membubarkannya lalu digantinya dengan Kabinet Gotong Royong. Ketua DPR, MPR, BPK, MA, dan Semua Kepala Staf AD, AL, AU dan Kepolisian juga diangkat sebagai menteri.

Namun Demokrasi Terpimpin yang digagas oleh Soekarno itu ternyata tidak bertahan lama seperti yang diprediksi oleh Moh. Hatta dengan mengatakan bahwa Demokrasi Terpimpin bagaikan rumah kertas yang tidak akan berumur panjang.<sup>49</sup> Terbukti kekuasaan Soekarno berakhir pada tahun 1968 setelah MPRS mencabut ketetapan tentang pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Sebelum diberhentikan, MPRS juga menolak pertanggungjawaban Soekarno sebagai akibat langsung dari peristiwa tanggal 30 September 1965 —yang populer dengan istilah G.30S/PKI.<sup>50</sup>

Pada masa Demokrasi Terpimpin, terutama setelah tahun 1960, terjadi eksplosif pendidikan dengan meningkatnya jumlah mahasiswa, karena murid SLTP dan SLTA di tahun 1950-an kini bertumpuk jumlahnya dan semua ingin menjadi mahasiswa.<sup>51</sup> Jika pada masa sebelumnya istilah “mahasiswa” identik

<sup>49</sup> Lihat Hatta, *Demokrasi Kita*, Jakarta: Jambatan, hal. 196.

<sup>50</sup> Tentang G30S PKI, lihat Onghokham, *Soekarno, Orang Kiri, Revolusi & G30 S 1965*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2009, hal. 157-176.

<sup>51</sup> Pada tahun 1960-an jumlah mahasiswa mengalami peningkatan. Jumlahnya sekitar 37.760 orang, pada tahun 1963 jumlahnya meningkat menjadi 50.000 orang dan pada tahun 1964

dengan pekerjaan yang baik dan sukses sosial, pada 1960-an sebutan “mahasiswa” menjadi lebih egalitarian sifatnya. Karena birokrasi pemerintah tak lagi sanggup menyerap semua lulusan ini, maka sarjana-sarjana baru ini beralih diserap ke bidang politik.<sup>52</sup>

Mobilisasi politik dalam Demokrasi Terpimpin menyebabkan aktifnya organisasi-organisasi massa yang bebas atau berafiliasi pada partai politik. Juga terjadi peningkatan besar-besaran jumlah anggota organisasi mahasiswa ekstra-universiter, seperti GMNI, HMI, dan CGMI. Umumnya mereka menjadi *underbow* partai-partai politik, seperti: GMNI dekat dengan PNI, CGMI dekat dengan PKI, dan HMI dekat dengan Masyumi.<sup>53</sup>

Akibatnya, perseteruan antar partai juga merembet pada perseteruan antar organisasi mahasiswa. Dalam hal ini, menonjol perseteruan antara CGMI yang pro-PKI dengan HMI yang anti-PKI. Ketika terjadi Peristiwa G30S, HMI bekerjasama dengan kekuatan militer Angkatan Darat menghancurkan PKI. Menjelang runtuhnya Demokrasi Terpimpin pada tahun 1966, HMI muncul memelopori pembentukan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI),<sup>54</sup> yang ternyata mendapat simpati rakyat. KAMI didukung kelompok pemuda dan pelajar mengajukan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura)<sup>55</sup> dalam menghadapi Partai Komunis Indonesia (PKI).

Gerakan mahasiswa 1966 dianggap sebagai gerakan yang paling fenomenal dalam sejarah gerakan mahasiswa Indonesia pasca kemerdekaan. Gerakan tersebut dianggap mampu mengartikulasikan secara tepat apa yang menjadi kegelisahan dan tuntutan rakyat saat itu. Melalui Tritura Mahasiswa 1966 mendapat dukungan masyarakat luas untuk menggerakkan reformasi yang berujung dengan kejatuhan penguasa.

---

meningkat menjadi 100.000 orang. Bila ditambah dengan jumlah mahasiswa swasta akademi dan institut yang ada maka jumlahnya mencapai 200.000 orang di tahun 1965. Penjelasan mengenai hal ini lihat Francois Raillon, *Ideologi Politik Mahasiswa Indonesia*, Jakarta, LP3ES, 1985, hal 10.

<sup>52</sup> Tentang sebutan “mahasiswa” menjadi lebih egalitarian sifatnya, lihat Arbi Sanit, *Op., Cit.*, hal. 53-56.

<sup>53</sup> Lihat Fachry Ali, *Mahasiswa, Sistem Politik di Indonesia dan Negara*, Jakarta: Inti Sarana Aksara, 1985, hal. 14-17. Lihat juga Arbi Sanit, *Mahasiswa, Kekuasaan dan Bangsa: Refleksi Gagasan Alternatif*, Jakarta: Lingkar Studi Indonesia, 1989, hal. 84-85.

<sup>54</sup> Tentang KAMI, lihat Ahmaddani G. Martha, Cristianto Wibisono, Yozar Anwar dkk., *Pemuda Indonesia: Dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa*, *Op., Cit.*, hal. 298-311

<sup>55</sup> *Ibid.*, hal. 313-377.



Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sangat menyusahakan rakyat. Kepemimpinan Soekarno yang menyisakan korupsi birokrasi menimbulkan kegerahan di kalangan mahasiswa. Kaum muda ini terus protes dan berontak dengan menggelar demonstrasi atas berbagai ketimpangan sosial. Kesenjangan ekonomi semakin tampak, rakyat semakin menderita. Respon represif mulai dilancarkan dan keadaan semakin bertambah panas pasca gugurnya Arief Rahman Hakim (mahasiswa UI) yang dijuluki Pahlawan Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera). Aliansi dibangun dengan berdirinya Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dan Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI). Mereka aktif bergerak dan turun berdemonstrasi mendesak Tritura yaitu: Turunkan Harga, Ritul Kabinet Dwikora dan Bubarkan PKI<sup>56</sup>.

Gerakan mahasiswa 1966 mengangkat isu bahaya laten komunis sebagai bahaya laten negara yang harus segera dimusnahkan dari bumi Indonesia. Akbar Tanjung, Cosmas Batubara, Sofyan Wanandi, dan Yusuf Wanandi adalah di antara aktivis mahasiswa yang bergerak lantang menentang komunisme. Dimana pada saat itu Partai Komunis Indonesia (PKI), sebagai pengusung paham komunisme, telah cukup hebat merasuki sektor-sektor pemerintahan.

Dukungan masyarakat terhadap pergerakan mahasiswa yang terbangun di beberapa wilayah nusantara memaksa Presiden Soekarno untuk berpihak pada rakyat. Slogan Nasakom yang dipaksakan Soekarno akhirnya runtuh dengan dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Peristiwa ini menandai berakhirnya kepemimpinan Orde Lama (ORLA) dan memasuki era Orde Baru (ORBA) dibawah kepemimpinan Soeharto.

Saat itu beberapa aktivis '66 memilih menanggalkan baju idealismenya untuk mencecap kenikmatan menjadi anggota parlemen, berduyun-duyun masuk Golkar, sebuah entitas yang kemudian dikecam. Orang yang paling keras memprotes perilaku memalukan ini adalah Soe Hok Gie, aktivis '66 sekaligus intelektual merdeka yang mati muda. Gie marah dan kecewa menyaksikan teman-temannya sesama demonstran melebur dalam kekuasaan; tidak sabar menjadi

---

<sup>56</sup> Lihat Fachry Ali, *Op., Cit.*, hal. 17-22. Lihat juga Hasyrul Moechtar, *Mereka dari Bandung: Pergerakan Mahasiswa Bandung 1960-1967*, Bandung: Penerbit Alumni, 1998, hal. 88-97, Yozar Anwar, *Angkatan 66: Sebuah Catatan Harian Mahasiswa*, Jakarta : Sinar Harapan, 1981, dan Ridwan Saidi, *Op., Cit.*, hal. 75-76, dan 83-84

penunggu gerbang idealisme yang selama ini digemborkan lewat aksi-aksi demonstrasinya. Gie menuduh mereka pengkhianat karena telah melacurkan diri untuk meneguhkan legitimasi rezim Orde Baru<sup>57</sup>.

## **2.4. Gerakan Mahasiswa pada Masa Orde Baru**

### **2.4.1. Angkatan 1974 dan Angkatan 1977**

Sementara pada masa Orde Baru, rezim Demokrasi Pancasila yang dipimpin oleh Soeharto juga muncul gerakan mahasiswa Angkatan 1974, Angkatan 1977 dan Angkatan 1998. Gerakan mahasiswa Angkatan 1998 inilah kemudian yang menumbangkan rezim Soeharto. Sebelum gerakan mahasiswa 1974 meledak, bahkan sebelum menginjak awal tahun 1970-an, sebenarnya para mahasiswa telah melancarkan berbagai kritik dan koreksi terhadap praktek kekuasaan rezim Orde Baru, seperti: Golput yang menentang pelaksanaan pemilu pertama di masa Orde Baru pada tahun 1972 karena Golkar dinilai curang. Gerakan menentang pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada tahun 1972 yang menggusur banyak rakyat kecil yang tinggal di lokasi tersebut. Diawali dengan reaksi terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), aksi protes lainnya yang paling mengemuka disuarakan mahasiswa adalah tuntutan pemberantasan korupsi. Lahirlah, selanjutnya apa yang disebut gerakan "Mahasiswa Menggugat" yang dimotori Arif Budiman yang program utamanya adalah aksi pengecaman terhadap kenaikan BBM, dan korupsi.

Menyusul aksi-aksi lain dalam skala yang lebih luas, pada 1970 pemuda dan mahasiswa kemudian mengambil inisiatif dengan membentuk Komite Anti Korupsi (KAK) yang diketuai oleh Wilopo. Terbentuknya KAK ini dapat dilihat merupakan reaksi kekecewaan mahasiswa terhadap tim-tim khusus yang disponsori pemerintah, mulai dari Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), *Task Force* UI sampai Komisi Empat.

Berbagai borok pembangunan dan demoralisasi perilaku kekuasaan rezim Orde Baru terus mencuat. Menjelang Pemilu 1971, pemerintah Orde Baru telah melakukan berbagai cara dalam bentuk rekayasa politik, untuk mempertahankan

---

<sup>57</sup> Tentang Soe Hok Gie lihat pengantar Harsja W Bactiar, Arief Budiman, Mira Lesmana, Riri Riza, dan Daniel Dhakidae dalam *Soe Hok Gie: Catatan Seorang Demontran*, Jakarta: LP3ES, 2005.

dan memapankan *status quo* dengan mengkooptasi kekuatan-kekuatan politik masyarakat antara lain melalui bentuk perundang-undangan. Misalnya, melalui Undang-Undang yang mengatur tentang pemilu, partai politik, dan MPR/DPR/DPRD.

Muncul berbagai pernyataan sikap ketidakpercayaan dari kalangan masyarakat maupun mahasiswa terhadap sembilan partai politik dan Golongan Karya sebagai pembawa aspirasi rakyat. Sebagai bentuk protes akibat kekecewaan, mereka mendorong munculnya Deklarasi Golongan Putih (Golput) pada tanggal 28 Mei 1971 yang dimotori oleh Arif Budiman, Adnan Buyung Nasution dan Asmara Nababan. Dalam tahun 1972, mahasiswa juga telah melancarkan berbagai protes terhadap pemborosan anggaran negara yang digunakan untuk proyek-proyek eksklusif yang dinilai tidak mendesak dalam pembangunan, misalnya terhadap proyek pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di saat Indonesia haus akan bantuan luar negeri.<sup>58</sup>

Memasuki tahun 1974 kemandirian ekonomi Indonesia mulai dipertanyakan. Membanjirnya produk Jepang menciptakan hegemoni baru. Pasar Indonesia mutlak dikuasai Jepang sehingga memancing kemarahan mahasiswa untuk bertindak. Dari bulan Juli 1943 sampai bulan Januari 1974 terjadi demonstrasi hampir setiap hari di berbagai kota. Kedatangan PM Jepang Tanaka ke Indonesia disambut mahasiswa dengan demonstrasi. Isu yang diangkat berkisar hutang luar negeri, penjajahan modal asing dan penghapusan jabatan Asisten Pribadi Presiden. Kerusuhan meledak di Jakarta, ratusan mahasiswa ditangkap karena dituduh membuat makar. Peristiwa kerusuhan ini dikenal sejarah sebagai peristiwa Lima Belas Januari (Malari).<sup>59</sup>

Peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari (Malari) adalah peristiwa demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan sosial yang terjadi pada 15 Januari 1974. Peristiwa itu terjadi saat Perdana Menteri (PM) Jepang Tanaka Kakuei sedang berkunjung ke Jakarta (tanggal 14-17 Januari 1974). Mahasiswa merencanakan

---

<sup>58</sup> Tentang Golput, TMII dan kedatangan PM Jepang Tanaka Kakuei ke Indonesia hingga terjadinya peristiwa Malari, lihat C. van Dijk, *Pengadilan Hariman Siregar*, Jakarta: TePLOK Press, 2000, hal 1-12

<sup>59</sup> Selain di Jakarta di Bandung di bentuk juga beberapa Komite Aksi oleh Mahasiswa ITB dan mahasiswa Universitas lainnya di Bandung. Begitu juga di Yogyakarta dan Surabaya. Lihat Arbi Sanit, *Gerakan Mahasiswa 1970-1973: Pecahnya Bulan Madu Politik*, dalam Muridan, *Op., Cit.*, hal 45-61.

menyambut kedatangannya dengan berdemonstrasi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. Karena dijaga ketat, rombongan mahasiswa tidak berhasil menerobos masuk pangkalan udara. Tanggal 17 Januari 1974 pukul 08.00, PM Jepang itu berangkat dari Istana tidak dengan mobil, tetapi diantar Presiden Soeharto dengan helikopter dari Bina Graha ke pangkalan udara.<sup>60</sup>

Waktu dalam aksi mahasiswa, didukung masyarakat banyak, terjadi penjarahan dan pembakaran secara besar-besaran di DKI Jakarta, terutama di sekitar kawasan Senen, Jakarta Pusat, dan sekitarnya. Data yang ada menunjukkan, dalam protes anti-Jepang itu, setidaknya 807 buah mobil dan motor buatan Jepang hangus dibakar massa di mana-mana. Selain itu, sedikitnya 11 orang meninggal dunia, 300 luka-luka, dan 775 orang kemudian ditahan. Lalu, dalam pendataan yang dilakukan, sebanyak 144 buah bangunan rusak berat dan 160 kg emas hilang dari sejumlah toko perhiasan.<sup>61</sup>

Peristiwa kelabu yang meletus bersamaan dengan kedatangan tamu negara, yang memiliki investasi besar di Indonesia itu, jelas memukul pemerintahan Presiden Soeharto. Betapa tidak, di saat itu pemerintah sedang ‘membujuk’ agar Jepang terus berinvestasi, karena Indonesia berjanji memberikan kemudahan-kemudahan berinvestasi. Akibatnya sejumlah tokoh mahasiswa ditahan, dan belasan media dibredel. Salah satu tokoh sentral, yang sampai sekarang dikenal sebagai motor penggerak Malari, adalah Hariman Siregar.<sup>62</sup>

Soeharto memberhentikan Soemitro sebagai Panglima Kopkamtib, langsung mengambil alih jabatan itu. Jabatan asisten pribadi juga dibubarkan oleh Presiden. Dalam peristiwa Malari Jenderal Ali Moertopo menuduh eks PSII dan eks Masyumi atau ekstrem kanan adalah dalang peristiwa tersebut. Tetapi setelah para tokoh peristiwa Malari seperti Syahrir dan Hariman Siregar diadili, tidak bisa dibuktikan bahwa ada sedikitpun fakta dan ada seorangpun tokoh eks Masyumi yang terlibat di situ. Belakangan ini barulah ada pernyataan dari (Alm.)

<sup>60</sup> Lihat S. Tasrif *et al.*, *Generasi Muda Indonesia Diadili: Membela Perkara Hariman Siregar*. Jakarta, 1974, hal 20.

<sup>61</sup> Penjarahan dan Pembakaran tersebut membuat pusat kota Jakarta terhenti aktivitasnya selama dua hari. Mengenai hal ini lihat Rizal Mallarangeng, *Mendobrak Sentralisme Ekonomi: Indonesia 1986-1992*, Jakarta, KPG, 2002, hal 77-78.

<sup>62</sup> Tentang pengadilan Hariman Siregar, lihat C. van Dijk, *Pengadilan Hariman Siregar, Op., Cit.*, hal 1.

Jenderal Soemitro, ada kemungkinan kalau justru malahan Ali Moertopo sendiri dengan CSIS-nya yang mendalangi peristiwa Malari<sup>63</sup>.

Menjelang dan terutama saat-saat antara sebelum dan setelah Pemilu 1977, barulah muncul kembali pergolakan mahasiswa yang berskala masif. Berbagai masalah penyimpangan politik diangkat sebagai isu, misalnya soal pemilu mulai dari pelaksanaan kampanye, sampai penusukan tanda gambar, pola rekrutmen anggota legislatif, pemilihan gubernur dan bupati di daerah-daerah, strategi dan hakekat pembangunan, sampai dengan tema-tema kecil lainnya yang bersifat lokal. Gerakan ini juga mengkritik strategi pembangunan dan kepemimpinan nasional.<sup>64</sup>

Demonstrasi yang cukup besar dilakukan mahasiswa terjadi lagi empat tahun kemudian, yaitu pada tahun 1978 menjelang pemilihan kembali Presiden Soeharto pada tanggal 23 Maret 1978. Sumber pergolakan gerakan mahasiswa 1978 berkaitan dengan berbagai masalah serius yang semakin jauh dari etika politik yang sehat melalui praktek kekuasaan politik rezim Orde Baru. Yang dikritik antara lain pelaksanaan kampanye, pola rekrutmen anggota legislatif mulai dari DPRD hingga MPR/DPR. Termasuk masalah pemilihan gubernur, bupati di daerah-daerah yang dinilai memperkosa nilai-nilai demokrasi dan keadilan.<sup>65</sup>

Para mahasiswa juga mempersoalkan hutang luar negeri Indonesia. Dalam buku pledoinya Lukman Hakim ketua Dewan Mahasiswa UI waktu itu disebutkan, jika pada 1965 utang luar negeri Indonesia berjumlah US\$ 2,35 juta, maka pada 1977 meningkat drastis, menjadi sebesar US\$ 15, 814 juta.<sup>66</sup> Yang paling penting, mahasiswa juga mengingatkan adanya kesenjangan sosial yang sudah melebar. Gerakan mahasiswa 1978 dan gerakan mahasiswa 1974 sebetulnya nyaris serupa, sama-sama mengandalkan basis organisasi mahasiswa, yaitu Dewan Mahasiswa. Keduanya berbeda dengan gerakan 1966 yang melibatkan organisasi ekstra.

<sup>63</sup> Lihat Ramadhan K.H., *Soemitro*, Jakarta, Sinar Harapan, 1994, hal 315-316.

<sup>64</sup> Arbi Sanit dalam Muridan, *Op., Cit.*, hal 56-57.

<sup>65</sup> Arbi Sanit dalam Muridan, *Op., Cit.*, hal 58.

<sup>66</sup> Tentang utang luar negeri Indonesia, lihat Lukman hakim, *Kudengar Indonesia Memanggil: Pledoi Di Hadapan Pengadilan Mahasiswa*, Jakarta: 1979, hal. 127-129, lihat juga Arbi Sanit dalam Muridan, *Op., Cit* , hal 58.

Reaksi pemerintah cukup keras. Kampus sempat diduduki militer dan sejumlah tokoh mahasiswa ditahan dan diajukan ke pengadilan.<sup>67</sup> Pemerintah juga memperlakukan Kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) diberlakukan secara efektif tahun 1978 oleh Mendikbud Daoed Joesoef dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) didirikan di kampus-kampus pada tahun 1979.<sup>68</sup> Kebijakan NKK dilaksanakan berdasarkan SK No.0156/U/1978 sesaat setelah Daoed Joesoef dilantik tahun 1979. Konsep ini mencoba mengarahkan mahasiswa hanya menuju pada jalur kegiatan akademik, dan menjauhkan dari aktivitas politik karena dinilai secara nyata dapat membahayakan posisi rezim. Menyusul pemberlakuan konsep NKK, pemerintah dalam hal ini Pangkopkamtib Soedomo melakukan pembekuan atas lembaga Dewan Mahasiswa, sebagai gantinya pemerintah membentuk struktur keorganisasian baru yang disebut BKK.<sup>69</sup>

Berdasarkan SK Menteri P&K No.037/U/1979 kebijakan ini membahas tentang Bentuk Susunan Lembaga Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Perguruan Tinggi, dan dimantapkan dengan penjelasan teknis melalui Instruksi Dirjen Pendidikan Tinggi tahun 1978 tentang pokok-pokok pelaksanaan penataan kembali lembaga kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Menurut peraturan menteri, Ketua BKK yaitu Pembantu Rektor III.<sup>70</sup>

Kebijakan BKK itu secara implisif sebenarnya melarang dihidupkannya kembali Dewan Mahasiswa, dan hanya mengizinkan pembentukan organisasi mahasiswa tingkat fakultas (Senat Mahasiswa Fakultas-SMF) dan Badan

<sup>67</sup> Selain itu juga Pemerintah melarang terbit 8 koran Nasional karena dianggap pemberitaannya tidak seimbang dalam memberitakan gerakan mahasiswa, yaitu *Kompas*, *Sinar Harapan*, *Merdeka*, *Pelita*, *Indonesia Times*, *Sinar Pagi* dan *Pos Sore*. Untuk hal ini lihat Arbi Sanit dalam Muridan, *Op., Cit.*, hal 58.

<sup>68</sup> Kebijakan BKK/NKK oleh Ulf Sundahusen disebut sebagai “a policy designed to keep the students of street and pocially complaint”. Kutipan Ulf Sundahusen dalam Hariyadhie, *Perspektif Gerakan Mahasiswa 1978 Dalam Percaturan Politik Nasional*, Jakarta, Golden Terayon Pers, 1995, hal 164. Lihat juga Arief Budiman dan Olle Tornquist, *Aktor Demokrasi: Catatan Tentang Perlawanan di Indonesia*, Jakarta, ISAI, hal xxx.

<sup>69</sup> Tentang BKK/NKK lihat Didik Supriyanto, *Perlawanan Pers Mahasiswa: Protes Sepanjang NKK/BKK*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998, hal. 21-28. Lihat juga Diro Aritonang, *Runtuhnya Rezim daripada Soeharto: Rekaman Perjuangan Mahasiswa Indonesia 1998*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999, hal. 75-76, dan Denny J.A, *Gerakan Mahasiswa dan Politik Kaum Muda era 80-an*, Jakarta : CV. Miswar, 1990, hal. 44-45.

<sup>70</sup> Didiek Supriyanto, *Op., Cit.*, hal. 88 dan Arief Budiman dan Olle Tornquist, *Op., Cit.*, hal 276.

Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF).<sup>71</sup> Namun hal yang terpenting dari SK ini terutama pemberian wewenang kekuasaan kepada Rektor dan Pembantu Rektor untuk menentukan kegiatan mahasiswa, yang menurut Daoed Joesoef sebagai wujud tanggung jawab pembentukan, pengarahan, dan pengembangan lembaga kemahasiswaan.<sup>72</sup>

Adanya kebijakan NKK/BKK tersebut, beberapa kampus menolaknya. Di ITB, kampus yang paling keras menolak kebijaksanaan tersebut, BKK nyaris tak pernah jelas eksistensinya. Di UGM, *de facto* BKK memang ada namun juga tidak berjalan. Di Salatiga, Kampus Universitas Kristen Satya Wacana juga melakukan kreasi serupa. Keberadaan BKK diakui namun pengurusnya berasal dari mahasiswa sendiri. Sementara di Universitas Indonesia memang memiliki BKK tetapi fungsi sehari-hari dijalankan oleh Forum para Ketua Senat Mahasiswa Fakultas, dan dinamakan Forkom UI.<sup>73</sup> Beberapa anggota DPR sempat mengusulkan pengajuan hak interpelasi oleh Syafi'i Sulaiman dan kawan-kawan tentang NKK/BKK, pada tahun 1979. Pengusul adalah anggota Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) dari Nahdlatul Ulama (NU), sedangkan para 24 pengusul lainnya terdiri dari anggota F-PP dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (F-PDI).<sup>74</sup>

Dengan konsep NKK/BKK ini, maka peranan yang dimainkan organisasi intra dan ekstra kampus dalam melakukan kerjasama dan transaksi komunikasi politik menjadi lumpuh. Ditambah dengan munculnya UU No.8/1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan maka politik praktis semakin tidak diminati oleh mahasiswa, karena sebagian Ormas bahkan menjadi alat pemerintah atau golongan politik tertentu. Kondisi ini menimbulkan generasi kampus yang apatis, sementara posisi rezim semakin kuat.

Sebagai alternatif terhadap suasana birokratis dan apolitis wadah intra kampus, di awal-awal tahun 80-an muncul kelompok-kelompok studi yang

<sup>71</sup> Didiek Supriyanto, *Op., Cit.*, hal. 39.

<sup>72</sup> Daoed Joesoef, *Normalisasi Kehidupan Kampus*, Direktorat Kemahasiswaan, Ditjen Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1979, hal 5-15.

<sup>73</sup> Arbi Sanit dalam Muridan, *Op., Cit.*, 180-182.

<sup>74</sup> Usul hak interpelasi ini ditolak dalam Sidang Paripurna DPR pada 11 Februari 1980. Penolakan berasal dari 279 suara yang berasal dari Fraksi ABRI, 59 suara dan FKP, 220 suara. Sementara persetujuan hak interpelasi hanya berasal dari 83 anggota FKP dan 18 anggota FDI. Lihat Masmimar Mangiang, *Mahasiswa, Ilusi Tentang Sebuah Kekuasaan*, dalam *Prisma* No. 12, Jakarta: LP3ES, Desember 1981, hal 98-107.

dianggap mungkin tidak tersentuh kekuasaan represif penguasa.<sup>75</sup> Dalam perkembangannya eksistensi kelompok ini mulai digeser oleh kehadiran wadah-wadah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh subur pula sebagai alternatif gerakan mahasiswa.<sup>76</sup>

Jalur perjuangan lain ditempuh oleh para aktivis mahasiswa dengan memakai kendaraan lain untuk menghindari sikap represif pemerintah adalah dengan meleburkan diri dan aktif di organisasi kemahasiswaan ekstra kampus, seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) atau yang lebih dikenal dengan kelompok Cipayung<sup>77</sup>. Mereka juga membentuk kelompok-kelompok diskusi dan pers mahasiswa. Beberapa kasus lokal yang disuarakan LSM dan komite aksi mahasiswa antara lain: kasus tanah waduk Kedung Ombo, Kacapiring, korupsi di Bapindo, penghapusan perjudian melalui Porkas/TSSB/SDSB.<sup>78</sup>

#### 2.4.2. Angkatan 1998 dan Kejatuhan Soeharto

Memasuki awal tahun 1990-an, di bawah Mendikbud Fuad Hasan kebijakan NKK/BKK dicabut dan sebagai gantinya keluar Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan (PUOK). Melalui PUOK ini ditetapkan bahwa organisasi kemahasiswaan intra kampus yang diakui adalah Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT), yang didalamnya terdiri dari Senat Mahasiswa Fakultas (SMF)

<sup>75</sup> Untuk menarik pengaruh Ormas dari dunia Mahasiswa, pada tanggal 23 Juli 1973 dibentuklah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Pembentukan KNPI ini dimotori oleh Jendral Ali Moertopo beserta aktivis 1966, seperti Akbar Tanjung, Abdul Gafur, David Napitupulu. Lihat Didiek Supriyanto, *Op., Cit.*, hal 35.

<sup>76</sup> Tentang kehadiran LSM-LSM, lihat Fauzie Syuaib, *Organisasi Kemahasiswaan: Upaya Mencari Bentuk Baru*, dalam *Prisma* No. 6, Jakarta: LP3ES, 1990, hal 75, lihat juga Suryadi A. Rajab, *Panggung-Panggung Mitologi dan Hegemoni Negara: Gerakan Mahasiswa di Bawah Orde Baru*, dalam *Prisma* No. 10, Jakarta LP3ES, 1990 dan Adi Suryadi Culla, *Op., Cit.*, hal. 130-131

<sup>77</sup> Kelompok Cipayung adalah sebuah kelompok perlawanan terhadap KNPI dari ormas-ormas kemahasiswaan, HMI, PMII, GMNI, GMKI, PMKRI dan dideklarasikan pada tahun 1972. Tentang kelompok Cipayung, lihat Ridwan Saidi, *Analisis Keberadaan dan Aktivitas KNPI (1973-1992)*, Jakarta; Yayasan Piranti Ilmu, 1992. Lihat juga Anders Uhlin, *Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*, Bandung: Penerbit Mizan, 1998, hal 109.

<sup>78</sup> Uraian lebih jelas mengenai pembentukan kelompok diskusi dan pers mahasiswa, lihat Didiek Supriyanto, *Perlawanan Pers Mahasiswa; Protes Sepanjang NKK/BKK*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.



dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Dikalangan mahasiswa secara kelembagaan dan personal terjadi pro kontra, menanggapi SK tersebut. Oleh mereka yang menerima, diakui konsep ini memiliki sejumlah kelemahan namun dipercaya dapat menjadi basis konsolidasi kekuatan gerakan mahasiswa. Argumen mahasiswa yang menolak mengatakan, bahwa konsep SMPT tidak lain hanya semacam *hidden agenda* untuk menarik mahasiswa ke kampus dan memotong kemungkinan aliansi mahasiswa dengan kekuatan di luar kampus.<sup>79</sup>

Dalam perkembangan kemudian, banyak timbul kekecewaan di berbagai perguruan tinggi karena kegagalan konsep ini. Mahasiswa menuntut organisasi kampus yang mandiri, bebas dari pengaruh korporatisasi negara termasuk birokrasi kampus. Sehingga, tidaklah mengherankan bila akhirnya berdiri Dewan Mahasiswa di UGM tahun 1994 yang kemudian diikuti oleh berbagai perguruan tinggi di tanah air sebagai landasan bagi pendirian model organisasi kemahasiswaan alternatif yang independen.<sup>80</sup>

Dengan dihidupkannya model-model kelembagaan yang lebih independen, meski tidak persis serupa dengan Dewan Mahasiswa yang pernah berjaya sebelumnya, upaya perjuangan mahasiswa untuk membangun kemandirian melalui SMPT menjadi awal kebangkitan kembali mahasiswa ditahun 1990-an. Salah satu usaha kalangan mahasiswa yang cukup berhasil ialah Musyawarah Besar (Mubes) pimpinan Senat Mahasiswa se-Jakarta di IKIP Jakarta pada tanggal 23 Maret 1996 dengan mendirikan Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta.<sup>81</sup> Organisasi yang juga memiliki hubungan kultural dengan keberadaan Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Jakarta (FKPMJ) dan Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Jakarta (FKMIJ) ini, lahir dari perjalanan panjang pertemuan aktivis senat mahasiswa se-Indonesia di era tahun 90-an.

Pada 1990-an lahir suatu deklarasi mahasiswa Indonesia yang redaksionalnya mirip dengan Sumpah Pemuda. Antara lain deklarasi itu berbunyi:

“1. Kami mahasiswa Indonesia menjunjung tinggi kebenaran dan bertekad membebaskan rakyat Indonesia dari ketidakadilan.

<sup>79</sup> Tentang konsep SMPT, lihat Arbi Sanit, *Pergolakan Melawan Kekuasaan: Gerakan Mahasiswa Antara Aksi Moral dan Politik*, Yogyakarta: Insist Press, 1999, hal. 179-180.

<sup>80</sup> *Ibid.*, hal. 182.

<sup>81</sup> Sekarang IKIP Jakarta berubah menjadi Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

2. Kami mahasiswa Indonesia setia dan rela berkorban pada kepentingan rakyat Indonesia dari ketidakadilan.
3. Kami mahasiswa Indonesia sementara berjuang dengan landasan solidaritas utuh.”<sup>82</sup>

Pada akhir tahun 1980-an hingga awal tahun 1990-an demonstrasi mahasiswa mulai mengeras. Beberapa di antaranya akhirnya memakan korban. Pada bulan Agustus 1989 terjadi penangkapan terhadap aktivis mahasiswa bernama Bambang Beathor Surjadi. Ia dipersalahkan, karena menyebarkan pamflet dan mengorganisasi demonstrasi yang menentang kenaikan tarif listrik. Pada tanggal 14 Desember 1993 Front Aksi Mahasiswa Indonesia (FAMI) melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR dengan isu Soeharto harus bertanggung jawab terhadap penyelewengan HAM. Pemerintah bereaksi keras atas aksi itu. Sebanyak 21 mahasiswa ditangkap dan dihukum 8 bulan hingga 14 bulan, diantaranya Nuku Soelaiman dan Yenny Rosa Damayanti, padahal sebelumnya vonis hanya 6 bulan.<sup>83</sup>

Antara tahun 1994-1998 rezim Orde baru sepertinya mengumpulkan banyak lawan dan mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh Soekarno dahulu, dengan rezim Orde Lama. Pembredelan tiga media, *Tempo*, *Editor* dan *Detik* pada pertengahan 1994 membuat Orde Baru mendapat lawan baru dari kaum jurnalis.<sup>84</sup> Mahasiswa memanfaatkan momentum ini untuk melakukan unjuk rasa menuntut pembatalan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Sejumlah aliansi gerakan pemuda dan mahasiswa terbentuk. Agak aneh juga ketika demonstrasi ini ditandingi oleh Forum Pemuda Pers Pancasila yang mendukung kebijakan pemerintah.<sup>85</sup>

<sup>82</sup> Lihat *Deklarasi Mahasiswa Indonesia*, dalam *Sinar*, 25 April 1994.

<sup>83</sup> Eko Sutoro, *Transisi Demokrasi Indonesia: Runtuhnya Rezim Orde Baru*, Yogyakarta: APMD Press, 2003, hal 203. Lihat juga Anders Uhlin, *Op., Cit.*, hal 111.

<sup>84</sup> Suharsih dan Ign. Mahendra K. *Op., Cit.*, hal. 90.

<sup>85</sup> Lihat *21 Mahasiswa Ditangkap* dalam *Sinar*, 11 Juli 1994.

**Tabel 2.1:**  
**Gerakan Mahasiswa di Enam Kota**

No.	Kota	Nama Organisasi Gerakan Mahasiswa
1.	Jakarta	1. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI); 2. Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta (FKSMJ); 3. Forum Komunitas Mahasiswa se-Jabotabek (FORKOT); 4. Front Nasional; 5. Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO);
2.	Bandung	1. Forum Komunikasi Mahasiswa Bandung (FKMB) 2. Front Indonesia Muda Bandung (FIM B) 3. Front Aksi Mahasiswa Unisba (FAMU), 4. Gerakan Mahasiswa Indonesia Untuk Perubahan (GMIP); 5. Komite Pergerakan Mahasiswa Bandung (KPMB); 6. Front Anti Fasis (FAF); 7. Keluarga Mahasiswa ITB (KM ITB); 8. Komite Mahasiswa Unpar (KM Unpar).
3.	Medan	1. Aliansi Gerakan Reformasi Sumatera Utara (AGRESU) 2. Dewan Mahasiswa untuk Demokrasi (DEMUD)
4.	Aceh	Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR).
5.	Bogor	Keluarga Besar Mahasiswa-Institut Pertanian Bogor (KBM-IPB)
6.	Yogyakarta	1. Solidaritas Mahasiswa Untuk Kedaulatan Rakyat (SMKR); 2. Komite Perjuangan Rakyat untuk Perubahan (KPRP) 3. Forum Komunikasi Mahasiswa Yogyakarta (FKMY); 4. Persatuan Perjuangan Pemuda Yogyakarta (PPPY); 5. Front Aksi Mahasiswa Peduli Rakyat (FAMPERA); 6. Liga Mahasiswa Muslim Yogyakarta (LMMY).

**Sumber:** Diolah oleh penulis dari wawancara dengan narasumber penelitian disertasi ini dan dari buku Suharsih dan Ign. Mahendra K, *Bergerak Bersama Rakyat: Sejarah Gerakan Mahasiswa dan Perubahan Sosial di Indonesia*, Yogyakarta: Resist Book, 2007.

Gerakan mahasiswa dekade 90-an mencapai klimaksnya pada tahun 1998, diawali dengan terjadinya krisis moneter di pertengahan tahun 1997 harga-harga kebutuhan melambung tinggi, daya beli masyarakat pun berkurang.<sup>86</sup> Mahasiswa

<sup>86</sup> Uraian lebih lanjut mengenai krisis moneter lihat HMT Oppusunggu, *Sumber Krisis Moneter Indonesia*, Jakarta: KPG, 1998. Lihat juga uraian Valina Singka Subekti, *Dimensi Ekonomi Politik Krisis Ekonomi Indonesia 1997-1998*, dalam Seri Penerbitan Studi Politik, *Menimbang Masa Depan Orde Baru*, Jakarta: Mizan, 1998, hal 123-148. Lihat juga pendapat Faisal Basri, “Krisis

pun mulai gerah dengan penguasa Orde Baru, tuntutan mundurnya Soeharto menjadi agenda nasional gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa Indonesia 1998 adalah puncak gerakan mahasiswa tahun sembilan puluhan yang ditandai tumbanganya Orde Baru dengan lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan, pada tanggal 21 Mei 1998.<sup>87</sup>

Berbagai kesatuan aksi di berbagai daerah muncul untuk menentang rezim Soeharto. Di Aceh terbentuk Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR). Di Medan muncul Aliansi Gerakan Reformasi Sumatera Utara (AGRESU), Dewan Mahasiswa untuk Demokrasi (DEMUD). Di Bandung lahir Forum Komunikasi Mahasiswa Bandung (FKMB), Front Indonesia Muda Bandung (FIM B), Front Aksi Mahasiswa Unisba (FAMU), Gerakan Mahasiswa Indonesia Untuk Perubahan (GMIP), Komite Pergerakan Mahasiswa Bandung (KPMB), Front Anti Fasis (FAF), Keluarga Mahasiswa ITB (KM ITB), dan Komite Mahasiswa Unpar (KM Unpar). Di Jakarta lahir Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta (FKSMJ), Forum Komunitas Mahasiswa se-Jabotabek (FORKOT), Front Nasional, Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO). Di Bogor ada Keluarga Besar Mahasiswa - Institut Pertanian Bogor (KBM-IPB). Di Yogyakarta ada Solidaritas Mahasiswa Untuk Kedaulatan Rakyat (SMKR), Komite Perjuangan Rakyat untuk Perubahan (KPRP), Forum Komunikasi Mahasiswa Yogyakarta (FKMY), Persatuan Perjuangan Pemuda Yogyakarta (PPPY), Front Aksi Mahasiswa Peduli Rakyat (FAMPERA), dan Liga Mahasiswa Muslim Yogyakarta (LMMY).<sup>88</sup>

Di Solo, Bali, Malang, dan Surabaya juga lahir puluhan kesatuan aksi yang konsisten menentang kebijakan dan keberadaan rezim Soeharto. Gerakan yang menuntut reformasi dan dihapuskannya "KKN" (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) pada 1997-1998 ini, harus berhadapan dengan berbagai tindakan represif yang

---

*Ekonomi Indonesia: Antara Gelombang Globalisasi dan Tuntutan Reformasi Total*", dalam Musa Kazhim (ed), *Menuju Indonesia Baru: Mengagas Reformasi Total*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998, hal 63-68.

<sup>87</sup> Istilah "Lengser" berasal dari bahasa Jawa yang diucapkan oleh Soeharto sendiri sebelum mengumumkan pengunduran dirinya. "Lengser Keprabon" artinya sendiri adalah turun tahta atau melepaskan jabatan. *Lengsernya* Soeharto ini menandai awal sejarah baru perubahan Orde dari Orde Baru ke Orde Reformasi.

<sup>88</sup> Suharsih dan Ign Mahendra K, *Op., Cit.*, 2007, hal 102.

menewaskan 4 aktivis mahasiswa Trisakti. Peristiwa Gejayan, Tragedi Trisakti, Tragedi Semanggi I dan II, Tragedi Lampung adalah bukti lainnya upaya represif Soeharto untuk meredam gerakan ini. Setelah bergulirnya reformasi pada tahun 1998, pergerakan mahasiswa dihadapkan pada pluralitas gerakan yang sangat tinggi. Mahasiswa pada saat ini memiliki garis perjuangan dan agenda yang berbeda dengan mahasiswa lainnya.

Gerakan mahasiswa di setiap masa berkaitan dengan peristiwa penting yang menyebabkan mahasiswa terdorong dan terpanggil untuk menunjukkan perannya dalam peristiwa tersebut. Gerakan mahasiswa 1998 muncul untuk menentang keberadaan rezim yang dianggap tidak lagi berpihak kepada kepentingan rakyat, korup dan otoriter. Munculnya gerakan mahasiswa 1998 bukan tiba-tiba, tetapi melalui proses panjang terkait dengan gerakan-gerakan mahasiswa sebelumnya.

#### **a. Kondisi Politik**

Ketika rezim Orde Baru memulai pemerintahannya berbagai kebijakan politik strategis diambil untuk menstabilkan keadaan. Salah satu kebijakan politik strategis diambil adalah reorganisasi dan refungsionalisasi organisasi politik baik pada tingkat supra-struktur politik maupun pada level infra-struktur politik. Kebijakan itu dimaksudkan untuk menciptakan stabilitas politik, karena stabilitas politik dilihatnya sebagai prasyarat bagi terlaksananya pembangunan ekonomi. Dalam pandangan Orde Baru, pembangunan hanya dapat terlaksana dengan baik bila didukung oleh stabilitas politik yang memadai.

Salah satu infrastruktur politik dilihat oleh rezim Orde Baru sebagai sumber instabilitas politik adalah partai-partai politik. Rezim Orde Baru mendasarkan pada pengalamannya dimana pemerintahan di bawah sistem Demokrasi Parlementer tidak dapat bekerja dengan baik akibat seringnya terjadi pergantian kabinet yang disebabkan oleh ketidakpuasan partai politik. Soeharto tidak ingin mengulang pengalaman yang buruk itu dengan cara melakukan penyederhanaan partai politik (fusi).

Kesembilan partai politik yang ada (Parmusi, NU, PSII, Perti, PNI, Partai Katolik, Parkindo, IPKI, dan Murba) dikelompokkan atas dua kelompok, yaitu: pertama, kelompok materiil-sprituil yang terdiri dari PNI, IPKI, Partai Katolik, Parkindo dan Murba; dan kedua kelompok sprituil-materiil yang terdiri dari

**Universitas Indonesia**

Parmusi, NU, PSII, dan Perti.<sup>89</sup> Setelah Pemilu 1971, tepatnya tahun 1973, kedua kelompok tersebut diharuskan melakukan fusi. Kelompok pertama, yang terdiri dari partai-partai Islam, tergabung dalam wadah Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kelompok kedua, yang terdiri dari partai-partai nasionalis dan Kristen, membentuk Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Dengan adanya fusi ini partai-partai politik yang ada menjadi tiga, yaitu PPP, PDI, dan Golkar.

Adanya kebijakan fusi tersebut tentu saja menguntungkan Golkar, sebagai partai pemerintah. Sebab Golkar tidak diikutsertakan untuk bergabung dengan partai-partai lainnya, tetapi berdiri sendiri. Di samping itu juga dengan adanya fusi tersebut maka saingan Golkar menjadi sederhana, tidak banyak, hanya PPP dan PDI. Dengan demikian keinginan pemerintah menjadikan Golkar sebagai satu-satunya partai yang akan selalu menang akan menjadi lebih mudah

Selain menyederhanakan partai politik, Pemerintah Orde Baru juga menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Berdasarkan pengalaman politik masa pemilu-pemilu sebelumnya, pemerintah merasa perlu melakukan penataan ke arah kesatuan orientasi dengan menerapkan asas tunggal. Dengan asas tunggal juga diharapkan identitas yang bersifat primordial akan pudar pada partai politik dan ormas. Deliar Noer melihat lima aspek yang menjadi kelemahan dari asas tunggal, yaitu: (1) asas tunggal partai menafikan kebhinekaan masyarakat yang memang berkembang menurut keyakinan masing-masing. Keyakinan ini bisa bersumber pada ajaran agama atau pemahaman lain; (2) asas tunggal partai menghalangi orang-orang yang sama keyakinan untuk mengelompok sesamanya serta bertukar pikiran sesamanya berdasarkan keyakinan, termasuk agama, yang dianut masing-masing; (3) asas tunggal partai menafikan hubungan antara agama dan politik; (4) asas tunggal partai mengandung kecenderungan ke arah sistem partai tunggal; (5) asas tunggal partai menghalangi kemungkinan pengembangan faham-faham, seperti yang bersumber dari agama, yang mungkin memperkuat Pancasila.<sup>90</sup>

Konsep asas tunggal Pancasila menimbulkan pro-kontra di kalangan umat Islam. Dari kalangan Islam yang menolak penerapan asas tunggal mengatakan bahwa hal itu sebagai usaha untuk menggantikan agama dengan Pancasila. Dalam

---

<sup>89</sup> Lihat Ali Moetopo, *Strategi Politik Nasional*, Jakarta: CSIS, 1974.

<sup>90</sup> Deliar Noer, *Islam, Pancasila dan Asas Tunggal*, Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1983, hal. 60-61.

kaitan itu Pemerintah kemudian membantah bahwa penerapan Pancasila akan menggantikan agama. Selain itu pemerintah menegaskan bahwa tidak ada usaha akan memancasilakan agama maupun menggantikan agama dengan Pancasila.

Selama Orde Baru berkuasa, telah terselenggara enam kali Pemilihan Umum (Pemilu), yaitu Pemilu 1971, Pemilu 1977, Pemilu 1982, Pemilu 1987, Pemilu 1992, dan Pemilu 1997. Dari enam kali Pemilu tersebut tampak Orde Baru berhasil melaksanakan Pemilu secara berskala setiap lima tahun sekali, kecuali pada Pemilu 1977. Keberkalaan pelaksanaan Pemilu itu secara formal merupakan suatu prestasi yang luar biasa. Hal itu bertambah dengan adanya tingkat partisipasi yang tinggi dalam setiap pelaksanaan Pemilu, di mana hampir mendekati 90% orang yang memberikan suara dalam Pemilu. Akan tetapi keberkalaan pelaksanaan Pemilu dan tingginya tingkat partisipasi tersebut mengandung kelemahan.

Keberkalaan penyelenggaraan Pemilu ternyata tidak dibarengi dengan tingkat kualitas pelaksanaan Pemilu. Pemilu-Pemilu Orde Baru tercatat mengandung banyak kelemahan dan tingkat demokrasinya sangat rendah. Pemilu-Pemilu Orde Baru diselenggarakan hanya sebagai alat legitimasi pemerintah, bukan sebagai alat demokrasi. Intimidasi, rekayasa, mobilisasi, dan kecurangan-kecurangan menghiasi setiap penyelenggaraan Pemilu-Pemilu Orde Baru. Dalam konteks itu, William Liddle, Indonesianis asal Amerika, berkesimpulan bahwa Pemilu-Pemilu Orde Baru bukanlah alat yang memadai untuk mengukur suara rakyat. Hal itu karena Pemilu-pemilu Orde Baru dilakukan melalui sebuah proses yang tersentralisasi pada tangan-tangan birokrasi. Tangan-tangan itu tidak hanya mengatur hampir seluruh proses pemilu, tetapi juga berkepentingan untuk merekayasa kemenangan bagi partai politik milik pemerintah, yaitu Golkar. Dalam setiap pemilu, kompetisi ditekan seminimal mungkin dan kebebasan dan keragaman pandangan tidak diperbolehkan atau dilarang.<sup>91</sup>

Hampir sama dengan Liddle tersebut di atas adalah apa yang dikemukakan oleh Irwan dan Endriana. Kedua peneliti dari Universitas Atma Jaya ini, berdasarkan hasil penelitian Pemilu 1992, memberikan kesimpulan yang senada

---

<sup>91</sup> R. William Liddle, *Pemilu-Pemilu Orde Baru*, Jakarta: LP3ES, 1992, hal. 46.

dengan yang dikatakan oleh Liddle. Irwan dan Edriana menemukan 900 kasus pelanggaran terhadap asas Luber (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia) pelaksanaan pemilu yang terdiri atas 52 kasus (5,78%) pelanggaran hak kampanye, 38 kasus (4,22%) intimidasi dan kekerasan terhadap partai politik (PPP dan PDI), 101 kasus (11,22%) intimidasi untuk memilih Golkar, 472 kasus (52,44%) pelanggaran terhadap saksi partai politik (PPP dan PDI), 223 kasus (24,78%) pelanggaran dalam pemungutan dan perhitungan suara, dan 14 kasus (1,56%) pelanggaran lain-lain. Dari sejumlah kasus pelanggaran tersebut, 71 (6,97%) pelaku pelanggaran dilakukan oleh aparat keamanan, 296 (29,05%) dilakukan oleh birokrasi pemerintahan, 23 (2,26%) dilakukan oleh Golkar, 618 (60,65%) dilakukan badan penyelenggara pemilu, dan 11 (1,08%) pelaku-pelaku lain.<sup>92</sup>

Tingkat partisipasi yang tinggi dalam Pemilu-Pemilu Orde Baru juga menumbuhkan pertanyaan. Meskipun tingkat *voter's run out* (pemakaian hak suara) dalam pemilu-pemilu Orde Baru paling tinggi, rata-rata 90%, dibanding dengan berbagai negara di kawasan Asia maupun Eropa dan Amerika. Akan tetapi tingkat *voter's run out* itu tidak mempunyai arti apa-apa apabila dikaitkan dengan partisipasi politik masyarakat Indonesia. Hal ini karena tingkat kehadiran untuk memberikan suara bukanlah semata-mata tindakan yang bersifat pilihan atas kemauan sendiri atau otonom, melainkan karena dipaksakan oleh faktor yang ada diluar mereka sendiri (mobilisasi). Sehubungan dengan itu maka pemilu-pemilu Orde Baru tidak dapat dijadikan indikator bagi partisipasi politik, karena dalam kenyataan pemilu-pemilu Orde Baru lebih memperlihatkan karakter mobilisasi politik. Di samping itu pemilu-pemilu Orde Baru juga merupakan suatu bentuk seremonial demokrasi, di mana Pemilu digunakan sebagai alat legitimisasi penguasa dalam upaya mempertahankan kekuasaannya.

Pemilu-pemilu Orde Baru, karena selalu dimenangkan oleh Golkar, sebagai partai pemerintah, akibatnya melahirkan sistem kepartaian yang hegemonik. Sistem partai hegemonik berada di antara sistem partai dominan dan sistem satu partai. Dalam sistem ini eksistensi partai-partai politik diakui tetapi peranannya dibuat seminimal mungkin, terutama dalam pembentukan pendapat umum.

<sup>92</sup> Alexander Irwan dan Edriana, *Pemilu Pelanggaran Asas Luber*, Jakarta: Sinar Harapan, 1995, hal.18-22.



Geovani Sartori lebih jauh mengatakan bahwa partai hegemonik tidak akan membiarkan untuk terjadinya kompetisi yang bersifat formal maupun yang aktual. Partai-partai yang lain diperbolehkan hanyalah sebagai partai kelas dua dan sekedar diberi lisensi. Dengan keberadaan partai seperti itu maka partai hegemonik akan tetap menang dan berkuasa.<sup>93</sup>

Terciptanya sistem kepartaian hegemonik selama Orde Baru ini, menurut Afan Gaffar<sup>94</sup> karena didukung oleh empat faktor, yaitu: (1) dibentuknya aparatur keamanan yang represif dengan tugas menjaga ketertiban dan mempertahankan aturan politik dan stabilitas negara. Dalam rangka itu dibentuklah badan seperti, BAKIN, Kopkamtib, dan Opsus; (2) proses depolitisasi massa, di mana massa diasingkan dari arena politik; (3) rekruturisasi partai-partai politik; (4) dikeluarkannya hukum-hukum pemilu dan aturan pemerintahan sedemikian rupa untuk memungkinkan Golkar selalu menang.

Sementara itu Eep Saefulloh Fatah dalam studinya mengatakan bahwa Orde Baru dalam rangka untuk mengokohkan kekuasaannya melakukan institusionalisasi politik, yaitu “Pembakuan proses kehidupan politik melalui organisasi atau lembaga politik”. Beberapa upaya untuk melakukan institusionalisasi tersebut, yaitu: (1) penguasaan dan penguatan birokrasi negara; (2) sentralisasi kekuasaan di tangan Presiden dan Eksekutif; dan (3) pelaksanaan strategi kooptasi negara dalam tataran suprastruktur dan infrastruktur.<sup>95</sup>

Ikrar Nusa Bhakti dalam tulisan yang berjudul “Berbagai Faktor Penyebab Jatuhnya Presiden Soeharto”, mengatakan bahwa rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto merupakan rezim otoriter birokratik, yang dicirikan oleh: (1) pemerintah didominasi oleh militer yang berkolaborasi dengan teknokrat sipil; (2) rezim Orde Baru didukung oleh wiraswastawan oligopolitik yang bersama negara berkolaborasi dengan masyarakat internasional; (3) pengambilan keputusan dalam rezim Orde Baru bersifat birokratik-teknokratik; (4) untuk

---

<sup>93</sup> Dikutip dari Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hal. 210.

<sup>94</sup> Afan Gaffar, *Javanese Voters*, Yogyakarta: UGM Pers, 1992, hal. 37.

<sup>95</sup> Eep Saepfulloh Fatah, *Konflik, Manipulasi dan Kebangkrutan Orde Baru*, Jakarta: Burung Merak Press, 2010, hal. 88.

mendapat dukungan rezim Orde Baru melakukan mobilisasi; dan (5) rezim Orde Baru melakukan tindakan-tindakan represif.<sup>96</sup>

Ternyata gambaran tentang rezim Orde Baru yang otoriter tersebut, tidak hanya disitu saja. Beberapa ahli tentang Indonesia menisbatkannya dengan “konsep-konsep” politik lain, yang meskipun berbeda-beda tetapi pada muara yang sama, yakni rezim otoriter. Dalam konteks ini, seperti yang ditulis oleh Abdul Azis Thaba dengan merujuk studi-studi yang dilakukan oleh ahli politik Indonesia, di mana rezim Orde Baru adalah: (1) menganut paham integralistik; (2) model negara pasca kolonial; (3) patrimonialisme Jawa; (4) *bureucratic polity*; (5) negara otoritarian birokratik renteng; (6) *bureucratic authoritarian regime*; (7) *rent capitalis state*; (8) negara birokratik otoriter korporatis; dan (9) negara birokratik.<sup>97</sup>

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah berkaitan dengan sebab-sebab keruntuhan rezim Orde Baru yang diperintah oleh kekuasaan yang otoriter. Banyak faktor yang menyebabkannya. Para pakar menilai, pengunduran diri presiden Soeharto tersebut bukan hanya disebabkan oleh gerakan mahasiswa tetapi juga ada faktor-faktor lain yang ikut mendorong Presiden Soeharto lengser, diantaranya, yaitu: (1) pernyataan 14 Menteri dalam Kabinet Pembangunan VII yang tidak bersedia bergabung ke dalam Kabinet Reformasi yang rencananya merupakan hasil *reshuffle* Kabinet Pembangunan VII. Penarikan dukungan ini merupakan pukulan berat bagi Soeharto;<sup>98</sup> (2) sikap ABRI yang tidak tegas dalam mendukung Soeharto yang berada dalam keadaan terpojok. Di kalangan ABRI sudah lama terjadi perpecahan antara Presiden dengan ABRI dan juga perpecahan internal di dalam tubuh Angkatan Darat. Oleh karena itu ketika ada tuntutan reformasi dari kalangan mahasiswa, kalangan ABRI yang tidak setuju terhadap Presiden Soeharto memberikan dukungan terhadap gerakan mahasiswa;

<sup>96</sup> Ikrar Nusa Bhakti, *Berbagai Faktor Penyebab Jatuhnya Presiden Soeharto*, dalam Dedy N. Hidayat, dkk, (ed), *Pers dalam Revolusi Mei Runtuhnya Sebuah Hegemoni*, Jakarta: Pustaka Gramedia Utama, 2000, hal. 65-66.

<sup>97</sup> Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Pers, 1996. hal. 52-53.

<sup>98</sup> Keempat belas menteri yang menolak tersebut adalah Akbar Tanjung, Ginanjar Kartasasmita, Hendropriyono, Giri Suseno, Haryanto Dhanutirto, Justika Baharsyah, Kuntoro Mangkusubroto, Rachmadi Bambang Sumadidjo, Rahardi Ramelan, Subiakto Tjakrawardaya, Sanyoto Sastrowardoyo, Sumadi, Theo Sambuaga, dan Tantri Abeng, lihat Lampiran 4: *Surat Pengunduran Diri Massal*.

(3) desakan internasional. Hal ini karena kekuatan-kekuatan internasional berkepentingan pada perluasan demokrasi dan dalam rangka itu mendesak setiap negara yang belum demokratis untuk melakukan penyesuaian diri. Indonesia, ketika terjadi tuntutan reformasi, negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, mendukung gerakan reformasi yang dilakukan mahasiswa.<sup>99</sup>

Memang demokrasi atau demokratisasi, pasca perang dingin, telah menjadi isu global. Negara-negara yang sebelumnya otoriter berubah menjadi negara demokrasi. Amerika Serikat yang mengklaim sebagai kampiun demokrasi menekan dan mendesak negara-negara otoriter agar menjadi negara demokrasi melalui berbagai cara, dari yang lunak hingga dengan kekerasan.

Terlepas dari tekanan dunia internasional, terutama Amerika Serikat, demokrasi memang telah menjadi *trend* pemerintahan abad ini. Banyak faktor yang mendorong negara dari otoriter ke demokrasi. Menurut Sammuel P. Huntington, tidak ada faktor tunggal yang menyebabkan suatu negara menjadi demokrasi, melainkan banyak faktor. Menurut Sammuel P. Huntington mengatakan:

“Tingkat kemakmuran ekonomi secara menyeluruh tinggi; Distribusi pendapatan dan/atau kekayaan yang relatif merata; Ekonomi pasar; Perkembangan ekonomi dan modernisasi masyarakat; Aristokrasi feodal pada suatu ketika dalam sejarah masyarakat; Tiadanya feodalisme dalam masyarakat; Borjuasi yang kuat; Kelas menengah yang kuat; Tingkat melek huruf dan pendidikan yang tinggi; budaya yang bersifat instrumental ketimbang idealis; Protestanisme; Pluralisme sosial dan kelompok-kelompok menengah yang kuat; Berkembangnya kompetisi politik sebelum perluasan partisipasi politik; Struktur Kewenangan demokratis di dalam kelompok-kelompok sosial; Tingkat tindak kekerasan oleh sipil yang rendah; Tingkat polarisasi dan ekstremisme politik yang rendah; Pemimpin-pemimpin politik yang mendukung demokrasi dengan sepenuh hati; Pendudukan oleh suatu kekuatan asing yang pro demokrasi; Pengaruh dari suatu kekuatan asing yang pro demokrasi; Tradisi menghormati hukum dan hak-hak individu; Hasrat kelompok elit meniru bangsa-bangsa yang demokratis; Homogenitas komunal (etnis, rasial, keagamaan); dan Heterogenitas komunal (etnis, rasial, keagamaan)<sup>100</sup>

Selanjutnya menurut Huntington, demokrasi bisa berjalan dalam empat hal, yaitu (1) dengan cara transformasi di mana elit yang berkuasa memelopori

<sup>99</sup> Bandingkan dengan Maswadi Rauf, *Arti Penting Pemilu 1999*, Seri Penerbitan Studi Politik, Jakarta: Lab. Politik Fisip-UI-Mizan, 2000, hal. 16-17.

<sup>100</sup> Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokrasi Ketiga*, Jakarta: Grafitipress, 1995, hal. 47.

proses perwujudan demokrasi; (2) dengan cara pergantian (*replacement*) di mana kelompok oposisi memelopori proses perwujudan demokrasi, dan rezim otoriter tumbang atau digulingkan; (3) dengan cara *transplacement* di mana proses demokratisasi merupakan hasil tindakan bersama kelompok pemerintah dan kelompok oposisi; dan (4) dengan cara intervensi yaitu proses demokratisasi akibat intervensi pihak luar atau asing dengan menjatuhkan rezim otoriter.<sup>101</sup>

Sementara itu Hall Hill mengatakan bahwa faktor utama kejatuhan Soeharto adalah semakin memburuknya situasi ekonomi saat itu. Hall Hill menilai krisis ekonomi sejak bulan Juli 1997 menyebabkan jatuhnya Soeharto. Krisis ekonomi yang disusul krisis politik mengakibatkan pelarian modal ke luar Indonesia secara masif, hingga menyebabkan anjloknya nilai rupiah sampai mencapai Rp 17.000 per dollar. AS Rupiah yang lemah membuat pebisnis kolaps karena tidak dapat lagi mengelola hutang luar negerinya. Situasi diperburuk dengan besarnya hutang luar negeri dan buruknya sistem manajemen keuangan dalam negeri. Harga barang kebutuhan pokok melonjak, sehingga menimbulkan keresahan sosial yang luar biasa.<sup>102</sup>

Menurut Arief Budiman, krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada saat itu, di samping faktor-faktor eksternal seperti krisis kapitalisme global, juga disebabkan karena faktor-faktor internal, yakni adanya sebuah rezim yang otoriter dan korup di bawah kepemimpinan Soeharto.<sup>103</sup> Situasi krisis ekonomi yang mengkhawatirkan itu kemudian melahirkan krisis politik yaitu krisis kepercayaan kepada pemerintah yang berkuasa.<sup>104</sup> Dilatar belakangi krisis ekonomi yang berkepanjangan dan berlanjut menjadi krisis multi-dimensi, lantas muncul sebuah usaha perubahan sosial yang dimotori oleh gerakan mahasiswa yang didukung oleh kesadaran bersama dari para mahasiswa. Momen ini kemudian berkembang menjadi suatu gerakan bersama yang menuntut perubahan di beberapa bidang.

Namun, menurut Satrio Arismunandar, penyebab yang lebih mendasar tampaknya adalah meruncingnya pertentangan antara pihak penguasa yang selalu

<sup>101</sup> *Ibid.*, hal.146.

<sup>102</sup> Hall Hill, dalam Geoff Forrester & R.J. May, *The Fall Of Soeharto*, Singapore: Select Book, 2004.

<sup>103</sup> Arief Budiman, *Kata Pengantar*, dalam Arbi Sanit, *Pergolakan Melawan Kekuasaan: Gerakan Mahasiswa Antara Aksi Moral dan Politik*, Yogyakarta: INSIST Press, hal.1999, hal.ix.

<sup>104</sup> Arbi Sanit, *Ibid.*, hal.125.

hanya menuntut penegakan stabilitas dan efektivitas pemerintahan berhadapan dengan akumulasi kekecewaan dan tuntutan pembaruan di pihak masyarakat.<sup>105</sup> Berbagai tuntutan perubahan itu terangkum dalam jargon “reformasi.” Pada saat yang sama, krisis legitimasi yang dihadapi rezim Orde Baru telah mencapai ambang batas, apalagi dengan terjadinya krisis moneter yang melanda semua sektor kehidupan. Dalam kaitan ini, seruan mahasiswa bagi “reformasi” memperoleh momen yang tepat dan mendapat dukungan meluas dari masyarakat.

Memang, seperti dijelaskan di atas, ada banyak faktor yang menyebabkan Soeharto jatuh dari kekuasaan. Namun demikian, faktor-faktor yang mempercepat turunnya Soeharto adalah gerakan mahasiswa yang massif baik di Jakarta maupun di daerah-daerah yang menuntut agar Soeharto turun dari kekuasaan. Slogan yang muncul pada waktu itu adalah turunkan harga dan “Harga” (Soeharto dan keluarga).

#### **b. Kondisi Ekonomi**

Gelombang krisis makroekonomi mendadak melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997. Dampak yang paling cepat terlihat pada ketersediaan cadangan devisa. Pemerintah dengan segenap daya tidak mampu melakukan stabilisasi nilai tukar. Kondisi ini membawa kemerosotan pada cadangan devisa negara dari 20,3 milyar Dollar AS pada bulan Juni 1997 menjadi sekitar 14 milyar dollar AS pada pertengahan 1998. Ini juga merupakan dampak dari memburuknya neraca modal Indonesia akibat penurunan arus modal masuk secara drastis maupun melonjaknya arus modal keluar.<sup>106</sup>

Turunan dari krisis ekonomi saat itu membawa dampak sangat signifikan bagi dunia perbankan. Krisis kepercayaan kemudian muncul di mana-mana dan akhirnya berdampak pada masalah likuiditas perbankan yang sangat serius. Bank Indonesia sebagai lembaga otoritas ekonomi dan moneter melakukan langkah penyelamatan dengan menyuntik kebijakan penyediaan Kredit Likuiditas Bank

---

<sup>105</sup> Satrio Arismunandar, *Bergerak! Peran Pers Mahasiswa dalam Penggulingan Rezim Soeharto*, Genta Press, Yogyakarta, Genta Press, 2005.

<sup>106</sup> Heru Cokro, *Pendudukan Gedung DPR/MPR: Kesaksian Aktivistis Mahasiswa 1998*, Jakarta: Teraju, 2008, hal.40.

Indonesia (KLBI), yang melonjak dari sekitar Rp 7 trilyun pada bulan September 1997 menjadi Rp 140 trilyun pada bulan Juli 1998.<sup>107</sup>

Krisis kemudian menjadi kenyataan di depan mata. Permintaan domestik secara signifikan mengalami penurunan pada kuartal pertama tahun 1998. Situasi ini mempengaruhi sisi produksi, karena permintaan domestik telah menjadi sumber penting pertumbuhan ekonomi sejak awal tahun 1990-an. Karena terdapat peningkatan ketidakseimbangan eksternal, diperkirakan Produk Domestik Bruto (GDP) menyusut kurang dari kontraksi permintaan domestik. GDP merosot sebesar 13,45% pada tahun 1998. Pukulan krisis ini kemudian menghantam empat sektor penting, yaitu konstruksi, pariwisata, keuangan, dan manufaktur. Sektor konstruksi adalah korban terparah “menggelepar” menerima pukulan; hentakan krisis yang menghantam sektor ini sebenarnya sudah dirasakan pada empat bulan pertama tahun 1997, yang mengalami pertumbuhan negatif.<sup>108</sup>

Kondisi ekonomi Indonesia di masa akhir Orde Baru diwarnai oleh krisis moneter. Gejolak moneter ini diindikasikan oleh depresiasi nilai rupiah sampai di atas 100 persen—tepatnya 170 persen—terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Jika pada bulan Juli 1997 nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS masih sekitar Rp 2.433 maka pada awal bulan Januari 1998 nilai tukar rupiah terhadap dollar AS telah mencapai Rp 8.300. Bahkan, dalam waktu satu hari saja nilai rupiah pada tanggal 8 Januari 1998 anjlok menjadi Rp 9.700 per Dolar AS; dan diperdagangkan pada Rp 11.000 per Dolar AS di pasar uang Jakarta.<sup>109</sup> Krisis mata uang itu kemudian memunculkan krisis ekonomi ketika rupiah terdepresiasi demikian tajamnya dalam waktu yang amat singkat. Banyak kalangan kemudian menilai bahwa naiknya kembali Soeharto tidak menimbulkan pengaruh signifikan, malahan justru semakin membuat terpuruknya nilai rupiah menuju titik yang sudah di luar batas perhitungan wajar.<sup>110</sup>

Akibat persoalan-persoalan di atas, pengangguran terbuka lebar dan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan melaju tak terkendali. Keduanya (pengangguran dan kemiskinan) bergabung melaju bersama inflasi

---

<sup>107</sup> *Ibid.*, hal.41.

<sup>108</sup> *Ibid.*, hal.42.

<sup>109</sup> Valina Singka Subekti, “Dimensi Ekonomi Politik Krisis Ekonomi Indonesia 1997-1998”, dalam Laboratorium Ilmu Politik FISIP UI, *Op.,Cit*, hal. 123.

<sup>110</sup> Mahfudz Sidiq, *KAMMI dan Pergulatan Reformasi*, Solo: Era Intermedia, 2003, hal.120-121.

yang meningkat. Jika memakai basis tahunan, inflasi selama Januari hingga bulan Mei 1998 telah mencapai lebih dari 100 persen. Walhasil terdapat peningkatan antara kemiskinan masyarakat dan kekurangan pangan dan dampak berantainya menimbulkan gejolak sosial berupa peningkatan tindakan anarkis dan kriminalitas.<sup>111</sup>

Pada tahun 1996, jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan menurun hingga 22,5 juta jiwa atau 11,2 persen dari jumlah penduduk. Akan tetapi, kenaikan dua kali lipat harga pangan pada sembilan bulan pertama sejak mulainya krisis menyebabkan jumlah orang miskin membengkak menjadi 118,5 juta jiwa atau 60,6 persen dari jumlah penduduk. Jumlah mereka yang kehilangan pekerjaan selama tahun 1998 saja mencapai minus 20%, yang bisa diterjemahkan bahwa tambahan PHK bisa mencapai 9,6 juta pekerja. Jika ditambah dengan penganggur sebelumnya dan pencari kerja, maka jumlah penganggur pada akhir tahun 1998 diperkirakan mendekati 20 juta pekerja.<sup>112</sup>

Untuk memulihkan kepercayaan pasar, pemerintah sebenarnya melakukan usaha menggandeng *International Monetary Fund* (IMF) atas desakan para penasehat ekonomi. Kesepakatan bersama (*Letter of Intent/LoI*) dengan IMF ditandatangani pada tanggal 31 Oktober 1997 oleh Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad dan Gubernur Bank Indonesia Sudrajad Djiwandono. Keberadaan IMF ternyata tidak membawa dampak yang signifikan dalam memutus mata rantai krisis, dan cenderung tidak mempertimbangkan kondisi sosial politik Indonesia saat itu. Blunder kebijakan terbesar IMF adalah menutup 16 Bank swasta, yang berakibat dunia perbankan Indonesia menjadi porak poranda, terjadi *rush* dan pengambilan dana besar-besaran dengan antrian panjang di beberapa Anjungan Tunai Mandiri (ATM).<sup>113</sup>

Tidak hanya itu, pada tanggal 15 Januari 1998, Presiden Soeharto menandatangani kesepakatan pada saat nilai tukar dolar saat itu sudah merayap naik menuju angka Rp 10.000,- per US\$. Pasar ternyata tidak merespons positif

---

<sup>111</sup> Heru Cokro, *Op.Cit.*, hal.43-44.

<sup>112</sup> Heru Cokro, *Op.Cit.*, hal.44-45.

<sup>113</sup> Diro Aritonang, *Op., Cit.*, hal. 54-63, lihat juga Fadli Zon, *Politik Huru Hara Mei 1998*", Jakarta: Institute for Policy Studies (IPS), 2004. hal 7-14 dan Ishak Rafick, "*Catatan Hitam 5 Presiden Indonesia: Sebuah Investigasi 1997-2007, Mafia Ekonomi, dan Jalan Baru Membangun Indonesia*", Jakarta : PT. Cahaya Insan Suci, 2008.hal 162-170.

*Letter of Intent* (LoI) yang ditandatangani Presiden Soeharto. Sebagian pengamat malah menilai kesepakatan kedua ini seperti “menyiram api dengan bensin”. Walaupun begitu, LoI kedua ini menyinggung berbagai masalah sensitif seperti proyek mobil nasional, proyek cengkeh dan sejumlah bisnis yang dilakukan anak-anak Soeharto.<sup>114</sup>

Dampak paling nyata lainnya dari krisis moneter adalah meningkatnya harga-harga barang termasuk sembilan bahan pokok (beras, gula, minyak terigu, kacang kedelai, jagung, telur, susu). Kenaikan harga juga terjadi pada bahan-bahan baku impor untuk industri. Akibatnya, banyak perusahaan yang tidak dapat mempertahankan proses produksinya, bahkan ada yang tutup sama sekali. Sebagai akibat lanjutan terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) besar-besaran. PHK semakin meningkatkan jumlah penganggur.<sup>115</sup>

Naiknya harga-harga sembako juga mengakibatkan kepanikan konsumen golongan menengah-atas. Mulai tanggal 9 Januari 1998 mereka secara panik memborong sembako di pasar-pasar swalayan dan di pasar-pasar tradisional. Aksi pembelian sembako besar-besaran terjadi serempak di kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan. Aksi ini membuat harga kian melonjak tinggi dan akibat lainnya konsumen kelas bawah di pasar-pasar tradisional kian menderita.<sup>116</sup>

Kenaikan harga sembako memiliki dua dampak. *Pertama*, mendorong sejumlah produsen maupun distributor untuk menimbun barang sampai harga tertinggi. Akibatnya soal lain muncul, yaitu kelangkaan sembako di pasar. Di Jakarta dan di Tangerang, misalnya, Bakorstanasda Jaya mengaku menemukan timbunan beras hingga 250 ribu ton, 31 ribu ton kedelai, dan 11 ribu ton gula. *Kedua*, kenaikan drastis itu menciptakan kepanikan luar biasa di kalangan masyarakat bawah hingga mendorong mereka melakukan kerusuhan. Di jalan raya di Bandung-Cirebon, kota Jatiwangi, pada tanggal 12 Februari 1998, massa berkerumun dan berteriak, “turunkan harga!”<sup>117</sup>

---

<sup>114</sup> *Ibid.*, hal.45-46.

<sup>115</sup> Max Boli Sabon, dkk, *Fakta Tragedi Semanggi: Analisis Hukum, Sosial Politik, Moral*, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 1999, hal. 113.

<sup>116</sup> Muridan S.Widjojo et al., *Op.Cit.*, hal.157.

<sup>117</sup> Muridan S. Widjojo et al., *Op.Cit*, hal.157-158.



### c. Kejatuhan Soeharto

Pada bulan Mei 1997, Indonesia melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih anggota legislatif. Setelah Pemilu 1997 usai, gelombang penolakan terhadap hasil pemilu 1997 terjadi di berbagai tempat. Pada tanggal 9 Juni 1997 di Gelanggang Mahasiswa UGM muncul aksi perlawanan oleh Gerakan Rakyat untuk Pemilu Demokratis. Aksi yang didukung sekitar 20 orang ini menyatakan menolak hasil pemilu yang tidak sah dan menuntut penghapusan Dwi Fungsi ABRI. Sebelas hari kemudian, tanggal 20 Juni 1997, di Semarang, FARI (Front Aksi Rakyat Indonesia) menuntut agar Pemilu diulang karena tidak demokratis dan menolak sidang umum MPR yang merupakan hasil pemilu yang tidak fair. Pada tanggal 9 Oktober 1997, aksi serentak terjadi di dua kota, Semarang dan Yogyakarta. Di Semarang puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Komite Suara Rakyat beraksi menyerukan, "Tolak DPR/MPR hasil Pemilu 1999. Pemilu curang, wakil rakyat juga curang; Pemilu korup, wakil rakyat juga korup". Di Yogyakarta, Kabakin (Komite Anak Bangsa untuk Keprihatinan Nasional) membuat aksi dengan isu politik yang sama. Di kota yang sama, 11 hari kemudian, SDOOT (Solidaritas Demokrasi untuk Orang-Orang Tertindas) turun ke jalan dari IAIN Sunan Kalijaga hendak menuju ke makam pahlawan, namun di depan kampus APMD dicegat oleh petugas. Dengan kata yang lebih halus mereka menyatakan, "perbaiki mekanisme pemilihan DPR/MPR."<sup>118</sup>

Di Padang, pada tanggal 19 Februari 1998, sekitar 2.000 mahasiswa Universitas Andalas berdemonstrasi menolak berkuasanya kembali Presiden Soeharto dan menuntut dilaksanakannya reformasi. Di kampus UI Salemba, mahasiswa dan sejumlah alumni UI mengadakan aksi keprihatinan pada tanggal 25 Februari 1998, yang diakhiri dengan menutup baliho yang bertuliskan "Selamat Datang di Kampus Perjuangan Orba" dengan kain putih. Pada tanggal 28 Februari 1998, beberapa mahasiswa Universitas Airlangga mogok makan untuk mendesak Sidang Umum MPR memenuhi tuntutan mereka dan menolak berkuasanya kembali Presiden Soeharto.<sup>119</sup>

<sup>118</sup> Muridan S. Widjojo et al., *Penakluk Rezim Orde Baru: Gerakan Mahasiswa '98*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999, hal. 152-153.

<sup>119</sup> Rene L. Pattiradjawane, *Trisakti Mendobrak Tirani Orde Baru*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999, hal. 123.

Sementara itu, anggota legislatif hasil Pemilu 1997 dalam Sidang Umum (SU) MPR yang berlangsung 1-11 Maret 1998 ternyata memilih kembali Soeharto sebagai Presiden untuk periode 5 tahun. Pada 10 Maret 1998, Soeharto dipilih kembali sebagai Presiden RI untuk ketujuh kalinya. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang anggotanya diangkat —sebagai wakil-wakil elit sipil dan militer Orde Baru— mensahkan Soeharto dengan suara bulat.<sup>120</sup> Di luar itu, dalam suasana menjelang Sidang Umum MPR, sebenarnya marak tuntutan agar Soeharto tidak dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai Presiden. Suara masyarakat, seperti misalnya Amien Rais, sejak jauh hari telah giat menyerukan bahwa suksesi kepemimpinan nasional pada 1998 harus menjadi keniscayaan.<sup>121</sup>

Militansi mahasiswa kian menghebat ketika nama seorang anak Soeharto dan kroninya, Siti Hardiyanti Rukmana dan Mohamad “Bob” Hasan, masuk dalam susunan Kabinet Pembangunan VII yang diumumkan pada 14 Maret 1998 di Istana Merdeka. Ini semakin membuktikan bahwa tuntutan hapuskan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang mereka suarakan tidak pernah digubris. Aksi mahasiswa yang semakin massif dan militan serta sering disertai bentrok dengan aparat mendorong Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto mencoba meredamnya dengan ajakan dialog. Akan tetapi, mahasiswa menilai dialog dengan sejumlah menteri kabinet itu tidak efektif. Mahasiswa mencurigai ajakan dialog itu sebagai siasat untuk memoderasi militansi mereka yang semakin mengental dan luas. Tapi penolakan itu tidak mengurungkan rencana Wiranto, sebab sebagian pihak masih terbuka dengan ajakan itu. Pada tanggal 18 April 1998, tetap digelar dialog antara pemerintah dengan tokoh masyarakat, cendekiawan, dan sejumlah perwakilan mahasiswa di Gedung Niaga Arena PRJ Jakarta.<sup>122</sup>

Pada tanggal 4 Mei 1998, tak mendengarkan tentangan keras berbagai pihak, termasuk DPR, pemerintah menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik. Keputusan ini menguntungkan mahasiswa, karena isu mereka menjadi lebih populis. Lima hari setelah keputusan BBM dan tarif dasar listrik naik, tanggal 9 Mei 1998, Presiden Soeharto berangkat ke Kairo untuk menghadiri KTT G-15.

<sup>120</sup> Geoff Forrester dan R. J. May (Ed.), *Jatuhnya Soeharto*, Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen, 1998. hal.1.

<sup>121</sup> Mahfudz Sidiq, *Op.Cit.*, hal.120.

<sup>122</sup> A. Ariobimo Nusantara, R. Masri Sareb Putra, dan Y.B. Sudarmanto *Aksi Mahasiswa Menuju Gerbang Reformasi*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1998, hal. 42.

Soeharto merasa masih mampu mengendalikan stabilitas politik dan nasional. Hari itu juga beredar berita tentang tewasnya Letda (Pol) Dadang Rusmana, Kepala Satuan Intelijen Kepolisian Resor Bogor, dalam aksi keprihatinan mahasiswa Universitas Djuanda (Unida) Bogor. Menurut Kapolres Bogor, Kolonel (Pol) Abubakar, Dadang tewas karena dianiaya mahasiswa Unida. Namun pernyataan ini dibantah dr. Yuli Budiningsih, ahli kedokteran Forensik FK UI, yang mengotopsi jenazah Dadang.<sup>123</sup>

Tanggal 12 Mei 1998, demonstrasi mahasiswa Universitas Trisakti di kawasan Grogol, Jakarta, berubah menjadi arena pembantaian berdarah yang menyulut kekerasan dan kekejaman lebih lanjut. Hery Hartanto (Fakultas Teknologi Industri), Elang Mulia Lesmana (Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan), Hafidhin Royan (Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan), dan Hendriawan Sie (Fakultas Ekonomi), tergeletak bersimbah darah di halaman kampus Universitas Trisakti akibat luka tembak.

Tewasnya empat mahasiswa Universitas Trisakti itu memang menjadi inspirasi bagi gerakan pro-reformasi di Indonesia. Setelah insiden itu, timbul keberanian luar biasa dalam berkonfrontasi dengan kekuasaan Presiden Soeharto yang didukung infrastruktur kekuasaannya, termasuk ABRI. Gugurnya empat mahasiswa Universitas Trisakti menjadi pemicu gelombang protes yang lebih besar. Gelombang itu memuncak dengan pendudukan Gedung DPR/MPR oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.<sup>124</sup> Di tengah tumbuhnya kesadaran kolektif dalam perlawanan terhadap Soeharto sebuah peristiwa dahsyat terjadi secara tak terduga, yakni kerusuhan massal 13-14 Mei 1998 di Jakarta. Menteri Koordinator Ekonomi dan Keuangan, Ginandjar Kartasasmita, menghitung bahwa kerugian akibat kerusuhan di Jakarta mencapai Rp 2,5 triliun.<sup>125</sup>

Atas berita memburuk situasi itu, Soeharto mempersingkat kunjungannya di Mesir dan kembali di Jakarta pada tanggal 15 Mei 1998. Saat masih di Mesir, Soeharto sempat menyatakan bahwa kalau rakyat Indonesia sudah tidak memberikan kepercayaan lagi kepadanya, tidak apa-apa. Dia tidak

---

<sup>123</sup> Munafrizal Manan, *Gerakan Rakyat Melawan Elit*, Yogyakarta: Resist Book, 2005, hal.80.

<sup>124</sup> Rene L. Pattiradjawane, *Ibid.*, hal. 2.

<sup>125</sup> Bacharuddin Jusuf Habibie, " *Detik-Detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi* ", Jakarta: THC. Mandiri, 2006, hal. 7.

mempertahankan kekuasaannya dengan senjata. Tiba di Indonesia, berdasar laporan-laporan, Soeharto bersedia menurunkan harga BBM sesuai tuntutan masyarakat. Pada saat tanggal 16 Mei 1998, Soeharto menerima pimpinan DPR dan berjanji akan me-*reshuffle* kabinet Pembangunan VII dan menjalankan reformasi di berbagai bidang.<sup>126</sup>

Namun, rakyat terlanjur tidak percaya. Pada tanggal 18 Mei 1998, ribuan mahasiswa bergelombang datang dari pelbagai kampus ke gedung MPR/DPR. Mereka tergabung dalam Forum Kota (FORKOT), Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta (FKSMJ), Kesatuan Aksi Mahasiswa untuk Reformasi Indonesia (KAMURI), Front Nasional, dan beberapa kelompok lain yang lebih kecil. Selain itu, pada hari yang sama, masyarakat dikejutkan oleh pernyataan Ketua DPR Harmoko. Harmoko yang didampingi para Wakil Ketua DPR—Buya Ismail (F-PP), Abdul Gafur (FKP), Fatimah Ahmad (F-PDI), dan Syarwan Hamid (F-ABRI)—meminta Presiden Soeharto untuk secara arif dan bijaksana mengundurkan diri demi persatuan dan kesatuan bangsa.<sup>127</sup>

Sehari kemudian, tanggal 19 Mei 1998, Soeharto mengundang Sembilan tokoh intelektual Islam ke Istana. Mereka adalah Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Nurcholish Madjid, Ali Yafie, Emha Ainun Nadjib, Malik Fadjar, Sutrisno Muhdan, Cholil Baidlowi, Ahmad Bagdja, dan Ma'ruf Amin. Soeharto ingin mendengar pendapat mereka soal situasi terakhir. Usai pertemuan, Soeharto menyimpulkan sendiri kemauannya untuk membentuk Komite Reformasi dan me-*reshuffle* Kabinet Pembangunan VII dan mengubahnya menjadi Kabinet Reformasi. Tugas Komite Reformasi ialah menyusun Undang-Undang Pemilu, Kepartaian, Susunan dan Kedudukan MPR/DPR/DPRD, Anti Monopoli, Anti Korupsi sebagaimana diinginkan gerakan mahasiswa dan rakyat. Pada tanggal 20 Mei 1998, empat belas orang menteri Kabinet Pembangunan VII mengirim surat kepada Presiden Soeharto untuk menyatakan tidak bersedia menjadi menteri lagi dalam susunan Kabinet Reformasi yang dibentuk.<sup>128</sup>

Pendudukan DPR/MPR dan karena legitimasi dan dukungan terhadapnya terus menerus melemah, akhirnya memaksa Presiden Soeharto mengundurkan diri

<sup>126</sup> Munafrizal Manan, *Ibid*, hal.83.

<sup>127</sup> A. Ariobimo Nusantara, R. Masri Sareb Putra, dan Y.B. Sudarmanto., *Op., Cit.*, hal. 62

<sup>128</sup> Lihat Lampiran 4: *Surat Pengunduran Diri Massal*.

dari jabatan yang baru diperolehnya kembali dari hasil Sidang Umum MPR tanggal 10 Maret 1998. Pidato Presiden Soeharto terakhir tanggal 21 Mei 1998 yang berjudul “Pernyataan Berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia”<sup>129</sup> disambut dengan sorak gempita oleh mahasiswa diseluruh Indonesia.<sup>130</sup>

Gerakan mahasiswa 1998 tampaknya juga telah belajar dari kesalahan gerakan mahasiswa sebelumnya, seperti gerakan mahasiswa 1974 dan 1978, bahwa kekuatan gerakan mahasiswa tak akan bisa diperoleh jika terjebak dengan pendekatan eksklusif atau berjuang sendirian tanpa melibatkan rakyat. Gerakan mahasiswa baru akan efektif jika betul-betul secara konkret didukung bahkan kalau perlu melibatkan komponen-komponen rakyat.<sup>131</sup>

Secara umum gerakan mahasiswa dalam menjatuhkan Soeharto dapat dikelompokkan ke dalam tiga hal, yaitu: (1) isu yang diusung oleh gerakan mahasiswa tahun 1998; (2) fragmentasi yang terdapat pada kelompok-kelompok dalam gerakan mahasiswa tahun 1998; (3) peranan elit dalam gerakan mahasiswa tahun 1998. Pembahasan mengenai isu yang diusung oleh gerakan mahasiswa tahun 1998 dapat ditelaah dengan menggunakan periodisasi. Periodisasi gerakan mahasiswa menjatuhkan Soeharto dapat dibedakan menjadi empat periode. Periodisasi ini dibuat dengan mendasarkan diri pada momen-momen penting dalam gerakan mahasiswa tahun 1998 yaitu: (1) periode sebelum tanggal 1 Maret 1998; (2) periode Sidang Umum MPR tanggal 1-11 Maret 1998; (3) Periode 12-21 Mei 1998

### **c.1. Periode Sebelum 1 Maret 1998.**

Pada awal periode pertama itu, isu yang ditampilkan sebatas pada kondisi aktual saat itu seperti: kelaparan di Irian Jaya, kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatra, menuntut pemerintah untuk menurunkan harga-harga barang dan menindak penimbun Sembilan bahan pokok (sembako). Contohnya adalah aksi 150 mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) yang melakukan mimbar bebas di kampus Baranangsiang pada hari Rabu 3 Desember 1997 dengan poster-poster yang dipajang bertuliskan: Berantas Korupsi dan Kolusi, Tindak Tegas Mega

<sup>129</sup> Lihat Lampiran 5: Pernyataan Berhenti Sebagai Presiden Republik Indonesia.

<sup>130</sup> A. Ariobimo Nusantara, R. Masri Sareb Putra, dan Y.B. Sudarmanto., *Op., Cit.*, hal. 63.

<sup>131</sup> Satrio Arismunandar, *Gerakan Mahasiswa dan Pers Mahasiswa*, <http://laskartimbul.com>.

Koruptor di BI, Tindak Tegas Pembakar Hutan, Tindak Tegas Aborsi sampai ke akar-akarnya.<sup>132</sup>

Dari segi kuantitas, frekuensi demonstrasi mencapai 154 demonstrasi. Demonstrasi terbanyak dan terbesar dalam kurun waktu itu terjadi di Yogyakarta-67 kali demonstrasi. Di Jakarta (termasuk Depok) hanya 19 kali. Isu terbanyak yang diangkat oleh para mahasiswa adalah isu politik nasional sebanyak 48 kali dan isu-isu internal kampus 30 kali. Selain isu yang sebatas pada kondisi aktual di atas, isu politik nasional yang mengemuka pada tahun 1997 adalah penolakan mahasiswa terhadap Pemilihan Umum 1997. Untuk isu keadilan sosial (31 kali) yang menonjol adalah solidaritas untuk korban kelaparan di Irian Jaya, dan untuk isu hak asasi manusia (26 kali) adalah penegakan hak asasi manusia dan anti kekerasan. Aktivitas mahasiswa Yogyakarta tampak menonjol dalam mengangkat isu-isu sensitif yang strategis dan berskala nasional. Tampaknya kota-kota lain sesekali muncul dan kelihatan masih menahan diri akibat trauma 27 Juli 1996.<sup>133</sup>

Mahasiswa menemukan momentumnya seiring dengan krisis ekonomi yang terjadi. Mahasiswa mulai bergerak dengan tuntutan awalnya adalah penurunan harga-harga. Isu ekonomis tersebut berhasil dimajukan oleh gerakan yang lebih politis. Isu kemudian berkembang menjadi penurunan Soeharto, juga pencabutan dwifungsi ABRI. Di berbagai kota kemudian muncul organisasi seperti: KMPRL di Lampung, KPRP, SOMMASI, ARMY, FAMPERA di Yogyakarta, DRMS di Solo, FAMPR di Purwokerto, APR, ASPR di Surabaya, FKMM di Malang, AGRESU, DEMUD di Medan, FKSMJ, FORKOT di Jakarta.<sup>134</sup>

Memasuki tahun baru 1998, aksi-aksi demonstrasi mulai marak lagi. Tercatat 31 aksi selama Januari di Solo, Jakarta, Bandar Lampung, Bandung, dan Yogyakarta, dengan membawa tiga isu penting: penolakan pencalonan kembali Soeharto (16 kasus), “turunkan harga” (7 kasus), dan “Megawati *for President*” (3 kasus), cabut paket 5 UU politik dan Dwi Fungsi ABRI” (masing-masing 2 kasus). Pada bulan ini aksi yang dimotori oleh komite mahasiswa hanya ada 7 kelompok.<sup>135</sup>

<sup>132</sup> Selo Soemardjan (Ed.), *Op.Cit.*, hal. 142.

<sup>133</sup> Muridan Widjojo et. al., *Op.Cit.*, hal. 150

<sup>134</sup> Sunarsih dan Ign. Mahendra K., *Op., Cit.*, hal. 102-106

<sup>135</sup> Muridan Widjojo et al., *Op.Cit.*, hal. 154.

Selain isu “tolak Soeharto”, kelompok aktivis mahasiswa GAOB (Gerakan Anti Orde Baru) di Lampung dan di Solo masih konsisten menyoal Dwi Fungsi ABRI dan paket 5 UU politik selain menuntut turunnya harga-harga. Di Jakarta demonstrasi ratusan mahasiswa IKIP Negeri Jakarta di kampus pada 19 Januari 1998 juga menolak Soeharto. Kelompok kampus lainnya, mahasiswa IPB misalnya, masih sibuk dengan isu lokal di kotanya. Demonstrasi dan pernyataan anti-Soeharto juga diangkat oleh kelompok non-mahasiswa Kelompok Cipayung (minus HMI DIPO), HMI MPO, dan aliansi LSM. Dari kalangan ilmuwan dan Pegawai Negeri Sipil, 19 peneliti LIPI membuat pernyataan politik menolak Soeharto.<sup>136</sup>

Isu anti Soeharto pada awal tahun 1998 ini sudah mengemuka namun belum merata secara nasional. Aksi menolak Soeharto belum melibatkan massa yang besar. Aksi di Solo memang mampu mengerahkan massa dua ribuan namun isunya lokal dan lokasinya bukan di Jakarta sehingga tidak mendapatkan liputan secara nasional dan tidak menimbulkan efek politik yang signifikan. Kelompok pelaku Anti-Soeharto pun masih berasal dari kelompok yang memang dikenal secara politis kritis, seperti kelompok LSM, Cipayung (minus HMI DIPO), dan HMI MPO sehingga dianggap “biasa”.<sup>137</sup>

Menjelang bulan Februari 1998, mahasiswa mulai mengaitkan isu mereka dengan Sidang Umum MPR. Beberapa mahasiswa juga melakukan aksi mogok makan seperti 2 (dua) orang mahasiswa Universitas Parahyangan, 6 (enam) mahasiswa di UGM, 7 (tujuh) mahasiswa di Universitas Airlangga pada awal Maret 1998. Salah satu alasan tindakan mogok makan adalah supaya aksi-aksi mahasiswa yang selama ini hanya diberitakan sekilas oleh pers dapat dimuat lebih serius lagi dan juga agar perhatian masyarakat luas semakin meningkat terhadap perkembangan situasi perekonomian yang semakin parah.<sup>138</sup>

Pada bulan Februari 1998, kuantitas aksi demonstrasi mahasiswa memang semakin meningkat. Di luar Jawa, mahasiswa mulai aktif: Palu, Bima, Lahat, Samarinda, dan yang terbanyak Ujung Pandang. Dari 40 aksi di seluruh Indonesia selama Februari, 17 aksi di antaranya terjadi di Ujung Pandang. Sementara itu

<sup>136</sup> *Ibid.*, hal. 154.

<sup>137</sup> Muridan Widjojo et al., *Ibid.*, hal. 155.

<sup>138</sup> Selo Soemardjan (Ed.), *Op.Cit* hal. 143.

di kota-kota “tradisional” GAOB mahasiswa seperti di Bandung, Solo, Jakarta, dan Yogyakarta juga semakin meningkat kuantitas dan kualitasnya. “Turunkan Harga” (31 kasus) merupakan isu politik utama selama Februari 1998 dan bukan “Tolak Soeharto” (hanya 6 kasus).<sup>139</sup>

Selama bulan Februari 1998 isu yang banyak diusung dalam aksi-aksi itu adalah Turunkan Harga. Pelaku gerakan pada masa ini bukan hanya organisasi-organisasi gerakan yang sudah lama bergerak sejak 80-an melainkan juga kalangan aktivis kampus dari organisasi-organisasi seperti Senat Mahasiswa, BEM, KM, dan Senat-senat Fakultas. Para aktor dari kalangan kampus ini menyebut gerakan mereka sebagai gerakan “moral” dengan format aksi keprihatinan di kampus. Mereka juga banyak didukung oleh para staf pengajar dan pimpinan perguruan tinggi yang menjadikan gerakan mahasiswa sebagai gerakan *civitas academica*.<sup>140</sup>

Pada Rabu 25 Februari 1998 ratusan mahasiswa UI menggelar aksi protes terhadap pemerintah Orde Baru di Kampus UI Salemba. Lebih dari seribu mahasiswa Universitas Indonesia yang berasal dari Keluarga Besar Universitas Indonesia (KBUI), bersama ratusan anggota ILUNI UI (Ikatan Alumni UI) dan para tokoh eksponen '66, melakukan aksi unjuk rasa di kampus UI Salemba. Aksi ini ditandai dengan penutupan papan “Selamat Datang di Kampus Perjuangan Orba” yang terpampang di pertigaan jalan Salemba-Diponegoro-Matraman, dengan dua helai kain putih oleh para mahasiswa. Para mahasiswa bahkan menghapus tulisan serupa yang terletak pada papan dekat Masjid Arief Rahman Hakim di bagian tengah kampus, dengan cat semprot warna hitam.<sup>141</sup>

Keesokan harinya tanggal 26 Februari 1998 aksi protes UI terhadap pemerintah Orde Baru meningkat; ribuan mahasiswa dan segenap staf pengajar serta pegawai lingkungan UI yang diinisiasi dan dikoordinir oleh Keluarga Besar Universitas Indonesia (KBUI) mengadakan aksi yang lebih besar di Kampus UI Depok. Dimulai dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, sekitar 500 mahasiswa berjaket kuning melakukan arak-arakan mengelilingi kompleks kampus UI sambil mengajak mahasiswa dari fakultas-fakultas lain. Aksi *civitas akademika* UI

---

<sup>139</sup> Muridan S. Widjojo et al., *Op.Cit* ..., hal. 160.

<sup>140</sup> Sunarsih dan Ign. Mahendra K., *Op.Cit.*, hal.103.

<sup>141</sup> Heru Cokro, *Op.Cit* .., hal.46.



menunjukkan bahwa UI menolak pemerintahan Orde Baru. Barisan mahasiswa sepanjang hampir satu kilometer itu kemudian menuju pintu gerbang kampus, sambil berteriak “Hidup Demokrasi, Hidup Reformasi”. Tugu selamat datang bertuliskan Universitas Indonesia lalu ditutupi spanduk putih bertuliskan “Kampus Perjuangan Rakyat”. Iring-iringan itu urung keluar kampus, karena pintu gerbang telah diblokir satu batalyon aparat keamanan. Komandan Kodim Depok, yang memimpin barisan petugas keamanan, mengancam bahwa ia mendapat perintah dari Pangdam V Jaya untuk menembak di tempat para pelaku demonstrasi di luar kampus. Aksi yang dimulai sekitar pukul 11.00 berlangsung tertib dan berakhir sekitar jam 14.00.<sup>142</sup>

Isu yang diangkat oleh kebanyakan aktivis Keluarga Mahasiswa (KM), Senat Mahasiswa (SM) atau Keluarga Besar (KB) di dalam kampus lebih merupakan pernyataan keprihatinan atas krisis ekonomi dan politik yang melanda Republik Indonesia sejak awal 1998. Tuntutan dan isu politiknya pun bersifat umum dan mengambang yakni “reformasi ekonomi dan politik”. Selain itu mereka secara bergantian menyebut berbagai tuntutan seperti pemerintahan yang bersih dan berwibawa, turunkan harga sembako, tolak kekerasan militer, audit kekayaan pejabat, KKN, kembalikan kedaulatan rakyat, menolak IMF, dan lain-lain.<sup>143</sup>

Pada tanggal 1-11 Maret 1998 diadakan Sidang Umum (SU) MPR, yang para pesertanya adalah anggota MPR/DPR hasil Pemilu 1997. SU MPR diawali dengan pidato pertanggungjawaban Soeharto. Dalam pidato itu, Soeharto tidak menyinggung-nyinggung soal Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), isu-isu yang justru sedang disorot tajam oleh masyarakat dan dianggap melibatkan kalangan keluarga Cendana dan kroninya. SU MPR yang diadakan di tengah krisis ekonomi ini berlangsung seolah-olah kondisi normal. Bahkan akhirnya, Soeharto oleh MPR dipilih lagi ketujuhkalinya dengan suara bulat, menjadi Presiden RI untuk masa jabatan 1998-2003, dengan B.J. Habibie sebagai Wakil Presiden.<sup>144</sup>

---

<sup>142</sup> Heru Cokro, *Ibid.*, hal.46-47.

<sup>143</sup> Muridan S. Widjojo *et al.*, *Op.Cit.*, hal. 166.

<sup>144</sup> Edward Aspinall dkk., *Titik Tolak Reformasi: Hari-Hari Terakhir Presiden Soeharto*, Yogyakarta: LKIS, 1999, hal. 30.

Namun susunan kabinet baru kembali menunjukkan ketidakseriusan Soeharto dalam menangani krisis. Kabinet itu diisi dengan tokoh-tokoh kroni yang makin menimbulkan frustrasi masyarakat, seperti Muhammad “Bob” Hasan sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan; Subiakto Tjakrawerdaya menjadi Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil; R. Hartono menjadi Menteri Dalam Negeri; bahkan putri Soeharto sendiri, Siti Hardiyanti Rukmana, ditunjuk menjadi Menteri Sosial.<sup>145</sup> Inilah kabinet yang paling lemah dan paling tidak profesional di masa Orde Baru. Bau nepotismenya sangat kental. Beberapa figur yang jelas-jelas bermasalah malah dipasang lagi. Sejumlah menteri bahkan bisa dibilang sebagai figur anti reformasi dan seolah-olah tutup mata dan tutup telinga terhadap aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.

Menyinggung tuntutan masyarakat bagi demokratisasi dan reformasi, R. Hartono, dalam serah terima jabatan Menteri Dalam Negeri dari Moh. Yogie SM, pada tanggal 17 Maret 1998, mengatakan:

Saya sendiri tidak tahu. Jika (ada yang menuntut) demokratisasi, apa selama ini tidak demokratis. Reformasi? Apa tidak reformasi? Kalau reformasi dalam arti radikal, itu tidak sesuai dengan budaya kita. Jangan lupa, radikal dengan perubahan yang sesuai dengan tuntutan itu beda. Kita sudah melaksanakan reformasi sejak tahun '45 sejak kita merdeka. ‘Kan bertahap, bertingkat.’<sup>146</sup>

Akibatnya, berbagai demonstrasi mahasiswa muncul dan terus bergelombang di kampus-kampus. Berbagai aspirasi masyarakat yang mendukung reformasi pun makin gencar dan terbuka diungkapkan. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU), misalnya, dalam pernyataan yang dibacakan Sekjen PB NU Achmad Bagdja yang didampingi Rois Syuriah dan KH Ilyas Ruchiat sesudah rapat pleno PB NU, tanggal 15 April 1998, mengimbau ABRI untuk mendukung reformasi. Dikatakan, perubahan (Reformasi) merupakan *sunnah* atau hukum Allah yang tidak dapat ditolak. Menolak reformasi atau *islah* (tuntutan perbaikan) sama artinya dengan menolak *sunnah* Allah serta mengingkari potensi manusia untuk menyempurnakan diri dan kehidupannya menjadi lebih baik.<sup>147</sup>

<sup>145</sup> *Ibid.*

<sup>146</sup> *Ibid.*

<sup>147</sup> *Ibid.*

Isu suksesi menjelang Sidang Umum MPR tanggal 1-11 Maret 1998, juga menjadi fokus perhatian para mahasiswa. Sebuah jajak pendapat yang diselenggarakan Senat Mahasiswa UI menjangkit 1.040 responden atau sekitar 5% dari seluruh mahasiswa UI menghasilkan, 85,6 % mahasiswa setuju agar secepatnya diadakan alih kepemimpinan nasional (suksesi). Selain itu 25,3 % antaranya mendukung Ketua Umum PP Muhammadiyah Amien Rais sebagai Calon Presiden, sedangkan Try Sutrisno mendapat dukungan 10,14%, Menristek B.J. Habibie 8,01% dan Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad menduduki urutan keempat dengan 6,9%. Aksi terus berlanjut, slogan anti-pemerintah makin lantang dikumandangkan, tapi kepada tentara dan aparat keamanan diserukan untuk bergabung dengan mahasiswa.<sup>148</sup>

Menjelang berakhirnya Sidang Umum MPR, isu yang dimunculkan beberapa kampus seperti di Universitas Airlangga, Surabaya adalah permintaan agar kabinet mendatang bersih, jujur, tulus, tidak sektarian, mengacu kepada kepentingan rakyat, reformasi total, mengatasi pengangguran dan korupsi.<sup>149</sup> Pada saat itu, aksi demonstrasi mahasiswa diwarnai oleh sikap dan teriakan-teriakan yang menolak pidato pertanggungjawaban Soeharto, di ITS sejak tanggal 6 Maret, di Jakarta pada tanggal 9 Maret yang diadakan di kampus masing-masing: Universitas Indonesia Depok, ISTN, Universitas Atmajaya, UKI, Universitas Gunadarma, Univ. Jayabaya, IISIP, UNAS dan Universitas Islam Jakarta. Alasan penolakannya dikarenakan Presiden Soeharto di dalam pidato pertanggungjawabannya di MPR tidak menyinggung apa yang menjadi penyebab krisis moneter dan bagaimana upaya-upaya konkrit untuk mengatasinya.<sup>150</sup>

### **c.2. Periode Sidang Umum MPR 12 Maret 1998 – 12 Mei 1998.**

Setelah sempat reda selama hampir satu minggu, mahasiswa kembali melakukan demonstrasi. Isu-isu yang dimunculkan pada periode ini berkenaan dengan tidak kredibelnya kabinet Pembangunan VII karena dinilai sarat dengan nepotisme dan koncoisme. Penunjukan menteri-menteri yang dikenal sebagai orang-orang yang dekat dengan Siti Hadiyanti Rukmana (Tutut) seperti

<sup>148</sup> Rene L. Pattiradjawane, *Op.Cit.*, hal. 124.

<sup>149</sup> Selo Soemardjan (Ed.), *Op.Cit.*, hal. 143-144.

<sup>150</sup> *Ibid.*, hal. 144.

R. Hartono, Subiyakto Tjakrawerdaya, dan sebagainya menunjukkan ketidakprofesionalan kabinet ini.<sup>151</sup>

Intensitas demonstrasi pada Maret 1998 semakin meningkat. Jumlah aksi yang tercatat sedikit lebih banyak, yakni 299 aksi. Aksi semakin merata dan meluas ke lebih dari 33 kota dari 17 provinsi. Kota Yogyakarta dan Bandung mencatat rekor tertinggi di Jawa masing-masing 40 aksi, lalu diikuti Jakarta (38 aksi), Semarang (19 aksi) dan Solo (16 aksi). Di luar pulau Jawa Kota Ujung Pandang mencatat rekor tertinggi 39 aksi, lalu Banjarmasin dan Medan masing-masing 12 aksi. Demonstrasi mahasiswa tidak hanya dilakukan oleh kota-kota besar dan menengah di Jawa, tetapi juga kota-kota kecil dan menengah di luar Jawa seperti Pontianak, Kupang, Jambi, Manado, Mataram, Samarinda, Bone dan lain-lain.<sup>152</sup>

Di bulan Maret 1998 ini juga, KM UGM mencatat massa terbesar hingga 15 ribu orang pada 5 Maret dan tanggal 11 Maret 1998. Isu anti Soeharto makin meluas, baik yang secara terang-terangan menolak Soeharto maupun yang menggunakan bahasa lain seperti menuntut pergantian kepemimpinan nasional, tolak Pertanggungjawaban Presiden ataupun menuntut pemimpin baru. Kelompok yang secara eksplisit berani menyatakan tolak Soeharto antara lain Solidaritas Mahasiswa Peduli Rakyat (SMPR) Solo, Forum Indonesia Muda Bandung (FIMB), dan Keluarga Mahasiswa Pecinta Demokrasi (KMPD) Yogyakarta.<sup>153</sup>

Berbeda dengan para aktivis mahasiswa di atas, isu yang diangkat oleh para aktivis kampus seperti Keluarga Mahasiswa, Senat Mahasiswa atau Keluarga Besar Kampus lebih merupakan pernyataan keprihatinan atas krisis ekonomi dan politik. Tuntutan dan isu politiknya pun bersifat umum dan mengambang yakni “reformasi ekonomi dan politik”. Selain itu, beberapa tuntutan yang mereka ajukan antara lain menuntut pemerintahan yang bersih dan berwibawa, turunkan harga sembako, tolak kekerasan militer, audit kekayaan pejabat, KKN, kembalikan kedaulatan rakyat, dan menolak IMF.<sup>154</sup>

<sup>151</sup> *Ibid.*, hal. 145.

<sup>152</sup> Muridan S. Widjojo et al., *Op.Cit.*, hal. 166.

<sup>153</sup> Sunarsih dan Ign. Mahendra K., *Op.Cit.*, hal.106.

<sup>154</sup> *Ibid.*, hal.106.

Dalam bulan April, isu dan tuntutan mahasiswa semakin meningkat. Target politiknya juga jelas yaitu menuntut Soeharto mundur. Gerakan mahasiswa yang dikenal moderat juga mulai ikut ambil bagian dalam aksi-aksi dan menuntut Soeharto mundur. Seperti yang dilakukan oleh KAMMI DIY pada 24 April 1998 yang menuntut Soeharto mundur. Begitu juga yang dilakukan oleh ARMI Yogyakarta pada tanggal 30 April 1998.<sup>155</sup>

KAMMI, misalnya, melakukan “Rapat Akbar Mahasiswa dan Rakyat Indonesia” di lapangan Masjid Al-Azhar, Jakarta pada tanggal 10 April 1998 yang dihadiri sekitar 20 ribu massa aksi. Debut pertama ini mencengangkan publik Indonesia yang sedang meningkat tensi gelombang tuntutan reformasinya. KAMMI menuntut pemerintah bertanggung jawab atas multikrisis yang terjadi dan melakukan reformasi total dengan segera. ABRI juga diseru untuk mengambil posisi yang benar, sebagai pengawal perjuangan hati nurani rakyat.<sup>156</sup>

Periode ini juga ditandai dengan kejenuhan mahasiswa dalam melakukan aksi di dalam kampus. Keinginan mahasiswa untuk berdemonstrasi di luar kampus tentu memicu bentrokan dengan aparat keamanan. Ini terjadi di banyak kampus yang diawali di Universitas 11 Maret Solo pada tanggal 3 Maret yang mengakibatkan 25 orang mahasiswa luka parah. Salah satu demonstrasi mahasiswa terbesar pada periode ini terjadi di kampus Universitas Sumatera Utara (USU) Medan yang menyebabkan diliburkannya kampus dari kegiatan akademik sejak tanggal 29 April hingga tanggal 7 Mei 1998. Aksi ini sempat disebut sebagai aksi yang paling beringas yang melibatkan aksi saling melempar batu antara mahasiswa dan aparat keamanan dan sebagainya. Meninggalnya Moses Gatotkaca mahasiswa Universitas Sanata Darma Yogyakarta pada tanggal 8 Mei 1998 semakin meningkatkan militansi mahasiswa di berbagai perguruan tinggi khususnya di Yogyakarta dan Jawa Tengah.<sup>157</sup>

Bentrokan dengan aparat sudah menjadi makanan sehari-hari bagi aksi mahasiswa. Di Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Universitas Lampung,

<sup>155</sup> *Ibid.*, hal.106.

<sup>156</sup> Mahfudz Sidiq, *Op.Cit.*, hal.123. lihat juga Aay Muhamad Furkon, *Partai Keadilan Sejahtera; Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Penerbit Tersaju, 2004, hal. 143. Lihat juga “Aksi-aksi KAMMI ketika Lembaga Dakwah Kampus Ikut terpanggil”. Dalam *Harian Republika* 17 April 1998.

<sup>157</sup> Selo Soemardjan (Ed.), *Op.Cit.*, hal. 146-147. Lihat juga A. Ariobimo Nusantara, R. Masri Sareb Putra, dan Y.B. Sudarmanto, *Op., Cit.*, hal. 42-43.

pada tanggal 17 Maret 1998 terjadi bentrokan antara mahasiswa yang ingin melanjutkan *rally* keluar kampus dengan militer. Sementara di Yogyakarta, tanggal 2-3 April bentrokan terjadi di Boulevard UGM dan bentrokan berulang pada tanggal 13 April ketika demonstran dikejar-kejar dan ditembaki oleh militer sampai ke dalam kampus. Hampir 8 jam kampus UGM dikuasai oleh militer. Di Medan juga terjadi bentrokan serupa, dalam aksi tanggal 24 April demonstran melempari militer dengan Molotov, akibatnya kampus Universitas Sumatera Utara (USU) diliburkan beberapa hari.<sup>158</sup>

Kualitas isu dan tuntutan kian meningkat. Target politiknya kian jelas, menuntut Soeharto mundur. Berbagai macam cara mahasiswa dilakukan untuk menunjukkan penolakan pada Soeharto. Presidium Mahasiswa Unisba Bandung misalnya menuntut agar UUD 1945 pasal 7 mengenai jabatan Presiden direvisi. Di Ujung Pandang penolakan pada Soeharto ditunjukkan aktivis mahasiswa Universitas 45 dengan tuntutan agar masa jabatan Presiden dibatasi hingga dua periode. KM ITB menuntut sidang istimewa MPR guna menuntut pertanggungjawaban Presiden. Berbagai pernyataan atau tuntutan politik di atas sebenarnya bermuara pada satu tuntutan yakni agar Soeharto mengundurkan diri.<sup>159</sup>

Ada banyak alasan yang melatarbelakangi penolakan mereka. Pertama, Soeharto telah berkuasa lebih dari 30 tahun, maka inilah saat yang tepat bagi terjadinya suksesi politik di Indonesia. Isu suksesi politik ini bahkan dilontarkan para dosen UGM, terutama Dr. Amien Rais. Kedua, selama Orde Baru berkuasa, kesenjangan sosial ekonomi antara yang kaya dan yang miskin semakin lebar. Ketiga, fenomena korupsi, kolusi, nepotisme, dan monopoli belakangan ini terus meningkat. Keempat, Soeharto yang selama 1960-1970-an menjadi pahlawan dan figur yang baik untuk stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, mulai berubah menjadi beban dan faktor negatif untuk stabilitas politik dan pemulihan ekonomi.

---

<sup>158</sup> Suharsih dan Ign. Mahendra K., *Op.Cit.*, hal.106. lihat juga A. Ariobimo Nusantara, R. Masri Sareb Putra, dan Y.B. Sudarmanto, *Op., Cit.*, hal. 43, dan Max Lane, *Bangsa Yang Belum Selesai*, Jakarta: Reform Institute, 2007, hal 189-191.

<sup>159</sup> Muridan Widjojo et al., *Op.Cit.*, hal. 168.

Karena itu mahasiswa mulai mencoba melontarkan isu-isu suksesi dan reformasi di bidang ekonomi, politik, dan hukum.<sup>160</sup>

Pada tanggal 1 Mei 1998, Soeharto melalui Mendagri R. Hartono bereaksi dengan mengatakan, reformasi hendaknya harus tetap konstruktif dan tidak terjebak dalam pemikiran dan sikap yang akibatnya mengganggu stabilitas. Kalau ada keinginan reformasi di bidang politik, dipersilakan mempersiapkan diri setelah tahun 2003. “Bila reformasi sampai mengganggu stabilitas, terpaksa harus dihadapi demi kepentingan bangsa!”<sup>161</sup>

Sikap serupa diungkapkan melalui Menteri Penerangan M. Alwi Dahlan, bahwa reformasi harus melalui MPR/DPR sebagai jalur konstitusional, tapi kalau ada yang tidak mau mengerti, akan dihadapi dengan suatu tindakan. Tetapi sesudah muncul reaksi keras terhadap pernyataan ini, Soeharto meralat ucapannya dengan mengatakan, tidak benar jika ia disebut tidak menginginkan reformasi sampai tahun 2003.<sup>162</sup>

Soeharto bertolak ke Kairo, Mesir, untuk menghadiri Konferensi Tingkat tinggi G-15 kedelapan, 9 Mei 1998. Ketika Soeharto di luar Indonesia, terjadi insiden penembakan yang menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei. Pada peristiwa di Universitas Trisakti, tanggal 12 Mei itu, telah tewas: Hendriawan Sie (mahasiswa FE angkatan 1996), Hafidhin Royan (mahasiswa FT Sipil & Perencanaan, angkatan 1995), Elang Mulia Lesmana (mahasiswa FT Sipil & Perencanaan, angkatan 1996), dan Hery Hartanto (mahasiswa Fakultas Teknologi industri, angkatan 1995).<sup>163</sup>

Tragedi Trisakti itu disusul dengan terjadinya kerusuhan massa di Jakarta pada tanggal 13-14 Mei 1998. Karena situasi gawat, Soeharto mempersingkat kunjungannya di Mesir dan kembali ke Jakarta pada tanggal 15 Mei 1998. Pada tanggal 16 Mei, Soeharto menerima para dosen UI, yang dipimpin Rektor UI Asman Boedisantoso Ranakusuma, yang memberi masukan tentang konsep reformasi. Pada kesempatan itu, para dosen menyampaikan aspirasi rakyat,

---

<sup>160</sup> Ikrar Nusa Bhakti, *Kecenderungan Gerakan Mahasiswa 1998*, dalam Geoff Forrester dan R. J. May (Ed.), *Jatuhnya Soeharto*, Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen, 1998, hal. 145-146.

<sup>161</sup> Diro Aritonang, *Op., Cit.*, hal 63.

<sup>162</sup> *Ibid.*, hal. 65.

<sup>163</sup> *Ibid.*, hal. 69.

yang meminta Soeharto mundur. Presiden menjawab, semua aspirasi itu disalurkan ke DPR.<sup>164</sup>

Sesudah bertemu dengan delegasi UI, Soeharto bertemu dengan para pimpinan DPR, yakni Ketua DPR/MPR H. Harmoko, Wakil Ketua Syarwan Hamid, dr. Abdul Gafur, Ismail Hasan Metareum, Fatimah Achmad, dan Sekjen DPR Afif Ma'roef. Dalam pertemuan itu, Ketua DPR menyampaikan dokumen dari DPR yang menyangkut agenda reformasi DPR dan aspirasi masyarakat yang disampaikan ke DPR oleh berbagai kekuatan sosial-kemasyarakatan, mahasiswa, cendekiawan, LSM dan sebagainya. Secara rinci Ketua DPR mengungkapkan desakan rakyat untuk menggelar Sidang Istimewa MPR. Kabinet Pembangunan VII segera di-*reshuffle* dan Presiden agar mengundurkan diri.<sup>165</sup>

Menanggapi hal itu, dengan alasan untuk melindungi rakyat, harta rakyat, aset nasional, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, Pancasila dan UUD '45, Soeharto menjawab, ia akan melakukan tiga hal. Pertama, untuk mengamankan semua itu ia akan mengambil tindakan tegas dengan menggunakan Tap V/MPR/1998, yang memberi wewenang sangat luas kepada Presiden untuk mengambil tindakan apapun untuk keselamatan negara. Kedua, reformasi jalan terus, DPR diharapkan menggunakan usul inisiatif dan pemerintah mendukung. Ketiga, kabinet akan di-*reshuffle*.<sup>166</sup>

Ismail Hasan Metareum mempersoalkan dampak yang akan terjadi, khususnya akibat penerapan Tap V/MPR/1998, bilamana dalam pelaksanaan operasionalnya dibentuk badan semacam Kopkamtib, yang di mata masyarakat merupakan lembaga ekstra-konstitusional yang di masa lalu sangat menyeramkan. Selain itu, bagaimana pula reaksi luar negeri. Presiden menjawab, soal nama akan dipertimbangkan agar tak ada kesan Kopkamtib gaya baru, sedangkan reaksi luar negeri tak perlu dihiraukan karena ini semata-mata urusan dalam negeri. Sikap Presiden terhadap tuntutan rakyat dengan demikian sangat jelas.<sup>167</sup>

Pada Senin, tanggal 18 Mei para pimpinan DPR/MPR bertemu. Saat itu gedung MPR/DPR sudah diduduki ribuan mahasiswa, dan DPR dalam posisi

<sup>164</sup> *Ibid.*, hal. 71.

<sup>165</sup> Abdul Gafur, *Hari-Hari Terakhir Seorang Presiden*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000, hal.77-90

<sup>166</sup> *Ibid.*

<sup>167</sup> *Ibid.*



terjepit antara tuntutan rakyat dan mahasiswa serta sikap keras Presiden. Dalam pertemuan itu, para pimpinan DPR menyimpulkan DPR harus bertindak, dengan membuat pernyataan yang berpihak kepada aspirasi dan tuntutan rakyat, yang dipelopori mahasiswa. Yakni, agar Soeharto mundur. Sebelum menyusun pernyataan pers, pimpinan Dewan mengundang para pimpinan Fraksi (Fraksi ABRI, Karya Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan Persatuan Pembangunan). Mereka satu-persatu diberitahu tentang hasil pertemuan dengan Presiden pada hari Sabtu (tanggal 16 Mei), dan tentang kesepakatan pimpinan dewan untuk membuat pernyataan pers.<sup>168</sup>

Berdasarkan hasil pertemuan itu, Ketua DPR/MPR H. Harmoko pada pukul 16.00 WIB, tanggal 18 Mei, membuat manuver politik mengejutkan. Dalam jumpa pers, Harmoko mengatakan, Pimpinan Dewan, baik Ketua maupun Wakil Ketua, mengharapkan—demi persatuan dan kesatuan bangsa—Presiden secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri. Namun malam harinya, Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto menyanggah, dengan mengatakan pernyataan Ketua MPR/DPR itu adalah sikap individual yang tidak memiliki ketetapan hukum, meskipun disampaikan secara kolektif. Pendapat DPR harus diambil seluruh anggota melalui sidang paripurna DPR.<sup>169</sup>

Di tengah desakan mundur yang gencar, Soeharto mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang disiarkan oleh televisi pada tanggal 19 Mei 1998. Tokoh-tokoh masyarakat yang sengaja diundang ke Istana Merdeka itu adalah: DR. Nurcholish Madjid (cendekiawan), Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra (pakar Hukum Tata Negara), Prof. KH Ali Yafie dan Drs. Amidhan (MUI), KH Abdurrahman Wahid, dr. Fahmi Saifuddin, KH Ma'ruf Amin, dan KH Achmad Bagdja (NU), Emha Ainun Nadjib (Budayawan), KH Cholil Baidlowi (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia), Prof. Malik Fadjar, M.Sc., Sutrisno Muhdam, dan Soewarsono (Muhammadiyah). Pada kesempatan itu, Soeharto mengatakan, tidak menjadi masalah jika ia harus mundur. Pahalanya, apakah dengan kemundurannya itu akan bisa mengatasi permasalahan. Soeharto

---

<sup>168</sup> *Ibid.*

<sup>169</sup> *Ibid.*

mengatakan, ia tak mau dicalonkan kembali pada Pemilu mendatang dan akan membentuk Komite Reformasi secepatnya.<sup>170</sup>

Berdasarkan kesepakatan seluruh Fraksi, DPR-RI pada hari yang sama menyatakan, dapat memahami pengunduran diri Presiden jika dilaksanakan secara konstitusional. Hari itu, makin banyak mahasiswa yang menduduki Gedung DPR/MPR Senayan.<sup>171</sup> Menjelang akhir periode ini yaitu mendekati insiden Trisakti 12 Mei 1998 mahasiswa melontarkan isu lebih jauh lagi yaitu mengenai pembubaran Kabinet karena dianggap tidak dapat menyelesaikan Krisis Ekonomi serta menuntut dilakukannya Sidang Istimewa MPR. Hal ini dikarenakan pemerintah kelihatannya belum serius untuk menangani krisis yang berkepanjangan ini.<sup>172</sup>

Pada bulan Mei, aksi-aksi mahasiswa semakin bertambah banyak, kampus-kampus yang selama ini apolitis ikut terlibat dalam aksi-aksi. Menginjak bulan Mei 1998 terhitung dari tanggal 1 Mei hingga tanggal 20 Mei tercatat lebih dari 445 aksi demonstrasi yang merata di seluruh Indonesia. Angka ini masih terbatas pada demonstrasi yang termuat di media massa cetak, tidak termasuk aksi-aksi demonstrasi di kota-kota kecil. Isu politik semakin beragam mulai dari turunkan harga sembako, turunkan tarif listrik dan BBM, hapuskan KKN, penghapusan Dwi Fungsi ABRI, paket 5 UU politik, hingga turunkan Soeharto.<sup>173</sup>

### c.3. Periode 12-21 Mei 1998

Peristiwa Insiden Trisakti tanggal 12 Mei 1998 di mana aparat menembak mati 4 mahasiswa yang sedang berada di halaman kampus, menandai *periode ketiga* dari gerakan mahasiswa (tanggal 13 Mei-21 Mei 1998). Peristiwa ini membangkitkan kesadaran dari semua tipe mahasiswa. Peristiwa ini diyakini sebagai katalisator gerakan mahasiswa. Isu penting mengkristal ke satu arah yakni pada figur Presiden Soeharto. Tema utama adalah tuntutan agar Soeharto turun dari jabatan Presiden disertai meminta pertanggungjawabannya mengenai bencana yang menimpa bangsa Indonesia dalam Sidang Umum Istimewa MPR, dan

<sup>170</sup> Diro Aritonang, *Op., Cit.*, hal. 120

<sup>171</sup> *Ibid.*

<sup>172</sup> Selo Soemardjan (Ed.), *Op.Cit.*, hal. 148.

<sup>173</sup> Muridan Widjojo et al., *Op.Cit.*, hal. 168

pelaksanaan pemilu untuk memilih anggota MPR, kemudian meminta MPR untuk membentuk pemerintahan transisi.<sup>174</sup>

Suasana kota Jakarta kemudian pada 20 Mei 1998 sangat mencekam. Hampir seluruh kegiatan kantor, sekolah, pertokoan berhenti. Soeharto sendiri terpukul, ketika 14 menteri di bawah koordinasi Menko Ekuin Kabinet Pembangunan VII, dalam pertemuan di kantor Menko Ekuin Ginanjar Kartasasmita memutuskan, untuk tidak duduk lagi dalam kabinet yang direncanakan Soeharto dari hasil pertemuan dengan para tokoh masyarakat, yang akan dinamai Kabinet Reformasi.<sup>175</sup>

Empat belas menteri yang tidak mau lagi bergabung dalam kabinet adalah: Akbar Tandjung (Menperkim), Kuntoro Mangkusubroto (Mentamben), A.M. Hendropriyono (Mentrans PPH), Sanyoto Sastrowardoyo (Meninves/Kepala BKPM), Rachmadi Bambang Sumadhijo (Menteri PU), Rahardi Ramelan (Menristek/Kepala BPPT), Sumahadi (Menhut/Perkebunan), Subiakto Tjakrawerdaya (Menkop/PPK), Theo L. Sambuaga (Menaker), Justika S. Baharsjah (Mentan), Giri Suseno Hadihardjono (Menhub), Haryanto Dhanutirto (Menpangan), dan Tanri Abeng (Meneg Pendayagunaan BUMN). Dua menteri di bawah Menko Ekuin yang tidak hadir adalah Bob Hasan (Menperindag) dan Fuad Bawazier (Menkeu). Namun, Bob Hasan bersedia menandatangani surat bersama itu, kecuali Fuad Bawazier. Surat kesepakatan ketidaksediaan duduk dalam kabinet baru itu rencananya akan disampaikan kepada Soeharto.<sup>176</sup>

Dalam surat pernyataan kepada Soeharto yang ditandatangani 14 Menteri tertanggal 20 Mei 1998 itu dinyatakan alasannya, yaitu situasi ekonomi sudah memburuk dari jam ke jam, dari hari ke hari. Diperkirakan, situasi ekonomi tak akan sanggup bertahan dalam seminggu jika tidak segera diambil langkah politik yang cepat dan tepat, sesuai dengan aspirasi yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Khususnya mengenai reformasi di segala bidang, seperti antara lain yang direkomendasikan oleh DPR-RI dengan pimpinan Fraksi-Fraksi

<sup>174</sup> Selo Soemardjan (Ed.), *Op. Cit.*, hal. 148-149.

<sup>175</sup> Lihat Muhammad Hisyam (peny.), *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003, hal. 81-83.

<sup>176</sup> Lihat Lampiran 4: *Surat Pengunduran Diri Massal*.

pada Selasa, tanggal 19 Mei 1998. Ke-14 Menteri ini sependapat, pembentukan kabinet baru tidak akan menyelesaikan masalah.<sup>177</sup>

Soeharto akhirnya berhenti dari jabatan Presiden pada tanggal 21 Mei 1998 dan Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden baru di Istana Merdeka. Kabinet Reformasi Pembangunan dibentuk B.J. Habibie diumumkan pada tanggal 22 Mei 1998. Desakan mahasiswa yang begitu bertubi-tubi inilah yang mengakibatkan Soeharto ditinggalkan oleh pendukungnya sehingga harus mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998.<sup>178</sup>

#### **d. Elemen-Elemen Gerakan Mahasiswa 1998**

Menurut Heru Cokro, gerakan mahasiswa yang menjatuhkan Soeharto terbagi menjadi dua aliran besar, yaitu lembaga formal kemahasiswaan yang dalam hal ini direpresentasikan oleh SM/BPM UI dan entitas non-formal kemahasiswaan, yang direpresentasikan oleh KBUI (Keluarga Besar Universitas Indonesia). KBUI sendiri merupakan entitas baru, yang katanya dibentuk karena kekecewaan terhadap sepak terjang SM/BPM UI yang dianggap lamban dalam merespons momentum reformasi. Konsekuensi dari fragmentasi di atas adalah terjadinya persaingan yang sangat kentara di antara keduanya. Dalam proses demonstrasi di UI, makin lama terjadi kecurigaan akut antarmasing-masing pihak.<sup>179</sup>

Sebagai contoh, pada Selasa, tanggal 19 Mei 1998 dalam rapat koordinasi di sore hari, mendadak terjadi rapat lengkap yang dihadiri oleh koordinator massa (FKSMJ dan Non-FKSMJ) serta para ketua senat dari jaringan FKSMJ. Terjadi tarik-menarik di bawah siapakah yang mengontrol koordinasi aksi ini. Kembali terjadi penolakan dari koordinator massa Non-FKSMJ untuk berkoordinasi di bawah koordinasi FKSMJ.<sup>180</sup> Di FKSMJ ada beberapa tokoh yang dianggap media massa sebagai representasi suara dari tuntutan FKSMJ. Tokoh tersebut adalah Sarbini Mahasiswa UNTAG Jakarta dan Irwan Mahasiswa Universitas Moestopo, Jakarta.

Akan tetapi, di luar persaingan SMUI versus KBUI, sebenarnya terdapat

<sup>177</sup> *Ibid.*

<sup>178</sup> Selo Soemardjan (Ed.), *Op.Cit.*, hal. 149.

<sup>179</sup> Heru Cokro, *Op.Cit.*, hal.117.

<sup>180</sup> Heru Cokro, *Op.Cit.*, hal.109.

pertemanan yang cukup baik. Hanya saja, begitu terlibat dalam konteks kemahasiswaan, keduanya kembali pada ego kelompok masing-masing.<sup>181</sup> Dalam analisa yang lain, menurut Suharsih dan Ign. Mahendra K., gerakan mahasiswa dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) tipe, yakni radikal-militan; moderat-konservatif, dan moderat-reaktif-religius. (Lihat Tabel 2.2).

Pengkategorian gerakan mahasiswa menjatuhkan Soeharto bulan Mei 1998 juga dibuat oleh Muridan S. Widjojo. Menurut Muridan S. Widjojo, gerakan mahasiswa tahun 1998 dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu : "gerakan moral" dan "gerakan politik". Pembagian menjadi dua kelompok ini didasarkan pada wacana yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok dalam gerakan mahasiswa itu sendiri. Gerakan moral mengacu pada wacana yang dikembangkan oleh gerakan moral yang mengkritisi kebijakan rezim Orde Baru. Muridan S. Widjojo menyebut kelompok ini sebagai Gerakan Kritik Orde baru (GKOB). Sedangkan gerakan politik mengacu pada wacana untuk merobohkan rezim Orde Baru, dan menyebut kelompok ini sebagai Gerakan Anti Orde Baru (GAOB).<sup>182</sup>

"Gerakan moral" mendasarkan diri pada pandangan bahwa perubahan politik dapat dilakukan dengan cara "menghimbau" atau "mengingatn" kepada elit politik. Berbeda dengan "gerakan politik", gerakan moral ini tidak secara tegas ingin mengganti kekuasaan politik Orde Baru Soeharto saat itu. Paham ini menekankan "suara" atau "gagasan" sebagai inti gerakan. Ini berarti bahwa kapasitas operasi yang diharapkan dari gerakan moral mahasiswa adalah sebatas "menghimbau" dan atau "mengingatn". Dari sini juga dapat dilihat bahwa penganut paham ini percaya bahwa suatu rezim politik bisa diubah dengan cara "dihimbau" atau "diingatn"<sup>183</sup>

<sup>181</sup> Heru Cokro, *Op.Cit.*, hal.117-118.

<sup>182</sup> Muridan S Widjojo et al., *Op.Cit.*, hal. 234. Penulis untuk selanjutnya lebih suka menggunakan istilah sendiri yang mirip dengan istilah Muridan S Widjojo, yaitu Gerakan Peningat Orde Baru (GPOB) dapat disamakan dengan GKOB dan Gerakan Kontra Orde Baru (GKOB) dapat disamakan dengan GAOB.

<sup>183</sup> *Ibid.*, hal. 240.

**Tabel 2.2:**  
**Beberapa Elemen Gerakan Mahasiswa 1998**

No	Spektrum/Haluan	Organisasi	Isu/Wacana	Strategi/Sikap
1	Radikal-Militan	FORKOT, KPRP, PRD	1. Tolak Soeharto 2. Turunkan Soeharto 3. Cabut Dwi Fungsi ABRI, 4. Cabut UU Politik, 5. Bubarkan MPR/DPR, 6. Reformasi Total	Penyebaran pamflet, membangun jaringan yang luas, aksi jalanan, tidak mau dialog/kompromi
2	Moderat-Konservatif	FKMSJ	1. Turunkan harga 2. Tolak kekerasan 3. Reformasi damai untuk rakyat 4. Hapus KKN	1. Hati-hati, 2. Lamban 3. Bersedia dialog (kecuali UI dan UGM) 4. Aksi damai 5. Aksi moral yang murni
3	Moderat-reaktif-religius	1. LMMY 2. KAMMI 3. HMI	1. Turunkan harga 2. Tolak kekerasan 3. Reformasi damai 4. Reformasi untuk rakyat 5. Hapuskan KKN	1. Hati-hati 2. Lamban 3. Bersedia dialog 4. Reaktif 5. Aksi damai di kampus dan masjid 6. Aksi moral religius 7. Tidak turun jalan 8. Menghindari provokasi dan kerusuhan

**Sumber:** Suharsih dan Ign Mahendra K, *Bergerak Bersama Rakyat: Sejarah Gerakan Mahasiswa dan Perubahan Sosial di Indonesia*, Yogyakarta: Resist Book, 2007, hal.103.

Sedangkan gerakan politik secara tegas ingin mengganti kekuasaan rezim Orde Baru Soeharto. Kelompok ini menolak semua kerangka asumsi yang dibangun Orde Baru. Sebelum tahun 1997, pemerintah rezim Orde Baru telah melarang mahasiswa terjun ke gerakan politik karena hal tersebut bukan karakter mahasiswa. Menurut pemerintah Orde Baru, mahasiswa harus belajar dan menunjukkan prestasi di kampusnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa gerakan politik adalah hal yang tabu bagi mahasiswa saat itu. Akan tetapi tidak bagi

**Universitas Indonesia**

kelompok GKOB. Mereka justru ingin menggunakan gerakan politik sebagai senjata untuk melawan pemerintah Orde Baru. Kelompok ini menyatakan bahwa mahasiswa tidak perlu menggunakan pemahaman yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru, karena hal tersebut dapat membatasi peran gerakan mahasiswa itu sendiri.<sup>184</sup>

Dengan menganggap gerakan mahasiswa sebagai gerakan politik, maka ruang pergerakannya menjadi luas, sehingga dengan demikian dapat berjuang bersama-sama rakyat. Konsekuensi bagi suatu gerakan politik, yaitu menyatunya antara berbagai kekuatan, termasuk dengan rakyat. Kelompok ini secara tegas menginginkan adanya hubungan dengan massa pengikut di luar kampus. Aktivis Universitas Lampung, Widjojo, menegaskan bahwa gerakannya adalah gerakan politik dan bukan gerakan moral dan langkah yang ditempuhnya berupa aksi atau pergerakan massa.<sup>185</sup>

Gagasan untuk menggabungkan kekuatan gerakan mahasiswa dengan massa di luar kampus ini telah menjadi perdebatan yang sengit diantara kelompok gerakan mahasiswa sendiri. Kelompok yang dikategorikan sebagai GPOB yang menolak unsur non mahasiswa atau rakyat biasa sebagai kekuatannya. Karena GPOB ingin bahwa gerakan mahasiswa harus steril dari infiltrasi kelompok-kelompok di luar mahasiswa. Sehingga dalam setiap aksinya, GPOB hanya melibatkan mahasiswa sebagai massanya. Hal ini berbeda dengan GKOB yang justru mengundang kelompok non mahasiswa, yang mereka sebut dengan rakyat untuk mendukung gerakannya.<sup>186</sup>

Akibat bersatunya kekuatan mahasiswa dan non mahasiswa ini, gerakan mahasiswa di beberapa kampus mengalami perbedaan yang sangat tajam, terutama pada pandangan mengenai kekuasaan dan strategi aksi. Tidak jarang antara GPOB dengan GKOB tidak dapat melakukan aksi bersama karena alasan di atas. Bahkan secara ekstrem ada kelompok yang menolak bergabung dengan kelompok gerakan mahasiswa dari universitas lain. Misalnya, pada tanggal 4 Maret 1998, GPOB dari Universitas Indonesia menolak ajakan mahasiswa IPB

---

<sup>184</sup> *Ibid.*, hal. 243.

<sup>185</sup> *Ibid.*, hal. 243.

<sup>186</sup> *Ibid.*, hal. 243.

untuk melakukan aksi bersama di jalan.<sup>187</sup> Berikut ini kelompok gerakan mahasiswa yang dikategorikan sebagai GPOB dan GKOB<sup>188</sup>:

### **d.1. GPOB (Gerakan Peningat Orde Baru)**

Kelompok aksi yang dapat dikategorikan ke dalam GPOB adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Kelompok ini merupakan produk Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (LDK) X di Universitas Muhammadiyah Malang pada 29 Maret 1998. Pertemuan yang dihadiri oleh sekitar 200 aktivis masjid kampus tersebut telah menghasilkan "Deklarasi Malang". Meskipun aktivitas gerakannya telah dimulai sebelumnya, namun peresmian sebagai organisasi massa formal, baru diputuskan pada 1-4 Oktober 1998. Menurut Fachri Hamzah, kelahiran KAMMI ini diilhami keberadaan gerakan mahasiswa tahun 1966, yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI).

Sebagian besar aktivis KAMMI ini berlatar belakang aktivis LDK yang berasal dari organisasi massa besar seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Kelompok ini membentuk basis-basis gerakan di beberapa universitas besar seperti UI, UGM, ITB, IPB, Unair, Undip dan lain-lain. Dalam setiap aksinya, baik yang ada di kota Jakarta, Yogyakarta, Malang dan Surabaya, KAMMI mampu menghadirkan massa yang cukup banyak.<sup>189</sup>

Orientasi KAMMI adalah reformasi politik dan ekonomi yang dilandasi moral dan akhlak. Namun, kelompok ini tidak secara tegas menyatakan ingin mengganti rezim kekuasaan. "Tujuan gerakan KAMMI adalah memastikan adanya perubahan yang bermanfaat bagi umat Islam dan dalam jangka panjang berupaya membentuk forum yang mapan". KAMMI menganggap bahwa dialog merupakan sarana yang efektif untuk menghindari anggapan bahwa KAMMI adalah kelompok yang fundamentalis.<sup>190</sup>

<sup>187</sup> *Ibid.*, hal. 243.

<sup>188</sup> *Ibid.*, hal. 290-376.

<sup>189</sup> Mahfudz Sidiq, *Op., Cit.*, hal. 95-98

<sup>190</sup> Muhammad Hasanuddin dan Kartika Nurrahman, *Membentuk Lapis Inteligensia Muslim-Negarawan* dalam Claudia Nef Saluz, *Dynamics of Islam Student Movements*, Yogyakarta: Nailil Printika, 2009, hal. 165-179, dan Andi Rahmat dan Mukhammad Najib, *Gerakan Perlawanan dari*



Karena kepemimpinan KAMMI yang bersifat struktural maka tokoh-tokoh yang muncul adalah orang yang menjadi Ketua Umum KAMMI Pusat, misalnya Fachri Hamzah pada gerakan reformasi menurunkan Presiden Soeharto dan Andi Rahmat pada gerakan menurunkan Presiden Abdurrahman Wahid.

## **d.2. GKOB (Gerakan Kontra Orde Baru)**

### **d.2.1. Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI)**

Gerakan mahasiswa tahun 1990 terpecah menjadi dua kelompok. Masing-masing kelompok ini mengembangkan jaringannya sendiri-sendiri. Salah satu jaringan besar itu adalah FMPY di Yogyakarta. Kelompok ini mengembangkan jaringannya dari Surabaya, Solo, Semarang, Purwokerto dan Jakarta. Di tiap-tiap kota jaringan ini memiliki organ-organ kecil sendiri, yang sangat khas lokal dan tidak tergantung dengan jaringan besarnya. Begitu juga dalam menyikapi isu-isu sosial dan politik, mereka tidak diharuskan mempunyai kesamaan sikap dan pilihan aksinya. Jaringan ini tidak lebih sebagai bentuk solidaritas dan *sharing* informasi.

Dalam hal ideologi, jaringan kelompok ini memperlakukan ideologi sebagai pengetahuan, karena belum pernah ada kesepakatan secara eksplisit oleh para aktivisnya.<sup>191</sup> Namun, jika dilihat dari wacana-wacana yang dikembangkan, kelompok ini menganut paham Sosialisme, Islam dan Nasionalisme. Kelompok ini memandang bahwa realitas politik di Indonesia bersifat unik, karena itu ideologi-ideologi besar tidak relevan bagi gerakan politik.<sup>192</sup>

Meskipun aktivitasnya sudah lama berjalan, namun sebagai organ resmi yang berskala nasional baru disepakati pada 13 Nopember 1998 di Magelang. Jauh hari sebelum menjadi FPPI, organ-organ dalam jaringan kelompok ini telah aktif melakukan aksi-aksi dalam menuntut reformasi dan melengserkan Soeharto. Beberapa organ-organ tersebut adalah: di Yogyakarta muncul Pusat Perjuangan Pemuda Yogyakarta (PPPY), Solidaritas Orang Pinggiran untuk Kemanusiaan (SOPINK), Front Aksi Mahasiswa Peduli Rakyat (FAMPERA); di Jakarta muncul Forum Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (FAMRED) dan

---

*Masjid Kampus*, Purimedia, Solo, 2001, hal. 46, lihat juga Mahfudz Sidiq, *Op., Cit.*, hal. 274, dan Aay Muhamad Furkon, *Op., Cit.*, hal. 145.

<sup>191</sup> Muridan S. Widjojo et al., *Ibid.*, hal. 303.

<sup>192</sup> *Ibid.*, hal. 303.

Gerakan Mahasiswa Pancasila untuk Reformasi (GEMPUR); di Purwokerto muncul Aliansi Kebebasan Rakyat Berpendapat (AKRAB) yang kemudian melahirkan Front Aksi Mahasiswa Peduli Rakyat (FAMPR), Komite Mahasiswa untuk Demokrasi Indonesia (Komarudin); di Salatiga muncul Solidaritas Mahasiswa STAIN Salatiga (SEMESTA), Serikat Mahasiswa Independen (SMI); di Semarang muncul Forum Mahasiswa Sadar Lingkungan (FORMASAL); di Surabaya muncul Forum Komunikasi Mahasiswa Surabaya (FKMS); di Malang muncul Gerakan Reformasi untuk Rakyat Malang (GERRAM); di Jombang muncul Forum Mahasiswa Jombang (FORMAJO); dan di Jember muncul Gerakan Mahasiswa Pecinta Rakyat (GEMPAR). Tokoh-tokoh yang muncul dari FPPI ini adalah Syafieq Alieha, Hengky Setiawan dari FAMRED Jakarta, Farhan dari PPPY Yogyakarta, Muhaji dari FKMS Surabaya dan Badrus Salam dari FKMM Malang.

#### **d.2.2. Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND)**

LMND merupakan organ nasional yang merupakan metamorfosis dari PRD, yang memiliki jaringan di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Solo, Purwokerto.<sup>193</sup> Meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, kelompok ini memilih ideologi Sosialis Demokratik Kerakyatan.<sup>194</sup> Kelompok ini memiliki organisasi yang cenderung senafas dengan format yang "sentralisme demokratik". Berbeda dengan FPPI, organ-organ yang tergabung dalam kelompok ini memiliki pilihan bahasa yang sama serta isu-isu besar yang sama. Secara organisasi, kelompok ini lebih rapi dibanding dengan FPPI.<sup>195</sup> Dalam mengantisipasi "incaran" pihak keamanan, kelompok ini menggunakan strategi memilih nama organ "sekali pakai", yaitu menggunakan nama kelompok tertentu hanya pada saat aksi isu tertentu pula dan setelah itu, organ tersebut tidak terdengar lagi. Strategi ini terutama dijalankan setelah peristiwa 27 Juli 1996 hingga akhir tahun 1997.

Adapun organ-organ yang tergabung dalam kelompok ini adalah: di Yogyakarta muncul Komite Nasional Penegak Demokrasi (KNPD), Komite Perjuangan Rakyat Untuk Perubahan (KPRP); di Solo muncul Komite Mahasiswa

<sup>193</sup> Tentang LMND lihat AE. Priyono, Stanley Adi Prasetyo, Olle Tornquist (ed.), *Gerakan Demokrasi di Indonesia Pasca Soeharto*, Jakarta: Demos-ISAI, 2003.

<sup>194</sup> Muridan S. Widjojo, *Op.Cit.*, hal. 326.

<sup>195</sup> *Ibid.*, hal. 327.

Untuk Keadilan dan Demokrasi (KMKD), Dewan Rakyat dan Mahasiswa Surakarta (DRMS), Dewan Ampera Sukoharjo, Dewan Reformasi Rakyat Sragen (DRRS), Dewan Reformasi Rakyat Boyolali (DRRB); di Lampung muncul Persatuan Mahasiswa Pemuda Lampung (PMPL) yang kemudian membentuk Komite Peduli Rakyat (KPR), Komite Mahasiswa Pemuda Rakyat Pelajar Lampung (KMPRPL), Aliansi Demokrasi Indonesia (ALDI); di Jakarta muncul Keluarga Besar UI (KBUI), Komite Buruh untuk Aksi Reformasi (KOBAR), Komite Mahasiswa dan Rakyat untuk Demokrasi (KOMRAD); di Bandung muncul Gerakan Mahasiswa Indonesia untuk Perubahan (GMIP); di Semarang muncul Forum Pembebasan, Komite Aksi Rakyat Semarang (KERAS); dan di Surabaya muncul Aliansi Bersama Rakyat Indonesia (ABRI). Dari LMND inilah muncul beberapa orang yang dianggap sebagai perwakilan dari aspirasi dan suara LMND, misalnya Reinhard Sirait, mahasiswa UI yang juga merangkap sebagai Ketua LMND.

#### **d.2.3. Forum Komunitas Mahasiswa Se-Jabotabek (Forum Kota)**

Dalam setiap aksinya, Forum Kota atau FORKOT yang didirikan pada tanggal 7 Maret 1998 mampu menarik massa cukup besar. Kelompok ini dibangun disimpul-simpul kampus yang sebelumnya telah memiliki tradisi perlawanan, seperti ISTN, APP, UKI dan IKIP Jakarta. FORKOT memandang bahwa gerakan mahasiswa yang dibangunnya sebagai kelompok penekan dalam proses menuju reformasi total. FORKOT sangat populer dan mampu menarik perhatian mahasiswa non aktivis sehingga pada setiap aksinya selalu dihadiri ribuan massa.<sup>196</sup>

Ideologi yang dibangun oleh kelompok ini belum begitu jelas, kecuali tuntutan untuk membentuk Komite Rakyat Indonesia (KRI) sebagai alternatif pemerintahan transisi pasca Soeharto. Konsep ini berasal dari Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang dipersiapkan menjelang kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Kelompok ini pernah membangun jaringan di beberapa kota melalui pertemuan mahasiswa se Jawa dan Bali. Namun, hingga sekarang tidak ada tindak lanjutnya.

---

<sup>196</sup> *Ibid.*, hal. 342.

Dalam perjalanannya meskipun organ ini mengaku cair dalam kepemimpinan tapi dalam beberapa hal ada muncul beberapa orang yang dianggap sebagai tokoh atau perwakilan suara dari organ ini. Seperti Eli Salomo mahasiswa ISTN Jakarta, Adian Napitupulu Mahasiswa UKI Jakarta dan Lutfie Iskandar Mahasiswa ABA-ABI Jakarta

#### **d.2.4. Front Nasional dan Pusat Informasi dan Jaringan Aksi untuk Reformasi (PIJAR)**

Selain FORKOT, di Jakarta terdapat dua kelompok gerakan mahasiswa yang cukup signifikan dalam melakukan aksi-aksi demonstrasi menuntut reformasi, yaitu Front Nasional dan PIJAR. Kedua kelompok ini berpusat di Universitas Nasional Jakarta. Sama seperti mereka menuntut penyelesaian krisis ekonomi dan melengserkan Soeharto sebagai Presiden. Tokoh yang muncul dari Pijar ini adalah Yeni Rosadamayanti yang berasal dari kampus Universitas Nasional Jakarta

#### **d.2.5. HMI Majelis Penyelamat Organisasi (MPO)**

Agak sulit memposisikan kelompok HMI MPO dalam dikotomi GKOB dengan GAOB. Tanpa alasan yang cukup jelas, Muridan S Widjojo mengkategorikan HMI MPO sebagai GKOB. Kemungkinan, alasannya karena HMI MPO dianggap tidak memiliki gen organisasi yang sama dengan HMI, yang terbukti beberapa mantan aktivisnya menjadi Pembantu Presiden Soeharto. Namun, sesungguhnya terdapat perbedaan mendasar antara HMI DIPO dengan HMI MPO, yaitu penolakannya terhadap kebijakan "asas tunggal Pancasila". Dari penolakan ini jelas bahwa HMI MPO sejak awal telah berseberangan dengan rezim Orde Baru Soeharto. Bahkan, antara tahun 1985 hingga pertengahan tahun 1998, HMI MPO ini dianggap sebagai organisasi yang ilegal oleh pemerintah Orde Baru.<sup>197</sup>

HMI MPO membentuk tujuh komite aksi yaitu Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Jakarta (FKMIJ), Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Semarang (FKMIS), Liga Mahasiswa Muslim Yogyakarta (LMMY), Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Ujung Pandang (FKMIU), Forum Komunikasi

<sup>197</sup> Suryo Albar dan Randi Kurniawan, *Dialektika HMI MPO sebagai Gerakan Kritis di UGM*, dalam Claudia Nef Saluz, *Op., Cit.*, hal. 3-48, lihat juga Muridan Widjojo et al., *Ibid.*, hal. 369.

Mahasiswa Islam Purwokerto (FKMIP), Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Kendari (FKMIK) dan Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Palu (FKMIP). Komite-komite aksi ini akan mempertanggung-jawabkan kegiatannya kepada Dewan Pimpinan Cabang HMI MPO kota setempat. Di Jakarta kelompok ini memiliki basis di Universitas Jayabaya, ABA-ABI, IAIN Ciputat, Universitas 45 Bekasi, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di Yogyakarta, kelompok ini berbasis di Jamaah Shalahuddin UGM dan di beberapa universitas swasta di Yogyakarta.

Antara tahun 1990-an hingga 1997 akhir, isu-isu yang paling sering diangkat dalam setiap aksinya oleh kelompok ini adalah persoalan perilaku keagamaan. Misalnya, isu jilbab, isu lemak babi, isu haram Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) dan isu-isu politik internasional seperti isu pro-Saddam, anti-Israel, dan isu anti Amerika. Pada tahun 1993-1994, kelompok ini mulai melontarkan isu politik dan ekonomi tentang ketidak-beresan perilaku kekuasaan rezim Orde Baru dengan mengangkat isu kredit macet. Menjelang akhir tahun 1997, kelompok ini mulai mengangkat isu anti Orde Baru Soeharto. Bahkan LMMY beberapa kali melakukan aksi bersama dengan kelompok kiri radikal seperti PRD.

#### **e. Karakter Gerakan Mahasiswa 1998**

Gerakan mahasiswa 1998 memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan “angkatan-angkatan” sebelumnya. Dua karakter yang paling menonjol ialah absennya organisasi formal yang terstruktur dan bersifat hirarkis, serta tiadanya unsur kepemimpinan dalam pengertian konservatif dan tradisional.<sup>198</sup> Tentang absennya tokoh pemimpin formal juga tersedia alasan taktis seperti itu. Mayoritas mahasiswa percaya bahwa gerakan mereka adalah “gerakan moral”. Itu berarti, tidak ada target kekuasaan atau ekonomi di dalam gerakan ekonomi.

Sejarah telah menunjukkan bahwa para pemimpin resmi mahasiswa adalah kelompok yang paling memetik keuntungan dari gerakan mahasiswa yang mereka pimpin. Karena itu, tidak boleh ada pemimpin resmi. Pemecahan atas munculnya masalah kepemimpinan dilakukan dengan menjalankan kepemimpinan kolektif. Karenanya, format presidium, dan terutama “forum” paling disukai. Forum

<sup>198</sup> Hermawan Sulisty, *Ibid.*, hal.151.

memberi alternatif bagi kepemimpinan konvensional yang lebih terstruktur dan permanen. Di dalam forum, setiap orang memiliki kans untuk memimpin sebuah aksi, sekalipun pada prakteknya tetap tidak banyak aktivis yang memiliki kemampuan untuk memimpin sebuah demonstrasi, terutama yang skalanya besar.<sup>199</sup>

Dibanding gerakan mahasiswa sebelumnya yang “normal”, gerakan mahasiswa pro-reformasi dengan kepemimpinan kolektifnya membawa dua konsekuensi, kekuatan dan kelemahan, sekaligus. Gerakan menjadi lebih kuat karena pihak aparat keamanan (biasanya melalui intel-intel) sulit mendeteksi siapa yang harus “dicomot” untuk menghentikan seluruh gerakan. Bahkan di dalam setiap aksi, pihak aparat sulit melakukan perundingan dan membuat “janji” dengan pemimpin yang kebetulan saat itu ditunjuk rekan-rekannya untuk maju memimpin di depan. Kasus-kasus di lapangan menunjukkan, setiap kali aparat “menggambil” satu atau beberapa orang yang dipercaya sebagai pemimpin aksi, maka gelombang aksi justru meningkat.<sup>200</sup>

Kepemimpinan kolektif juga memberi kesempatan bagi setiap orang untuk belajar memimpin, untuk akhirnya menguasai komando lapangan yang relatif setara satu dengan yang lain. Di dalam kepemimpinan kolektif, mahasiswa menemukan inti gerakan moral mereka, yaitu egalitarianisme. Pada umumnya, semakin radikal suatu organ mahasiswa, maka semakin egaliter pengambilan keputusan dan langkah-langkah aksi yang dilakukan. Karakter inilah yang seringkali salah dimaknakan orang luar, sehingga *miss* persepsi gerakan mahasiswa radikal sebagai “komunis” mudah diluncurkan oleh kalangan rezim Orde Baru, yang terancam oleh gerakan mahasiswa.<sup>201</sup>

Namun, kepemimpinan kolektif sekaligus membawa sejumlah kelemahan. Jalur “komando” sangat sulit dibangun. Setiap kali diputuskan untuk melakukan aksi, sulit diterka berapa banyak massa mahasiswa yang bisa diajak ikut serta. Akibatnya, perencanaan seringkali tidak sesuai dengan praktek aksinya di lapangan. Selain itu, kepemimpinan kolektif kadang kala menyebabkan saling tuding dan salah menyalahkan, jika suatu aksi gagal atau tidak mencapai target.

---

<sup>199</sup> Hermawan Sulistyono, *Ibid.*, hal.152.

<sup>200</sup> *Ibid.*, hal.152.

<sup>201</sup> *Ibid.*, hal.153.

Tidak banyak anggota kepemimpinan kolektif yang mau mengakui kesalahannya. Kepemimpinan kolektif bisa juga memberikan peluang bagi tokoh-tokoh untuk memisahkan diri dan membangun organ sendiri. Pengalaman sepanjang gerakan pro-reformasi menunjukkan, sekadar egoisme pribadi bisa memecah kepemimpinan kolektif yang semula diperkirakan cukup kokoh.<sup>202</sup>

Terlepas dari karakter yang dimiliki dari gerakan mahasiswa 1998 dan keberhasilannya dalam menjatuhkan Soeharto dari kekuasaan, gerakan mahasiswa 1998 juga memiliki beberapa kelemahan dan kelebihan. Beberapa kelemahan dari gerakan mahasiswa 1998, antara lain<sup>203</sup>: (1) Merupakan gerakan yang strategis: diakui atau tidak, gerakan mahasiswa sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting dan posisinya sangat strategis; (2) Memiliki kemampuan untuk berkembang karena banyaknya waktu yang dapat dipakai untuk belajar mengenai teori perubahan, wacana, dan lain-lain; (3) Gerakan mahasiswa bagian integral dari semesta gerakan rakyat; (4) Dampak perubahan yang diberikan gerakan mahasiswa sangat besar; (5) Mahasiswa bagian dari investasi perubahan dan pembangunan ke depan; (6) Gerakan tidak dapat dimatikan oleh kekuatan kekuasaan manapun atau proses perubahan; (7) Mahasiswa mengelola gerakan sendiri; dan (8) Mampu menjadi penghubung masyarakat yang bermasalah dengan pihak yang berpengaruh.

Satu kelemahan di atas yang menarik untuk dibahas adalah tentang perpecahan di tingkat kesatuan aksi mahasiswa. Menurut Hermawan Sulisty, mahasiswa bergerak ke arah dua lingkungan yang berbeda, yaitu faksionalisme dalam orientasinya yang bersifat ke dalam (*inward-looking orientation*) dan sekaligus membangun aliansi longgar serta jaringan yang terjalin cukup rapi, yang disebut “forum”. Arah pertama dicirikan oleh kompetisi yang sangat sengit, sebagai akibat dari fragmentasi internal, sementara arah kedua dicirikan oleh meningkatnya radikalisme. Perkembangan keduanya mensyaratkan satu hal yang sama, yaitu dukungan massa mahasiswa. Semakin lama peran kuantitas menjadi semakin penting. Betapapun radikalnya sebuah aksi, jika hanya dilakukan oleh sekelompok kecil massa mahasiswa, dampak politisnya tidak akan efektif. Pada

<sup>202</sup> Hermawan Sulisty, *Ibid.*, hal.153.

<sup>203</sup> A. Prasetyantoko dan Ign. Wahyu Indriyo, *Gerakan Mahasiswa dan Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi, dan Supremasi Hukum, 2001, hal.82-83.

suatu insiden, misalnya, sekitar 40 mahasiswa Universitas Nasional (Unas) Jakarta, ditambah beberapa orang mahasiswa ISTN dan IISIP, memaksakan diri untuk bentrok—jargon umumnya, *chaos*—dengan aparat keamanan di depan kampus Unas di Pejaten. Tentu saja mereka kalah oleh pasukan keamanan yang jumlahnya sekitar tiga kali lipat.<sup>204</sup>

Di samping kelebihan, gerakan mahasiswa menjatuhkan Soeharto bulan Mei 1998 juga memiliki kelemahan, di antaranya<sup>205</sup>: (1) Ketidakmampuan mahasiswa membina hubungan yang baik dengan masyarakat: dalam hal ini seringkali mahasiswa bergerak sendiri di luar koridor rakyat kebanyakan. Jadi ada kesan bahwa mahasiswa bergerak atas nama *heroisme*, bukan atas nama kebutuhan material masyarakat banyak; (2) Ada motivasi dari sekelompok mahasiswa yang hanya sekedar mencari kesenangan atau hobby. Dari kelompok seperti inilah, gerakan mahasiswa lalu hanya bersifat sebagai aktualisasi *egoisme* dan memenuhi sifat *heroisme* yang sementara saja; (3) Pengorganisasian massa di basis gerakan yang lemah: karena hanya terfokus pada aktivisme yang berciri *heroisme*, gerakan mahasiswa secara umum lalai untuk melakukan pengorganisasian pada basis gerakan di tingkat bawah. Misalnya saja mereka tidak melakukan kaderisasi dan pengkaderan yang terus-menerus pada lapisan dalam (di antara para mahasiswa sendiri); (4) Terkadang mahasiswa memaksakan agenda atau mengangkat isu lama: pemilihan isu yang tidak strategis sebetulnya menggambarkan adanya bias kepentingan atau kurang menguasai situasi dan lapangan; (5) Adanya jarak antara mahasiswa dan rakyat: hal ini ditunjukkan dengan pemilihan isu yang tidak berbasis pada kepentingan rakyat. Selain itu, gerakan mahasiswa juga tidak memiliki akar yang kuat melalui pengorganisasian terhadap rakyat; (6) Adanya perpecahan di tingkat kesatuan aksi gerakan mahasiswa: perpecahan gerakan mahasiswa disebabkan oleh eksistensi, cara bergerak, perbedaan pandangan; (7) Tidak ada arah dan tujuan yang pasti tentang proses reformasi yang dikumandangkan oleh mahasiswa: selain karena faktor eksternal yang berada dalam situasi yang dipenuhi oleh ketidakpastian, secara internal mereka memiliki latar belakang, orientasi dan visi yang berbeda-beda;

<sup>204</sup> Hermawan Sulistyono, *Lawan!: Jejak-jejak Jalanan di Balik Kejatuhan Soeharto*, (Jakarta: Pensil-324, 2009), hal.151.

<sup>205</sup> A. Prasetyantoko dan Ign. Wahyu Indriyo, *Ibid.*, hal. 79-82.



(8) Menganggap masyarakat sebagai ‘objek’ transformasi: tidak mampu mengintegrasikan diri ke dalam masyarakat; (9) Gerakan mahasiswa bersifat reaktif keluar, temporer, dan kemahasiswaan; dan (10) Gerakan kehilangan daya reaktif.

Sebelum krisis ekonomi menerpa Indonesia pada tahun 1997, dan sebelum marak aksi-aksi protes di banyak tempat di Indonesia, para elit politik berkumpul di bawah Soeharto. Soeharto berhasil mengontrol semua unsur elit politik, sosial, budaya, ekonomi dan agama, seperti militer, birokrasi, partai politik, kelompok bisnis, aristokrat lokal dan tokoh-tokoh agama. Sedangkan kemunculan elit politik, sosial, budaya, ekonomi dan agama sebagai oposisi rezim Orde Baru yang jumlahnya sangat sedikit masih memiliki kekuatan yang tidak signifikan. Bahkan krisis ekonomi berlangsung dari bulan September hingga bulan Desember 1997, tidak satupun dari elit politik di lingkaran kekuasaan yang bersikap kritis terhadap Soeharto. Argumen rasionalnya adalah para elit politik di lingkaran Soeharto tidak memiliki keyakinan politik yang kuat akan kejatuhan Soeharto baik yang disebabkan oleh krisis ekonomi maupun disebabkan oleh krisis politik. Para elit politik di lingkaran kekuasaan Soeharto tetap memiliki keyakinan politik bahwa Orde Baru tetap bertahan sekalipun oposisi menguat dan aksi-aksi protes meningkat setelah terjadi krisis ekonomi.

Namun di luar keyakinan itu, mobilisasi politik anti Orde Baru yang terus meningkat, menyebar dan meluas membuat elit politik di lingkaran kekuasaan Soeharto terbelah menjadi: (1) elit politik pendukung Soeharto, dan (2) elit politik penentang Soeharto.<sup>206</sup> Elit politik yang mendukung Soeharto berusaha mempertahankan Soeharto hingga akhir masa jabatannya meskipun krisis ekonomi dan krisis politik tampak berhimpitan. Sementara elit politik yang menentang Soeharto telah mengubah posisi mereka dengan cara bersimpati dan mendukung aksi-aksi protes, memisahkan diri dari kekuasaan dan melawan Soeharto. Tidak diragukan lagi bahwa dukungan dan simpati itu semakin memperburuk posisi Soeharto.

Harmoko, salah satu elit politik yang berada di lingkaran kekuasaan termasuk ke dalam elit politik yang berani melawan Soeharto. Sebelum aksi-aksi

---

<sup>206</sup> Denny J.A menyebut perpecahan itu sebagai elit “loyalis Soeharto” dan elit “lawan Soeharto”. Lihat Denny J.A, *Ibid.*, hal.38.

protes meningkat, Harmoko merupakan pendukung setia Soeharto. Namun setelah aksi-aksi protes tidak terkendali, Harmoko yang sangat dekat dengan Soeharto tanpa ragu meminta Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya. Atas desakan gerakan mahasiswa dan elemen *civil society* pendukung reformasi dan pendukung demokrasi, dimana setelah itu Harmoko menemui dan meminta Soeharto di kediamannya.<sup>207</sup> Harmoko adalah simbol elit politik dari dalam lingkaran Soeharto yang bertindak sebagai pelaku perubahan.

Selain elit politik yang kontra Soeharto yang berasal dari dalam lingkaran Soeharto sendiri, terdapat pula sejumlah elit pelaku perubahan seperti elit politik, elit intelektual, kelompok-kelompok gerakan mahasiswa dan *civil society* lainnya yang berasal dari luar lingkaran Soeharto. Dari kampus muncul nama-nama intelektual yang sangat kritis terhadap rezim Orde Baru, seperti Sri Bintang Pamungkas dan Amien Rais. Sri Bintang Pamungkas mengkritik Soeharto melalui partai politik yang didirikannya sendiri, Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) menjelang kerusuhan tanggal 27 Juli 1996. Namun Sri Bintang Pamungkas berbeda dengan Amien Rais yang mendapat tempat dalam gerakan mahasiswa.<sup>208</sup>

Perlawanan Amien Rais terhadap Soeharto dan rezimnya seperti yang ditunjukkan dalam kritiknya terhadap Kabinet Pembangunan VII telah membangkitkan sikap perlawanan terhadap Soeharto. Keberaniannya menyampaikan ide perubahan kepemimpinan nasional sebelum era krisis ekonomi dan kesediaannya menjadi Calon Presiden melawan Soeharto,<sup>209</sup> serta sikapnya yang mengancam rezim Soeharto akan memimpin aksi *peoples power* jika dalam enam bulan tidak terjadi perbaikan memberi semangat gerakan mahasiswa untuk menjatuhkan Soeharto dan rezimnya.<sup>210</sup> Selain Sri Bintang Pamungkas yang pertama bersuara keras tapi dipenjara, Amien Rais juga termasuk tokoh yang sangat berani mengambil resiko politik untuk berhadapan dengan Soeharto dengan

---

<sup>207</sup> Denny J.A, *Ibid.*, hal.38-39.

<sup>208</sup> Di Era Orde Baru, Dr. Amien Rais menjadi Ketua Umum Muhammadiyah dan di era reformasi ia mendirikan Partai Amanat Nasional (PAN).

<sup>209</sup> Pertengahan Februari 1998, Amien Rais menyatakan kesediaannya menjadi kandidat Presiden. Pencalonannya sebagai kandidat presiden mendapat perhatian besar dari sejumlah media massa karena pada saat itu jabatan Presiden adalah hal yang disakralkan dan kultur serta konteks politik Orde Baru, dengan mendiskusikan suksesi kepemimpinan dianggap sebagai sebuah tindakan subversif. Lihat Denny J.A, *Ibid.*, hal.116.

<sup>210</sup> Tentang ancaman Amien Rais yang akan menggerakkan *peoples power* lihat Muridan S. Widjojo, et al., *Op.Cit.*, hal. 164.

cara bertindak sebagai penggagas sekaligus pelaku perubahan. Amien Rais sebagai simbol intelektual kampus mampu memobilisasikan dan menginspirasi aksi-aksi protes di berbagai kampus yang berpengaruh di Indonesia dengan cara memberikan pidato politik di depan mahasiswa yang siap mendukung perubahan.

Di minggu kedua Mei 1998 di Café Gallery di Jakarta Pusat, Amien Rais bersama sejumlah tokoh pendukung perubahan, seperti Rizal Ramli, Toety Heraty, Daniel Sparingga, Goenawan Mohammad dan Arifin Panigoro, Albert Hasibuan membentuk Majelis Amanat Rakyat (MAR).<sup>211</sup> MAR mengeluarkan tiga *statement* politik, yaitu: (1) meminta Presiden Soeharto untuk mundur secara hormat untuk kepentingan negara. Langkah itu penting agar keseluruhan proses reformasi dapat berjalan baik dan damai; (2) meminta aparat keamanan mencegah berbagai macam kekerasan terhadap masyarakat dan mencegah kondisi yang makin memburuk. Permintaan itu terkait tindakan represif aparat keamanan terhadap aksi-aksi protes. Sebelumnya, pada tanggal 18 April 1998 Amien Rais menegaskan bahwa perintah kepada mahasiswa untuk kembali ke kampus dan peringatan penggunaan tindakan represif untuk menghadapi protes jalanan tidak membuat mahasiswa mundur. Selo Soemardjan dan intelektual dari FISIP Universitas Indonesia justru mendorong mahasiswa untuk meneruskan aksinya untuk menyuarakan aspirasi rakyat.<sup>212</sup> (3) meminta mahasiswa, generasi muda dan masyarakat secara umum mendukung demokrasi.<sup>213</sup>

Keseriusan Amien Rais menjadi penggagas sekaligus pelaku perubahan juga ditunjukkan oleh rencananya melakukan demonstrasi besar-besaran untuk menuntut mundur Presiden Soeharto. Namun karena situasi tidak aman rencana demonstrasi yang awalnya akan dilaksanakan di Lapangan Monas dibatalkannya melalui siaran RRI dan TVRI. Juga ditunjukkan oleh acara mimbar bebas di kompleks gedung DPR/MPR yang menampilkan pembicara sejumlah tokoh pendukung reformasi total, seperti Emil Salim, Deliar Noer, Albert Hasibuan,

---

<sup>211</sup> Menurut Amien Rais, MAR adalah sebuah kekuatan gerakan moral yang akan menawarkan saran-saran dan kritik positif terhadap pemerintah yang tidak menjalankan apa yang diinginkan masyarakat Denny J.A, *Ibid.*, hal.117.

<sup>212</sup> Forrester dan May (Ed.), *Op.Cit.*, hal. 209-210.

<sup>213</sup> Denny J.A, *Ibid.*, hal.118

Erna Witoelar, Wimar Witoelar, Saparinah Sadli, dan Nursyahbani Kantjasungkana.<sup>214</sup>

Kondisi ekonomi dan politik yang terus memburuk mendorong satu persatu elit di lingkaran Soeharto mencari posisi aman tidak terkecuali elit militer yang selama rezim Orde Baru berdiri dapat dikatakan yang paling loyal terhadap Soeharto. Syarwan Hamid, misalnya, secara terang-terangan menunjukkan peran politiknya melalui *statement* politiknya yang intinya dua hal, yaitu: (1) bersedia mengambil resiko dari sikapnya yang mendukung reformasi politik; (2) bersama dengan anggota DPR lainnya, mengubah posisi politiknya dari mendukung menjadi meminta Soeharto untuk mengundurkan diri.<sup>215</sup> *Statement* Syarwan Hamid sebagai anggota DPR yang meminta Soeharto mengundurkan diri, meskipun mengaku didiskusikan dengan Ketua DPR/MPR, Harmoko, secara fundamental telah mengubah iklim politik negara saat itu.<sup>216</sup>

Keberanian Amien Rais melawan Soeharto dengan cara bersedia melakukan protes dan bersedia mencalonkan diri jadi Presiden lalu menjalar ke mana-mana. Selain hadir dalam aksi keprihatinan menuntut pemerintah mengatasi berbagai krisis yang sedang melanda Indonesia pada tanggal 25 Februari 1998, Emil Salim melalui Gema Madani juga mengajukan diri sebagai Calon Presiden kepada Fraksi Utusan Daerah di gedung DPR/MPR pada awal bulan Maret 1998.

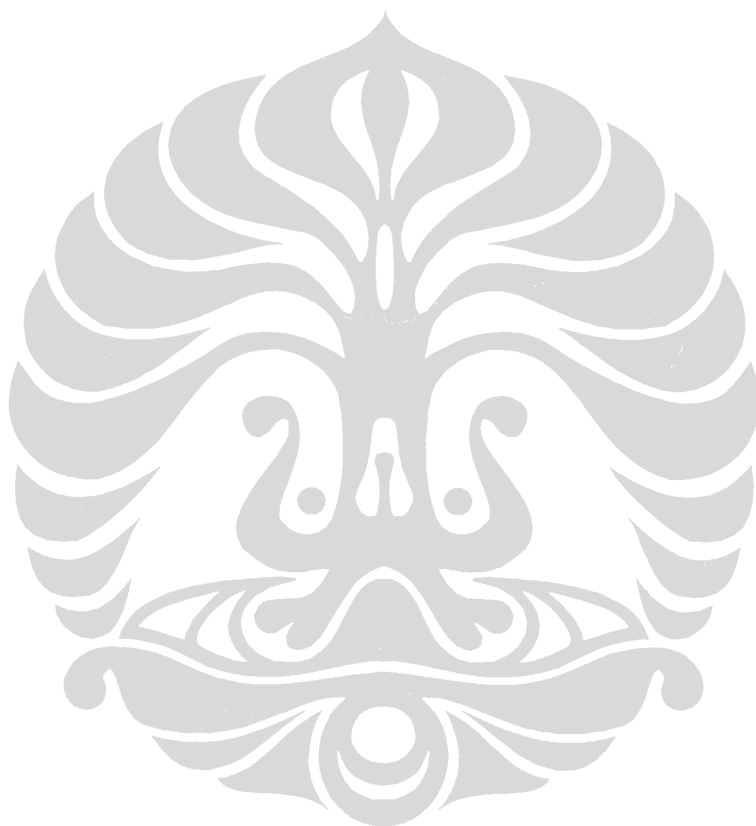
Di hadapan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) dan Ikatan Alumni UI (ILUNI UI) yang didukung oleh Mahar Mardjono mantan Rektor UI dan Selo Soemardjan Guru Besar FISIP UI, Emil Salim mengungkapkan keprihatinannya dalam acara Mimbar Bebas yang dipimpin oleh Inspektorat Jenderal Kehutanan Mayjen (Purn) Hariadi Darmawan. Penutupan Mimbar Bebas yang berlangsung pada tanggal 25 Februari 1998 ditandai oleh tindakan simbolis mahasiswa UI menutup tulisan “Kampus Perjuangan Orde Baru” yang terpampang pada Baliho besar yang dipajang di depan kampus UI “Selamat

<sup>214</sup> Acara Mimbar Bebas dilaksanakan di dalam halaman Gedung DPR/MPR yang dihadiri kurang lebih 50.000 orang belum termasuk jumlah massa yang berada di luar gedung DPR/MPR. Lihat Heru Cokro, *Op.Cit.*, hal.124.

<sup>215</sup> Denny J.A, *Op.Cit.*, hal.123.

<sup>216</sup> Meskipun visi dari ABRI menciptakan *good government*, tapi *statement* Syarwan Hamid selaku wakil dari DPR yang meminta Soeharto mundur diakuinya bukan berasal dari militer, sehingga bersedia bertanggung jawab secara pribadi. Lihat Denny J.A, *Op.Cit.*, hal.123.

Datang di Kampus Perjuangan Orde Baru”. Penutupan itu sebagai simbolis berakhirnya dukungan mahasiswa dan *civitas akademika* UI terhadap Soeharto.<sup>217</sup> Mahasiswa dan *civitas akademika* UI yang sudah tanpa rasa takut secara terus menerus menekan Soeharto melalui serangkaian aksi-aksi unjuk rasa hingga pada tanggal 13 April 1998, Rektor UI, Prof. Dr. Asman Budisantoso Ranakusuma, terpaksa harus membela mahasiswa dan *civitas akademikanya* yang mendapat sambutan represif dari pihak keamanan.<sup>218</sup>



---

<sup>217</sup> Muridan Widjojo menyebutnya sebagai simbol berkurangnya dukungan mahasiswa dan *civitas akademika* Universitas Indonesia terhadap rezim Orde Baru. Lihat Muridan S Widjojo, *Op.Cit.*, hal.160-161.

<sup>218</sup>Sebaliknya Abdurrahman Wahid pada bulan Mei 1998 justru meminta mahasiswa mengendalikan diri supaya tidak terjadi kerusuhan yang tidak terkendali. Lihat Arief Budiman dalam Arbi Sanit, *Op.Cit.*, hal. x.

### **BAB 3**

## **PRO-KONTRA GERAKAN MAHASISWA PADA MASA PRESIDEN B.J. HABIBIE**

Bab ini membahas polarisasi kelompok-kelompok gerakan mahasiswa dalam kejatuhan Presiden B.J. Habibie. Agar lebih fokus bab ini hanya membahas satu kelompok gerakan mahasiswa, yaitu: (1) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang merupakan kelompok gerakan mahasiswa yang mendukung B.J. Habibie; (2) Forum Kota (FORKOT) dan Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta (FKSMJ) yang merupakan kelompok gerakan mahasiswa yang menentang B.J. Habibie. Setelah membahas organisasi dan kepemimpinan, ideologi organisasi dan gerakan, basis massa, isu yang diusung, serta hubungan HMI, KAMMI, FORKOT dan FKSMJ dengan kelompok kepentingan dan partai politik, bab ini kemudian membahas konflik politik antara HMI bersama KAMMI melawan FORKOT bersama FKSMJ.

### **3.1. HMI dan KAMMI: Gerakan Mahasiswa Islam Ekstra Universitas Pendukung B.J. Habibie**

#### **3.1.1. HMI**

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) didirikan pada hari Rabu tanggal 14 Rabiul Awal 1366 H bertepatan tanggal 05 Februari 1947 di Sekolah Tinggi Islam (STI) Jalan Setiodiningratan Yogyakarta.<sup>1</sup> Lafran Pane,<sup>2</sup> seorang mahasiswa Tingkat 1 Sekolah Tinggi Islam (STI) yang sekarang berubah nama menjadi Universitas Islam Indonesia (UII), bersama dengan rekan-rekannya mendirikan HMI, yaitu: Karnoto Zarkasyi (Ambarawa), Dahlan Husein (Palembang),

---

<sup>1</sup> Jalan Setiodiningratan Yogyakarta sekarang berubah nama menjadi Jalan Panembahan Senopati

<sup>2</sup> Lafran Pane ketika memimpin rapat pembentukan HMI mengatakan bahwa pembentukan organisasi Mahasiswa Islam sudah siap, bagi yang mau menerima HMI itulah yang diajak untuk mendirikan HMI, dan yang menentang biarlah terus menentang, toh tanpa mereka organisasi ini bisa berdiri dan berjalan. Lafran Pane lahir di Sipirok Tapanuli Selatan, Sumatera Utara dari lingkungan nasionalis-muslim. Sebelum masuk di STI, Lafran Pane pernah mengenyam pendidikan di pesantren Ibtidaiyah, Wusta dan Sekolah Muhammadiyah. Tentang HMI lihat Agussalim Sitompul, *HMI dalam Pandangan Seorang Pendeta*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1982, hal. 32. Lihat juga Victor I. Tanja, *HMI, Sejarah dan Kedudukannya di Tengah Gerakan Muslim Pembaharu Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 1982.

Maisaroh Hilal (Singapura), Suwali, Yusdi Ghozali (PII-Semarang), Mansyur, Siti Zainah (Palembang), M. Anwar (Malang), Hasan Basri, Marwan, Zulkarnaen, Tayeb Razak, Toha Mashudi (Malang), Baidron Hadi (Yogyakarta).<sup>3</sup>

#### a. Organisasi dan Kepemimpinan

Ada dua tujuan dasar dibentuknya HMI, yaitu: (1) untuk mempertahankan dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia; (2) untuk menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam.<sup>4</sup> Sebagai upaya mencapai tujuan itu, HMI membentuk struktur organisasi terutama untuk menghadapi dan mengatasi hambatan organisasi. Organisasi HMI terdiri dari atas lima struktur, yaitu: (1) struktur kekuasaan; (2) struktur pimpinan; (3) lembaga-lembaga khusus; (4) lembaga kekaryaannya; (5) majelis pertimbangan organisasi. Struktur kekuasaan dipegang oleh Forum Kongres, Konferensi Cabang (Konfercab) serta Rapat Anggota Komisariat (RAK). Sedangkan struktur pimpinan terdiri atas Pengurus Besar (PB), Pengurus Cabang (PC), serta Pengurus Komisariat (PK).<sup>5</sup>

Selain itu, juga dibentuk Koordinator Komisariat (Korkom) untuk memperlancar dan mempermudah manajemen organisasi dan Badan Koordinasi (BADKO) sebagai pembantu Pengurus Besar dalam mengkoordinir cabang. Korkom berfungsi sebagai pembantu cabang dalam mengkoordinir Komisariat. Hingga Oktober 2003. Juga dibentuk lembaga-lembaga Khusus seperti Korps Pengader Cabang (KPC), Korps HMI-Wati (KOHATI), dan lain-lain untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang terkait dengan bidang khusus. Sedangkan lembaga-lembaga kekaryaannya, seperti Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI) dan Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam (LEMI) dibentuk untuk meningkatkan dan mengembangkan keahlian dan profesionalisme para anggota HMI.<sup>6</sup> Selain struktur organisasi, kepemimpinan di HMI juga menjadi penting untuk mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuannya itu. Mengenai gambaran kepemimpinan HMI dapat dilihat pada fase-fase perkembangan HMI.

<sup>3</sup> Agussalim Sitompul, *Op., Cit.*, hal. 43.

<sup>4</sup> Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam (1947-1975)*, Surabaya; Bina Ilmu, 1976, hal 20.

<sup>5</sup> Laras Aridhini dan Zulfarida Puspa, *HMI Bulaksumur: Menciptakan Kader Intelektual*, dalam Claudia Nef Saluz (ed), *Dynamic of Islamic Student Movement; Iklim Intelektual Islam di Kalangan Aktivis Kampus*, Yogyakarta; Resist Book, 2009, hal 36-37.

<sup>6</sup> Laras Aridhini dan Zulfarida Puspa, *HMI Bulaksumur: Menciptakan Kader Intelektual*, dalam Claudia Nef Saluz (ed), *Ibid*, hal. 40-42.

### **a.1. Periode 1946-1947**

Periode tahun 1946-1947 ini dapat disebut sebagai fase konsolidasi spiritual. Dikatakan demikian karena HMI tidaklah didirikan amat mudah. Terdapat hambatan berat yang justru muncul dari Islam sendiri. Adapun faktor yang menghambat berdirinya HMI, yaitu: (1) Gerakan Pemuda Islam (GPII); (2) Pelajar Islam Indonesia (PII); dan (3) reaksi-reaksi dari Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta (PMY). Sedangkan faktor yang mendukung berdirinya HMI yaitu posisi dan arti kota Yogyakarta sebagai: (1) Ibukota NKRI pada waktu itu dan Kota Perjuangan; (2) pusat gerakan Islam; (3) kota universitas/kota pelajar; (4) pusat kebudayaan yang terletak di Pusat Jawa (*Central of Java*); (4) kebutuhan penghayatan dan keagamaan mahasiswa; (5) adanya tuntutan perang kemerdekaan bangsa Indonesia; (6) adanya Sekolah Tinggi Islam (STI), Balai Perguruan Tinggi (BPT) Gajah Mada dan Sekolah Tinggi Teknik (STT); (7) adanya dukungan Presiden STI Prof. Abdul Kahar Muzakir; (8) ummat Islam Indonesia mayoritas.<sup>7</sup>

### **a.2. Periode 1947**

Periode tahun 1947 dapat disebut sebagai fase pengokohan HMI. Disebut demikian karena selama lebih kurang sembilan bulan; dari tanggal 5 Februari 1947 hingga tanggal 30 November 1947, reaksi-reaksi atas kelahiran HMI mulai berakhir. Selama masa itu HMI berusaha mengatasi dan menjawab berbagai hambatan, dan tantangan, ancaman dan gangguan yang dapat dikatakan datang setiap saat. Kemampuan HMI menjawab hal itu dapat dilihat dari eksistensi HMI terus berdiri tegak dan mulai terlihat kokoh.<sup>8</sup>

### **a.3. Periode 1947-1949**

Periode tahun 1947-1949 dapat disebut sebagai fase perjuangan bersenjata. Disebut demikian karena sesuai tujuan didirikannya HMI, maka konsekuensinya pada masa perang kemerdekaan adalah HMI tidak boleh tinggal diam. HMI harus turun ke medan laga untuk bertempur melawan pihak agresor. HMI mengambil bagian perjuangan dengan cara membantu pemerintah baik sebagai staf, penerangan dan penghubung maupun sebagai prajurit tempur di lapangan.

<sup>7</sup> Agussalim Sitompul, *HMI dalam Pandangan Seorang Pendeta, Op., Cit.*, hal. 42-43

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 47-48.



Hal yang sama juga dilakukan oleh HMI pada pemberontakan PKI Madiun tanggal 18 September 1948. Wakil Ketua PB HMI Ahmad Tirtosudiro (Ketua PPMI) membentuk Corps Mahasiswa untuk membantu pemerintah menumpas pemberontakan PKI di Madiun. Corps Mahasiswa yang dipimpin oleh Komandan Hartono dan Wakil Komandan Ahmad Tirtosudiro mengerahkan anggotanya ke gunung-gunung, memperkuat aparat pemerintah. Keberadaan Corps Mahasiswa perlu ditegaskan karena dari perannya itulah kemudian PKI menaruh dendam terhadap HMI di kemudian hari, seperti terbukti tahun 1964-1965 menjelang meletusnya peristiwa G30S/PKI.<sup>9</sup>

#### **a.4. Periode 1950-1963**

Periode tahun 1950-1963 dapat disebut sebagai fase pertumbuhan dan perkembangan HMI. Disebut demikian karena selama keterlibatan kader-kader HMI dalam arena pertempuran melawan agresi Belanda dapat dikatakan pembinaan organisasi HMI sangat terabaikan. Namun peristiwa penyerahan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949 membuat kader-kader HMI yang tadinya melaksanakan tugas-tugas keagamaan dan kebangsaan di medan perang kembali melanjutkan kuliahnya di kampus masing-masing. Konsolidasi internal organisasi mulai dilaksanakan pada tahun 1950 yang ditandai oleh peristiwa pemindahan PB HMI dari Yogyakarta ke Jakarta pada bulan Juli 1951.<sup>10</sup>

#### **a.5. Periode 1964-1965**

Periode tahun 1964-1965 dapat dikatakan sebagai fase yang penuh tantangan bagi kader-kader HMI. Disebut demikian karena dendam PKI kepada HMI mulai menemukan ruang setelah agitasi-agitasinya berhasil membubarkan Masyumi dan GPII.<sup>11</sup> PKI dan para simpatisannya yang menganggap HMI sebagai kekuatan ketiga ummat Islam membuatnya sangat bersemangat membubarkan HMI. Dendam PKI dan para simpatisannya tidak hanya membuat HMI dan kader-kadernya mendapat fitnah akibat hasutan dan propaganda, tapi juga menjadi

<sup>9</sup> A. Dahlan Ranuwihardjo, *Bung Karno dan HMI; Dalam Pergulatan Sejarah*, Jakarta, INTRANS, 2002, hal. 1-4.

<sup>10</sup> Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan Himnunan Mahasiswa Islam (1947-1975)*, Op., Cit., hal. 14.

<sup>11</sup> Nurcholish Madjid, *Wacana Kenegaraan HMI: Sebuah Pengantar dalam Mahasiswa dan Wacana Kenegaraan; Kumpulan Rekomendasi Kongres HMI 1971-1999*, Jakarta: FOSAL PB HMI Lintas Periode, 2002, hal. xv.

korban penculikan. Kerugian materil dan moril HMI baru berhenti setelah pemerintah menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang sejak peristiwa tanggal 30 September 1965.<sup>12</sup>

#### a.6. Peride 1966–1968

Periode tahun 1966–1968 dapat disebut sebagai fase kebangkitan HMI dan Pelopor Orde Baru. Disebut demikian karena HMI yang sangat sadar akan kegagalan Orde Lama berperan serta dalam memelopori lahirnya Orde Baru. HMI melalui Wakil Ketua PB HMI, Mari'ie Muhammad, memprakarsai terbentuknya Kesatuan Aksi Mahasiswa (KAMI) tanggal 25 Oktober 1965. Ada dua tugas pokok yang dilakukan oleh KAMI, yaitu: (1) mengamankan Pancasila; (2) memperkuat bantuan kepada ABRI dalam penumpasan Gestapu/ PKI.<sup>13</sup>

Aksi massa KAMI yang mulai membuat Orde Lama berang adalah Rapat Umum pada tanggal 3 Nopember 1965 di halaman Fakultas Kedokteran UI Salemba Jakarta. Kemudian puncaknya pada tanggal 10 Januari 1966, KAMI mengajukan Tiga Tuntutan Rakyat, Tritura, yaitu menuntut penguasa dan harga turun, serta PKI dibubarkan. Rezim anti-Orde Lama yang tidak menerima tuntutan itu akhirnya melakukan tindakan represif yang menyebabkan meninggalnya sejumlah mahasiswa, seperti Arif Rahman Hakim (UI) dan Zubaidah di Jakarta, Aris Munandar dan Margono di Yogyakarta, Hasannudin di Banjarmasin, Muhammad Syarif al-Kadri di Makasar. Namun gugurnya pahlawan-pahlawan Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) itulah yang kemudian menjadi jalan licin bagi kelahiran Orde Baru yang ditandai oleh keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar).<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Fachry Ali, *Wawasan Sejarah Dalam Lingkungan yang Berubah; Visi Masa Depan HMI-KAHMI*, Pengantar dalam Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, *HMI dan KAHMI; Menyongsong Perubahan Menghadapi Pergantian Zaman*, Jakarta, Majelis Nasional KAHMI, 1997, hal. xxx-xxxiii. Lihat juga A. Dahlan Ranuwihardjo, *Bung Karno dan HMI; Dalam Pergulatan Sejarah*, Jakarta, INTRANS, 2002.

<sup>13</sup> Yozar Anwar, *Angkatan '66: Sebuah Catatan Harian Mahasiswa*, Jakarta: Sinar Harapan, 1981, hal 300. Lihat juga Ahmadani G Martha, Christianto Wibisono, Yozar Anwar (ed), *Pemuda Indonesia dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa*, Jakarta: Kantor Menpora, 1984, hal. 298-311.

<sup>14</sup> Mengenai aksi-aksi yang dilakukan oleh KAMI, lihat Yozar Anwar, *Angkatan '66, : Sebuah Catatan Harian Mahasiswa*, Jakarta: Sinar Harapan, 1981. Lihat juga Francois Raillon, *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia: Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974*, Jakarta; LP3ES, 1985 dan Hasyrul Moechtar, *Mereka dari Bandung; Pergerakan Mahasiswa Bandung 1960-1967*, Bandung; Alumni, 1998.

### a.7. Periode 1969-1970

Periode tahun 1969-1970 dapat disebut sebagai fase pembangunan. Disebut fase pembangunan karena setelah Orde Baru dan Pancasila diterima, kader-kader HMI telah melibatkan diri dalam pembangunan sesuai Rencana Pembangunan Lima Tahun I (Repelita I) yang dimulai pada tanggal 1 April 1969. HMI dan kader-kadernya berpartisipasi dalam pembangunan dalam dua bentuk, yaitu: (1) turut serta menciptakan suasana, situasi dan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan; (2) memberikan konsep-konsep dalam berbagai aspek pemikiran; (3) pelaksana pembangunan.<sup>15</sup>

### b. Ideologi Organisasi dan Gerakan

Secara umum ada empat permasalahan yang menjadi latar belakang berdirinya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), yaitu: (1) situasi dunia internasional; (2) situasi NKRI; (3) kondisi mikrobiologis umat Islam di Indonesia; (4) kondisi perguruan tinggi dan dunia kemahasiswaan. Namun yang menjadi isu pokok saat itu adalah keterbelakangan umat Islam yang prosesnya diawali oleh kemunduran berpikir dari umat Islam. Sementara salah satu faktor kemunduran berpikir umat Islam adalah umat Islam terlena dengan kebesaran dan keagungan masa lalunya.<sup>16</sup>

Akibat dari keterbelakangan umat Islam, maka munculah gerakan untuk menentang keterbatasan seseorang melaksanakan ajaran Islam secara benar dan utuh. Gerakan inilah yang disebut sebagai gerakan pembaharuan. Tujuan dari gerakan pembaharuan adalah ingin mengembalikan ajaran Islam kepada ajaran yang totalitas, dimana disadari oleh HMI bahwa Islam bukan hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat sakral saja, melainkan juga merupakan pola kehidupan manusia secara keseluruhan. Untuk itu sasaran gerakan pembaharuan atau reformasi adalah ingin mengembalikan ajaran Islam kepada proporsi yang sebenarnya, yang berpedoman kepada Al Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Soeharto, *Peranan HMI dalam Pembangunan Bangsa dan Tantangan Perubahan Dunia*, dalam Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, HMI dan KAHMI; *Menyongsong Perubahan Menghadapi Pergantian Zaman*, *Ibid.*, hal 3-10.

<sup>16</sup> Agussalim Sitompul, *HMI dalam Pandangan Seorang Pendeta*, *Op., Cit.*, hal. 34-35.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 35-39.

Dengan timbulnya ide pembaharuan itu, maka gerakan pembaharuan di dunia Islam lainnya mulai bermunculan, seperti di Turki (1720) dan Mesir (1807). Begitu juga dengan penganjurnya, seperti Rifaah Badawi Ath Tahtawi (1801-1873), Muhammad Abduh (1849-1905), Muhammad Ibnu Abdul Wahab (Wahabisme) di Saudi Arabia (1703-1787), Sayyid Ahmad Khan di India (1817-1898), Muhammad Iqbal di Pakistan (1876-1938) dan lain-lain.<sup>18</sup>

Di Indonesia sejak Cornerlis de Houtman mendarat di Banten pada tahun 1596, muncul tiga masalah bagi umat Islam, yaitu: (1) penjajahan dengan segala implikasinya; (2) *missi zending* agama Kristiani; (3) peradaban Barat dengan ciri sekulerisme dan liberalisme. Kondisi ummat Islam sebelum berdirinya HMI dapat dikategorikan menjadi empat golongan, yaitu: (1) ummat Islam yang melaksanakan ajaran Islam yang hanya berhubungan dengan tradisi atau adat istiadat, seperti upacara perkawinan, kematian dan kelahiran; (2) ulama dan pengikut-pengikutnya mempraktekkan Islam sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW; (3) ulama dan pengikut-pengikutnya yang berpendirian bahwa hidup hanya untuk kepentingan akhirat; (4) ummat Islam yang sudah beradaptasi dengan kemajuan zaman.<sup>19</sup>

Di lain pihak khususnya di perguruan tinggi, ada dua faktor yang sangat berpengaruh terhadap dunia kemahasiswaan sebelum HMI berdiri, yaitu: (1) penerapan sistem pendidikan Barat. Sistem ini diterapkan dalam dunia pendidikan umumnya dan perguruan tinggi khususnya yang mengarah kepada sekulerisme dan pendangkalan agama; (2) meluasnya pengaruh komunis di lembaga kemahasiswaan, seperti Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta (PMY) dan Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) di Surakarta. Kolaborasi sekulerisme dan komunisme bukan hanya menyebabkan krisis keseimbangan di tubuh kemahasiswaan, tetapi juga tidak adanya keseimbangan antara akal dan kalbu, jasmani dan rohani, serta pemenuhan antara kebutuhan dunia dan akhirat.<sup>20</sup>

Pada periode tahun 1970 sampai sekarang (tahun 2010) dapat disebut sebagai fase pergolakan pemikiran dan pembaharuan pemikiran. Disebut demikian

<sup>18</sup> Agussalim Sitompul, *HMI dalam Pandangan Seorang Pendeta*, *Ibid.*, hal. 39.

<sup>19</sup> Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam (1947-1975)*, hal. 20.

<sup>20</sup> Agussalim Sitompul, *Ibid.*, hal 53. Lihat juga Harry J Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit Islam di Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*, Jakarta; Pustaka Jaya, 1980 dan Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam Indonesia (1902-1942)*, Jakarta: LP3ES, 1980.

karena setelah masalah internal organisasi relatif terselesaikan, HMI yang salah satu ciri khasnya adalah pembinaan kebebasan berpikir telah membuat HMI semakin dinamis. Kader-kader HMI yang kritis mulai memperlihatkan upaya pembaharuan pemikiran sejak tahun 1968 hingga mencapai klimaksnya pada tahun 1970. Sebagai dampak dari pembaharuan pemikiran di tubuh HMI, maka HMI kemudian terbelah ke dalam dua kutub organisasi dan pemikiran, yaitu: (1) HMI dengan pola "pemikiran baru" yang menerima Pancasila sebagai ideologi. Kubu HMI ini sangat terkenal dengan sebutan HMI Diponegoro (HMI DIPO); (2) HMI dengan pola "pemikiran lama" yang tetap mempertahankan Islam sebagai ideologi. Kubu HMI ini sangat terkenal dengan sebutan HMI Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO).

HMI MPO muncul dalam suasana Orde Baru sedang dicengkram otoriterisme. Pancasila yang dipaksakan oleh militer sebagai azas tunggal bukannya membuat suasana semakin demokratis. Justru dengan ideologi Pancasila masyarakat hidup dalam kesuburan budaya politik parokial dan subyek, serta partisipasi politik warga negara yang termobilisasikan. HMI MPO menolak suasana itu dengan menyatakan tidak menerima Pancasila sebagai azas tunggal. Dalam menentang Orde Baru, HMI MPO tidak hanya terlihat sebagai organisasi 'bawah tanah' untuk tetap mempertahankan ideologi Islam, tetapi juga menuntut Soeharto meletakkan jabatannya.

Kemunculan HMI MPO bermula dari sikap PB HMI pro-Pancasila yang terkesan meremehkan kader-kader HMI yang ingin tetap mempertahankan Islam sebagai ideologi organisasi dan ideologi gerakan.<sup>21</sup> Sikap meremehkan itu direspon oleh kader-kader HMI pro-Islam dengan demonstrasi di Kantor PB HMI Jl. Diponegoro No. 16 Jakarta. PB HMI pro-Pancasila yang tidak puas dengan demonstrasi HMI MPO itu lalu menggandeng militer, sehingga sejumlah anggota HMI MPO ditangkap dengan tuduhan subversif. Dampak dari konflik itu, di

---

<sup>21</sup> Tambahan Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) di belakang HMI baru muncul saat menjelang kongres HMI XVI di Padang Sumatera Barat pada tanggal 24-31 Meret 1986. Kader-kader HMI yang mendukung perlunya HMI diselamatkan lebih senang menyebut dirinya sebagai HMI-MPO. HMI (MPO) memiliki 38 cabang dan 3 Badan Koordinasi (Badko) yakni: Badko Indonesia Bagian Barat (Sumatra, Banten, DKI, Jabar), Badko Indonesia Bagian Tengah (Kalimantan, Jateng, DIY, Jatim, Bali) dan Badko Indonesia Bagian Timur (Sulawesi, Maluku, NTB, NTT, Papua). Uraian mengenai HMI MPO, lihat M. Rusli Karim, *HMI MPO dalam Pergolakan Politik di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1997.

dalam forum Kongres HMI XVI di Padang Sumatera Barat pada tanggal 24-31 Meret 1986 HMI terpecah dua, yaitu: (1) HMI yang menerima penerapan asas tunggal (HMI-DIPO); (2) HMI yang menolak asas tunggal (HMI-MPO) atau HMI 1947 yang tetap berasas Islam.

### **c. Isu Yang Diusung**

Terlepas dari penilaian yang terkandung di dalamnya, sikap akomodatif HMI DIPO yang menerima azas tunggal Pancasila, secara politik adalah dimaksudkan untuk tetap mempertahankan kelangsungan hidup HMI dari ancaman otoriterisme Orde Baru. Sebaliknya perjuangan HMI-MPO untuk tetap mempertahankan Islam sebagai ideologi organisasi dan ideologi gerakan merupakan bentuk konsistensi sebuah gerakan mahasiswa dalam melakukan perlawanan terhadap penindasan yang dilakukan oleh Negara melalui aparatnya. Dengan ideologi Islamnya, HMI-MPO bukan saja merupakan organisasi pertama yang berani melawan Orde Baru dengan segala resiko politiknya, tetapi juga tercatat satu-satunya organisasi yang sejak awal menyuarakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Bagi HMI MPO yang melihat tahun 90-an itu sebagai "tahun madu" antara kekuatan Islam dan kekuatan negara Orde Baru tetap tidak mampu merubah kondisi moral dan politik bangsa yang sudah terlanjur rusak. Di satu sisi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang didirikan oleh B.J. Habibie atas restu Presiden Soeharto memang membangkitkan kegairahan umat Islam untuk ber-Islam yang ditandai oleh maraknya dakwah-dakwah Islam di kantor-kantor pemerintah, dan banyak pengajian-pengajian dan Majelis Ta'lim yang dibentuk di instansi pemerintah, termasuk Masjid yang dibangun atas bantuan Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila milik Soeharto, tetapi di lain sisi hal itu tetap tak membuat Orde Baru menjadi lebih baik.

Bahkan kader-kader HMI MPO yang kritis terhadap Orde Baru justru melihat hal itu sebagai politik akomodasi penguasa terhadap Islam yang sudah sejak lama mengalami penindasan. Terbukti tokoh-tokoh Islam yang independen dan kritis tetap diburu oleh penguasa, dan harga politik bagi sebuah kebebasan tetap sangat mahal harganya. Sebagai upaya untuk tetap melakukan perlawanan, HMI-MPO kemudian membentuk kantong-kantong aksi perlawanan, seperti

**Universitas Indonesia**

Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Jakarta (FKMIJ), Liga Mahasiswa Muslim Yogyakarta (LMMY) dan SEMMIKA. Cara yang dilakukan oleh HMI-MPO itu mirip dengan strategi HMI tahun 60-an yang membentuk KAMI yang berhasil melakukan mobilisasi massa untuk fungsi "Parlemen Jalanan".<sup>22</sup>

Sebelum meletus gerakan Mei 1998, lapisan-lapisan HMI-MPO banyak memainkan peran strategisnya dalam menggalang kekuatan elemen gerakan mahasiswa. Poros Jakarta-Yogyakarta-Makassar dibentuk sebagai sentra gerakan untuk mengkomunikasikan isu-isu gerakannya ke seluruh Indonesia. Di Jakarta, FKMIJ memprakarsai terbentuknya FKSMJ, sedangkan di Yogyakarta, LMMY aktif menggalang koalisi dengan elemen gerakan lainnya. Sementara di Makassar, aktivis FKMIM pro-aktif melakukan konsolidasi gerakan dan pembentukan Persatuan Aksi Mahasiswa Makassar Indonesia (PAMMI). Ketika gerakan Mei 1998 meletus, PB HMI-MPO bersama-sama dengan FORKOT, FKSMJ dan komponen masyarakat lainnya menduduki gedung DPR/MPR hingga rezim Orde Baru jatuh. Perjuangan utama HMI MPO berhasil ketika bulan November 1998 MPR mencabut UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Azas Tunggal.

Ada tiga isu utama yang diusung oleh HMI sebelum dan pasca gerakan Mei 1998, yaitu: (1) KKN; pasca gerakan Mei 1998 terjadi transformasi dari *oligarchi corruption* menjadi *democratic corruption*;<sup>23</sup> (2) revolusi sistemik (HMI DIPO dan MPO);<sup>24</sup> (3) kerapuhan ekonomi nasional (terbukti krisis ekonomi tahun 1997) (HMI DIPO dan MPOK); (4) hutang luar (Hubert Neiss, wakil IMF-

<sup>22</sup> Suryo Albar dan Rinaldi Kurniawan, *Dialektika HMI MPO Sebagai Gerakan Kritis di UGM*, dalam Cladia Nef Saluz, *Op., Cit.*, hal. 6. Lihat juga, Muridan S Widjojo dan Moch. Nurhasim, *Organisasi Gerakan Mahasiswa 1998: Upaya Rekonstruksi*, dalam Muridan S Widjojo *et al*, *Penakluk Rezim Orde Baru: Gerakan Mahasiswa 1998*, Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 1999, hal. 368-369.

<sup>23</sup> Istilah *oligarchi corruption* digunakan untuk menunjuk korupsi yang pada masa Orde Baru hanya dilakukan oleh sekelompok elit politik. Sedangkan *democratic corruption* digunakan untuk menyebut korupsi yang sudah menyebar ke berbagai sektor, lapisan masyarakat, dan daerah secara bersama-sama dan terbuka melalui mekanisme demokrasi. Dimanipulasinya nilai-nilai dan prosedur demokrasi untuk kepentingan pribadi atau golongan telah menyebabkan terciptanya demokrasi korupsi menjadi *democratic corruption*, yaitu suatu proses pengambilan kebijakan publik yang didasarkan atas kepentingan pribadi, keluarga, partai politik, atau kelompok kepentingan.

<sup>24</sup> Terminologi revolusi sistemik digunakan oleh HMI MPO sejak tahun 1999 PB HMI MPO untuk sebuah perubahan sistem yang tidak hanya penataan ulang sistem (reformasi), tetapi juga suatu perubahan yang berlangsung secara cepat dan diikuti oleh terbentuknya pemerintahan yang populis, terciptanya kesadaran sosial pada massa rakyat, perubahan relasi kelas dalam struktur sosial. Wujud dari gerakan Revolusi Sistemik adalah kampanye perlunya Presidium Nasional untuk memimpin transisi demokrasi. PB HMI periode 2001-2003 menterjemahkan revolusi sistemik ke dalam perjuangan menolak neo-liberal dan neo-imperialisme sebagai tekanan utama.

*International Monetary Fund* memaksa Soeharto menandatangani pinjaman untuk sebuah kesepakatan baru yang tidak memberi jalan keluar) (HMI DIPO dan MPO); Oleh karena itu HMI secara tegas dan bersikap: menuntut penghentian utang luar negeri, pemutusan hubungan dengan IMF, anti-privatisasi BUMN, menuntut perlindungan bagi petani dan peningkatan subsidi untuk rakyat kecil.

Fenomena rekonsolidasi Orde Baru dan TNI ke dalam tatanan politik nasional, gagalnya cita-cita reformasi, terinstitusionalisasikannya otoritarianisme dalam Orde Reformasi, tekanan ekonomi dan politik global, tatanan politik internasional, bantuan asing dan terorisme membuat HMI bersikap hati-hati. Misalnya, sikap PB HMI MPO yang menolak Pemilu 2004 didasarkan pada fenomena masih adanya kekuatan-kekuatan lama dalam pertarungan pemilu 2004.

### **3.1.2. KAMMI**

Gagasan pembentukan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) bermula dari acara Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FS-LDK) ke-X Se-Indonesia di Universitas Muhammadiyah, Malang, Jawa Timur pada tanggal 26-29 Maret 1998. Forum yang dihadiri sekitar 63 perwakilan Perguruan Tinggi dari Jawa, Sumatera dan Kalimantan Tengah bukan hanya membicarakan persoalan aktivitas dakwah di kampus-kampus untuk mengatasi krisis moral, tetapi juga mengupas berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negara Indonesia, seperti krisis ekonomi; krisis moneter dan krisis politik. KAMMI lahir lewat sebuah deklarasi yang mereka sebut dengan Deklarasi Malang.<sup>25</sup>

#### **a. Organisasi dan Kepemimpinan**

Kehadiran KAMMI untuk terlibat dalam penyelesaian berbagai persoalan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia, seperti krisis ekonomi; krisis moneter dan krisis politik membuatnya tidak menutup pintu bagi gerakan lain yang ingin bergabung dengan KAMMI. KAMMI melakukan aksi-aksi, bentuk demonstrasi, seminar, dialog dan diskusi. Aksi-aksi KAMMI tidak hanya di Jakarta, namun juga di Kampus Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Universitas Brawijaya

<sup>25</sup> Andi Rahmat dan Muhammad Najib, *Gerakan Perlawanan dari Masjid Kampus, Op., Cit.*, hal. 161-163. Lihat juga Mahfudz Sidiq, *KAMMI dan Pergulatan Reformasi, Op., Cit.*, hal. 28.



(Unibraw) Malang dan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta dan kampus-kampus besar lainnya.

Tekad KAMMI untuk tetap memelihara dan memperluas jaringannya (*networking*) di seluruh masjid-masjid kampus yang ada di Indonesia tampak dalam aksi unjuk rasa yang bertajuk "Rapat Umum Mahasiswa dan Rakyat" pada hari Jumat, tanggal 10 April 1998 di lapangan Masjid Agung Al-Azhar. Rapat itu dihadiri utusan Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) dari UGM, UI, ITB, IPB, dan Unair bersama dengan ribuan massa lainnya. Mereka bergabung bersama jamaah shalat Jumat dan buruh korban PHK. Mimbar bebas yang digelar pun menampilkan tokoh-tokoh mahasiswa seperti Rama Pratama (SMPT UI), Febri Nurhidayat (ITB), dan ketua umum KAMMI Fachri Hamzah.<sup>26</sup> KAMMI juga melakukan dialog dengan media asing untuk menjaga agar pihak asing tidak menuding KAMMI membangkitkan fundamentalisme (Lihat Tabel 3.1).

**Tabel 3.1:**  
**Daftar Tokoh Mahasiswa Pendukung dan Penentang B.J. Habibie**

No.	Nama Organisasi	Nama Tokoh Mahasiswa	Sikap Politik
1.	HMI	1. Anas Urbaningrum	Pendukung B.J. Habibie
		2. Ahmad Dolly Kurnia	Pendukung B.J. Habibie
2.	KAMMI	1. Fachri Hamzah (UI)	Pendukung B.J. Habibie
3.	FORUM KOTA	1. Eli Salomo (ISTN)	Penentang B.J. Habibie
		2. Abdullah (IKIP Jakarta)	Penentang B.J. Habibie
		3. Syafieq (STF Driyarkara)	Penentang B.J. Habibie
		4. Lutfi Iskandar (ABA ABI)	Penentang B.J. Habibie
		5. Wahab Talaoho (UNIJA)	Penentang B.J. Habibie
4.	FKSMJ	1. Sarbini (Untag Jakarta)	Penentang B.J. Habibie
		2. Irwan (Universitas Moestopo)	Penentang B.J. Habibie

**Sumber:** Wawancara penulis dengan narasumber aktivis HMI, KAMMI, FORKOT dan FKSMJ.

#### **b. Ideologi Organisasi dan Gerakan**

Prakarsa Lembaga Dakwah Kampus (FS-LDK) dalam mendirikan KAMMI menunjukkan betapa ideologi Islam bukan lagi sebatas ideologi organisasi, namun juga telah menjadi ideologi gerakan (Lihat Tabel 3.2). Hal itu dapat dilihat dari sikap KAMMI yang tertuang di dalam Deklarasi Malang dimana KAMMI merupakan wadah aksi mahasiswa muslim yang berusaha berperan aktif dalam

<sup>26</sup> Mahfudz Sidiq, *KAMMI dan Pergulatan Reformasi, Op., Cit.*, hal. 28-29. Lihat juga *Gatra* edisi 18 April 1998.

proses perubahan dan perbaikan kondisi sosial, budaya dan ekonomi yang berlandaskan kepada Wahyu atau Alquran dan ilmu pengetahuan. Sebab, KAMMI yakin kalau selama ini hanya wahyu dan ilmu pengetahuan yang benar di sisi Allah SWT.<sup>27</sup>

**Tabel 3.2:**  
**Ideologi Organisasi Gerakan Mahasiswa Pendukung dan Penentang B.J. Habibie**

No.	Nama Organisasi	Ideologi Organisasi	Ideologi Gerakan
1.	HMI	Pancasila-Islam	Moderat
2.	KAMMI	Islam	Moderat
3.	FORKOT	Anti Otoriterisme	Radikal
4.	FKSMJ	Nasionalis	Radikal

**Sumber:** Wawancara penulis dengan narasumber aktivis dari HMI, KAMMI, FORKOT dan FKSMJ.

### c. Isu Yang Diusung

Mengacu pada Deklarasi Malang, sikap KAMMI yang mendukung B.J. Habibie bukan saja memiliki visi dan misi yang sama tentang Islam, namun juga sebagai upaya KAMMI dalam mendukung tuntutan reformasi ekonomi. KAMMI melihat bahwa masih suburnya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta kondisi perekonomian bangsa yang terpuruk berkaitan dengan kondisi dan sistem politik yang ada. KAMMI mengusung isu reformasi ekonomi yang harus dibarengi dengan reformasi politik. Namun KAMMI berharap reformasi itu tetap dilandasi oleh strategi yang jelas dan tepat, serta prosesnya yang berorientasi pada pemberdayaan dan kemakmuran rakyat.

Di situlah KAMMI sangat tegas menuntut reformasi hukum dan perundang-undangan. Reformasi hukum bagi KAMMI sangat penting artinya karena selama ini hukum dan perundang-undangan sangat tidak memadai untuk mewujudkan kepastian hukum dalam menjamin hak asasi rakyat. Reformasi ekonomi dan politik yang dibingkai oleh reformasi hukum dan perundang-undangan merupakan isu KAMMI yang sangat fundamental. KAMMI yang mengusung isu KKN dan

<sup>27</sup> Lihat Aay Muhammad Furkon, *Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer, Op., Cit.*, hal. 145.

reformasi politik dan hukum melalui beberapa tahapan, dua diantaranya sangat penting, yaitu: (1) tetap memelihara dan memperluas jaringannya (*networking*) di seluruh masjid-masjid kampus yang ada di Indonesia; (2) melibatkan seluruh mahasiswa Indonesia yang sedang menuntut ilmu di negara lain.<sup>28</sup>

### **3.2. FORKOT dan FKSMJ: Gerakan Mahasiswa Plural Ekstra Universitas Penentang B. J. Habibie.**

#### **3.2.1. Forum Kota (FORKOT)**

Forum Mahasiswa Se-Jabotabek (FORKOT) didirikan pada tanggal 7 Maret 1998. FORKOT beranggotakan sejumlah kampus yang juga memiliki akar sejarah pergerakan mahasiswa, seperti Universitas Indonesia (UI), Universitas Kristen Indonesia UKI), Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, IKIP Jakarta (sekarang UNJ), Universitas Nasional (UNAS), Institut Sains dan Teknologi Nasional ISTN) dan lain sebagainya, yang kemudian jumlah itu sempat membengkak menjadi 70-an lebih kampus.<sup>29</sup> Dalam perjalanannya beberapa mahasiswa, seperti Abdullah (IKIP Jakarta), Adian Napitupulu (UKI), Syafieq (STF Driyarkara) dan Eli Salomo (ISTN) dianggap sebagai para pendiri FORKOT.

Kelahiran FORKOT yang ditandai oleh aksi-aksi massifnya, bukan hanya langsung menggebrak dunia gerakan mahasiswa yang saat itu dapat dikatakan tengah "bangun tidur", tetapi juga membuat pihak keamanan harus mengamatinya dengan penuh kewaspadaan. Bahkan peristiwa mundurnya UNAS, Universitas Pakuan Bogor dan Aliansi Demokrasi Rakyat (ALDERA) yang langsung mendirikan Front Nasional dua hari menjelang jatuhnya Soeharto tidak membuat gerakannya kehilangan pamor.

Kemunculan FORKOT yang sangat fenomenal dan spontan mengingatkan orang tentang gerakan ultra radikal *Hangcungryon* di Korea Selatan.<sup>30</sup> FORKOT muncul dapat dilihat dua aspek, yaitu: (1) puncak ekspresi kemarahan para aktivis mahasiswa yang kritis terhadap otoriterisme Orde Baru; (2) rasa tidak percaya

<sup>28</sup> Mahfudz Sidiq, *KAMMI dan Pergulatan Reformasi, Op., Cit.*, hal. 195-230.

<sup>29</sup> A. Prasetyantoko dkk., *Gerakan Mahasiswa dan Demokrasi di Indonesia*, Tim Peneliti GM Universitas Atma Jaya, Jakarta: Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum, 2001, hal. 84-85. Lihat juga *Forum Keadilan*, No 5, Tahun VII, 15 Juni 1998, Tabloid *Visi Mahasiswa*, Minggu 1-11 Maret 1999, hal 12.

<sup>30</sup> Wawancara dengan Adian Napitupulu, Aktivis FORKOT, Sabtu tanggal 29 Mei 2010 di Jakarta.

mahasiswa terhadap organisasi mahasiswa intra dan ekstra universiter. Radikalisme FORKOT dibuktikannya dengan cara menjadi gerakan mahasiswa pertama yang menguasai Gedung DPR/MPR pada tanggal 18 Mei 1998. Aksi-aksi FORKOT tidak menjadi jinak pasca jatuhnya Soeharto, tapi justru sebaliknya, aksi-aksi demonstrasi FORKOT dalam menentang B.J. Habibie semakin radikal hingga hampir semua aksi-aksinya bentrok dengan pihak TNI, Polri dan kelompok-kelompok yang tidak suka dengan aksi FORKOT, seperti dalam peristiwa Tragedi Semanggi I dan Semanggi II.<sup>31</sup>

#### a. Organisasi dan Kepemimpinan

FORKOT tidak memiliki struktur yang baku. Rekrutmen anggota dilakukan secara cair (tidak birokratis). Cukup hanya diserahkan kepada simpul FORKOT di masing-masing kampus. Masalah manajemen organisasi, semuanya dijalankan secara bersama-sama, seperti penunjukan koordinator lapangan (Korlap) dan juru bicara aksi (Jubir Aksi) yang harus mendapatkan persetujuan langsung dari rapat antar simpul.<sup>32</sup>

Masalah internal FORKOT adalah ketidakpuasan simpul dan anggota. Misalnya, sejumlah simpul kampus menyatakan mengundurkan diri dengan alasan strategi FORKOT sudah tidak sesuai visi gerakan. Awal bulan September 1998, Syafieq, mahasiswa dari STF Driyakara dan Abdullah, mahasiswa IKIP Jakarta aktivis senior FORKOT, misalnya, menyatakan keluar bersama teman-temannya dari Universitas Moestopo lalu mendirikan Front Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (FAMRED). Lalu, Eli Salomo, mahasiswa dari ISTN dan bersama aktivis senior, mantan aktivis FORKOT lainnya, seperti Faisal

<sup>31</sup> Selain bentrok dengan TNI/POLRI, FORKOT juga bentrok dengan kelompok lain seperti dari kelompok Islam dan Pam Swakarsa. Mengenai aksi-aksi FORKOT menolak B.J. Habibie lihat *Belalang Dalam Gerakan* dalam *Panji* Edisi IV/20 November 1998.

<sup>32</sup> Cairnya struktur baku FORKOT dan lebih diserahkan kepada simpul FORKOT di masing-masing kampus, lebih disebabkan karena banyak aktivis FORKOT adalah mahasiswa-mahasiswa yang tidak tergabung dalam Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) dan bahkan cenderung kritis terhadap Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) di masing-masing kampus. Selain itu juga pola cair ini dilakukan sebagai bagian dari strategi gerakan agar bisa saling mengawasi diantara masing-masing simpul kampus. Sehingga penyelewengan (kooptasi) gerakan bisa dihindarkan. Pola strategi dan gerakan FORKOT ini merupakan kritik terhadap pola strategi gerakan mahasiswa tahun 1966 dan 1974 dimana banyak tokoh-tokoh aktivisnya masuk (terlibat) dalam kekuasaan.

Saimima dari ABA ABI juga menyatakan keluar pada akhir Februari 2000. Bersama Faisal Saimima, Eli Salomo lalu mendirikan Front Kota (FRONKOT).<sup>33</sup>

## b. Ideologi Organisasi dan Gerakan

Aksi-aksi demonstrasi FORKOT yang sangat radikal tidak hanya membuat sebagian elemen masyarakat melancarkan kecaman, tetapi juga menudingnya sebagai bagian dari komunisme. Tudingan bahwa FORKOT merupakan wadah bagi para aktivis kiri yang berasal dari penganut agama kiri; terutama Kristen kiri dan Islam kiri, serta didukung oleh para Pastor Serikat Yesuit dan Nasionalis Sekuler tampak pada plesetan FORKOT yang berarti Forum Komunis Total.<sup>34</sup>

Namun FORKOT sendiri secara tegas menolak semua tudingan itu. Eli Salomo, Aktivis FORKOT mengatakan:

Soal ideologi secara formal FORKOT itu belum masuk pada satu pemilihan ideologi-ideologi tua ideologi-ideologi *mainstream* mulai dari namanya ideologi Kapitalisme, Sosdem, Kesejahteraan, Komunis dan sebagainya itu tidak ada. Tidak ada satu sesi pun kita membicarakan pilihan terhadap ideologi. Tapi kan FORKOT sendiri sebenarnya bukan muncul secara dadakan. Di pertemuan dari banyak orang-orang atau tokoh-tokoh pada masa sebelumnya melakukan kerja advokasi. Jadi kalau menarik apakah ideologinya ada pada kotak-kotak mainstream? Tidak ada. Tapi mungkin yang lebih tepat FORKOT lebih condong pada ideologi kerakyatan, ideologi kerakyatan yang tidak bisa juga disebut yang marxis dan tidak bisa juga disebut Sosdem. Secara tepat karena kalau membedah ideologi suatu organisasi itu kan harus melihat dari program organisasi cara bekerja dan itu kan harus utuh. Pertama terminologi pengertian tentang anarkis dan anarkisme itu kan sering sekali tersesat atau disesatkan. Ya, pada saat satu kelompok terjadi bentrok kemudian kelompok itu dikategorikan kelompok anarkis hingga FORKOT itu kan kelompok yang mencoba menegaskan satu Negara Republik Indonesia pada satu garis konstitusi yang benar. Artinya dia tidak berkeinginan pada kehancuran atau penabrakan pada undang-undang atau regulasi-regulasi yang ada. Bukan di situ garis FORKOT. Kalaupun terjadi bentrokan bisa di cek apakah pernah FORKOT melakukan aksi kemudian seketika melakukan pengrusakan atau penyerangan termasuk

<sup>33</sup> Perpecahan ini lebih terjadi karena adanya perbedaan dalam pilihan strategi gerakan. Famred yang di deklarasikan oleh 13 kampus lebih memilih metode gerakan ANV (Active Non Violence) yaitu aksi tanpa kekerasan. Sementara Front Kota lebih memilih aksi kekerasan tergantung pada situasi aksi yang dihadapi dilapangan. Wawancara dengan Syafieq Mahasiswa STF Driyarkara, Aktivis FORKOT dan FAMRED, Selasa tanggal 12 Januari 2010 di Jakarta. Wawancara dengan Abdullah, Mahasiswa IKIP Jakarta, Aktivis FORKOT dan FAMRED, Sabtu tanggal 30 Mei 2010 di Jakarta. Wawancara dengan Eli Salomo, Mahasiswa ISTN Jakarta, Aktivis FORKOT dan FRONKOT, Sabtu tanggal 28 November 2010 di Jakarta.

<sup>34</sup> Karena kecaman dan stigma komunis inilah FORKOT seringkali dijadikan musuh bersama oleh kelompok-kelompok Islam yang berakibat bentrok.

instansi-instansi atau pos Polisi atau kantor Tentara? Pernah gak seperti itu yang terjadi saat aksi kemudian terjadi bentrokan terjadi provokasi dari Tentara terjadi provokasi dari kelompok yang melawan kita kemudian kan pilihannya dua, apakah kita kemudian berdiam diri kemudian menjadi korban? Karena kita lihat karakter tentara karakter Polisi kita adalah bukan karakter Polisi yang profesional yang misalnya melihat sudah melihat demonstran itu tidak melawan kemudian mereka juga tidak melakukan pemukulan karakternya adalah kalau sudah ada yang tertangkap mari kita pukul habis-habisan itu pengalaman kita sehingga pilihannya apakah kita diam kemudian merasa takut dengan tindakan represif Polisi atau kita terus melakukan aksi-aksi menyuarkan keyakinan kita sambil kita mempertahankan diri tidak konyol kan itu pilihannya. Sehingga terlihat FORKOT misalnya dituduh mempersenjatai diri, pertanyaan kapan FORKOT memukul duluan kan tidak pernah itu sisi soal kekerasan yang muncul dalam aksi-aksi FORKOT itu adalah satu mekanisme pertahanan diri yang kita ambil untuk kita tetap bisa bersuara terhadap keyakinan politik kita. Yang kedua kemudian komunis dituduh anarkis segala macam itukan debat ideologi yang sangat gampang dijawabnya dan walaupun labeling komunis bagiku itu bukan suatu kemaluan sejarah tapi disitu lah bagaimana keterlanjangan sejarah melihat rezim menggunakan segala cara untuk mempertahankan dirinya termasuk melakukan fitnah terhadap organisasi misalnya FORKOT atau gerakan mahasiswa lain yang punya garis tidak mau kompromi tidak mau dibeli oleh rezim politik yang berkuasa. Dan kalau mau gampang transaksi dengan kekuasaan bukan dengan orang yang mau berkuasa padahal belum tentu berkuasa. Karena itu FORKOT menolak Habibie dengan keyakinan bahwa rezim Orde Baru tidak akan bisa menghasilkan pemerintahan yang bersih, pasti dia akan mencoba melanggengkan kalau sebelumnya dengan cara penyerahan dari Soeharto ke Habibie maka waktu itu yang kita sangat curigai adalah mereka akan mencoba pake logika demokratis yang konstitusional lewat pemilu tersebut. Jadi pemilu tersebut sebenarnya punya potensi yang cukup besar untuk menjadi penyelewengan untuk mempertahankan rezim yang berkuasa Golkar dan kelompok Habibie lah pada saat itu.<sup>35</sup>

Penegasan Eli Salomo panjang lebar tersebut tidak otomatis bahwa FORKOT tidak memiliki ideologi, tidak dekat atau justru berseberangan dengan ideologi kiri, sosialisme demokrasi atau komunisme. Dari penjelasan Eli Salomo tersebut juga dapat diajukan sejumlah kemungkinan alasan mengapa FORKOT tidak menegaskan ideologinya secara tegas, yaitu: (1) aktivisnya yang bersimpati pada strategi gerakan politik revolusioner membuatnya tidak ingin dikaitkan dengan ideologi marxisme; (2) kegagalan kelompok gerakan sosial dan politik yang menganut ideologi Pancasila, Nasionalisme atau Islamisme, misalnya,

<sup>35</sup> Wawancara dengan Eli Salomo, Aktivis FORKOT penentang Pemerintahan B.J. Habibie, Mahasiswa ISTN Jakarta, Sabtu, 28 November 2009, di Jakarta.

membuatnya tidak tertarik untuk melirik salah satu dari ideologi tersebut; (3) jika menganut ideologi komunisme, maka sikap para aktivisnya yang menolak mengakui secara terang-terangan merupakan strategi untuk menjaga kelangsungan hidup organisasinya. Sebab, mengakui ideologinya komunisme atau setidaknya tidaknya dekat dengan ideologi Marxisme sama artinya dengan melakukan konfrontasi terhadap ideologi Negara Republik Indonesia.

### c. Isu Yang Diusung

Ada tiga isu yang diusung oleh FORKOT, yaitu: (1) pembubaran Partai Golkar; (2) pembersihan Orde Baru; (3) pemilu dipercepat. Ketiga isu itu dicoba direalisasikan bukan hanya menolak atau berusaha menjatuhkan Presiden B.J. Habibie tetapi juga mengusulkan pembentukan Komite Rakyat Indonesia (KRI) yang nantinya mempercepat pelaksanaan pemilu. Eli Salomo, Aktivist FORKOT, mengatakan:

“Habibie mungkin memang menjadi ikon Islam setelah dia menjadi ICMI, pengaruh kelompok CSIS dalam segala macam dalam pemerintahan Soeharto tergantikan oleh kekuatan ICMI dengan masuknya kekuatan ICMI. Artinya intelektual-intelektual muda Islam kemudian mempunyai posisi dalam pemerintahan Soeharto dan saat Habibie naik ini kan dianggap suatu kesempatan untuk suatu ekspresi politik dari kelompok-kelompok intelektual berlabeling Islam ini. Tetapi kan bagi kelompok-kelompok misalnya FORKOT sendiri tidak melihat bahwa Habibie diturunkan karena dia Islam tidak pada poin itu tapi melihat bahwa pada pergantian dari Soeharto ke Habibie ini sebuah dagelan politik yang tidak dapat diterima. Persoalannya bukan semata-mata di Soeharto, tapi ada pada satu sistem yang dipertahankan selama 32 tahun itu dibentuk dan diperkuat dan akhirnya dikuasai Habibie kan itu yang kita anggap sistem itu yang memiskinkan, yang membuat situasi tidak demokratis. ... Sejak kita menggulirkan soal KRI kita sebenarnya banyak *sounding* dengan banyak tokoh. Banyak tokoh yang kita *sounding*, kita *sounding* bukan dalam pengertian kita melakukan jual-beli politik tapi kita mempresentasikan imajinasi kita tentang Indonesia masa depan itu seperti apa dan mengapa kita meminta mereka untuk menjadi bagian dari mencapai Indonesia masa depan itu atau saat itu yang kita sebut Indonesia baru.”<sup>36</sup>

Penolakan FORKOT terhadap Presiden B.J. Habibie selain karena Presiden B.J. Habibie dianggap simbol Golkar dan Orde Baru, juga dianggap sebagai kaki tangan Soeharto. Oleh karena itu kejatuhan Soeharto bagi FORKOT harus pula

<sup>36</sup> Wawancara dengan Eli Salomo, Aktivist FORKOT penentang Pemerintahan B.J. Habibie, Mahasiswa ISTN Jakarta, Sabtu, 28 November 2009, di Jakarta.

diikuti kejatuhan B.J. Habibie. Hal ini pula yang disebutkan, Adian Napitupulu salah seorang Aktivis FORKOT lainnya mengatakan :

“Yah, karena kita melihat Habibie sebagai perpanjangan tangan Soeharto yah, waktu itu. Habibie dijadikan sebagai Presiden untuk menjamin keselamatan Soeharto beserta kroni-kroninya dan keluarganya.”<sup>37</sup>

### 3.2.2. Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Se-Jakarta (FKSMJ)

Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta (FKSMJ) didirikan melalui Musyawarah Besar (Mubes) pimpinan Senat Mahasiswa se-Jakarta di IKIP Jakarta (kini Universitas Negeri Jakarta) pada tanggal 23 Maret 1996. Tercatat nama aktivis dan pimpinan Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) di Jakarta sebagai pendiri FKSMJ, yaitu: Heru Cokro (Universitas Indonesia), Ubedilah Badrun (IKIP Jakarta/UNJ), Indra (Universitas YARSI), Omen Abdurrahman (Universitas Mercu Buana), Sarbini (Universitas 17 Agustus), Danar, Henky, Saiful, Irwan (Universitas Moestopo Beragama), Maman Faturahman, Sayed Junaidi Rizaldi (Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta), Embay, Tris dan Dwi K (STIE Swadaya), Ferry dan Luthfi Nasution (Universitas Jakarta), Waspada (Universitas Attahiriyah), Kuncoro dan Agung (Universitas Kertanegara).<sup>38</sup>

Organisasi yang juga memiliki hubungan kultural dengan keberadaan FKPMJ (Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Jakarta) dan FKMIJ (Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Jakarta) ini, lahir dari perjalanan panjang pertemuan aktivis senat mahasiswa se-Indonesia di era tahun 90-an yang peduli dengan upaya melawan rezim Orde Baru yang dianggap otoriter dan korup.

#### a. Organisasi dan Kepemimpinan

Satu bulan setelah pendirian organisasi ini, tepatnya tanggal 17 April 1996, FKSMJ melakukan aksi demonstrasi menolak kenaikan tarif angkutan umum di Departemen Perhubungan Jakarta yang kemudian meluas ke wilayah Indonesia lainnya yang berakhir bentrokan dengan aparat keamanan, menimbulkan korban

<sup>37</sup> Wawancara dengan Adian Napitupulu, Aktivis FORKOT penentang Pemerintahan B.J. Habibie, Sabtu, 29 Mei 2010, di Jakarta.

<sup>38</sup> Muridan S Widjojo dan Moch. Nurhasim, *Organisasi Gerakan Mahasiswa 1998: Upaya Rekonstruksi*, dalam Muridan S Widjojo, *et al, Op., Cit.*, hal. 356-358.



di pihak mahasiswa dan rakyat di Ujung Pandang.<sup>39</sup> Peristiwa ini kemudian disikapi mahasiswa dengan aksi berkabung nasional dan melakukan aksi mimbar bebas di seluruh kampus di Indonesia. Aktivitas parlemen jalanan yang dilakukan FKSMJ ini dengan dukungan dari universitas-universitas lainnya menguat cepat di seluruh Jakarta, dukungan tersebut kemudian muncul antara lain dari Senat Mahasiswa Universitas Indonesia (masa kepengurusan Kamarudin), meskipun pada awalnya Senat Mahasiswa Universitas Indonesia (SM UI) ini tidak ikut terlibat dalam pergerakan pembentukan organisasi ini termasuk aksi-aksi politiknya. Rapat-rapat politik FKSMJ semakin intensif terjadi usai aksi tolak kenaikan tarif angkutan.<sup>40</sup>

Gerakan FKSMJ kemudian terlihat kembali menjelang peristiwa 27 Juli 1996 yang pada saat itu para aktivisnya ikut terlibat dalam mimbar bebas di kantor PDI yang kemudian berakhir rusuh<sup>41</sup>. Gerakan protes FKSMJ ini di penghujung tahun 1997 makin menguat ketika melakukan aksi politik demonstrasi pada 26 Desember 1997 di gedung DPR/MPR untuk menolak pencalonan kembali Soeharto sebagai Presiden, aksi ini dilakukan bersama FKMIJ, FKMP, FAAR, dan Alarm-Aldera. Demonstrasi ini sempat dikepung sejumlah panser militer yang berjaga-jaga di gedung DPR/MPR. Protes FKSMJ juga dilakukan terhadap Mendikbud dengan memprotes agar Kepmendikbud No 0457/U/1990 dicabut, ini terjadi pada periode tahun 1997 yang sempat memunculkan nama Saifullah (Universitas Mustopo), Agus Supriyatna (IKIP Jakarta) dan Selamat Nurdin (UI).<sup>42</sup>

Pada perjalanannya kemudian pada tahun 1998 muncul aktivis-aktivis FKSMJ seperti Sarbini (Universitas 17 Agustus), Irwan (Universitas Mustopo), Henry Basel (IKIP/UNJ), Heru Cokro (UI) dan Rama Pratama (UI). Pertemuan-pertemuan antara generasi baru FKSMJ dengan generasi awal FKSMJ, termasuk dengan aktivis FKMIJ (Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Jakarta) seperti

<sup>39</sup> Peristiwa ini terjadi tanggal 25-26 April 1996 dimana beberapa mahasiswa meninggal akibat bentrok dengan aparat TNI/POLRI. Peristiwa ini disebut dengan Tragedi Makassar Berdarah. Lihat, Suharsih dan Ign Mahendra K, *Op., Cit*, hal. 95.

<sup>40</sup> Lihat *Mereka yang Menentang Sidang Sandiwara* dalam *Tempo* 24 November 1998.

<sup>41</sup> Peristiwa 27 Juli 1996 terjadi karena penolakan massa pendukung PDI pro Megawati terhadap PDI pimpinan Soerjadi. Massa PDI pendukung Megawati Soekarnoputri menduduki kantor PDI di Jalan Diponegoro yang berakibat bentrok. Pasca peristiwa ini beberapa aktivis diculik dan hilang.

<sup>42</sup> Kepmendikbud No 0457/U/1990 ini berisi tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.

Ahmad Wakil Kamal dan Mulyadi serta dengan sejumlah elemen mahasiswa Bandung berjalan makin intensif hingga kemudian menduduki Gedung DPR/MPR sebagai simbol perlawanan rakyat menghendaki turunnya Soeharto.

Pendudukan gedung DPR/MPR ini terjadi pada tanggal 18-23 Mei 1998. FKSMJ menjadi aktor penting dalam pendudukan gedung DPR/MPR ini bersama Forum Kota (FORKOT), sebuah organisasi mahasiswa Jabotabek yang lahir dari aktivis diluar senat mahasiswa. Selain FORKOT kemudian nampak juga HMI MPO yang juga membawa massa ribuan mahasiswa. Hari kedua pendudukan kemudian diikuti oleh ratusan ribu mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi Jakarta, Bandung, dan universitas lainnya.<sup>43</sup> Saat aksi pendudukan gedung DPR/MPR ini Soeharto berhenti dari jabatannya sebagai Presiden pada 21 Mei 1998.

Berakhirnya era senat mahasiswa tidak menjadikan FKSMJ merubah nama organ gerakannya, karena FKSMJ merupakan alat perjuangan, bukan organisasi kemahasiswaan. Berjalannya waktu menjadikan kampus-kampus yang menjadi bagian FKSMJ kembali melakukan konsolidasi di kampus masing-masing. Maka selanjutnya terbentuklah KAM-Jakarta atau Komite Aksi Mahasiswa Jakarta yang merupakan organ mahasiswa yang lahir setelah Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta (FKSMJ) tidak lagi aktif. Dalam perjalanan selanjutnya pimpinan kolektif KAM Jakarta beralih kepada generasi yang lebih muda dari aktivis FKSMJ. Karena sifatnya yang kolektif, kepemimpinan KAM Jakarta merupakan kepemimpinan bersama dari beberapa simpul kampus yang sebagian besar berlokasi di Jakarta Selatan. Kampus-kampus yang tercatat sebagai bagian dari KAM Jakarta adalah Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Universitas Satya Negara Indonesia (USNI), Universitas Mercu Buana, Universitas 17 Agustus, UPN Veteran, Universitas Budi Luhur, Universitas ABA-ABI, STMIK JAKARTA/STI&K dan beberapa kampus lainnya.

#### **b. Ideologi Organisasi dan Gerakan**

Keberadaannya diakui oleh pemerintah memberi petunjuk bahwa FKSMJ tidak seradikal dengan FORKOT. Ideologi organisasi yang cenderung nasionalis

---

<sup>43</sup> Lihat *Tanggal-Tanggal Penting H.M Soeharto* dalam *Kompas*, 19 Mei 1998.

religius membuatnya bersikap pro-pluralisme dengan ideologi gerakan yang cenderung moderat.

### c. Isu Yang Disung

Isu yang diusung oleh FKSMJ dalam menolak B.J. Habibie adalah delegitimasi kekuasaan Presiden B.J. Habibie. FKSMJ menyikapi isunya itu ke dalam bentuk aksi-aksi demonstrasi yang intinya memuat dua hal, yaitu: (1) menolak naiknya B.J. Habibie sebagai Presiden dan mengusulkan pembentukan pemerintahan transisi dalam bentuk presidium; (2) mendesak MPR untuk mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban dan mencabut mandat B.J. Habibie.

Mengenai sikap menolak B.J. Habibie sebagai Presiden, Sarbini, Aktivis FKSMJ, mengatakan:

”Salah satunya adalah bahwa Habibie itu bagian dari Orde Baru sebab Habibie itu kepanjangan tangan dari Orde Baru dan dia adalah anak kesayangan Pak Harto yang akan menjaga sistem Orde Baru yang sudah diciptakan oleh Soeharto”<sup>44</sup>

Dalam mengusung isunya, FKSMJ kemudian mensosialisasikan gagasannya tentang perlunya Dewan Presidium Nasional sebagai representasi pemerintahan transisional, sementara FORKOT menghendaki dibentuknya Komite Rakyat Indonesia (KRI) yang juga sebagai pemerintahan transisional, hingga kemudian kedua organisasi ini berbeda haluan. Perbedaan gagasan ini menurut Sarbini, Aktivis FKSMJ mengatakan :

”Kita namanya bukan KRI seperti ide FORKOT, ya mungkin hampir sama dengan kita tapi namanya bukan presidium kita itu tapi Dewan Presidium Nasional. Yang kita berpikir dipimpin oleh orang-orang yang melawan Orde Baru, ya kita sangat sederhana saja pada saat itu yang melawan Orde Baru ada Ibu Mega, yang melawan Orde Baru, ada Gus Dur, yang melawan Orde Baru, ada juga Amien Rais. Kita sederhana berpikinya itu aja. Diluar klik-klik dari dalam, jadi yang saya katakan tadi bahwa latar belakang era pada saat itu mahasiswa anggaplah kalau bahasa lainnya polos gitu jadi tidak berprotensi jadi siapa, ini jadi siapa, kita jadi

<sup>44</sup> Wawancara dengan Sarbini, Aktivis FKSMJ, Mahasiswa UNTAG-Jakarta, Sabtu, 27 Maret 2010 di Jakarta.

apa gak penting. Begitu kalau saya melihatnya. Jadi bahasa sederhananya elite-elit yang melawan Orde Baru itulah yang kita dorong pada saat itu.<sup>45</sup>

Aksi-aksi FKSMJ usai keluar dari DPR masih terus berlanjut bersama elemen mahasiswa lainnya, antara lain aksinya menolak Sidang Istimewa MPR 1998 pada 23 Oktober dan 10-13 November 1998 dan upayanya "menculik" Amien Rais, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, untuk memimpin perubahan dan penolakan Sidang Istimewa. Namun Ketiga tokoh ini menolak perubahan menyeluruh dan kemudian menghasilkan Deklarasi Ciganjur. Sementara elemen-elemen mahasiswa lainnya bergerak menuju gedung DPR/MPR yang berakhir dengan Tragedi Semanggi I.<sup>46</sup>

Aktivis FKSMJ yang mencuat pada saat ini antara lain adalah Sarbini (Universitas 17 Agustus), Irwan (Univ. Mustopo) dan Dandy- Kusumohartono (STIE Perbanas). Aksi-aksi FKSMJ masih berlanjut hingga menjelang Pemilu 1999 dengan menduduki kantor KPU pada 25 Juli 1999 sebagai bentuk protes atas mandegnya Reformasi Total. Aksi-aksi FKSMJ selanjutnya dilakukan antara lain bersama HMI MPO untuk menolak pemilu 1999 dan menghendaki bubarnya Golkar. Pada perjalanannya kemudian era senat mahasiswa berakhir dengan berlakunya SK Mendikbud Nomor 155/U/1998 tentang organisasi kemahasiswaan yang kemudian melahirkan BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) di hampir semua perguruan tinggi.

### 3.3. HMI-KAMMI Vs FORKOT-FKSMJ: Konflik Politik

Secara politik polarisasi gerakan mahasiswa pada masa pemerintahan B.J. Habibie berlangsung sejak B. J. Habibie dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan Soeharto yang menyatakan berhenti sebagai Presiden.<sup>47</sup>

<sup>45</sup> Wawancara dengan Sarbini, Aktivis FKSMJ, Mahasiswa UNTAG-Jakarta, Sabtu, 27 Maret 2010 di Jakarta.

<sup>46</sup> Tragedi Semanggi I terjadi ketika mahasiswa menolak agenda Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kala itu, Majelis tak mengagendakan penghapusan Dwi Fungsi ABRI, dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme atau dikenal istilah KKN. Peristiwa ini menimbulkan korban mahasiswa Bernadinus Realino Norma Irmawan (Atma Jaya), Teddy Mardani(ITI), Sigit Prasetyo (YAI), Engkus Kusnadi (Unija), Heru Sudibyo (UT), Muzamil Joko Purwanto (UI). Korban jatuh selain mahasiswa adalah Agus Setiana (Pelajar/Tukang Ojek), Budiono (Masyarakat), Doni Efendi (Karyawan), Rinanto (Satpam Hero), Sidik (Masyarakat), dan Lukaman Firdaus (Pelajar). Lihat *Jakarta Dari Menit Ke Menit* dalam *Kompas*, 15 November 1998.

<sup>47</sup> Tentang pernyataan Soeharto berhenti sebagai Presiden lihat selengkapnya Lampiran 4: *Pernyataan Berhenti Sebagai Presiden Republik Indonesia*.

Untuk sebagian polarisasi gerakan mahasiswa diperkuat oleh pro-kontra elit politik terhadap legitimasi hukum dan politik Presiden B.J. Habibie. Oleh karena itu dukungan dan penentangan gerakan mahasiswa, seperti HMI dan KAMMI terhadap B.J. Habibie tidak dapat dilihat sebagai sikap yang penuh dengan kemandirian. Sarbini, Aktivis FKSMJ dan Mahasiswa UNTAG Jakarta melihat adanya pengaruh elit politik dalam gerakan mahasiswa setelah mencermati sikap HMI dan KAMMI yang mendukung B.J. Habibie. Sarbini mengatakan:

”Kalau saya melihat yang lebih kental pro-Habibie itu KAMMI dan HMI. Lebih kental kesana kalau bicara mahasiswanya. Nah kalau yang kesini ini kalau mau kita jujur memang ada dorongan-dorongan dari *link* tertentu dari yang anti Habibie. Ya saya melihatnya seperti itu mungkin bisa ditanya Bang Rizal Ramli kenapa pada saat itu. Ya saya melihat ada seperti itulah, kalau yang anti Habibie. Ya tapi kalau bicara agenda memang pada saat itu saya secara pribadi pilihan sulit. Artinya satu sisi kita melihat Soeharto sudah selesai nah di satu sisi ada polarisasi nah satu sisi ada kepentingan yang bercampur. Memang ada isu yang menurut kita cocok dengan kita ada isu yang menurut kita tidak cocok dengan kita.”<sup>48</sup>

Pengamatan Sarbini yang melihat adanya dorongan-dorongan dari jaringan politik tertentu secara tidak langsung dibenarkan oleh Anas Urbaningrum mantan Ketua Umum PB HMI pendukung Pemerintahan B.J. Habibie. Menurut Anas Urbaningrum gerakan mahasiswa tidaklah berdiri sendiri, melainkan terkait dengan arus konstestasi politik nasional atau konteks politik secara keseluruhan. Anas Urbaningrum mengatakan:

“Gerakan mahasiswa kan tidak berdiri sendiri. Terkait dengan konteks politik secara keseluruhan, berbagai kelompok mahasiswa itu, langsung atau tidak langsung bertemu dengan kontestasi politik nasional, jadi kalau kemudian ada polarisasi, itu bukan suatu hal yang aneh, karena suara mahasiswa dianggap penting oleh dinamika kontestasi ini. Jadi kalau pendekatannya dari politik murni, sebenarnya polarisasi itu adalah kepanjangan dari kontestasi politik nasional. Tapi pendekatan itu tidak bisa menjelaskan dengan penuh karena terlalu simplistik, kalau dikatakan gerakan mahasiswa itu hanya alat dari kepentingan politik. Pertemuan arus kontestasilah saya kira.”<sup>49</sup>

Sebagian elit politik melihat peralihan kekuasaan ke tangan B.J. Habibie tidak memiliki legitimasi hukum dan politik, serta sebagiannya lagi memandang

<sup>48</sup> Wawancara dengan Sarbini, Aktivis FKSMJ dan Mahasiswa UNTAG Jakarta penentang B.J. Habibie, Sabtu, tanggal 27 Maret 2010, di Jakarta.

<sup>49</sup> Wawancara dengan Anas Urbaningrum Ketua Umum PB HMI pendukung Pemerintahan B.J. Habibie, Selasa tanggal 04 Mei 2010 di Jakarta.

sudah sesuai dengan hukum ketatanegaraan yang berlaku.<sup>50</sup> Elit politik yang melihat peralihan kekuasaan ke tangan B.J. Habibie tidak memiliki pijakan legitimasi hukum dan politik mendasarkan pandangannya pada argumen bahwa TAP MPR tentang pengangkatan Presiden hanya ditunjukkan kepada Soeharto, bukan B.J. Habibie, sehingga bila Soeharto menyatakan berhenti sebagai presiden maka MPR seharusnya memilih Presiden baru, karena mandat MPR ke Soeharto secara otomatis kembali kepada MPR. Sebaliknya, elit politik yang melihat peralihan kekuasaan ke tangan B.J. Habibie telah memiliki pijakan hukum dan politik yang kuat mendasarkan pandangannya pada argumen bahwa berdasarkan Pasal 8 UUD 1945 Wakil Presiden secara otomatis akan menjabat sebagai Presiden hingga masa jabatan berakhir jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai Presiden dalam masa jabatannya.<sup>51</sup>

Oleh sebab itu polarisasi tersebut setidaknya menjelaskan adanya kelompok politik yang mendukung dan yang menentang B.J. Habibie menduduki posisi sebagai Presiden. Di kalangan Islam tradisional dan modernis, misalnya, tidak semuanya menerima B.J. Habibie. Terdapat elit Islam yang tidak puas terhadap B.J. Habibie karena B.J. Habibie dinilai telah mempolitisir simbol-simbol Islam untuk memluas basis dukungan politiknya. Di tubuh militer juga demikian, terdapat elit militer yang tidak puas terhadap B.J. Habibie, karena kebijakan B.J. Habibie yang membeli sejumlah kapal bekas dari Jerman. Juga di kalangan teknoratis terdapat teknokrat yang tidak puas terhadap B.J. Habibie karena kebijakan B.J. Habibie yang pro-teknologi *high-tech* yang dianggapnya hanya menghambur-hamburkan uang negara.<sup>52</sup>

Namun polarisasi gerakan mahasiswa tidak seluruhnya merupakan cermin dari pro-kontra elit politik terhadap legitimasi hukum dan politik Presiden B.J. Habibie. Polarisasi gerakan mahasiswa juga berasal dari perbedaan penilaian terhadap posisi B.J. Habibie pasca jatuhnya Soeharto. Gerakan mahasiswa penentang B.J. Habibie, seperti FORKOT dan FKSMJ menilai B.J. Habibie

<sup>50</sup> Lihat Munafrizal Manan, *Gerakan Rakyat Melawan Elite*, Yogyakarta: Resist Book, 2005, hal. 98-99.

<sup>51</sup> Menurut Pasal 8 UUD 1945 jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya, maka ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. Lihat Pasal 8 UUD 1945 sebelum amandemen.

<sup>52</sup> B.J. Habibie juga dianggap tidak populer di kalangan investor, pasar uang internasional, dan IMF. Lihat Munafrizal Manan *Op.Cit.*, hal.99-100.

selain masih merupakan bagian dari rezim Orde Baru, juga dinilai orang yang paling loyal terhadap Soeharto. Penolakan sebagian gerakan mahasiswa terhadap B.J. Habibie pasca 21 Mei 1998 dilakukan dalam bentuk tuntutan reformasi total. Penolakan mahasiswa terhadap Presiden B.J. Habibie, karena dianggap rezim Orde Baru hanya "berganti baju". Abdullah, Aktivistis FORKOT, mengatakan :

"Habibie kita lihat sebagai representasi kekuasaan lama, yaitu kekuasaan Soeharto. Yang waktu itu ingin meninggalkan kekuasaan tanpa pertanggungjawaban dengan berlindung di balik sosok yang bernama Habibie. Sementara prosedur yang selalu diagung-agungkan yaitu pendekatan konstitusi, mestinya ditaati oleh mereka. Ada syarat, ketika Soeharto akan melepaskan jabatan dan melimpahkan kepada Habibie, mestinya itu ada tempat yang khusus kan, Yaitu Gedung MPR/DPR. Tetapi dia (Soeharto) tidak melakukan itu, malah melakukannya di Istana. Nah itu yang membuat kami kecewa"<sup>53</sup>

Sebaliknya, gerakan mahasiswa pendukung B.J. Habibie, seperti KAMMI menilai B.J. Habibie dan pemerintahannya bukanlah kelanjutan dari rezim Orde Baru. Fachri Hamzah, Ketua KAMMI pendukung B.J. Habibie mengatakan:

"Jadi, mereka menganggap Habibie sama dengan Soeharto, suatu pandangan yang saya sendiri saya tentang. Karena, Orde Baru tanpa Soeharto itu sendiri itu sudah selesai. Sebab roh daripada Orde Baru itu, yah Soeharto sendiri. Roh dalam arti yang berhasil membangun kekuatan secara permanen, yang paling kuat *network*nya itu, hanya Soeharto. Di luar itu tidak akan ada lagi yang bisa dianggap, direspek oleh kekuatan yang kita sebut Orde Baru itu. Habibie tidak bisa menjadi tokoh. Siapa dia? Dia bukan Tentara, dia bukan orang Jawa, dia sebetulnya, yah di Golkar bolehlah, tapi basisnya kan bukan politisi, memang dia Ketua Dewan Pembina. Cukup kuatlah, tapi kita tahu, bahwa Habibie, akarnya itu, kepada aktivitas politik baik dalam birokrasi, dalam ABRI dan Golkar itu, tidak kuat. Kemudian tidak punya kharisma seperti yang dibangun oleh Soeharto."<sup>54</sup>

Dukungan gerakan mahasiswa pendukung B.J. Habibie, seperti KAMMI yang menilai B.J. Habibie dan pemerintahannya bukanlah kelanjutan dari rezim Orde Baru ditentang oleh Eros Djarot elit politik PDIP penentang B.J. Habibie yang mengatakan :

"Kenapa kita menentang Habibie. saya mewakili pemikiran kaum nasionalis waktu itu yah, saya berpikir, Habibie itu berpikir sangat liberal. Karena liberal ini tidak dipahami sebelumnya, sebenarnya *liberalisme* itu

<sup>53</sup> Wawancara dengan Abdullah, Aktivistis FORKOT dan FAMRED, Mahasiswa IKIP Jakarta (UNJ), penentang Pemerintahan B.J. Habibie, Sabtu, 30 Mei 2010 di Jakarta.

<sup>54</sup> Wawancara dengan Fachri Hamzah, Mantan Ketua KAMMI pendukung Pemerintahan B.J. Habibie, Sabtu tanggal 03 April 2010 di Cibubur.

tidak ada kebebasannya, ada batasan juga. Maka batasan-batasan itu tidak disediakan. Akhirnya menjadi *hyperliberal* seperti yang sekarang kan. Itu yang kita khawatirkan, dan terjadi sampai sekarang. Jadi semua kekacauan ini menurut saya, yah dialah (B.J. Habibie) letaknya dan dasarnya. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan Pak Habibie begini, begitu, yah silahkan, dia gak jelek semua loh, ada kepemimpinan-kepemimpinannya yang saya *apreciate*, tapi yang sangat mendasar bagaimana konsep menjalankan negara berdasarkan Indonesia, kalau konsep Jerman yah silahkan aja! Maka saya berkewajiban untuk menegur dia, begitu gak mau ditegur, yah kita lawan. Jadi pengertian perlawanan di sini masalah ideologis.”<sup>55</sup>

Selama pertengahan bulan Mei 1998, yaitu tanggal 21-22, penolakan terhadap B.J. Habibie sudah berlangsung secara diaspora di berbagai kota-kota penting di Indonesia. Di luar Jakarta, Solo misalnya, sekitar dua puluh ribu massa DRMS berkumpul di kantor DPRD II Solo melakukan aksi: (1) menolak B.J. Habibie; (2) menuntut pembubaran MPR/DPR; (3) nasionalisasi kekayaan Soeharto; (4) membentuk UU Anti Monopoli; (5) mencabut paket 5 UU Politik dan Dwi Fungsi ABRI; (6) membebaskan Tapol/Napol Orde Baru tanpa syarat; (7) mengadili Soeharto. Aksi DRMS itu kemudian berlanjut di pelataran Balai Kota Solo setelah mendapat dukungan sekitar 5.000 massa yang terdiri dari pedagang, buruh dan ibu rumah tangga. Di kampus Universitas Udayana Denpasar Bali, mahasiswa Universitas Udayana bersama ribuan massa lainnya menolak Harmoko, Hartono, dan Habibie (3H), serta Ida Bagus Oka sebagai Menteri.<sup>56</sup> Di Purwokerto juga demikian, ribuan massa FAMPR membentuk barisan dan berpawai sepanjang kurang lebih 2 km dengan kurang lebih 1.000 motor, 8 mobil, dan 1 truk menyambut turunnya Soeharto dan menuntut pengadilan Soeharto dan kroni-kroninya.

Di Jakarta tidak kalah seriusnya. FORKOT dan FKSMJ yang menentang B.J. Habibie menurunkan ribuan massanya dari berbagai perguruan tinggi se-Jabotabek untuk menyambut kejatuhan Soeharto untuk: (1) menolak naiknya B.J. Habibie sebagai Presiden; (2) menuntut pemilu dipercepat; (3) menuntut pertanggungjawaban dan pengusutan kekayaan Soeharto sambil mengingatkan

<sup>55</sup> Wawancara dengan Eros Djarot elit politik PDIP penentang B.J. Habibie, Minggu tanggal 27 Juni 2010 di Jakarta.

<sup>56</sup> Irine H. Gayatri dan Moch. Nurhasim, “*Reformasi Atau Mati!: Gerakan Mahasiswa Pasca Soeharto*”, dalam Muridan S. Widjojo et.al, *Penakluk Rezim Orde Baru: Gerakan Mahasiswa '98*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), hal.181-182.



bahwa reformasi terus berlanjut. Bahkan bagi FORKOT, FKSMJ dan Gerakan Kontra Orde Baru (GKOB) peringatan bahwa reformasi belum selesai atau tuntutan reformasi total sama artinya dengan penolakan terhadap Presiden B.J. Habibie.

Sementara sikap tegas FORKOT, FKSMJ, dan GKOB yang menolak Presiden B.J. Habibie rupanya tidak mendapat tempat di hati para pendukung B.J. Habibie. Kelompok-kelompok gerakan pendukung B.J. Habibie berusaha memperlihatkan sikap ketidaksukaannya terhadap kelompok-kelompok gerakan penentang B.J. Habibie dengan cara bersedia melakukan konfrontasi. Di pelataran gedung DPR/MPR Senayan tanggal 22 Mei 1998, ribuan massa pendukung B.J. Habibie dan "reformasi konstitusional" yang dipimpin oleh Ahmad Soemargono (KISDI), Andreanto (HUMANIKA), Fadly Zon *International Policy Studies/IPS*) dan Muchtar Biki bersama kelompok Pendekar Banten, GPI, Yayasan Pedagang Muslim Sukabumi, Bakor Pondok Pesantren Indonesia, GPA, GPII, PPII, HMII, DDII, IMM, PII hampir bentrok dengan ribuan massa FORKOT dan Front Nasional.<sup>57</sup>

Dukungan terhadap B.J. Habibie dengan cara bersedia melakukan konfrontasi ini dilakukan karena menganggap B.J. Habibie sebagai simbol Islam dan merupakan tokoh yang dianggap mampu membawa perbaikan. Ahmad Sumargono, aktivis KISDI, elit politik pendukung B.J. Habibie mengatakan:

"Senayan dikuasai oleh kelompok-kelompok kiri itu, termasuk Adnan Buyung Nasution, Emil Salim dan mahasiswanya, hampir sebulan, itu dia kibarkan penghinaan terhadap Habibie, saya tidak ada hubungan emosional dengan Habibie, gak ada saya itu, dekat juga gak, Cuma beberapa kali saya ketemu. Nah, ketika penghinaan-penghinaan terhadap Habibie, "Habibie biadab, Habibie turun, Habibie ini.." Saya dengan kawan-kawan dengan kekuatan Islam, bukan saya sendiri, merencanakan bagaimana untuk menembus ini, kita usir orang-orang ini. Kebetulan saya sebagai Korlap, M.S. Kaban sebagai wakil saya, menyerbu Senayan, kita datang kesana, kita turun kan, dan kita kuasai."<sup>58</sup>

Sedangkan HMI yang mendukung B.J. Habibie secara organisasional tidak langsung berkonfrontasi dengan FORKOT dan FKSMJ. Akan tetapi aktivis HMI

<sup>57</sup> Lihat *Forum Keadilan*, No 5 Tahun VII, 15 Juni 1998. Lihat juga Irine H. Gayatri dan Moch. Nurhasim, "Reformasi Atau Mati!: Gerakan Mahasiswa Pasca Soeharto", dalam Muridan S. Widjojo et.al, *Ibid.*, hal.182-183.

<sup>58</sup> Wawancara dengan Ahmad Sumargono, Aktivis KISDI, elit politik pendukung Pemerintahan B.J. Habibie, Kamis, tanggal 01 April 2010 di Jakarta.

yang turut serta membentuk KAMMI secara tidak langsung menggunakan KAMMI untuk menghadang aksi-aksi FORKOT dan FKSMJ.<sup>59</sup> Mengenai sikap HMI yang mendukung B.J. Habibie, Anas Urbaningrum Ketua Umum PB HMI mengatakan:

“Memang, pada waktu itu, tidak terbayangkan sebelumnya, ringkas cerita bahwa Pak Harto menyatakan berhenti, dan atas nama konstitusi, Habibie yang mengganti untuk meneruskan masa jabatan Pak Harto. Nah, karena itu jalan pikiran PB HMI waktu itu adalah bukan sempit untuk mendukung Habibie, tetapi mendukung Habibie sebagai Presiden menggantikan Pak Harto adalah semata-mata untuk menyelamatkan situasi transisi politik, dan itu yang terbaik untuk menyiapkan Pemilu. Konteksnya adalah untuk keselamatan pemerintahan, keselamatan transisi politik dan tidak ada kekosongan kekuasaan. Kalau ada transisi kemudian ada kekosongan kekuasaan karena presiden yang menggantikan Pak Harto ditolak, itu akan menjadi krisis politik yang susah dikalkulasi implikasinya. Dasarnya itu. Tentu juga, secara implisit, ada ada pertimbangan subjektifnya. Tapi ini bagian kecil saja dalam konteks itu. Habibie pada saat itu dinilai sebagai salah satu representasi politik yang akomodatif terhadap kepentingan umat.”<sup>60</sup>

Dukungan terhadap B.J. Habibie yang dianggap sebagai simbol Islam, ditolak oleh gerakan mahasiswa penentang B.J. Habibie. Gerakan Mahasiswa penentang B.J. Habibie menganggap bahwa pendukung B.J. Habibie menggunakan politik aliran Islam untuk mempertahankan B.J. Habibie. Syafieq, aktivis FORKOT dan FAMRED mengatakan:

“Ya, saya menganggap bahwa mengapa mereka mendukung Habibie karena Habibie adalah representasi dari identitas politik dia. Semua kelompok yang mendukung Habibie waktu itu bisa di lacak mereka berakar dari politik Islam, hampir semua dari situ. Jadi begitu Soeharto jatuh beberapa kalangan kembali ke kelompok mulai mempraktekan politik aliran kembali dari kelompok lama yang mendukung Habibie saya kira secara nyata mereka mempraktekan koalisi aliran.”<sup>61</sup>

Konfrontasi antara kelompok pendukung dan kelompok penentang B.J. Habibie di satu sisi menggambarkan masih adanya kekuatan sumber daya politik B.J. Habibie tapi di lain sisi juga menjelaskan adanya potensi kelemahan dari basis dukungannya. Kekuatan sumber daya politik B.J. Habibie

<sup>59</sup> Tentang aktivis HMI yang turut serta mendirikan KAMMI dan konfrontasi KAMMI dengan FORKOT dan FKSMJ. Lihat *Pro dan Kontra Habibie* dalam Koran *Tempo* 24 November 1998.

<sup>60</sup> Wawancara dengan Anas Urbaningrum Ketua Umum PB HMI Pendukung Pemerintahan B.J. Habibie, Selasa tanggal 04 Mei 2010 di Jakarta.

<sup>61</sup> Wawancara dengan Syafieq Mahasiswa STF Driyarkara, Aktivis FORKOT dan FAMRED, Penentang Pemerintahan B.J. Habibie, Selasa tanggal 12 Januari 2010 di Jakarta.

antara lain: (1) secara *de facto* memegang kekuasaan pasca-Soeharto; (2) sumber finansial yang tergolong kuat; (3) mesin politik Golkar yang masih tetap eksis di berbagai daerah-daerah; (4) kendali atas birokrasi; (5) secara institusional masih mendapat dukungan dari ABRI. Kekuatan sumber daya politik B.J. Habibie adalah selain didukung oleh orang-orang dekatnya, intelektual dan faksi Islam, eks Orde Baru yang sedang mencari suaka politik, B.J. Habibie juga didukung oleh para avonturir/oportunis politik.<sup>62</sup>

Sebaliknya, didorong oleh kesadaran akan ancaman dari potensi kelemahan dari basis dukungan politiknya, B.J. Habibie kemudian berusaha agar pemerintahannya tetap dapat diterima oleh berbagai kalangan.<sup>63</sup> B.J. Habibie kemudian menggalang simpati dan dukungan dari berbagai pihak dengan cara mengakomodasi kepentingan dan tuntutan dari pihak-pihak lain terutama kelompok-kelompok yang menentanginya, seperti: (1) mengumumkan susunan kabinet yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan pada tanggal 22 Mei 1998; (2) menjanjikan pemerintahan yang bersih, efisien dan bebas KKN, serta kesempatan ekonomi yang adil;<sup>64</sup> (3) mengeluarkan serangkaian kebijakan liberalisasi politik yang selama era Soeharto mustahil diwujudkan. Fachri Hamzah, Mantan Ketua KAMMI Pusat, mengatakan:

“Dan itu terbukti, 7 bulan kekuasaannya itu, betul-betul dia gunakan secara efektif, untuk membangun fondasi bagi demokrasi, baik dalam 300-an UU yang dia buat selama itu, dan juga kemudian membangun kebebasan dan menyerahkan masyarakat itu untuk lebih partisipatif, dalam semua hal, termasuk dalam media, kebebasan pers.”<sup>65</sup>

Pengumuman susunan Kabinet Reformasi Pembangunan diakui membuat tenang situasi, setidaknya untuk sementara, karena tumbuhnya optimisme pemerintahan yang bersih, efisien dan bebas KKN. Hal itu dapat dicermati dari 36 nama yang diumumkan B.J. Habibie terdapat 16 orang yang tergolong orang baru di pemerintahan, terdapat 6 Jenderal TNI AD aktif dan purnawirawan, 3 orang dari luar Golkar: 2 orang dari PPP, yaitu Hamzah Haz dan A.M. Saefuddin dan 1 orang dari PDI, yaitu Panangian Siregar. Sedangkan

<sup>62</sup> Munafrizal Manan, *Op.Cit.*, hal.100.

<sup>63</sup> Munafrizal Manan, *Op.Cit.*, hal.100-101.

<sup>64</sup> Imam Baihaqi (ed), *Soeharto Lengser, Perspektif Luar Negeri*, Yogyakarta: LKiS, 1999, hal. 98.

<sup>65</sup> Wawancara dengan Fachri Hamzah, Mantan Ketua KAMMI pendukung pemerintahan B.J. Habibie, Sabtu tanggal 03 April 2010 di Cibubur.

20 orang yang merupakan wajah lama terdapat 15 orang yang tetap di posnya semula dan 5 orang pada pos baru. Pemberhentian putri sulung Soeharto, Siti Hardiyanti Indra Rukmana (Tutut) dari jabatan Menteri Sosial, Jenderal Hartono dari jabatan Menteri Dalam Negeri, Bob Hasan dari jabatan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dan Fuad Bawazier dari jabatan Menteri Keuangan, B.J. Habibie ingin menunjukkan bahwa pemerintahannya profesional, aspiratif, kredibel, bebas dari KKN, serta memberi kesempatan kepada semua kekuatan politik yang ada di dalam masyarakat.

Reaksi positif datang kalangan intelektual, seperti Amien Rais, Nurcholish Madjid dan Emil Salim. Amien Rais meskipun mendukung B.J. Habibie tetap melihat Kabinet Reformasi sebagai pemerintahan transisi yang hanya bertugas mempersiapkan pemilu dan paket UU politiknya, Sidang Umum MPR untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden baru hingga enam bulan ke depan. Nurcholish Madjid dan Emil Salim juga mengeluarkan pernyataan yang "moderat", yaitu menerima susunan Kabinet Reformasi dan memosisikan B.J. Habibie sebagai pemerintahan transisi. KAMMI Solo dan AMIN di Salatiga juga memberikan kesempatan pada B.J. Habibie dan kabinet barunya sampai diadakannya pemilu. SMPT STIE-AMKOP di Ujung Pandang meminta Presiden B.J. Habibie untuk segera menyelesaikan krisis ekonomi, sosial, dan politik, menghapuskan KKN serta menciptakan peradilan yang bersih dan berwibawa.<sup>66</sup>

Akan tetapi, upaya dan janji B.J. Habibie tersebut tidak seluruhnya disambut baik oleh semua kalangan. Sejumlah pihak, seperti Kelompok Petisi 50 tetap melihat komposisi Kabinet Reformasi masih berbau KKN. Kelompok Kerja Petisi 50 tetap mengeluarkan Pernyataan Keprihatinan. Kelompok Kerja Petisi 50 yang dimotori oleh Ali Sadikin bahkan mengajukan tuntutan "reformasi paripurna di semua bidang kehidupan masyarakat" yang oleh mahasiswa disebut sebagai reformasi total dan menilai pelantikan B.J. Habibie sebagai Presiden oleh Mahkamah Agung tidak konstitusional.<sup>67</sup>

Terkait dengan tuntutan pemerintahan profesional, aspiratif, kredibel, bebas dari KKN, serta memberi kesempatan kepada semua kekuatan politik yang ada di dalam masyarakat. Selama bulan Juni hingga bulan Juli 1998 sejumlah aksi-

<sup>66</sup> Irine H. Gayatri dan Moch. Nurhasim, *Op.Cit.*, hal.185-186.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hal.185.

aksi menuntut mundurnya pejabat pemerintah yang dinilai 'tidak bersih' mewarnai politik nasional. Muncul desakan mundur terhadap pejabat yang dinilai terlibat dalam tragedi 27 Juli 1996, desakan mundur Menteri KLH Panangian Siregar oleh gabungan 38 LSM dan mahasiswa di Yogyakarta, karena dinilai tidak memiliki kompetensi di bidangnya dan ditengarai terlibat dalam kasus penyerbuan DPP PDI 27 Juli 1996. Di Ujung Pandang, di halaman kantor Bapedal, ratusan aktivis pro-demokrasi, pengacara, serta aktivis Mapala menuntut mundur Panangian Siregar.<sup>68</sup>

Di Padang, ribuan mahasiswa Universitas Bung Hatta mengajukan keberatan terhadap susunan Kabinet Reformasi. Mereka tidak puas karena B.J. Habibie mengangkat mantan Gubernur Sumatera Barat, Hasan Basri Durin, sebagai Menteri Agraria yang dianggap tidak bersih dari KKN. Di Semarang, aksi-aksi FKPI mempertanyakan mekanisme pengangkatan B.J. Habibie, menuntut pertanggungjawaban Soeharto dan menuntut *recall* anggota DPR/MPR yang berjumlah 700 orang. Di Bandung gabungan mahasiswa Jawa Barat menolak pengangkatan B.J. Habibie dan menuntut reformasi total serta pelaksanaan Sidang Istimewa (SI).<sup>69</sup>

Tuntutan serupa diajukan oleh mahasiswa Universitas Warmadewa di Denpasar. Mahasiswa Universitas Warmadewa menuntut proses pengadilan terhadap mantan Presiden Soeharto. Di Medan, aksi mahasiswa dan pengurus Senat Mahasiswa Universitas Sumatera Utara mempertegas enam hal, yaitu: (1) pemerintahan B.J. Habibie merupakan pemerintahan transisi; (2) pembebasan tapol/napol; (3) pencabutan UU Subversif dan UU Pemilu; (4) rasionalisasi kekayaan pejabat pemerintah dan swasta yang diperoleh secara illegal; (5) menciptakan iklim perekonomian yang lebih kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya ekonomi kerakyatan dengan menghindari praktek-praktek monopoli, oligopoli dan kartel; (6) serta penurunan dan stabilisasi harga sembako. Di Lampung, KMPPRL bersama ribuan massa dari kampus UBL melakukan *long march* ke RRI Bandar Lampung sambil menuntut pencabutan Dwifungsi

<sup>68</sup> *Ibid.*, hal.194-195.

<sup>69</sup> Irine H. Gayatri dan Moch. Nurhasim, "*Reformasi Atau Mati!: Gerakan Mahasiswa Pasca Soeharto*", dalam Muridan S. Widjojo et.al, *Ibid.*, hal.186.

ABRI, pembebasan Tapol/Napol, pembentukan Dewan Rakyat untuk pemerintahan transisi, dan referendum bagi rakyat Maubere.<sup>70</sup>

Mengenai penegasan bahwa pemerintahan B.J. Habibie merupakan pemerintahan transisional, baik pendukung maupun penentang B.J. Habibie tampak sependapat. Akan tetapi tuntutan Dewan Rakyat, Pemerintahan Presidium, Komite Rakyat Indonesia atau yang sejenisnya, HMI menegaskan ketidaksetujuannya. Penolakan HMI terhadap tuntutan Dewan Rakyat, Pemerintahan Presidium, Komite Rakyat Indonesia atau yang sejenisnya bukan saja karena konsep itu tidak memiliki legitimasi politik dan hukum yang kuat, tetapi juga utopis dalam implementasinya. Anas Urbaningrum, Ketua Umum PB HMI, mengatakan:

“Bayangkan kalau Pak Harto turun, Habibie ditolak kemudian dibentuk pemerintahan presidium. Mengoperasikan Pemerintahan Presidium itu, yah sangat tidak rasional. Konsepnya sih bagus, artinya di atas kertas bisa dimengerti, tetapi mengoperasikan itu hampir tidak ada jalanlah. Yang pertama, landasan konstitusinya apa? Yang kedua, kalau misalnya disepakati ada Presidium, cara memilihnya seperti apa? Siapa yang harus dipilih, dasar legitimasi politiknya apa, dan terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan tentang operasional Pemerintahan Presidium, saya kira juga belum ada preseden tentang Pemerintahan Presidium. Meskipun ide itu diformatikan sebagai ide-ide pada masa transisi, ide itu hanya indah dikonsep, tapi dalam pengoperasiannya rasanya hampir utopis.”<sup>71</sup>

Sebaliknya, kelompok gerakan mahasiswa penentang B.J. Habibie, seperti FORKOT menilai B.J. Habibie dan pemerintahannya adalah kelanjutan dari rezim Orde Baru karena itu FORKOT menuntut dibentuknya Komite Rakyat Indonesia sebagai pemerintahan sementara. Syafieq, Aktivist FORKOT dan FAMRED, mahasiswa STF Driyarkara mengatakan:

“Kita waktu itu tidak menuntut pemilu segera tetapi kita ingin ada pemerintahan transisional yang memastikan rambu-rambut yang memastikan aturan main sehingga anasir-anasir Orde Baru tidak bisa kembali lagi ke kekuasaan. Posisi FORKOT ketika Soeharto jatuh kemudian juga FAMRED dua-duanya juga sama-sama. Mereka (FORKOT dan FAMRED) tidak mengusung isu pemilu, mereka lebih mengusung pemerintahan yang transisional yang terdiri dari orang yang relatif tidak terlibat kejahatan politik dan ekonomi Orde Baru dan mereka inilah nanti diharapkan menyelenggarakan pemilu ulang. Kita sudah sempat menyusun

<sup>70</sup> *Ibid.*, hal.186-187.

<sup>71</sup> Wawancara dengan Anas Urbaningrum Ketua Umum PB HMI pendukung Pemerintahan B.J. Habibie, Selasa tanggal 04 Mei 2010 di Jakarta.

kita membayangkan ada semacam Presidium sementara yang kita beri nama Komite Rakyat Indonesia yang bayangannya, ya seperti Komite Nasional Indonesia Pusat. Kita menginginkan dibentuk pemerintahan sementara semacam Presidium yang beranggotakan orang-orang yang tidak terlibat dengan Orde Baru. Waktu itu kita menghubungi banyak sekali orang ada yang menghubungi Megawati, saya sendiri menghubungi Gus Dur, ada yang menghubungi Amien Rais, jadi kita membagi tugas. Kita tak berpersepsi bahwa kita yang membentuk karena kita tahu diri bahwa rakyat Indonesia bukan Cuma kita tapi kita mengusulkan dan kita sudah menghubungi beberapa tokoh-tokoh Gus Dur waktu itu tidak keberatan, kita menghubungi Kwik dan Megawati juga. Beberapa teman, seperti Abdulah waktu itu sempat bertemu Megawati tetapi Megawati tidak terlalu antusias.”<sup>72</sup>

Kabinet Reformasi Pembangunan yang dilantik di Istana Negara pada tanggal 23 Mei 1998 oleh semua unsur kekuatan yang ada tetap dilihat sebagai pemerintahan transisional. KAMMI, misalnya, dalam Rapat Akbarnya di Lapangan Masjid Al-Azhar pada tanggal 22 Mei 1998 yang juga menghadirkan Amien Rais sebagai pembicara menegaskan bahwa pemerintahan B.J. Habibie sebagai pemerintahan transisional. KAMMI bahkan menegaskan batas waktu bagi B.J. Habibie, yaitu hanya enam bulan untuk menuntaskan agenda-agenda reformasi di bidang politik.<sup>73</sup> Penegasan batas waktu 6 bulan bagi pemerintahan transisional membuat Presiden B.J. Habibie pada tanggal 23 Mei 1998 harus mengundang Amien Rais, Emil Salim, Rudini, Nurcholis Madjid, Adnan Buyung Nasution, dan Sudjana Syafe'i untuk meminta masukan.<sup>74</sup>

Sebaliknya, kelompok penentang B.J. Habibie seperti Gerakan Kontra Orde Baru (GKOB) dan FORKOT selain tetap konsisten dengan sikapnya yang menolak pemerintahan baru B.J. Habibie dan menganggap pemerintahan B.J. Habibie sebagai metamorfosis dari pemerintahan Orde Baru, juga mengajukan alternatif untuk pembentukan pemerintahan transisi B.J. Habibie. Di Jakarta, pada 28 Mei 1998, FORKOT dan FKSMJ dengan ribuan massanya kembali menggempur gedung DPR/MPR dengan tuntutan pembentukan Komite

<sup>72</sup> Wawancara dengan Syafieq, Aktivist FORKOT dan FAMRED, mahasiswa STF Driyarkara, Penentang Pemerintahan B.J. Habibie, Selasa tanggal 12 Januari 2010 di Jakarta.

<sup>73</sup> Mahfudz Sidiq, *Op.Cit.*, hal.156.

<sup>74</sup> Pada akhir pertemuan, Amien Rais menyatakan kepada wartawan pernyataan Presiden B.J. Habibie bahwa pemerintahannya akan mengantarkan Indonesia kepada pemilu dengan perangkat UU Politik yang baru. Lihat Mahfudz Sidiq, *Ibid.*, hal.156.

Rakyat Indonesia (KRI) untuk mengangkat eksekutif melalui MPRS/DPRS. Sedangkan FKSMJ tetap menuntut percepatan pelaksanaan SI.<sup>75</sup>

Selama pertengahan hingga akhir bulan Mei 1998 tercatat 90 aksi mahasiswa dari 536 jumlah total demonstrasi di berbagai daerah dengan tiga isu utama: (1) menolak B.J. Habibie; (2) percepat SI MPR; (3) pemilu ulang.<sup>76</sup> Sesudahnya, sepanjang Juni 1998 tercatat 274 demonstrasi dengan dua isu politik utama; (1) percepatan SI MPR; dan (2) pengadilan Soeharto<sup>77</sup>. Meskipun demikian aksi-aksi yang menuntut perubahan politik dan ekonomi yang menandai perjalanan Kabinet Reformasi Pembangunan juga tetap terlihat di daerah-daerah.<sup>77</sup>

Penetapan B.J. Habibie sebagai pengganti Presiden Soeharto telah terbukti mengandung komplikasi politik.<sup>78</sup> Kedekatan B.J. Habibie dengan Soeharto telah menyulitkan B.J. Habibie di hadapan para penentanginya. Tudingan bahwa B.J. Habibie tidak memiliki keberanian moral dan politik untuk menetapkan Soeharto sebagai sumber dari semua malapetaka ekonomi dan politik yang dihadapi bangsa Indonesia dan tudingan ketakutan mengadili Soeharto terbukti benar setelah pemerintahan B.J. Habibie mendeponir kasus Soeharto. Padahal tuntutan paling pokok dari gerakan reformasi sebagaimana yang tampak dari jargon, pamflet, poster, orasi, seruan dan pernyataan para penentang B.J. Habibie adalah B.J. Habibie harus memiliki keberanian memutus hubungannya dengan Soeharto.<sup>79</sup>

Tudingan para penentang B.J. Habibie tersebut justru menemukan alasan pembenarnya setelah pemerintah B.J. Habibie tampak gigih menepis semua kemungkinan penggunaan langkah politik dan hukum untuk meminta pertanggung jawaban Soeharto, keluarga dan para kroninya. Oleh karena itu di satu sisi sikap penentangan yang diterima B.J. Habibie merupakan akibat logis dari kedekatan politik B.J. Habibie dengan Soeharto. Di lain sisi strategi "*divide and rule*" yang berhasil dikembangkan Soeharto merupakan sumber dari semua pembelahan, kompetisi dan konflik politik baik di kalangan kelompok gerakan mahasiswa

<sup>75</sup> Irine H. Gayatri dan Moch. Nurhasim, "*Reformasi Atau Mati!: Gerakan Mahasiswa Pasca Soeharto*", dalam Muridan S. Widjojo *et.al*, *Ibid.*, hal.187.

<sup>76</sup> *Ibid.*, hal.190.

<sup>77</sup> *Ibid.*, hal.191.

<sup>78</sup> *Ibid.*, hal. xv

<sup>79</sup> Cornelis Lay, *Ibid.*, hal. xv



maupun di lapisan elit politik masa pemerintahan B.J. Habibie.<sup>80</sup> Strategi strategi "divide and rule" Soeharto digambarkan oleh Eli Salomo dengan menjelaskan konflik antara FORKOT dan KAMMI. Eli Salomo, Mahasiswa ISTN Jakarta, aktivis FORKOT mengatakan:

"Kita juga kan banyak kenal tokoh-tokoh yang ada di KAMMI baik tokoh yang di tingkat kampus, level Jakarta, maupun level nasional dan karakternya kita sudah tahu dan bertarungnya sudah terjadi, dan kita paham benar mereka selama ini yang mencoba menggembosin gerakan anti-Orde Baru dan gerakan anti-Soeharto selama bertahun-tahun di dalam kampus. Kemudian pada sisi oportunistis pada sisi akhir pemerintahan Soeharto mereka mengambil pilihan oportunistis melawan tuannya sendiri. Kita paham benar mereka kok yang menggembosin dalam kampus, mereka yang menuduh kita komunis dalam kampus. Jadi tidak pusing, tidak terlalu terkejut saat kemudian KAMMI menjadi oportunistis terhadap kekuasaan yang ada, karena pilihannya menyusup pada kekuasaan yang ada. Jadi kita tidak terlalu pusing, tapi kita paham inilah lawan kalau di level mahasiswa yang kita hadapi sehari-harinya sebelum Soeharto jatuh maupun pada saat Habibie berkuasa."<sup>81</sup>

Di mata FORKOT dukungan KAMMI dan HMI terhadap B.J. Habibie bukan lagi bersifat moral, melainkan sudah bersifat politik, sehingga KAMMI dan HMI tampak sebagai *underbouw* politik. Polarisasi antara FORKOT dan KAMMI/HMI yang sangat tajam dapat dilihat dari sikap FORKOT yang menuding gerakan KAMMI dan HMI sebagai gerakan politik partai di level mahasiswa. Adian Napitupulu, Aktivis FORKOT, mengatakan:

"Jadi dari segi historisnya, mereka sebenarnya bukan gerakan mahasiswa, tapi gerakan politik partai di level mahasiswa. Nah, bagi saya itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau dibilang bagaimana terjadinya polarisasi dalam konteks kekuasaan Habibie pada saat itu, saya tidak menganggap sama sekali HMI dan KAMMI sebagai gerakan mahasiswa. Mereka *underbouwnya* partai".<sup>82</sup>

Kontroversi terpilihnya B.J. Habibie sebagai Presiden juga diperburuk oleh kenyataan bahwa hampir semua elit politik yang setia terhadap Soeharto selama masa pemerintahannya mendukungnya tanpa berusaha menarik simpati publik dan pembelaan. Padahal justru kenyataan inilah yang nantinya memberikan alasan

<sup>80</sup> Lihat juga Cornelis Lay, "Setelah Soeharto Jatuh", dalam Geoff Forrester dan R. J. May (Ed.), *Ibid.*, hal. Xv.

<sup>81</sup> Wawancara dengan Eli Salomo, Aktivis FORKOT penentang pemerintahan B.J. Habibie, Mahasiswa ISTN Jakarta, Sabtu, 28 November 2009 di Jakarta.

<sup>82</sup> Wawancara dengan Adian Napitupulu, Aktivis FORKOT penentang pemerintahan B.J. Habibie, Sabtu, 29 Mei 2010 di Jakarta.

kuat bagi para penentang B.J. Habibie dan para pendukung gerakan reformasi untuk tetap meyakini bahwa rezim Orde Baru Soeharto tetap eksis. Oleh karena itu dapat dimengerti bila terdapat elit politik yang melihat pemerintahan B.J. Habibie sebagai Orde Baru jilid dua.<sup>83</sup> Rahman Tolleng, elit politik penentang B.J. Habibie mengatakan:

“Ketika Soeharto turun dan kemudian terdengar secara konstitusional Habibie yang naik memang secara konstitusi mengatakan begitu. Terus terang itu tidak cukup karena tidak terjadi perubahan. Habibie kan bagian dari rezim dan sebelumnya dikenal sebagai pemuja Soeharto, Soeharto sebagai gurunya.”<sup>84</sup>

Tudingan elit politik penentang B.J. Habibie bahwa pemerintahan B.J. Habibie merupakan Orde Baru jilid dua bukan hanya dikaitkannya dengan pengalaman sebelumnya yang dilihatnya sebagai gejala normal, tetapi juga suatu proses yang mesti terjadi dalam proses transisi, sehingga apa yang dilakukan oleh B.J. Habibie tidak perlu dipuji tapi perlu dicurigai.<sup>85</sup>

Kenyataan bahwa legitimasi politik Presiden B.J. Habibie tidaklah terlalu kuat, karena tidak dipilih melalui Pemilu dan mobilisasi politik terhadapnya juga relatif kurang membuat posisi politik B.J. Habibie sangat rentan kritik dan oposisional. Perlawanan kelompok mahasiswa pro-Reformasi Total terhadap mobilisasi politik yang dilakukan oleh kelompok “Reformasi Konstitusional”: Komite Umat Islam Untuk Reformasi Konstitusional (KUIRK) yang terdiri dari 43 organisasi massa untuk mendukung B.J. Habibie menegaskan bahwa dukungan politiknya tidaklah terlalu kuat.<sup>86</sup> Lemahnya mobilisasi politik juga terkait dengan urgensi dan dampak dari kebijakan B.J. Habibie (Lihat Tabel 3.3).

<sup>83</sup> Legitimasi B.J. Habibie juga dapat diketahui dari hasil *polling* yang telah dilakukan oleh Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha Indonesia (LSPEUI) dan Laboratorium Ilmu Politik FISIP UI. *Polling* LSPEUI dilakukan terhadap 5000 responden berpenghasilan di bawah 400.000 rupiah di 10 kota dan hasilnya menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat hanya 38,9%. Demikian pula *polling* yang dilakukan Laboratorium Ilmu Politik FISIP UI dengan 1.000 responden di Jakarta menunjukkan bahwa B.J. Habibie meraih tempat ketiga dengan 8,2% setelah Amien Rais (12,8%) dan Megawati Soekarnoputri (11,3%).<sup>83</sup> Lihat juga Cornelis Lay. *Ibid.*, hal. xv-xvi.

<sup>84</sup> Wawancara dengan Rahman Tolleng, elit politik penentang pemerintahan B.J. Habibie, Rabu, 23 Desember 2009 di Jakarta.

<sup>85</sup> Cornelis Lay. *Op., Cit.*, hal. xvi.

<sup>86</sup> Iwan Gardono Sujatmiko, “Dampak Reformasi” dalam Selo Soemardjan (Ed.), *Kisah Perjuangan Reformasi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), hal. 263.

**Tabel 3.3:**  
**Kebijakan Presiden B.J. Habibie**

SIFAT	DAMPAK PADA MASYARAKAT	
	LUAS	Kurang LUAS
URGEN	Sembako, pengusutan Soeharto	Pembentukan kabinet, percepatan pemilu, kebebasan pers, pengusutan 13-14 Mei, penggantian utusan golongan
KURANG URGEN		Masalah PDI, pembebasan Tapol, pemberian Mahaputera, pemberian rumah, pergantian Jaksa Agung

**Sumber:** Iwan Gardono Sujatmiko, "*Dampak Reformasi*" dalam Selo Soemardjan (ed.), *Kisah Perjuangan Reformasi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999, hal.266.

Meskipun demikian masih terdapat kebijakan B.J. Habibie yang mendapat dukungan luas, seperti pembebasan Tapol/Napol, pencabutan Permenpen No.1/1984 yang membatasi kebebasan pers, serta mempersiapkan RUU Pemilu dan Kepartaian. Akan tetapi, DPR bersama dengan pemerintahan B.J. Habibie juga mengeluarkan sejumlah kebijakan yang kontradiktif, seperti Perpu No.2/1998 yang membatasi kebebasan berekspresi di muka umum melalui dan UU No.9/1998 tentang Unjuk Rasa.<sup>87</sup> UU Politik juga terus dipersoalkan oleh aktivis Gerakan Kontra Orde Baru (GKOB). GKOB menuntut pencabutan paket UU Politik: UU tentang Pemilu, UU tentang Susunan dan Kedudukan MPR/DPR dan DPRD, UU tentang Papol dan Golkar, UU tentang Keormasan dan UU tentang Referendum.<sup>88</sup>

Di mata dunia internasional, persoalan politik yang menyita perhatian sekaligus mengundang kecaman terhadap pemerintah Orde Baru, seperti kasus Timor Timur, juga muncul sejak turunnya Soeharto. Pada masa Orde Baru,

<sup>87</sup> Penolakan terhadap Perpu No.2/1998 dilakukan oleh seratus aktivis FORKOT dan 16 organisasi di Ujung Pandang pada 31 Juli 1998. Lihat Irine H. Gayatri dan Moch. Nurhasim, "*Reformasi Atau Mati!: Gerakan Mahasiswa Pasca Soeharto*", dalam Muridan S. Widjojo et.al, *Op.Cit*, hal.195.

<sup>88</sup> Usulan mengenai perubahan UU datang dari lembaga-lembaga pemerintah yaitu Departemen Dalam Negeri, Departemen Kehakiman, dan LIPI. Dalam pembahasan terhadap RUU bidang politik, terutama mengenai Pemilu, Papol, dan Susduk MPR, DPR, dan DPRD, persoalan posisi Fraksi ABRI yang masih ada di DPR menjadi suatu ironi, mengingat DPR menjadi pihak yang akan menggolkan RUU Politik menjadi UU. *Ibid.*, hal.196. Pemerintah B.J. Habibie juga mendapat sorotan karena kebijakan-kebijakan politiknya. Golkar juga merupakan sasaran hujatan dari berbagai pihak, Golkar dituntut oleh utusan dari lima daerah tingkat I (DPD Bengkulu, Jatim, DIY, Timor Timur, dan Irian Jaya) untuk meminta maaf atas kesalahannya di masa lalu yang mengakibatkan krisis ekonomi dan politik. *Ibid.*, 197.

persoalan Timor Timur selalu dianggap sudah selesai, dan setiap aksi untuk menuntut referendum dan kemerdekaan selalu dicap separatis, atau subversif. Kejatuhan Soeharto bagi aktivis Timor Timur yang mendukung hak penentuan nasib sendiri, merupakan pendorong untuk mengkonsolidasikan diri. Meskipun terdapat perbedaan perspektif tentang reformasi, perekat yang bisa menyatukan aktivis Timor Timur dan gerakan mahasiswa di Jawa adalah isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Di Dili, puluhan ribu massa rakyat dan mahasiswa DSMTT berkumpul di kampus Universitas Timor Timur menuntut pembebasan Xanana Gusmao dan melaksanakan referendum. Keesokan harinya 1500 aktivis Timor Timur yang diaspora dari berbagai perguruan tinggi di Jawa berkumpul di depan gedung Deplu, Pejambon, Jakarta, dengan tuntutan yang sama.<sup>89</sup>

Di tengah-tengah perdebatan mengenai reformasi politik dan hukum, satu hal yang sangat menonjol adalah persoalan Dwi Fungsi ABRI. Selain UU Politik, tuntutan pencabutan Dwi Fungsi ABRI masih sering terdengar dalam aksi-aksi protes, apalagi dihubungkan dengan berbagai kekerasan politik yang terjadi pada era Orde Baru. Selama bulan Oktober 1998, gugatan terhadap Dwi Fungsi ABRI dalam wacana publik meramaikan panggung seminar dan diskusi. Dwi Fungsi ABRI merupakan distorsi dari fungsinya yang utama, yaitu menjaga ketahanan dan keamanan negara. Selama rezim Orde Baru berkuasa, ABRI hanya menjadi alat bagi pelanggaran kekuasaan dengan menempatkannya pada kursi legislatif. Sebagai alat, penempatannya dalam kursi legislatif akhirnya melegitimasi pembatasan partisipasi politik rakyat.<sup>90</sup>

Memasuki bulan Oktober 1998, aksi-aksi menolak Dwi Fungsi ABRI marak di berbagai kota. "Cabut Dwi Fungsi ABRI" mengiringi peringatan ulang tahun ABRI ke-53. Pada 5 Oktober 1998, demonstrasi secara sporadis dilakukan oleh berbagai kelompok aksi baik di Jakarta maupun di daerah-daerah. Umumnya disertai tuntutan agar ABRI bertanggung jawab pada kasus-kasus pelanggaran HAM.<sup>91</sup> Regresi proses reformasi di bidang politik yang terjadi pada pemerintahan baru ini seolah mencapai puncaknya kurang dari dua minggu menjelang pelaksanaan Sidang Istimewa (SI) MPR bulan November 1998.

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, hal.198.

<sup>90</sup> *Ibid.*, hal.201.

<sup>91</sup> *Ibid.*, hal.201.

Tuntutan yang semakin gencar agar ABRI "hengkang" dari kursi empuk legislatif sirna, karena posisi ABRI di DPR tidak dapat digoyahkan lagi, mengingat hal itu sudah diatur dalam Rancangan Ketetapan (Rantap) MPR yang akan diputuskan dalam SI MPR menjadi TAP MPR. BP MPR sudah menyepakati bahwa anggota DPR terdiri dari unsur partai politik peserta pemilu dan anggota ABRI yang diangkat. Menjelang SI MPR 1998, kecenderungan mobilisasi massa marak di beberapa wilayah. Aksi-aksi mahasiswa dengan berbagai tuntutan yang bernada menolak maupun mendukung SI dengan "agenda tambahan" pun berlangsung secara sporadis.<sup>92</sup>

Agenda politik Kabinet Reformasi Pembangunan yang diharapkan mampu mengakomodasi tuntutan reformasi total adalah Sidang Istimewa (SI) MPR. Namun, bagi mereka yang tidak yakin akan kapabilitas pemerintahan B.J. Habibie, tuntutan untuk menolak SI bahkan semakin nyaring disuarakan. Sementara itu, pemerintah berusaha menjalankan SI yang sudah ditetapkan jadwalnya, 10-13 November 1998. Maka B.J. Habibie pun mengeluarkan peringatan di depan para pimpinan ABRI di Istana Merdeka. "Diinstruksikan kepada seluruh jajaran ABRI untuk mengamankan agenda politik sebaik-baiknya dan tidak memberikan peluang bagi resiko sekecil apapun".<sup>93</sup>

Menjelang Sidang Istimewa (SI), "huru-hara" masih berlangsung setelah gelombang aksi di beberapa titik sejak tanggal 9 dan 10 November 1998, sampai saat pelaksanaan SI pada 11-13 November 1998. Tuntutannya adalah "Reformasi atau Mati!". Pada tanggal 12 November 1998 terjadi bentrokan di tiga tempat, yaitu di depan Gedung Manggala Wanabhakti, Pejompongan dan sekitar kampus Universitas Dr. Moestopo. Ribuan mahasiswa FORKOT menaiki 20 bus metromini dihadang aparat di depan Gedung Manggala Wanabhakti. Bentrokan juga terjadi di depan kampus Universitas Dr. Moestopo. Ribuan mahasiswa dan rakyat memburu Pam Swakarsa menuju ke Senayan, tetapi dihadang oleh aparat.<sup>94</sup>

Sidang Istimewa yang berlangsung antara 10-13 November 1998 ditolak oleh beberapa gerakan mahasiswa. Aksi-aksi demonstrasi bahkan sudah dilakukan sebelum Sidang dimulai. Tanggal 9 November 1998, massa melakukan

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, hal.203.

<sup>93</sup> *Ibid.*, hal.203.

<sup>94</sup> *Ibid.*, hal.226.

*rally* berkeliling kota Jakarta dengan meneriakkan yel-yel menolak Sidang Istimewa (SI), menuntut pencabutan Dwi Fungsi ABRI, menuntut Soeharto diadili, serta menuntut dibentuk Pemerintahan Sementara. Setelah berkeliling kota, mereka menginap di Kampus UI, Kampus YAI di Jl. Salemba dan sebagian lagi di Kampus Universitas Kristen Indonesia (UKI) di Jl. Diponegoro yang berdekatan dengan kampus UI. Sementara itu, untuk menghadang gerakan pro-demokrasi yang menuntut reformasi total, militer mengorganisir para preman dan kelompok Islam bayaran. Kelompok ini tergabung dalam "Pengamanan Swakarsa" atau lebih dikenal "Pam Swakarsa" yang selama sehari-hari memprovokasi para mahasiswa. Mereka didatangkan dari berbagai tempat, baik dari Jakarta maupun luar Jakarta. Kelompok ini mengadakan kemah di sekitar gedung DPR/MPR dan mereka dipersenjatai bambu runcing untuk menyerang mahasiswa.<sup>95</sup>

Tanggal 9 November, Pam Swakarsa menyerang kampus Universitas Atma Jaya Jakarta di Jl. Jenderal Sudirman dengan batu yang menyebabkan beberapa mobil rusak. Mereka juga melakukan provokasi di berbagai tempat di Jakarta. Di kawasan Bendungan Hilir, Jl. Jenderal Sudirman, depan Kampus Universitas Atma Jaya, kelompok ini dilawan oleh rakyat sekitar dengan batu sehingga terjadi bentrok fisik yang mengakibatkan beberapa orang luka-luka. Bentrok ini baru berhenti setelah datang pasukan Brigadir Mobil. Di kawasan Jakarta Selatan, segerombolan preman yang diorganisasi tentara dalam Pemuda Pancasila, salah satu elemen "Pam Swakarsa", menyerang sebuah Posko Gotong Royong PDI Megawati Soekarnoputri. Mereka merusak posko, merobek-robek gambar Megawati Soekarnoputri dan menantang berkelahi. Penyerangan itu dipimpin oleh seorang pengacara yang mengaku pro-reformasi, Ruhut Sitompul.<sup>96</sup>

Hari pertama Sidang Istimewa (SI), mahasiswa dan rakyat sejak pagi melakukan aksi penolakan SI MPR. Lebih dari 10 ribu massa memadati Jl. Diponegoro dari Pertigaan Rumah Sakit Saint Carolus hingga di depan Bioskop Megaria, yang jaraknya sekitar 250 meter. Setelah itu, mereka bergerak menuju Gedung DPR melewati Tugu Proklamasi. Sementara itu, aktivis

<sup>95</sup> Suharsih dan Ign Mahendra K, *Bergerak Bersama Rakyat: Sejarah Gerakan Mahasiswa dan Perubahan Sosial di Indonesia*, Yogyakarta: Resist Book, 2007, hal.115.

<sup>96</sup> Suharsih dan Ign Mahendra K, *Ibid.*, hal.116.

mahasiswa yang bergabung dalam FORKOT melakukan mobilisasi massa yang dimulai dari Kampus UKI Cawang. Mereka berkeliling kota dengan 40 bus yang dipenuhi oleh massa baik di dalamnya maupun di atasnya. Siang harinya terjadi bentrokan antara mahasiswa dengan Pam Swakarsa di depan Hotel Hilton, Jl. Gatot Subroto, Semanggi. Seorang mahasiswa dilaporkan tergeletak di jalan tol dengan luka parah di kepalanya.<sup>97</sup>

Malam harinya, massa mendatangi DPR untuk menemui para wakil rakyat boneka yang sedang melakukan SI. Mereka menuntut Soeharto diadili, Dwifungsi ABRI dicabut, dan menolak SI. Pukul 20.20 WIB mereka meninggalkan gedung DPR RI sambil mengucapkan terima kasih kepada rakyat di wilayah sekitar Gedung DPR RI, Semanggi maupun Bendungan Hilir yang telah membantu mereka dan turut menolak Sidang Istimewa.<sup>98</sup>

Di Yogyakarta, 32 organisasi yang terdiri dari Komite Perjuangan Rakyat untuk Perubahan (KPRP), Partai Rakyat Demokratik (PRD), Himpunan Mahasiswa Islam-MPO (HMI-MPO), Himpunan Mahasiswa Islam-(HMI) Diponegoro, Partai Nasionalis Indonesia (PNI), dan kelompok lain yang tergabung dalam Forum Bersama Anti-Dwi Fungsi ABRI menduduki stasiun Radio Republik Indonesia (RRI) untuk memaksa agar pernyataan sikap mereka disiarkan.<sup>99</sup>

Tanggal 11 November 1998, pukul 18.30, lebih dari 10 ribu mahasiswa dan kelompok pro-demokrasi, yang terdiri dari Komite Mahasiswa Anti Dwifungsi ABRI (KOMRAD), Komite Buruh untuk Aksi Reformasi (KOBAR), Komite Pendukung Megawati (KPM), Front Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (FAMRED), Forum Bersama (FORBES), Koalisi Nasional untuk Demokrasi, Keluarga Besar Universitas Indonesia (KB-UI) berusaha merebut Tugu Proklamasi yang selama ini diduduki oleh Pam Swakarsa. Akibatnya terjadi bentrok fisik dan berkembang menjadi kerusuhan. Setidaknya satu buah mobil Kijang di Bioskop Megaria, Jl. Diponegoro, telah dibakar.<sup>100</sup>

<sup>97</sup> Uraian yang lebih jelas mengenai Tragedi Semanggi, lihat *Fakta Tragedi Semanggi, Analisa Hukum, Sosial Politik, Moral*, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, 1999.

<sup>98</sup> Lihat Suharsih dan Ign Mahendra K, *Op. Cit.*, hal.116.

<sup>99</sup> *Ibid.*, hal.116.

<sup>100</sup> *Ibid.*, hal.116-117.

Tanggal 12 November 1998 ratusan ribu mahasiswa dan rakyat bergerak menuju gedung DPR/MPR dari segala arah, Semanggi-Slipi-Kuningan, tetapi tidak ada yang berhasil menembus ke sana karena dikawal dengan sangat ketat oleh tentara, Brimob dan Pam Swakarsa. Terjadi bentrokan di tiga tempat, yaitu Manggala Wanabhakti, Pejompongan, dan sekitar kampus Universitas Dr. Moestopo. Pada malam harinya terjadi bentrok di daerah Slipi dan Jl. Sudirman, puluhan mahasiswa masuk rumah sakit. Ribuan mahasiswa dievakuasi ke Universitas Atma Jaya. Satu orang pelajar, yaitu Lukman Firdaus, terluka berat dan masuk rumah sakit. Beberapa hari kemudian ia meninggal dunia. Ribuan mahasiswa FORKOT dihadang aparat di depan Gedung Manggala Wanabhakti. Ribuan mahasiswa dan rakyat memburu Pam Swakarsa menuju Senayan, tetapi dihadang aparat. Tuntutan mahasiswa saat itu adalah: menolak Sidang Istimewa, pembentukan pemerintah transisi dan menuntut pencabutan Dwifungsi ABRI.<sup>101</sup>

Esok harinya Jum'at tanggal 13 November 1998 mahasiswa dan rakyat sudah bergabung dan mencapai wilayah Semanggi dan sekitarnya, kemudian bergabung dengan mahasiswa dari FAMRED yang sudah ada di kampus Universitas Atma Jaya Jakarta. Jalan Sudirman sudah dihadang oleh aparat sejak malam hari dan pagi hingga siang harinya jumlah aparat semakin banyak guna menghadang laju mahasiswa dan masyarakat. Kali ini mahasiswa bersama rakyat dikepung dari dua arah sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dengan menggunakan kendaraan lapis baja. Saat itulah, pada hari terakhir Sidang Istimewa, terjadi tragedi Semanggi I.

Dalam tragedi tersebut 18 orang meninggal dunia, tujuh mahasiswa, satu siswa SMU, sembilan orang pejalan kaki dan satu orang polisi, 253 orang terluka, sedangkan yang terluka oleh tembakan senjata api adalah 14 mahasiswa, 1 dosen, dua siswa SMU dan 15 pejalan kaki. Di atas darah tersebut tentara merayakan kemenangannya yang telah berhasil memukul mundur gerakan mahasiswa dan rakyat dengan menyanyikan lagu "Mars Siliwangi". Hampir semua korban adalah mahasiswa atau pelajar, beberapa wartawan yang meliput peristiwa, beberapa

---

<sup>101</sup> *Ibid.*, hal.117.



karyawan swasta yang berada di sekitar tempat itu, termasuk para pedagang asongan juga mengalami kekerasan oleh tentara.

Berikut adalah nama-nama beberapa korban Semanggi I: Teddy Mardhani Kusuma, mahasiswa Institut Teknologi Indonesia merupakan korban meninggal pertama di hari itu. Korban kedua penembakan oleh aparat adalah Bernardus Realino Norma Irawan, mahasiswa Fakultas Ekonomi Atma Jaya, Jakarta, tertembak di dadanya dari arah depan saat ingin menolong rekannya yang terluka di pelataran parkir Kampus Universitas Atma Jaya Jakarta. Mulai dari jam 3 sore itu sampai pagi hari sekitar jam 2 pagi terus terjadi penembakan terhadap mahasiswa di kawasan Semanggi dan penembakan ke dalam kampus Atma Jaya. Semakin banyak korban berjatuh baik yang meninggal tertembak maupun terluka. Gelombang mahasiswa dan rakyat yang ingin bergabung terus berdatangan dan disambut dengan peluru dan gas air mata. Korban lain yang meninggal dunia adalah: Sigit Prasetyo (YAI), Heru Sudibyo (Universitas Terbuka), Engkus Kusnadi (Universitas Jakarta), Muzzamil Joko (Universitas Indonesia), Uga Usmana, Abdullah/Donit, Agus Setiana, Budiono, Doni Effendi, Rinanto, Sidik, Kristian Nikijulong, Sidik, Hadi.<sup>102</sup>

Pada tanggal 14 November 1998 mahasiswa menguasai halaman depan DPR/MPR bersama ratusan ribu rakyat. Tetapi isunya bergeser menjadi mengadili diktator Soeharto. Jalur-jalur pawai juga sudah tidak di jalur-jalur strategis yang dapat mengajak rakyat luas seperti pada tanggal 12-13 November 1998. Setelah tanggal 14 November 1998, berangsur-angsur halaman depan DPR/MPR ditinggalkan. Mengenai peristiwa Semanggi, Panglima ABRI saat itu, Jenderal Wiranto, menyatakan di depan anggota legislatif bahwa peristiwa Semanggi adalah untuk menyelamatkan kedudukan anggota legislatif —”...bila tidak demikian maka anda-anda mungkin sudah tidak duduk lagi di sini”— yang disambut dengan tawa riuh anggota-anggota legislatif.<sup>103</sup>

Sementara mahasiswa dan rakyat bertempur di jalan-jalan untuk menolak Sidang Istimewa, 4 tokoh reformasi bertemu di Ciganjur pada tanggal 10 November 1998, hari pertama Sidang Istimewa. Empat tokoh tersebut adalah: Megawati Soekarnoputri, Abdurrahman Wahid, Sri Sultan Hamengku Buwono

<sup>102</sup> *Ibid.*, hal.118.

<sup>103</sup> *Ibid.*, hal.118.

X, dan Amien Rais. Pertemuan yang disebut sebagai Dialog Nasional tersebut diprakarsai oleh FKSMJ, Satgas KM-ITB, dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Siliwangi, setelah sehari-hari menduduki halaman rumah Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Kesepakatan ini mencerminkan persetujuan mereka atas dilaksanakannya Sidang Istimewa MPR. Selain itu mereka menghendaki B.J. Habibie berhenti pada Agustus 1999. Pertemuan tersebut menghasilkan delapan poin kesepakatan, yaitu:<sup>104</sup> (1) menghimbau kepada semua pihak agar tetap menjunjung tinggi terciptanya kesatuan dan persatuan bangsa secara utuh dengan semangat Bhineka Tunggal Ika dalam Negara Kebangsaan dan Kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Para pemimpin formal maupun informal haruslah konsisten dengan semangat ini; (2) mengembalikan kedaulatan rakyat dan memberdayakan lembaga perwakilan sebagai penjelmaan aspirasi rakyat, yang mencerminkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan penguasa; (3) mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, sebagai asas perjuangan sebagai proses pembangunan bangsa, ke arah masyarakat yang adil dan sejahtera melalui cara-cara yang demokratis. Dalam rangka itu, haruslah dilakukan desentralisasi pemerintahan sesuai dengan kemampuan daerah dan ditetapkan *refund sharing* (perimbangan keuangan) yang adil antara pemerintah pusat dan daerah;

Kesepakatan berikutnya, (4) agar pelaksanaan reformasi diletakkan dalam perspektif kepentingan generasi baru bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan bangsa di masa yang akan datang; (5) segera dilaksanakannya Pemilu yang Jurdil dan dilaksanakan oleh pelaksana independen, di mana panitia pelaksanaan terdiri dari peserta Pemilu dan diawasi oleh tim independen. Pemilu merupakan jalan demokratis untuk mengakhiri pemerintahan transisi yang dipimpin oleh B.J. Habibie, sekaligus menjadi cara untuk menetapkan pemerintahan yang baru secara legitimate, selambat-lambatnya dalam tiga bulan setelah pemilu Mei 1999 berlangsung, pemerintahan baru sudah harus dibentuk melalui SU MPR; (6) penghapusan Dwifungsi ABRI secara bertahap paling lama enam tahun dari tanggal pernyataan ini dibacakan, dalam rangka mewujudkan masyarakat madani; (7) dilakukan usaha yang sungguh-sungguh dan tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk menghapus dan mengusut pelaku KKN, diawali dengan

---

<sup>104</sup> *Ibid.*, hal.119-120.

pengusutan harta kekayaan Soeharto sesuai ketentuan yang berlaku; (8) mendesak seluruh pengamanan swakarsa Sidang Istimewa (SI) MPR untuk segera membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing agar tidak memperkeruh suasana.

Hasil Sidang Istimewa (SI) MPR ditanggapi beragam oleh gerakan mahasiswa penentang dan pendukung B.J. Habibie. Syafieq, mahasiswa STF Driyarkara, aktivis FORKOT dan FAMRED mengatakan penolakannya terhadap hasil SI. Syafieq mengatakan bahwa SI tidak memiliki legitimasi apapun di mata rakyat, apalagi hasilnya dan sama sekali tidak mencerminkan aspirasi rakyat.<sup>105</sup> Sebaliknya gerakan mahasiswa pendukung B.J. Habibie melihat bahwa Sidang Istimewa adalah sarana untuk menuju reformasi total. Fachri Hamzah, aktivis KAMMI mengatakan:

“Pemerintah perlu mempercepat Sidang Istimewa dan Pemilu. Dua agenda ini merupakan cara paling realistis, representatif, dan demokratis dalam menentukan pimpinan negara baru yang *legitimate* guna mewujudkan dan memastikan proses demokratisasi menuju reformasi total yang damai dan konstitusional”<sup>106</sup>

Empat bulan sejak peristiwa Semanggi I, gerakan mahasiswa mengalami penurunan dalam kuantitas peserta demonstrasi yang sangat drastis. Di Jakarta hampir setiap demonstrasi mahasiswa (khususnya demonstrasi dari kelompok radikal seperti FORKOT, FAMRED, KOMRAD, AMARA, KMB, dan sebagainya) selalu dipukul dengan alasan tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Alat legal bagi pemukulan tersebut adalah pelanggaran terhadap UU No. 9/1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum.<sup>107</sup>

Sementara Presiden B.J. Habibie semakin ingin melegitimasi kekuasaannya di mata dunia internasional. Salah satu kebijakan yang dilakukannya Presiden, B.J. Habibie memperbolehkan diadakannya referendum provinsi Timor Timur (sekarang Timor Leste). B. J. Habibie mengajukan dua opsi bagi bagi rakyat Timor Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap

<sup>105</sup> Lihat *Gerakan Mahasiswa dan Hubungan Transkampus* dalam *Kompas*, 18 November 1998.

<sup>106</sup> Lihat *Percepat Sidang Istimewa dan Pemilu* dalam *Suara Pembaruan*, 13 September 1998.

<sup>107</sup> Lihat Edi Mulyono, *PRD dan Radikalisasi Mahasiswa*, dalam *Basis*, Nomor 5-6 Tahun ke 48, Mei-Juni 1999.

menjadi bagian dari Indonesia.<sup>108</sup> Rakyat Timor Timur memilih opsi kedua, karena dinilai sebagai pilihan terbaik setelah mereka merasa disakiti selama 24 tahun oleh Indonesia. Pada referendum 30 Agustus 1999, Timor Timur menyatakan merdeka dari Indonesia, hasil referendum diumumkan, dan rakyat Timor Timur lepas dari kuasa Indonesia. Setelah rakyat Timor Timur menyatakan melepaskan diri dari belenggu Indonesia, kekerasan terjadi di mana-mana antara pihak yang pro dan kontra kemerdekaan Timor Timur. Mengenai Referendum bagi Timor-Timur serta kekerasan yang terjadi setelahnya, pihak TNI menyebutkan itu adalah sebuah kesalahan besar B. J. Habibie. Letjend. Fachrul Rozi mengatakan :

“Kalau masalah Timor-Timur itu kan, itu ngomong sebagai sebuah perintah, kemudian TNI melaksanakan, TNI tinggal mematangkan itu, dan mematangkan juga gak bisa dilakukan dalam waktu yang begitu singkat. Dan itu menurut saya sebagai sebuah kesalahan besar. Tiba-tiba ada referendum yang tadinya tidak ada opsi itu kan, dulunya kan opsinya cuma otonomi khusus, gak ada ngmong merdeka. Tiba-tiba muncul opsi itu kan.”<sup>109</sup>

Dalam menghadapi Pemilu 1999, gerakan mahasiswa kembali terpecah. Terdapat tiga sikap gerakan mahasiswa, yaitu: (1) mendukung pelaksanaan Pemilu tanpa syarat; (2) gerakan mahasiswa yang mendukung pelaksanaan Pemilu dengan syarat; (3) gerakan mahasiswa yang tetap meneruskan isu-isu utama sebelumnya. Antara lain, pengadilan Soeharto beserta kroni-kroninya, penghapusan KKN, pencabutan Dwi Fungsi ABRI dan pembentukan pemerintahan transisi.<sup>110</sup>

Menjelang pemilu 1999 berlangsung konsolidasi gerakan mahasiswa. Konsolidasi tersebut adalah Rembuk Nasional Mahasiswa Indonesia (RNMI). Konsolidasi ini berlangsung pada tanggal 28 Maret hingga tanggal 1 April 1999 di Universitas Udayana, Bali. RNMI dihadiri oleh 101 orang dari 52 organisasi

<sup>108</sup> Terkait pemberian referendum bagi Timor-Timur ini Presiden Indonesia BJ Habibie mengaku surat dari mantan Perdana Menteri Australia John Howard mendesak Habibie untuk secepatnya bertindak terkait desakan untuk melepaskan Timor Timur atau Timor Leste. Pada 1998, Howard menulis surat kepada Habibie yang mendukung kemerdekaan Timor Leste. Habibie mengatakan bahwa surat tersebut mendesaknya untuk mengeluarkan keputusan cepat yang akhirnya berujung pada referendum enam bulan kemudian. Lihat *Habibie Mengaku Didesak Howard Gelar Referendum Timor Timur* dalam *Tempo*, Minggu, 16 November 2008.

<sup>109</sup> Wawancara dengan Letjend.(Purn.) Fachrul Rozi Mantan Kasum TNI dan Mantan Wakil Panglima TNI, Selasa, 22 Juni 2010 di Jakarta.

<sup>110</sup> Suharsih dan Ign Mahendra K, *Op.Cit.*, hal.121.

gerakan mahasiswa dari 16 provinsi. RNMI menghasilkan 4 butir resolusi, yaitu:<sup>111</sup> (1) Pemilu yang diselenggarakan rezim B.J. Habibie 7 Juni 1999 mendatang adalah tidak demokratis, tidak Jurdil, karena dihasilkan oleh DPR hasil Pemilu 1997 yang juga melaksanakan Sidang Istimewa MPR yang berlumuran darah rakyat serta masih adanya ABRI di DPR sehingga tidak membawa kepada Indonesia ke arah yang diinginkan mahasiswa; (2) oleh karena itu dinyatakan bahwa RNMI tidak mempercayai pemilu yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 Juni 1999 sebagai solusi atas krisis multidimensi yang saat ini berlangsung di Indonesia; (3) sebagai solusi atas krisis multidimensi harus dibentuk sebuah pemerintahan transisi yang berasal dan tak terpisah dengan arus besar gerakan rakyat dan bebas dari unsur-unsur yang sebelumnya menindas rakyat. Pemerintahan transisi ini bebas dari intervensi militer, atau harus berbasis pada demokrasi sipil; (4) untuk persoalan Aceh dan Irian Jaya, mereka melihat adanya keyakinan politik di kalangan rakyat Aceh dan Irian Jaya untuk menentukan nasibnya sendiri, bukan sekedar masalah disintegrasi.

Mereka juga menuntut referendum segera untuk Timor Leste. RNMI merupakan embrio dari berdirinya Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI)<sup>112</sup> dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND).<sup>113</sup> Tentang RNMI, Eli Salomo mahasiswa ISTN Jakarta, aktivis FORKOT penentang pemerintahan B.J. Habibie mengatakan:

“Sebenarnya kita sedang melanjutkan satu massa mengambang sehingga gak nyambung dengan basis massanya. Kita coba dengan adanya RNMI (Rebug Nasional Mahasiswa Indonesia) itukan satu cara kita mengkonsolidasikan gerakan mahasiswa tapi kemudian setelah RNMI muncul beberapa kelompok nasional gerakan mahasiswa. Dan ini kan tidak bisa dibatasi, misalnya muncul FPPI, muncul LMND, dan muncul Front Mahasiswa Nasional (FMN). Itukan satu fenomena yang tidak bisa kita batasi tapi usaha untuk membangun koalisi nasional itukan yang kita coba. Misalnya dalam sektor mahasiswa di Jakarta misalnya kita membangun organ AKRAB (Aliansi Rakyat Bersatu) itu mengumpulkan mulai dari gerakan mahasiswa kemudian kelompok-kelompok sosial termasuk organisasi serikat buruh, organisasi serikat tani menjadi satu kelompok yang namanya AKRAB. Tapi kemudian itu pecah tidak bisa dipertahankan diluar kemampuan kita untuk bisa mempertahankan. Tapi usaha untuk membangun

<sup>111</sup> *Ibid.*, hal.121-122.

<sup>112</sup> Lihat Gunawan, *Runtuhnya Konsolidasi Demokrasi*, Yogyakarta: Pusat Studi Masyarakat, 2002, hal. 19-29.

<sup>113</sup> Lihat Suharsih dan Ign Mahendra K, *Op.Cit.*, hal.122.

suatu koalisi nasional itu selalu ada karena tanpa itu kita berkesimpulan tidak bisa mendesak munculnya pemerintahan yang transisi. Kita kalau dalam satu medan perjuangan kita kan harus mengambil satu fokus isu gerakan, fokus saat itu adalah kita membicarakan penggulingan pemerintahan Habibie artinya bukan cuma Habibie sebenarnya struktur-struktur Orde Baru yang masih berkuasa kemudian diganti dengan pemerintahan yang kolektif transisional kemudian akibat kita fokus itu muncullah koalisi Tentara dan aparat.<sup>114</sup>

Pemilu 1999 akhirnya dimenangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri dengan meraih 35.706.618 suara atau 33,7% dan 153 kursi, disusul Partai Golkar di urutan kedua dengan meraih 23.742.112 suara atau 22,4% dan 120 kursi, PKB di urutan ketiga dengan 13.336.963 suara atau 12,6 % dan 51 kursi, PPP di urutan keempat meraih 11.330.387 suara atau 10,7% dan 58 kursi, PAN meraih 7.528.956 suara atau 7,12 % dan mendapatkan 34 kursi.<sup>115</sup>

Pasca pemilu, rezim B.J. Habibie ingin mensahkan RUU-PKB yang dibuat oleh DPR. Dan kebijakan ini pun ditolak oleh mahasiswa dan massa rakyat dengan melakukan perlawanan. Penolakan tersebut karena RUU-PKB tidak lebih dari upaya tentara untuk mendapatkan kembali kekuasaan politiknya. Isi pasal-pasalnya memberikan kewenangan besar dalam tugas-tugas polisional kepada militer, dalam situasi negara dinilai darurat atau dalam keadaan berbahaya.<sup>116</sup>

Di Jakarta tanggal 9 September 1999 dalam waktu yang bersamaan ratusan mahasiswa Forum Bersama (FORBES) bentrok dengan militer sampai memakan korban luka-luka. Tanggal 15 September 1999, sekitar 500 mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI), Universitas Borobudur, dan pelajar STM melakukan aksi yang berakhir bentrok dengan militer di depan kampus Universitas Borobudur. Tanggal 22 September 1999, di Jakarta sekitar seribu massa LMND, FNPBI, Universitas Bung Karno mengadakan *long march* dari kampus UI Salemba menuju gedung MPR/DPR. Terjadi dua kali bentrokan antara massa dan militer. Puncak aksi penolakan terhadap RUU PKB di Jakarta terjadi pada tanggal 23-24 September 1999 yang mengakibatkan terjadinya peristiwa Semanggi II. Peristiwa ini kembali menimbulkan jatuh korban di pihak mahasiswa dan massa

<sup>114</sup> Wawancara dengan Eli Salomo, Aktivis FORKOT penentang pemerintahan B.J. Habibie, Mahasiswa ISTN Jakarta, Sabtu, 28 November 2009, di Jakarta.

<sup>115</sup> *Ibid.*, hal.122-123.

<sup>116</sup> Suharsih dan Ign Mahendra K, *Ibid.*, hal.123.

rakyat. Salah satu korban Semanggi II adalah Yap Yun Hap, mahasiswa Universitas Indonesia.<sup>117</sup>

**Tabel 3.4:**  
**Organisasi Gerakan Mahasiswa Pendukung dan Penentang B.J. Habibie**

No.	Nama Organisasi	Jenis Organisasi	Bentuk Organisasi	Sifat Organisasi
1.	HMI	Ekstra Universitas	Formal	Kaderisasi
2.	KAMMI	Ekstra Universitas	Formal	Kaderisasi
3.	FORKOT	Ekstra Universitas	Anomali	Gabungan
4.	FKSMJ	Ekstra Universitas	Anomali	Gabungan

**Sumber:** Diolah oleh penulis dari wawancara dengan aktivis HMI, KAMMI, BEMI, BEMSI, FORKOT.

Di Bandung, tanggal 21 September 1999, sekitar 100 mahasiswa gabungan dari 12 elemen kesatuan aksi mahasiswa mendatangi gedung DPRD I Jawa Barat. Di Solo, aksi penolakan terhadap RUU PKB dilakukan oleh ratusan massa dari 28 elemen mahasiswa Indonesia yang tergabung Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) tanggal 9 September 1999 dengan *long march* menuju Markas Korem. Di Makassar, terjadi bentrokan dengan militer ketika sekitar 200 mahasiswa dan rakyat melakukan pendudukan gedung DPRD Sulsel. Di Surabaya, sekitar seratus mahasiswa UPN Veteran Surabaya mendatangi gedung DPRD Tingkat II Surabaya dan berhasil memaksa Fraksi ABRI/TNI, Perjuangan dan PAN menandatangani tuntutan mahasiswa untuk menolak RUU PKB.

HMI dan KAMMI adalah dua organisasi mahasiswa ekstra universitas pendukung B.J. Habibie berhadapan dengan FORKOT dan FKSMJ yang juga dua organisasi adalah ekstra universitas penentang B.J. Habibie (Lihat Tabel 3.4). Tiga isu utama yang diusung oleh HMI sebelum dan pasca gerakan Mei 1998, seperti: (1) KKN; (2) revolusi sistemik; (3) kerapuhan ekonomi nasional;

<sup>117</sup> Suharsih dan Ign Mahendra K, *Ibid.*, hal.123-124.

(4) hutang luar tetap dipegang hingga B.J. Habibie dipercaya oleh Soeharto untuk melanjutkan jabatannya yang masih tersisa hingga tahun 2004. Sementara naiknya B.J. Habibie yang dianggapnya sebagai figur Islam membuat yakin bahwa sikap tegas HMI terhadap penghentian utang luar negeri, pemutusan hubungan dengan IMF, anti-privatisasi BUMN, menuntut perlindungan bagi petani dan peningkatan subsidi untuk rakyat kecil tidak ada masalah.

Hal yang sama ditunjukkan oleh KAMMI yang aktivisnya umumnya berlatar belakang LDK yang berasal dari organisasi massa besar, seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). KAMMI yang dapat dikatakan bentukan aktivis-aktivis dakwah kampus yang sebagian berasal IMM dan HMI memiliki sikap yang cenderung sama dengan HMI yaitu mendukung B.J. Habibie. Bersama dengan HMI, KAMMI yang telah membentuk basis-basis gerakan di beberapa universitas besar, seperti UI, UGM, ITB, IPB, Unair, Undip dan lain-lain memilih berhadapan dengan FORKOT dan FKSMJ yang menentang B.J. Habibie (Lihat Tabel 3.5)

**Tabel 3.5:**  
**Polarisasi Gerakan Mahasiswa Pendukung dan Penentang B.J. Habibie**

No.	Nama Organisasi	Sikap Politik	Isu Polarisasi
1.	HMI	Pendukung B.J. Habibie	Ideologi Islam
2.	KAMMI	Pendukung B.J. Habibie	Ideologi Islam
3.	FORKOT	Penentang B.J. Habibie	Pluralisme
4.	FKSMJ	Penentang B.J. Habibie	Pluralisme

**Sumber:** Diolah oleh penulis dari wawancara dengan aktivis HMI, KAMMI, BEMI, BEMSI, FORKOT.

Orientasi KAMMI berupa reformasi politik dan ekonomi yang dilandasi moral dan ahlak membuatnya tidak perlu mengusik posisi B.J. Habibie. Namun, lawannya, FORKOT dan FKSMJ tetap menuntut mundur B.J. Habibie apapun prestasinya. Sebab B.J. Habibie di mata kedua organisasi gerakan mahasiswa ini hanyalah boneka dan atau 'kaki tangan' Soeharto. FORKOT dan FKSMJ secara tegas tetap menyatakan ingin mengganti rezim kekuasaan. FORKOT yang merupakan salah satu organ gerakan mahasiswa 1998 dengan basis kurang lebih 70 kampus di Indonesia membuat FORKOT percaya diri untuk berhadapan



dengan siapa saja termasuk HMI dan KAMMI yang mendukung B.J. Habibie. Radikalisme FORKOT yang sangat terkenal itu dibuktikan dengan terjadinya bentrok melawan aktivis HMI, aktivis KAMMI dan sejumlah elemen-elemen pendukung B.J. Habibie, seperti yang terjadi di Gedung DPR/MPR ketika terjadi peralihan kekuasaan dari tangan Soeharto ke tangan B.J. Habibie.

Bukan saja bentrok dengan aparat TNI-Polri, kebiasaan bentrok dalam setiap aksi-aksinya melawan pihak yang berseberangan dengannya telah menjadi ciri khas dari FORKOT. Hal itu pulalah yang membuat sejumlah pendiri FORKOT memilih keluar lalu mendirikan kelompok gerakan mahasiswa baru, seperti Syafieq, Wahab dan Abdullah mendirikan FAMRED dan Eli Salomo dan Faisal Saimima mendirikan FRONT KOTA.<sup>118</sup>

Radikalisme yang menjadi ideologi gerakan FORKOT dalam menentang Soeharto dan B.J. Habibie dituding oleh berbagai pihak sebagai penganut Marxis. Bahkan Letnan Jenderal (Purn) Achmad Tirtosudiro, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), memasukkan FORKOT sebagai salah satu kelompok yang merencanakan makar terhadap B.J. Habibie. Namun FORKOT tetap berargumen bahwa tindakannya itu hanya merupakan reaksi terhadap sikap aparat yang sangat represif terhadapnya. Eli Salomo, Aktivis FORKOT, mengatakan:

“FORKOT misalnya dituduh mempersenjatai diri, pertanyaan kapan FORKOT memukul duluan kan tidak pernah itu sisi soal kekerasan yang muncul dalam aksi-aksi FORKOT itu adalah satu mekanisme pertahanan diri yang kita ambil untuk kita tetap bisa bersuara terhadap keyakinan politik kita. Yang kedua kemudian komunis dituduh anarkis segala macam itukan debat ideologi yang sangat gampang dijawabnya dan walaupun labeling komunis bagiku itu bukan suatu kemaluan sejarah tapi di situlah bagaimana ketelanjangan sejarah melihat rezim menggunakan segala cara untuk mempertahankan dirinya termasuk melakukan fitnah terhadap organisasi misalnya FORKOT atau gerakan mahasiswa lain yang punya garis tidak mau kompromi tidak mau dibeli oleh rezim politik yang berkuasa. Dan kalau mau gampangan transaksi dengan kekuasaan bukan dengan orang yang mau berkuasa padahal belum tentu berkuasa. Karena itu FORKOT pertama menolak B.J. Habibie dengan keyakinan bahwa

<sup>118</sup> Berdirinya kelompok baru gerakan mahasiswa FAMRED dan Front Kota terpisah dari FORKOT lebih karena ketidakcocokan antar simpul kampus, personal, kepercayaan, akselerasi dan metode gerakan antara kekerasan-anti kekerasan. Wawancara dengan Syafieq, Aktivis FORKOT dan FAMRED penentang pemerintahan B.J. Habibie, Mahasiswa STF Driyarkara, Selasa, 12 Januari 2010, di Jakarta. Wawancara dengan Abdullah, Aktivis FORKOT dan FAMRED penentang pemerintahan B.J. Habibie, Mahasiswa UNJ, Selasa, 12 Januari 2010, di Jakarta.

rezim Orde Baru tidak akan bisa menghasilkan pemerintahan yang bersih pasti dia akan mencoba melanggengkan kalau sebelumnya dengan cara penyerahan dari Soeharto ke Habibie. Maka waktu itu yang kita sangat curigai adalah mereka akan mencoba pake logika demokratis yang konstitusional lewat pemilu tersebut jadi pemilu tersebut sebenarnya punya potensi yang cukup besar untuk menjadi penyelewengan untuk mempertahankan rezim yang berkuasa Golkar dan kelompok Habibie lah pada saat itu.”<sup>119</sup>

Upaya FORKOT menjatuhkan B.J. Habibie didasarkan pada dua alasan pokok, yaitu: (1) B.J. Habibie masih dianggapnya sebagai bagian dari Soeharto; (2) B.J. Habibie dinilai tidak mampu menyelesaikan krisis ekonomi dan krisis politik. Hal itu diakui oleh Eli Salomo, aktivis FORKOT mengatakan:

“Turunnya Soeharto bukan berarti aksi-aksi demonstrasi FORKOT selesai, karena turunnya Soeharto bukan berarti masalah selesai. Soeharto hanyalah salah satu poin dari reformasi total. Reformasi yang diinginkan oleh FORKOT adalah mengembalikan kedaulatan kepada rakyat. FORKOT menganggap B.J. Habibie masih bagian dari Soeharto yang juga tidak mampu menyelesaikan krisis ekonomi dan krisis politik yang sedang berjalan ketika itu.”<sup>120</sup>

Keputusan FORKOT meluncurkan program Komite Rakyat Indonesia (KRI) bukan hanya sekedar menentang B.J. Habibie, tetapi juga untuk menjatuhkannya yang oleh Achmad Tirtosudiro<sup>121</sup> disebutnya sebagai merencanakan makar. Ancaman FORKOT bahwa selama KRI belum terbentuk, maka segala kegiatan politik yang dilakukan pemerintahan B.J. Habibie dianggap tidak sah telah membuat panik kelompok pendukung B.J. Habibie seperti ICMI. Sikap FORKOT yang menentang dilaksanakannya SI MPR sejalan dengan sikapnya yang tidak ingin mengikuti agenda pemerintahan B.J. Habibie. Sebab, bagi FORKOT mengikuti agenda B.J. Habibie sama artinya dengan mengakui adanya legitimasi rakyat untuk B.J. Habibie.

<sup>119</sup> Wawancara dengan Eli Salomo, Aktivis FORKOT penentang pemerintahan B.J. Habibie, Mahasiswa ISTN Jakarta, Sabtu, 28 November 2009, di Jakarta.

<sup>120</sup> Wawancara dengan Eli Salomo, aktivis Forkot dan Front Kota penentang B.J. Habibie di Jakarta tanggal 28 November 2009.

<sup>121</sup> Lihat *Percepat Sidang Istemewa dan Pemilu dalam Suara Pembaruan*, 13 September 1998, lihat juga *Mereka yang Menentang Sidang Sandiwara dalam Tempo* 24 November 1998.

## **BAB 4**

### **PRO-KONTRA GERAKAN MAHASISWA PADA MASA ABDURRAHMAN WAHID**

Berbeda pada masa pemerintahan B.J. Habibie dimana sikap politik dan peran HMI dan KAMMI yang hanya memilih secara organisasional tampil mendukung B.J. Habibie. Sebaliknya, pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, sikap politik dan peran HMI dan KAMMI dalam menentang Abdurrahman Wahid selain dilakukan secara langsung, yaitu secara organisasional, juga dilakukan secara tidak langsung, yaitu secara personal melalui kader-kadernya yang ada di dalam kepengurusan BEM-BEM perguruan tinggi negeri yang bergabung ke dalam BEMSI.

Bab ini membahas polarisasi gerakan mahasiswa pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Agar lebih fokus bab ini hanya membahas dua organisasi gerakan mahasiswa intra-universiter, yaitu: (1) Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia (BEMI), gerakan mahasiswa yang mendukung Abdurrahman Wahid; (2) Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEMSI), organisasi gerakan mahasiswa yang menentang Abdurrahman Wahid.<sup>1</sup>

Bab ini membahas kedua organisasi gerakan mahasiswa intra-universiter tersebut dari aspek organisasi dan kepemimpinan, ideologi organisasi dan gerakan, basis massa dan hubungannya dengan kelompok-kelompok kepentingan dan partai politik, serta kondisi politik yang melingkupinya pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Namun sebelum membahas kedua organisasi gerakan mahasiswa intra-universiter tersebut, bab ini terlebih dahulu membahas sikap politik dan peran HMI dan KAMMI, organisasi mahasiswa ekstra-universiter yang berhaluan Islam, yang sebelumnya mendukung pemerintahan

---

<sup>1</sup> BEMI dan BEMSI dipilih karena sejumlah pertimbangan yang dapat menjadi indikator dalam melakukan analisis perbandingan, diantaranya, yaitu: (1) keduanya merupakan organisasi intra-universiter; (2) keduanya merupakan organisasi yang terpolarisasi (versus); (3) keduanya merupakan perpanjangan tangan dari organisasi ekstra universiter. Aktivis BEMI memiliki kedekatan dengan PMII, sedangkan BEMSI memiliki kedekatan dengan HMI dan KAMMI; (4) keduanya memiliki kedekatan dengan partai politik. BEMI memiliki kedekatan dengan PKB, partai pendukung Abdurrahman Wahid, sedangkan BEMSI memiliki kedekatan dengan PAN, PK dan Partai Golkar, partai penentang Abdurrahman Wahid yang sebelumnya mendukung Abdurrahman Wahid.

B.J. Habibie dan kemudian menentang Abdurrahman Wahid pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid.

#### 4.1. Sikap dan Peran HMI dan KAMMI

Pada awalnya baik kader HMI maupun kader KAMMI mendukung terpilihnya Abdurrahman Wahid. Nuansa ideologi Islam yang ada di dalam Poros Tengah dan warna ideologi dalam pertarungan antara pendukung Megawati Soekarnoputri dan pendukung Abdurrahman Wahid menjadi dasar bagi organisasi mahasiswa Islam ekstra universitas tersebut untuk mendukung Abdurrahman Wahid. Dukungan HMI dan KAMMI ditunjukkan oleh sikap para kader-kadernya yang menyambut gembira terpilihnya Abdurrahman Wahid, seperti yang ditunjukkan oleh M. Fakhrudin, Ketua Umum PB HMI Tahun 2000-2002. M. Fakhrudin mengatakan:

“Mungkin begini yah, abang ingin menjelaskan suasana kebathinan, proses pemilihan Presiden itu berlangsung, kebetulan pada saat itu saya sedang di Aceh dalam rangka melaksanakan tugas organisasi. Pada waktu itu sedang berlangsung Musdalub, dan saya menyaksikan proses *votting* pemilihan itu. Dan terus terang jujur saya katakan, demi Allah, betapa bangganya saya, Gus Dur terpilih dan bisa mengalahkan Megawati. Memang faktor ideologi itu sangat mewarnai yah, karena memang proses jatuhnya Habibie pun sebenarnya juga ada pertarungan ideologi antara kelompok-kelompok “Islam” dengan kelompok “nasionalis” yang *diback up* oleh kekuatan-kekuatan minoritas. Saya sampai loncat-loncat, karena gembiranya.”<sup>2</sup>

Namun dukungan kader-kader HMI dan KAMMI hanya berlangsung sesaat. Tidak adanya oposisi yang bisa mengontrol jalannya proses reformasi, sikap Abdurrahman Wahid yang dinilai arogan, sikap para pendukung yang hanya memperkeruh suasana dan isu korupsi adalah sejumlah alasan HMI dan KAMMI untuk bergabung dalam menentang Abdurrahman Wahid. M. Fakhrudin, Ketua Umum PB HMI Tahun 2000-2002 membenarkan hal itu dengan mengatakan:

“Kemudian, setelah saya terpilih menjadi Ketua Umum PB HMI, dalam salah satu poin gagasan yang saya jual adalah pentingnya untuk memperkuat kekuatan masyarakat, kekuatan di luar negara untuk mengkritisi kebijakan pemerintah. Karena waktu itu memang, dengan terbentuknya Kabinet Gotong Royong, dan itu adalah koalisi antar lintas partai politik baik itu Poros Tengah maupun PDI-P, saya menganggap bahwa kita agak susah

<sup>2</sup> Wawancara dengan M. Fakhrudin, Ketua Umum PB HMI Tahun 2000-2002, penentang Abdurrahman Wahid, Senin, 17 Mei 2010, di Jakarta.

berharap karena tidak ada kekuatan oposisi formal. Seluruh kekuatan politik bergabung dan *mensupport* Presiden dan Wakil Presiden, kemudian dalam benak saya menjadi sangat penting, apalagi kita pada tahap awal merintis proses demokratisasi, itu sangat penting, kemudian kekuatan-kekuatan alternatif pengontrol, untuk mengawasi *state*, mengawasi proses reformasi politik segala macam, dan memang itu bukan sesuatu rencana yang sudah terskenario, tetapi dalam perjalanan, saya melihat bahwa banyak kejanggalaan-kejanggalaan yang dilakukan oleh pemerintah. Misalnya, kesalahan Gus Dur pada arogansi, kemudian pernyataan-pernyataannya yang kontroversial, itulah yang mengundang reaksi dari berbagai kalangan/kelompok, kelompok-kelompok yang sebenarnya dari awal menjadi pilar yang mendukung Gus Dur, itu yang kemudian dalam waktu 1–2 bulan menjadi musuh, kemudian ditambah lagi pernyataan-pernyataan kontroversial soal HMI (orang-orang yang di lingkarannya), misalnya bubarkan HMI, HMI *connection*. Isu korupsi juga termasuk, namun isu korupsi itu sebetulnya adalah persoalan *management*, penataan *managementnya*, dan tidak ada yang prinsipil, tapi memang persoalan komunikasi politiknya yang mulai retak, sehingga kesalahan-kesalahan Gus Dur dicari. Gus Dur termasuk produktif mengeluarkan *statement-statement* kontroversial, hampir setiap Jumat selalu membuat pernyataan-pernyataan yang bukan malah mendinginkan suasana. Saya percaya, sebetulnya kalau dia merangkul seluruh potensi-potensi, berbagai kekuatan politik, saya percaya dia bisa sampai pada akhir jabatan.”<sup>3</sup>

Sikap politik HMI dan KAMMI yang menentang Abdurrahman Wahid selain dilakukan secara organisasional, juga dilakukan secara personal oleh masing-masing kadernya yang ada di dalam BEM-BEM. HMI dan KAMMI bergabung menentang Abdurrahman Wahid dengan cara mendukung para kadernya-kadernya yang ada di BEM-BEM perguruan tinggi negeri terkemuka membentuk BEMSI. Meskipun demikian, dalam perkembangan selanjutnya, BEMSI kemudian terpecah setelah mengalami konflik internal yang menyebabkan kader-kader HMI dan kader-kader KAMMI terpisah ke dalam dua organisasi.

Perpecahan antara kader-kader HMI dan kader-kader KAMMI selain disebabkan oleh faktor koordinasi, juga disebabkan oleh faktor kekecewaan kader-kader HMI terhadap kader-kader KAMMI. Kader-kader HMI di BEMSI kecewa karena seniornya, Akbar Tanjung, ditolak oleh kader-kader KAMMI untuk tampil berorasi dalam demonstrasi BEMSI yang berlangsung di gedung DPR/MPR. Tentang kekecewaan kader-kader HMI di BEMSI setelah seniornya, Akbar Tanjung ditolak orasi oleh kader-kader KAMMI di BEMSI, Taufik Riyadi,

<sup>3</sup> Wawancara dengan M. Fakhrudin, Ketua Umum PB HMI Tahun 2000-2002, penentang Abdurrahman Wahid, Senin, 17 Mei 2010, di Jakarta.

Mahasiswa Universitas Indonesia, Pendiri BEMSI dan penentang Abdurrahman Wahid mengatakan:

“Kalau Akbar Tanjung malah begini, jadi isunya pada saat itu, adalah kita terutama UI terima dana dari Golkar pada saat itu. Dan ini isu yang dihembuskan oleh kelompok kiri, bubarkan Golkar. Kemudian saya sepakat, saya bilang memang kalau sama Golkar saya sepakat. Akhirnya saya bilang, kita tidak pernah sama sekali ada kontak dengan Akbar Tanjung. Tapi setelah saya pelajari sekarang, didalam BEMSI itukan ada juga anak-anak HMI. Kedekatan hubungan Akbar Tanjung sama HMI kan sangat dekat. Jadi ada beberapa teman-teman kampus misalnya IAIN Ciputat, seperti Burhanuddin Muhtadi yang kontak dengan Akbar Tanjung, yang kemudian juga mengklaim bahwasanya dia (Akbar Tanjung) juga mendukung. Saya juga tidak keberatan ketika teman-teman lain bertanya, UI sepakat tidak membubarkan Golkar? saya bilang saya sepakat. Kemudian saya membakar bendera Golkar sebagai simbol. Nah, itu menimbulkan kemarahan juga dari HMI, bahkan pada saat aksi, Akbar Tanjung tidak kita kasih pidato pada saat di DPR. Pada saat itu, ketika kita dudukin DPR ada beberapa orasi, dari Amien Rais ada orasi. Ketika Akbar Tanjung mau naik orasi di tolak oleh teman-teman, disuruh turun, akhirnya menimbulkan friksi, BEMSI akhirnya pecah.”<sup>4</sup>

Konflik internal di BEMSI membuat kader-kader HMI keluar dari BEMSI lalu mendirikan organisasi baru yang diberi nama Aliansi Lembaga Formal Se-Indonesia (ALFONSO).<sup>5</sup> Sedangkan kader-kader KAMMI yang ada di dalam BEMSI tetap memilih bertahan di BEMSI. Meskipun demikian perpecahan antara kader-kader HMI dan kader-kader KAMMI tetap tidak berdampak kepada perubahan sikap keduanya terhadap Abdurrahman Wahid. Baik kader-kader HMI di ALFONSO maupun kader-kader KAMMI di BEMSI tetap pada sikapnya masing-masing, yaitu menentang Abdurrahman Wahid. Tentang terbentuknya ALFONSO yang berkoordinasi dengan HMI dan sikap kader-kader HMI yang ada di ALFONSO yang menentang Abdurrahman Wahid, M. Fakhruddin, Ketua Umum PB HMI Tahun 2000-2002 penentang Abdurrahman Wahid, mengatakan:

<sup>4</sup> Wawancara dengan Taufik Riyadi, Mahasiswa Universitas Indonesia, Pendiri BEMSI dan penentang Abdurrahman Wahid, Kamis, 01 April 2010 di Jakarta.

<sup>5</sup> Aliansi Lembaga Formal Kemahasiswaan se-Indonesia (ALFONSO) sebelumnya bergabung dalam BEMSI. Kelompok ini berpisah karena perbedaan sikap politik dalam melihat pengunduran Abdurrahman Wahid belum cukup untuk memperbaiki negara. Kelompok ini lebih mengusung isu Revolusi Sistemik, selain menuntut pengunduran diri Presiden Abdurrahman Wahid, juga menuntut Amien Rais, Ketua MPR, mundur dan pembersihan Orde Baru serta pencabutan Dwi Fungsi ABRI. Alfonso berasal dari 72 perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia. Juru bicara ALFONSO adalah Burhanuddin Muhtadi, Presiden Mahasiswa IAIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Jakarta. Latar belakang aktivis ALFONSO didominasi oleh aktivis HMI dan IMM. Lihat *72 Perguruan Tinggi Minta Gus Dur Mundur* dalam *Rakyat Merdeka*, 20 Februari 2001.

”Ada, tapi tidak formal. Karena memang sesungguhnya begitu kita menjadi simbol perlawanan, kekuatan-kekuatan dalam kampus yang menentang Gus Dur melakukan komunikasi informal dengan kita. Karena kita terlanjur menjadi simbol, yah komunikasinya menjadi terbangun. Jadi peran kita agak lumayan sentralistik, untuk memediasi, kalau ada isu kita ikut berdiskusi segala macam. Kalau ada problem kita ikut terlibat untuk membantu. Misalnya waktu teman-teman Ciputat itu membuat parodi, kan sempat agak rame, kita juga ikut mensupport. Kita bilang itu adalah seni, bukan penghinaan. Jadi bukan *by design*, yah bahwa dalam perjalanan kita ikut terlibat.”<sup>6</sup>

Penjelasan M. Fakhruddin tersebut menegaskan bahwa sikap dan peran HMI dalam menentang Abdurrahman Wahid selain dilakukan secara organisasional, juga dilakukan secara personal oleh kader-kader HMI. Peran HMI dalam menentang Abdurrahman Wahid dilakukan baik secara langsung, seperti melakukan demonstrasi menentang Abdurrahman Wahid<sup>7</sup> maupun secara tidak langsung, seperti membantu mengkomunikasikan isu-isu, mendukung dan memediasi kader-kadernya yang menentang Abdurrahman Wahid.

#### **4.2. BEMI: Gerakan Mahasiswa Plural Intra Universitas Pendukung Abdurrahman Wahid**

Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia (BEMI) dideklarasikan di Yogyakarta pada tanggal 2 Maret 2001. BEMI berbasis di sejumlah perguruan tinggi swasta dan negeri yang menolak bergabung dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEMSI), seperti BEM Universitas Tarumanagara Jakarta, BEM Universitas Atma Jaya Jakarta, BEM IAIN Bandung, BEM Universitas Soegiopranoto, BEM IAIN Walisongo Semarang, BEM IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, BEM IAIN Sunan Ampel Surabaya, BEM UBHARA, BEM UNISA, BEM UBAYA dan BEM Universitas Janabadra.<sup>8</sup> Secara politik kemunculan BEMI terkait dengan klaim BEMSI yang menentang Abdurrahman Wahid bahwa BEM-BEM yang ada di seluruh Indonesia berada di bawah kendalinya.

<sup>6</sup> Wawancara dengan M. Fakhruddin, Ketua Umum PB HMI Tahun 2000-2002, penentang Abdurrahman Wahid, Senin, 17 Mei 2010, di Jakarta.

<sup>7</sup> M. Fakhruddin, Ketua Umum PB HMI Tahun 2000-2002 mengaku dalam melakukan demonstrasi menentang Abdurrahman Wahid, HMI mendapatkan bantuan logistik dari senior-senior HMI. Wawancara dengan M. Fakhruddin, Ketua Umum PB HMI Tahun 2000-2002, penentang Abdurrahman Wahid, Senin, 17 Mei 2010, di Jakarta.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Aktivis BEMI Arif Rahman dan Quddus Salam. Lihat *Media Indonesia*, ”Organ Lama dan Baru pada Gerakan Mahasiswa”, tanggal 24 Maret 2001.

Munculnya BEMI menurut Arief Rahman, Aktivistis dan Koordinator BEMI mengatakan:

“Memang latar belakang teman-teman BEMI hampir semuanya teman-teman itu aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang memang punya afiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU). Tapi kita tidak melihat disitu bahwa isu-isu yang dimainkan oleh kelompok-kelompok tertentu itu adalah isu-isu tentang korupsi yang utama. Isu-isu yang dimainkan memang untuk menjatuhkan Gus Dur dan memang kita anggap keterlibatannya bukan hanya Gus Dur tapi ada Akbar Tanjung dan lain-lain. Tapi kita lihat bahwa masalah isu yang dimainkan itu yang kita lihat dimainkan oleh kelompok kanan yang memang rata-rata BEMSI itu punya afiliasi terhadap Partai Keadilan dimana pada saat itu hampir rata-rata kampus-kampusnya pun dan tokoh-tokohnya pun yang memang bergerak aktif di KAMMI dan bergerak di Partai Keadilan. Kalau pemahaman tentang isu yang digulirkan itu kan pada saat itu kan yang kita anggap pembusukan politik terhadap pemerintahan yang sah dengan sebuah mekanisme pemilihan di DPR pada saat itu. Memang ini kaitannya ke kelompok-kelompok Habibie Center pada saat itu nah kita melihat bahwa proses itu yang memang terjadi”.<sup>9</sup>

#### a. Organisasi dan Kepemimpinan

Organisasi BEMI berbentuk Presidium yang terdiri dari perwakilan Presiden atau Ketua BEM Mahasiswa di masing-masing perguruan tinggi yang tergabung dalam BEMI. Sedangkan aktivis BEMI yang sering muncul dalam memberikan statement sikap politik, yaitu: Arif Rahman (Ketua BEM Universitas Tarumanagara dan Ketua Cabang PMII Jakarta Barat) yang sangat dekat dengan PMII dan pengurus PKB, seperti Muhaimin Iskandar dan Muhyidin Arubusman (Lihat Tabel 4.1).

**Tabel 4.1:**  
**Jenis, Sifat dan Bentuk Organisasi BEMI dan BEMSI**

No.	Nama Organisasi	Jenis Organisasi	Sifat Organisasi	Bentuk Organisasi
1.	BEMI	Intra Universiter	Formal	Gabungan
2.	BEMSI	Intra Universiter	Formal	Gabungan

**Sumber:** Diolah oleh penulis dari wawancara dengan narasumber aktivis BEMI dan BEMSI.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Arif Rahman, Aktivistis dan Koordinator BEMI dari BEM Universitas Tarumanagara, Jakarta. Sabtu, 28 November 2009, dan Jumat, 02 April 2010, di Jakarta.



### b. Ideologi Organisasi dan Ideologi Gerakan

Secara ideologis BEMI sangat dekat dengan nasionalis-religius (Lihat Tabel 4.2). Hal itu dapat dicermati dari dua hal, yaitu: (1) BEMI didirikan oleh aktivis-aktivis mahasiswa yang dekat dengan PMII dan bahkan sebagian aktivis BEMI adalah anggota PMII dan PKB yang menganut pluralisme; (2) pengurus BEM yang menjadi anggota BEMI dan pengurus BEMI selain memiliki basis massa di kampus-kampus yang mengusung pluralisme, seperti kampus IAIN, kampus Kristen dan kampus swasta lainnya, juga tidak terlalu menonjolkan aspek keagamaan. Namun karena kedekatannya dengan kelompok gerakan mahasiswa radikan dan dengan kelompok-kelompok sosialis, seperti Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan tokoh PSI dan Fordem, seperti Rahman Tolleng membuat ideologi gerakannya cenderung radikal (Lihat Tabel 4.2)<sup>10</sup>

Arif Rahman Aktivis dan Koordinator BEMI, mengenai ideologi organisasi dan ideologi gerakan BEMI menjelaskan :

”Saya juga yakin itu juga yang melatarbelakangi karena bagaimanapun pada saat bicara hampir semua anak-anak BEMI itu teman-teman Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Otomatis ada satu ideologi yang memang dipahami oleh teman-teman bahwa Gus Dur adalah tokoh perubahan yang memang kita anggap banyak menjadi inspirasi teman-teman PMII”.<sup>11</sup>

**Tabel 4.2:**  
**Ideologi Organisasi dan Gerakan BEMI dan BEMSI**

No.	Nama Organisasi	Ideologi Organisasi	Ideologi Gerakan
1.	BEMI	Pancasila	Radikal
2.	BEMSI	Islam	Moderat

**Sumber:** Diolah oleh penulis berdasarkan wawancara dengan narasumber dari BEMI dan BEMSI

<sup>10</sup> Istilah kiri digunakan untuk menunjuk gerakannya yang cenderung anarkis (bentrok).

<sup>11</sup> Wawancara dengan Arif Rahman, Aktivis dan Koordinator BEMI, Sabtu, 28 November 2009, dan Jumat, 02 April 2010, di Jakarta.

**Tabel 4.3:**  
**Daftar Tokoh Mahasiswa Pendukung dan Penentang**  
**Abdurrahman Wahid**

No.	Nama Organisasi	Nama Tokoh Mahasiswa	Ideologi Gerakan
1.	BEMI	1. Arif Rahman (Untar)	Radikal
		2. Quddus Salam ( IAIN Surabaya)	Radikal
		3. Arif Rubai (Undip)	Radikal
		4. Dawam (IAIN Bandung)	Radikal
		5. Leonardus Lilik (UGM)	Radikal
2.	BEMSI	1. Taufik Riyadi (UI)	Moderat
		2. Andre Rosiade (Trisakti)	Moderat
		3. Sigit Prasetyo (ITB)	Moderat
		4. Deni Supriyadi (UNJ)	Moderat

**Sumber:** Diolah oleh penulis dari wawancara dengan Taufik Riyadi, Mahasiswa Universitas Indonesia, Pendiri BEMSI dan penentang Pemerintahan Abdurrahman Wahid, Kamis, tanggal 01 April 2010 di Jakarta. Wawancara dengan Arif Rahman dan Quddus Salam pendiri BEMI.

### c. Isu Yang Diperjuangkan

Upaya BEMI memperkuat dan memperluas dukungannya dilakukan dengan mengusung tiga isu penting, yaitu: (1) pembubaran Partai Golkar; (2) pengadilan Soeharto; (3) pembersihan pemerintahan dari antek-antek Orde Baru, seperti Akbar Tandjung, Ginandjar Kartasasmita, Fuad Bawazier, Arifin Panigoro (Lihat Tabel 4.4).

**Tabel 4.4:**  
**Isu Polarisasi Gerakan Mahasiswa**  
**Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid**

NAMA ORG.	ISU	TUNTUTAN
<b>BEMSI</b>	KKN, Antek Israel	Presiden Abdurrahman Wahid mundur
<b>BEMI</b>	1. Pemerintahan bersih 2. Reformasi total	1. Pembubaran Golkar 2. Pembersihan Orde Baru dan antek-anteknya

**Sumber:** Diolah oleh penulis dari wawancara dengan Taufik Riyadi, Mahasiswa Universitas Indonesia, Pendiri BEMSI dan penentang Pemerintahan Abdurrahman Wahid, Kamis, tanggal 01 April 2010 di Jakarta. Wawancara dengan Arif Rahman dan Quddus Salam pendiri BEMI. Lihat juga Media Indonesia, *Organ Lama dan Baru pada Gerakan Mahasiswa*, tanggal 24 Maret 2001.

### 4.3. BEMSI: Gerakan Mahasiswa Plural Intra Universiter Penentang Abdurrahman Wahid

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEMSI) berdiri pada tanggal 14 Februari 2001 di Bandung. BEMSI memiliki basis massa di semua perguruan tinggi negeri ternama, seperti BEM Universitas Indonesia, BEM Universitas Hasanuddin Makassar, BEM Universitas Gajah Mada Yogyakarta, BEM Universitas Pasundan Bandung, BEM Universitas Muhammadiyah Jakarta, BEM Universitas Negeri Jakarta, BEM Institut Pertanian Bogor, BEM Institut Teknologi Bandung, BEM Universitas Trisakti Jakarta, BEM Universitas Sriwijaya Palembang, BEM Universitas Sumatera Utara Medan, BEM Universitas Andalas Padang, BEM Universitas Lampung, BEM Universitas Airlangga Surabaya, BEM Universitas Diponegoro Semarang.<sup>12</sup> Mengenai munculnya BEMSI, Andre Rosiade, Aktivist BEMSI, mengatakan :

“Sudah dimulai sejak ada kongres mahasiswa Indonesia yang melahirkan JMI (Jaringan Mahasiswa Indonesia), lalu dari jaringan JMI ini pada waktu itu tahun 1999 kalau tidak salah, waktu itu ada kongres Mahasiswa Indonesia terjadilah pertarungan ideologi. Waktu itu terjadi pertarungan ideologi antara pro Habibie dan penentang Habibie. Jadi pertemuan pertemuan mahasiswa itu sudah *intens* sebelumnya. Mulai tahun 1998, sudah ada sarasehan di Trisakti, lalu ada Kongres Mahasiswa Indonesia di TMII, dilanjutkan ada pertemuan Jaringan Mahasiswa Indonesia yang terus berkelanjutan, tapi untuk BEMSI itu, hanya kesepakatan bersama kita saja. BEMSI tidak dilahirkan dari Kongres Mahasiswa Indonesia. BEMSI hanya nama dari kesepakatan beberapa organisasi intra kampus yang sehaluan dan sejalan, dalam hal ini karena kesamaan latar belakang sebagai aktivis KAMMI.”<sup>13</sup>

Dalam aksi-aksi BEMSI sangat tegas menuntut Abdurrahman Wahid mundur dari Presiden, Taufik Riyadi, Aktivist BEMSI mengatakan:

“Pemerintah sudah gagal melaksanakan agenda reformasi, gagal memberi rasa aman dan ketenteraman kepada rakyat Indonesia. Bahwa penyelesaian masalah bangsa, titik awalnya Abdurrahman Wahid harus mundur”<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Diolah oleh penulis dari wawancara dengan Taufik Riyadi, Mahasiswa Universitas Indonesia, Pendiri BEMSI dan penentang Pemerintahan Abdurrahman Wahid, Kamis, tanggal 01 April 2010 di Jakarta. Wawancara dengan Arif Rahman dan Quddus Salam pendiri BEMSI. Lihat juga, *Organ Lama dan Baru pada Gerakan Mahasiswa*, dalam Media Indonesia tanggal 24 Maret 2001., *Pro-Kontra Abdurrahman Wahid Padati DPR/MPR*, dalam Suara Pembaruan, tanggal 29 Januari 2001.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Andre Rosiade, Aktivist BEMSI, Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid, Kamis, 25 Maret 2010, di Jakarta.

<sup>14</sup> Lihat *Gerakan Mahasiswa Terpolarisasi Oleh Rekayasa "Mafia" Politik* dalam *Kompas*, 31 Maret 2001.

**Tabel 4.5:**  
**Sikap Politik dan Ideologi Gerakan BEMI dan BEMSI**

No.	Nama Organisasi	Sikap Politik	Ideologi Gerakan
1.	BEMI	Pendukung Abdurrahman Wahid	Pluralis/Radikal
2.	BEMSI	Penentang Abdurrahman Wahid	Islam

**Sumber:** Diolah oleh penulis dari wawancara dengan aktivis BEMI, Arif Rahman, Quddus Salam dan Aktivis BEMSI, Taufik Riyadi, Andre Rosiade.

Sikap dan posisi BEMSI yang memilih menentang Abdurrahman Wahid dilatari oleh sikap dan kebijakan Abdurrahman Wahid yang kerap mengecewakan berbagai kalangan. Sikap BEMSI yang menentang Abdurrahman Wahid lahir dari ketidakpuasannya terhadap beberapa kebijakan Abdurrahman Wahid yang dinilai kontroversial, mengandung unsur KKN dan mengabaikan perasaan kaum mayoritas (Islam), seperti Kasus *Buloggate* dan Sumbangan Dana dari Sultan Brunei dan keinginan membukan hubungan perdagangan dengan Israel. Oleh karena itu konflik antara BEMI dan BEMSI salah satunya sangat dipengaruhi oleh faktor ideologi organisasi dan ideologi gerakan mahasiswa, dimana BEMI berhaluan pluralis/radikal, sedangkan BEMSI berhaluan Islam (Lihat Tabel 4.5).

#### **a. Organisasi dan Kepemimpinan**

Organisasi BEMSI yang berbentuk presidium yaitu terdiri dari perwakilan Presiden Mahasiswa atau Ketua BEM di masing-masing perguruan tinggi yang bergabung dalam BEMSI menunjukkan kepemimpinan BEMSI bersifat kolektif kolegial. Meskipun demikian terdapat aktivis-aktivis BEMSI yang sangat populer, seperti Taufik Riyadi (Ketua BEM UI) yang juga anggota KAMMI dan kemudian menjadi anggota PK. Juga muncul nama Andre Rosiade (Presiden Mahasiswa BEM Universitas Trisakti dan merangkap Ketua Umum KAMMI Jakarta Barat) yang juga sangat dekat dengan PK.

Taufik Riyadi Aktivis BEMSI menjelaskan tentang organisasi dan kepemimpinan BEMSI ini :

“Sebenarnya Presidium, sebenarnya gak ada koordinator. Cuma saya seakan-akan menjadi Koordinator, karena ada UI. Saya juga memberi

kesempatan terhadap Burhanuddin Muhtadi dari IAIN Ciputat dan Andre Rosiade dari Trisakti”.<sup>15</sup>

### **b. Ideologi Organisasi dan Ideologi Gerakan**

Secara ideologis organisasi dan gerakan BEMSI sangat dekat dengan Islam atau berhaluan Islam. Hal itu dapat dicermati dari empat hal, yaitu: (1) BEMSI didirikan oleh aktivis-aktivis Lembaga Dakwah Kampus (LDK) yang dekat dengan KAMMI dan PK; (2) baik Presiden Mahasiswa atau Ketua BEM maupun Presidium BEMSI berasal dari aktivis Islam kampus; (3) memiliki basis massa di kampus-kampus negeri ternama yang mengusung isu Islamisme (Lihat Tabel 4.5). hal ini ditegaskan oleh Andre Rosiade, aktivis BEMSI yang mengatakan :

“Bisa dilihat lihat *track record* kita (BEMSI) rata-rata aktivis organisasi Islam di kampus. Latar belakang kita, rata-rata hampir semua kampus besar di Indonesia, jadi rata-rata kita aktivis-aktivis dakwah Islam yang terorganisir di kampus.”<sup>16</sup>

### **c. Isu Yang Diperjuangkan**

Upaya BEMSI memperkuat dan memperluas dukungannya dilakukan dengan mengusung tiga isu penting, yaitu: (1) tegakkan supremasi hukum; (2) amandemen UUD 45; (3) berantas praktek KKN; (4) adili Soeharto; (5) cabut Dwi Fungsi ABRI; (6) otonomi daerah seluas-luasnya; (7) reformasi sistem pendidikan; (8) lakukan *recovery ekonomi*; (9) tolak militerisasi sipil (Lihat Tabel 4.6).

<sup>15</sup> Wawancara dengan Taufik Riyadi, Aktivis BEMSI, Ketua BEM UI, dan penentang Pemerintahan Abdurrahman Wahid, Kamis, tanggal 01 April 2010, di Jakarta.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Andre Rosiade, Aktivis BEMSI, Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid, Kamis, tanggal 25 Maret 2010, di Jakarta.

**Tabel 4.6:**  
**Isu Polarisasi Gerakan Mahasiswa**  
**Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid**

<b>ORGAN</b>	<b>ISU</b>	<b>TUNTUTAN</b>	<b>PERNYATAAN</b>
<b>BEMSI</b>	1. KKN	<p>1. Meminta Presiden Abdurrahman Wahid bersikap arif dan bijak dengan secepatnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai konsekuensi dari kegagalan meneruskan agenda reformasi demi kepentingan bangsa.</p> <p>2. Menuntut secepatnya dilakukan pemulihan ekonomi agar rakyat tidak terbebani dengan kesulitan yang melilit leher, akibat kondisi ekonomi yang tidak kunjung membaik.</p> <p>3. menuntut pendidikan yang terjangkau oleh seluruh kalangan masyarakat, sehingga tercapai pemerataan pendidikan. Keempat, menolak kenaikan BBM sekarang karena itu akan membebani masyarakat, terutama kalangan ekonomi lemah.</p> <p>4. menuntut dilaksanakannya visi reformasi secara konsisten dan menyeluruh, termasuk tuntutan pengadilan terhadap elemen orba tanpa pandang bulu.</p>	<p><b>Sigit Prasetyo (Mhs ITB) :</b> "Kami meminta bisa bertemu langsung dengan Presiden, agar bisa menyampaikan langsung tuntutan kami, termasuk dengan nuansa-nuansa yang kami bawa tanpa lewat orang kedua. Kedua, kami meminta lewat para menteri itu untuk lebih melihat realitas yang ada di masyarakat, dan menyampaikan tuntutan dari mahasiswa untuk disampaikan kepada Presiden agar dia bisa lebih bersikap bijak, dengan mundur dari jabatannya,".</p> <p><b>Taufik Riyadi (Mhs UI) :</b> "Pemerintah sudah gagal melaksanakan agenda reformasi, gagal memberi rasa aman dan ketenteraman kepada rakyat Indonesia. Bahwa penyelesaian masalah bangsa, titik awalnya Abdurrahman Wahid harus mundur"</p>
<b>BEMI</b>	<p>1. Pembubaran Partai Golkar</p> <p>2. Pengadilan Soeharto dan kroninya: Akbar Tandjung, Ginandjar Kartasasmita, Fuad Bawazier, Arifin Panigoro.</p>	Tuntut Pembubaran Golkar, pembersihan Orde Baru dan pemilu dipercepat	<p><b>Arif Rahman (Mhs Univ Tarumanagara) :</b> "Mereka ini adalah orang-orang yang melakukan praktek-praktek penipuan, korupsi, nepotisme bersama KKN-nya Cendana. Mereka harus dibubarkan dari DPR,"</p> <p><b>Quddus Salam (Mhs IAIN Surabaya) :</b> "Kita terus melakukan konsolidasi dengan daerah yang lain untuk mengkampanyekan pemilu dipercepat,"</p>

**Sumber:** Diaolah dari wawancara dengan Aktivis BEMSI, Taufik Riyadi dan Andre Rosiade dan Wawancara dengan Aktivis BEMI, Arif Rahman dan Quddus Salam serta dari sumber media massa, seperti *Kompas*, *Koran Tempo* dan *Majalah Tempo*.

#### 4.4. BEMI Vs BEMSI: Konflik Politik

Setelah pelaksanaan Pemilu 1999, MPR mengadakan Sidang Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Hasilnya ternyata MPR memutuskan memilih Abdurrahman Wahid sebagai Presiden dan Megawati Soekarnoputri sebagai Wakil Presiden.<sup>17</sup> Secara umum, masyarakat menyambut baik dan menaruh ekspektasi, serta optimis atas terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai Presiden dan Megawati Soekarnoputri sebagai Wakil Presiden. Optimisme itu ditunjukkan oleh nilai rupiah yang menguat hingga level Rp 6.700,- per dollar AS, indeks harga saham gabungan (IHSG) yang melejit hingga menembus batas psikologis 700, sehingga memberi angin segar bagi pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, bagi banyak pihak, pasangan Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri dapat menjadi terminal legislasi bagi peralihan kepemimpinan rezim di era transisi.<sup>18</sup>

Namun tidak sedikit pihak tetap ragu terkait dengan kemampuan yang dimiliki Abdurrahman Wahid. Riwayat kesehatan yang buruk dan minimnya pengalaman dalam pemerintahan, administrasi dan birokrasi merupakan dua alasan mengapa muncul keraguan terhadap diri Abdurrahman Wahid. Bahkan Marcus Mietzner melihat Sidang Umum MPR 1999 dan pemilihan Presiden yang mengantarkan Abdurrahman Wahid menjadi Presiden tampaknya tidak akan menyelesaikan transisi politik di Indonesia. Argumen Marcus Mietzner sangat sederhana, yaitu bahwa keadaan pada waktu pemilihan Presiden Abdurrahman Wahid merupakan petunjuk nyata bahwa jabatan kepresidenan Abdurrahman Wahid sendiri adalah bagian dari transisi yang perlu dituntaskannya.<sup>19</sup> Ada beberapa alasan untuk itu, antara lain: (1) Abdurrahman Wahid sangat bergantung pada dukungan anggota-anggota Majelis yang berasal dari Poros Tengah (2) kemenangan Abdurrahman Wahid tidak hanya menunjukkan kelemahan institusional sistem pemilihan yang digunakan,

<sup>17</sup> Abdurrahman Wahid terpilih menjadi Presiden pada Sidang Paripurna ke-13 MPR, dengan mendapatkan suara 373 suara sementara Megawati Soekarnoputri mendapat 313 suara. Sementara pada voting pemilihan Wakil Presiden, Megawati Soekarnoputri mendapatkan 396 suara dan Hamzah Haz 284 suara. Lihat *Tonggak-Tonggak Massa Balita* dalam *Tempo* 19 Mei 2003.

<sup>18</sup> Lihat Munafrizal Manan, *Gerakan Rakyat Melawan Elit*, Yogyakarta: Resist Book, 2005, hal.124-125.

<sup>19</sup> Marcus Mietzner, "Sidang Umum MPR 1999: Wahid, Megawati, dan Pergulatan Perebutan Kursi KePresidenan" dalam Chris Manning dan Peter Van Diermen (Ed.), *Indonesia di Tengah Transisi: Aspek-aspek Sosial Reformasi dan Krisis*, Yogyakarta: LKIS, 2000, hal.45.

melainkan juga menegaskan personalisasi yang terus-menerus berlaku dalam politik Indonesia.

Walaupun partainya menduduki tempat keempat dalam pemilihan umum, Abdurrahman Wahid mampu memanfaatkan kemahiran berpolitiknya sehingga mendatangkan keuntungan maksimal, dan menyisihkan partai pemenang pemilu, yaitu PDI-P Megawati Soekarnoputri, melalui tekad dan perhitungan yang dingin; (3) kondisi fisik Presiden telah berulang-ulang menimbulkan spekulasi tentang skenario pergantian kekuasaan. Sama halnya di era Soeharto, para aktor politik yang bersiap-siap mencari posisi dalam mengantisipasi mundurnya Presiden karena alasan politik atau fisik.<sup>20</sup>

Secara politik terpilihnya Abdurrahman Wahid pada Sidang Umum MPR 1999 dapat dianggap cacat legitimasi politik. Betapa tidak, PDIP sebagai partai pemenang Pemilu 1999 tidak secara otomatis mampu mendudukkan Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden. Kegagalan Megawati Soekarnoputri terkait kemampuan Abdurrahman Wahid yang dapat menggunakan berbagai cara untuk memenangkan 373 suara yang nantinya membuatnya unggul atas Megawati Soekarnoputri. Abdurrahman Wahid terpilih justru dari perjuangan sebuah aliansi renggang dan labil dengan kekuatan-kekuatan yang pernah dikecamnya sebagai sektarian Islam, Poros Tengah.<sup>21</sup> Mengenai terpilih dan kejatuhannya, serta sikap penolakan KAMMI terhadap Abdurrahman Wahid, Fachri Hamzah, mantan Ketua KAMMI Pusat dan penentang Abdurrahman Wahid, mengatakan:

“Justru kesalahannya itu di Amien Rais juga, waktu itu, komitmennya kan tokohnya dia, tapi memang kan mati kartunya, Habibie mundur. Amien Rais waktu itu sudah jadi ketua MPR, dalam keadaan memaksa, keadaan memaksa itu harusnya dia berpikir ulang. Dan mengatakan ini, saya harus maju. Yusril juga dalam waktu itu masih dianggap terlalu muda. Di situlah Gus Dur sebagai alternatif. Kalau Mega naik, Mega tidak searogan dulu, dulu memang kita menentang Mega, karena Mega ini kan dari partai yang dulu 3%, tiba2 menjadi 34%, aura kemenangannya itu, disambut hiruk-pikuk sedemikian rupa sehingga Mega ini gak bakal jadi pemimpin yang tidak membangun perasaan terancam, orang pun perasaan terancam di bawah Mega itu, ngeri itu. Yang *establish* Golkar waktu itu, beserta sisa-

<sup>20</sup> Marcus Mietzner, *Ibid.*, hal.45.

<sup>21</sup> Latar belakang terbentuknya Poros Tengah, lihat Untung Wahono, *Peran Politik Poros Tengah dalam Kancah Perpolitikan Indonesia*, Jakarta; Perennial Press, 1999. Lihat juga Suharsono, *Cemerlangnya Poros Tengah*, Jakarta; Pustaka Tarbiyatuna, 2003.



sisanya elemen Orde Baru yang masih banyak itu, terancam, orang Islam merasa terancam, hingga memang bagaimanapun harus ada jalan tengah, dan dalam perspektif itulah sebetulnya ide Amien, menge-*push* Gus Dur, bagaimana pun dianggap benar, meskipun ada insidennya. Tapi setelah Gus Dur naik, tak satupun tokoh-tokoh yang berhasil tetap konsolidasi dengan Gus Dur, tidak ada yang menunggangi Gus Dur membangun pemerintahan secara lebih stabil, jadi jatuhlah Gus Dur.<sup>22</sup>

Melalui Poros Tengah, Abdurrahman Wahid ingin mempertaruhkan semua kepercayaan dan dukungan yang diterimanya dari kaum pluralisme; suara toleransi dan moderasi. Tanpa sedikitpun keraguan, dengan mengangkat isu *gender* dan agama terhadap Megawati Soekarnoputri, Abdurrahman Wahid mulai menghantam kampanye Megawati Soekarnoputri. Betul bahwa Abdurrahman Wahid telah mempertaruhkan hidupnya dengan menerjunkan diri dalam kegiatan-kegiatan politik yang penuh stres dan yang muskil membantu kepulihannya dari dua *stroke* serius yang dideritanya tahun 1998.<sup>23</sup>

Kuatnya tekad Abdurrahman Wahid menjadi Presiden dapat dijelaskan dengan dinamika hubungannya dengan Megawati Soekarnoputri. Sebab, hubungan antara keduanya, sudah berlangsung sejak tahun 1950-an. Abdurrahman Wahid, Ketua Organisasi Muslim terbesar Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), adalah mitra yang secara politis dan intelektual lebih unggul dibanding Megawati Soekarnoputri. Abdurrahman Wahid bahkan sudah membimbing Megawati Soekarnoputri sejak memasuki kancah politik di akhir 1980-an, meskipun sejak kejatuhan Soeharto, Abdurrahman Wahid merasa bahwa dirinya telah kehilangan pengaruh atas Megawati Soekarnoputri.

Sulit dibayangkan bahwa disanjung oleh pers dalam negeri dan luar negeri sebagai Presiden Indonesia masa depan, kepercayaan diri Megawati Soekarnoputri justru berkembang hingga ke tingkat yang mengancam hierarki hubungan antara dirinya dengan Abdurrahman Wahid. Megawati Soekarnoputri merasa perlu menerima pendaatang-pendaatang baru ke dalam lingkaran relasi terdekatnya, sehingga Abdurrahman Wahid merasa terancam. Kepemimpinan Abdurrahman Wahid dalam aliansi kekuatan nasionalis-sekuler dan kekuatan Islam tradisional dimana Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai sekretaris eksekutifnya, berada

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Fachri Hamzah, Mantan Ketua KAMMI pendukung Pemerintahan B.J. Habibie dan penentang Abdurrahman Wahid, Sabtu tanggal 03 April 2010 di Cibubur.

<sup>23</sup> Marcus Mietzner, *Op., Cit.*, hal.46.

dalam bahaya. Dengan latar belakang ini, Abdurrahman Wahid mencoba gagasan mendukung Sultan Yogyakarta menjadi Presiden pada bulan Oktober 1998. Ketika hal ini ternyata tidak dapat berjalan, Abdurrahman Wahid akhirnya menyimpulkan bahwa hanya ada satu cara baginya untuk melestarikan pengaruh terhadap proses politik yang sedang berlangsung, yaitu: dia sendirilah yang harus menjadi Presiden.<sup>24</sup>

Tahun 1999 awal, Abdurrahman Wahid telah meyakinkan dirinya sendiri bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)—yang didirikan tanggal 23 Juli 1998 dengan restu resmi cabang-cabang NU—akan cukup kuat untuk menjaminkannya menduduki kursi kepresidenan. Abdurrahman Wahid mengabaikan peringatan para penasihat dekatnya bahwa pada puncak kejayaannya sebagai partai politik pun NU tidak pernah memenangkan lebih dari 18 persen suara dalam pemilihan umum. Maka, Abdurrahman Wahid sangat menekan pimpinan PKB di bawah Matori Abdul Djalil dan Muhaimin Iskandar untuk menetapkan target perolehan suara dalam pemilihan umum lebih 40 %. Dalam skenario Abdurrahman Wahid, PDI-P akan berada di urutan kedua, sekitar 25 %, sehingga dialah yang nanti akan menjadi pimpinan koalisi. Abdurrahman Wahid sudah mulai menghimpun dan menata kabinetnya pada awal bulan Februari, mengaku bahwa Megawati Soekarnoputri sudah setuju menarik diri dari persaingan Calon Presiden seandainya Abdurrahman Wahid dicalonkan.<sup>25</sup>

Akan tetapi, pada bulan Maret, Abdurrahman Wahid menyadari bahwa perkiraannya mengenai kinerja PKB dalam pemilihan umum mungkin terlalu optimistik. Pada tahap inilah Abdurrahman Wahid mulai menyerang Megawati Soekarnoputri pada butir-butir yang sangat peka, termasuk *gender* dan kurangnya kedalaman ke-Islamannya. Dalam suatu pidato di Singapura yang mengagetkan banyak orang, Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa seorang Presiden perempuan tidak diterima kalangan mayoritas Muslim Indonesia secara umum, khususnya pemuka-pemuka Islam tradisional. Ironisnya, para Kyai telah mempersiapkan seperangkat argumen untuk melegitimasi Presiden perempuan, dalam suatu pertemuan PKB akhir Februari. Oleh karena itu, tampaknya kepentingan Abdurrahman Wahid bukanlah terutama berkait dengan

---

<sup>24</sup> Marcus Mietzner, *Ibid.*, hal.47.

<sup>25</sup> Marcus Mietzner, *Ibid.*, hal.47.

permasalahan umum tentang peran perempuan dalam politik, melainkan lebih pada memprediksi peluang Megawati Soekarnoputri dalam pemungutan suara.<sup>26</sup>

Hasil Pemilu tahun 1999 menjungkirbalikkan hubungan yang telah berlangsung sekian lama antara Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Megawati Soekarnoputri unggul secara meyakinkan, memperoleh 35 persen dari jumlah suara yang masuk dan 153 kursi dalam parlemen baru. Dengan kemenangan ini, Megawati Soekarnoputri berada pada posisi terdepan dalam perebutan kursi Presiden, jauh meninggalkan pesaing lainnya. Kontrasnya, Abdurrahman Wahid setidak-tidaknya ikut menyebabkan penampilan PKB yang sedang-sedang saja, yaitu hanya mengumpulkan 12 persen dari jumlah keseluruhan suara dan hanya 51 kursi. Partai ini praktis terhapus habis di daerah-daerah luar Jawa. Banyak pejabat partai mempersalahkan manuver Abdurrahman Wahid yang membingungkan dan Jawa-sentrisnya yang menyolok sebagai pokok pangkal kekalahan itu.<sup>27</sup>

Dalam apa yang kemudian ternyata merupakan *blunder*, 'bunuh diri' strategis yang besar, Megawati Soekarnoputri menjadikan Abdurrahman Wahid merasa bahwa dalam pandangan Megawati Soekarnoputri pemilihan umum itu telah mengubah dinamika hubungan mereka berdua. Dalam rapat-rapat yang diselenggarakan segera setelah pemilihan umum, Megawati Soekarnoputri tidak menyembunyikan kepuasannya tentang apa yang dipandanginya sebagai mandat pemerintahan yang begitu jelas dilimpahkan kepadanya. Abdurrahman Wahid terperangah ketika, setelah dia meminta empat posisi kabinet untuk PKB dan NU, Megawati Soekarnoputri hanya menawarkan satu. Sebelumnya tidak pernah terjadi bahwa Megawati Soekarnoputri berani menolak secara terbuka saran yang Abdurrahman Wahid ajukan. Akan tetapi, sekarang dengan perolehan kursi parlemen yang tiga kali lipat dari perolehan PKB, Megawati Soekarnoputri merasa sudah saatnya untuk berubah. Ini disusul dengan serangkaian insiden lain. Setelah itu, Abdurrahman Wahid menyimpulkan bahwa Megawati Soekarnoputri tidak berniat memberinya peranan penting dalam rencana-rencana politiknya.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Marcus Mietzner, *Ibid.*, hal.47-48.

<sup>27</sup> Marcus Mietzner, *Ibid.*, hal.48.

<sup>28</sup> Marcus Mietzner, *Ibid.*, hal.48.

Abdurrahman Wahid bukanlah satu-satunya pelaku politik yang sempat merasa dipentalkan dan dijauhkan oleh Megawati Soekarnoputri. Amien Rais, yang Partai Amanat Nasional-nya hanya memperoleh 7 persen dari keseluruhan suara, pada awalnya sudah mengakui hak Megawati Soekarnoputri untuk memimpin pemerintahan berikut. Amien Rais mendorong Megawati Soekarnoputri untuk mengambil langkah-langkah seperlunya untuk membentuk koalisi yang kokoh antara para penandatangan Deklarasi Poso bulan Mei sebelumnya. Akan tetapi, Megawati Soekarnoputri tidak melihat adanya keperluan yang mendesak untuk mengadakan pengaturan dengan partai-partai yang akan dapat membantunya memperoleh mayoritas mutlak dalam Sidang Umum.<sup>29</sup>

Megawati Soekarnoputri bersikeras mengukuhkan haknya yang wajar untuk menjadi Presiden, dan enggan mendekati apa yang dengan sengit disebutnya "partai-partai kecil". Sikap Megawati Soekarnoputri ini akhirnya mengakibatkan terbentuknya aliansi antara pihak-pihak yang sekian lama saling bersaing. Hubungan antara Abdurrahman Wahid dan Amien Rais sudah buruk sejak Abdurrahman Wahid memimpin NU (sebagai spektrum tradisional dari Islam Indonesia) dan Amien Rais memimpin Muhammadiyah (sebagai spektrum modernis) dalam masa-masa akhir pemerintahan Soeharto.

Hubungan mereka boleh dikata tidak pula membaik setelah jatuhnya Orde Baru. Akan tetapi, kini mereka bersama-sama menghadapi prospek bahwa Megawati Soekarnoputri akan menduduki kursi kepresidenan. Hal itu sangat mungkin akan menjadikan keduanya tersingkir menjadi pemain-pemain politik yang kurang penting. Maka, mereka memikirkan strategi untuk menghukum Megawati Soekarnoputri atas kekakuan dan rasa puas dirinya. Meskipun semula direncanakan hanya sebagai semacam peringatan untuk menyadarkan Megawati Soekarnoputri, kerja sama antara Abdurrahman Wahid dan Amien Rais ini kemudian berkembang sangat jauh.<sup>30</sup>

Amien Rais menamakan jalinan kerja sama itu "Poros Tengah". Tujuan Amien Rais ialah menghimpun partai-partai Islam, yang ditempatkan di tengah, sebagai alternatif terhadap PDI-P di kiri dan Golkar (partai politik negara

<sup>29</sup> Marcus Mietzner, *Ibid.*, hal.48-49.

<sup>30</sup> Marcus Mietzner, *Ibid.*, hal.49.

di bawah Orde Baru) di kanan. Calon-calon anggota aliansi itu adalah PAN, PPP, PBB, PK, dan PKB.<sup>31</sup> Amien Rais harus bekerja mati-matian untuk membentuk dan mengukuhkan aliansi ini. Dia menghadapi tiga masalah utama, yaitu: (1) banyak politisi dalam PPP dan PBB secara cukup terbuka telah mendukung B.J. Habibie menjadi Presiden dalam satu masa jabatan lagi; (2) Abdurrahman Wahid terlanjur menggerakkan PKB memasuki kubu Megawati untuk mengantisipasi suatu aliansi PKB—PDI-P di bawah patronase Abdurrahman Wahid. Ketika Abdurrahman Wahid akan mengubah strategi itu, partai tersebut sulit diajak mengikuti pergeseran kebijakan ini; (3) kalau kedua masalah itu berhasil diatasi, aliansi itu masih juga jauh dari kemungkinan menjadi mayoritas mutlak dalam Sidang Umum. Tanpa dukungan cukup besar dari Golkar, tidak mungkin Poros Tengah menang.<sup>32</sup>

Amien Rais tampak menyadari bahwa satu-satunya cara untuk meyakinkan Abdurrahman Wahid dan PKB agar mau bergabung dalam aliansi itu ialah menawarkan kursi Presiden kepada Ketua Umum PB NU itu. Sebaliknya, kesediaan Abdurrahman Wahid menerima tawaran Amien Rais membuktikan kemampuan dan kelihaiannya Amien Rais dalam meraba ambisi politik Abdurrahman Wahid dan ketersinggungannya oleh perilaku Megawati Soekarnoputri. Bahkan dalam analisa Marcus Mietzner, Amien Rais secara jitu berasumsi bahwa Abdurrahman Wahid tidak akan sanggup menolak godaan bahwa dia akan diajukan sebagai calon Presiden. Amien Rais juga memperhitungkan bahwa perutusan PKB dalam Sidang Umum tentu akan meninggalkan Megawati Soekarnoputri jika pimpinan dan panutan mereka mencalonkan diri melawan Megawati Soekarnoputri.<sup>33</sup>

Dalam perkembangannya, seperti diketahui oleh publik, setelah pulang dari Amerika Serikat mengobati matanya, Abdurrahman Wahid tampak semakin bulat keinginannya mencalonkan diri sebagai calon Presiden. Bahkan manuver politik Abdurrahman Wahid sudah terlihat jelas ketika menyangkal pernah memberikan dukungan kepada Megawati Soekarnoputri, dan meminta pimpinan PKB agar

---

<sup>31</sup> Lihat *Menyoal Sikap Amien Rais* dalam *Republika*, 27 Juli 1999. Lihat juga Untung Wahono, *Peran Politik Poros Tengah dalam Kancah Perpolitikan Indonesia, Op., Cit.*, hal 104-106 dan Suharsono, *Cemerlangnya Poros Tengah, Op., Cit.*, hal. 86-88

<sup>32</sup> Marcus Mietzner, *Ibid.*, hal.49.

<sup>33</sup> Marcus Mietzner, *Ibid.*, hal.50.

tidak meneruskan dukungannya pada PDI-P. Kepada sejumlah Kyai di Surabaya yang tampak kebingungan, Abdurrahman Wahid juga menegaskan bahwa PKB bukanlah satu-satunya partai yang diakui oleh kepengurusan NU sebagai cara untuk menyatakan bahwa sikapnya telah berubah. Di satu sisi Abdurrahman Wahid tampak berusaha membuat jarak antara dirinya dengan partai yang memasangkannya sebagai calon Presiden dalam berkampanye dan kalah, tapi lain sisi juga mencoba membangun citra sebagai jalan tengah (kompromis) yang dapat diterima oleh unsur-unsur Islam maupun sekular moderat.<sup>34</sup>

Pada pekan menjelang pemilihan Presiden, Abdurrahman Wahid sudah melancarkan berbagai serangan terhadap Megawati Soekarnoputri. Secara terbuka, Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa PDI-P telah menyuap para utusan wakil rakyat, mengulang-ulang bahwa NU tidak dapat menerima pimpinan perempuan, dan menyatakan bahwa PDI-P tidak memahami Islam dengan mencontohkan Zulvan Lindan, juru bicara PDI-P yang membacakan tanggapan Fraksi PDI-P terhadap pidato pertanggungjawaban B.J. Habibie.<sup>35</sup>

Dalam menyerang Megawati Soekarnoputri, Abdurrahman Wahid secara bersamaan berusaha melanjutkan hubungannya dengan B.J. Habibie. Beberapa kali pertemuan dengan B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid berhasil memperoleh keyakinan bahwa Presiden yang sedang kewalahan itu akan condong kepadanya daripada kepada Megawati Soekarnoputri, seandainya B.J. Habibie akan memerintahkan 100-120 pendukungnya di fraksi Golkar untuk memberikan suara kepada NU seandainya B.J. Habibie sendiri tidak dapat bertahan. Tiba-tiba makna kunjungan yang secara ajeg dilakukan Abdurrahman Wahid kepada B.J. Habibie sejak awal 1999, yang sering diatur oleh Abdurrahman Wahid untuk membicarakan berbagai topik yang tanpa arah pasti, menjadi lebih jelas.<sup>36</sup>

Abdurrahman Wahid menjaga kontak dengan Megawati Soekarnoputri sepanjang dua pekan yang menentukan menjelang pemilihan Presiden, bahkan sampai bepergian bersama ke Jawa Timur untuk mengunjungi makam ayahanda Megawati Soekarnoputri dan kakek Abdurrahman Wahid sendiri. Dalam pertemuan-pertemuan dengan Megawati Soekarnoputri itu, Abdurrahman Wahid

---

<sup>34</sup> Marcus Mietzner, *Ibid.*, hal.50.

<sup>35</sup> Marcus Mietzner, *Ibid.*, hal.51.

<sup>36</sup> Marcus Mietzner, *Ibid.*, hal.51-52.

memberikan isyarat-isyarat yang tidak konsisten. Sekali Abdurrahman Wahid mengindikasikan bahwa dia tidak akan ikut mencalonkan diri jika Megawati Soekarnoputri menjamin bahwa dia akan dapat banyak ikut menentukan dalam pembentukan kabinet baru.

Pada kesempatan lain, Abdurrahman Wahid mengatakan akan menawarkan kepada Megawati Soekarnoputri beberapa posisi jika Abdurrahman Wahid menjadi Presiden. Kedudukan itu meliputi mulai dari Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Ketua DPR, sampai pimpinan oposisi. Tidak konsistennya tawaran-tawaran itu membuat Megawati Soekarnoputri berpikir bahwa Abdurrahman Wahid hanya sedang berusaha memperkuat posisi tawar-menawarnya, dan akhirnya akan menyerahkan kursi kepresidenan kepadanya. Dengan latar belakang demikian, Megawati Soekarnoputri menerima saja segala serangan dari pihak Abdurrahman Wahid dan tidak mau memunculkan isu-isu yang barangkali akan dapat merobohkan Abdurrahman Wahid, misalnya kondisi kesehatannya yang buruk, bersandarnya Abdurrahman Wahid pada B.J. Habibie dan partai-partai Islam, dan inkonsistensinya yang sudah mahsyur itu.<sup>37</sup>

Sementara Megawati Soekarnoputri salah tebak tentang maksud-maksudnya yang sebenarnya, Abdurrahman Wahid melangkah ke tahap persiapan akhir ke arah kursi kepresidenan. Setelah mendapatkan keyakinan bahwa B.J. Habibie akan mendukungnya seandainya B.J. Habibie gagal mendapatkan dukungan untuk pidato pertanggung jawabannya, Abdurrahman Wahid mendekati unsur-unsur penentang B.J. Habibie di tubuh Golkar dan menawarkan kedudukan Wakil Presiden kepada ketua partai itu, Akbar Tanjung. Pos yang sama itu dia tawarkan pula kepada Panglima TNI, Jenderal Wiranto. Jenderal itu memegang kendali atas 38 kursi di Sidang Umum itu, yang sangat menentukan keberhasilan Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid juga yakin bahwa kemenakannya, Saifullah Yusuf, akan memobilisasi 30 anggota MPR di tubuh PDI-P untuk memberikan suara baginya.<sup>38</sup>

Akan tetapi, perhitungan Abdurrahman Wahid ini sangat teoritis. Para pendukung B.J. Habibie di Golkar akan memberikan suara mendukung calon mereka selama B.J. Habibie masih ikut bersaing dalam pencalonan, dan tidak ada

---

<sup>37</sup> Marcus Mietzner, *Ibid.*, hal.52.

<sup>38</sup> Marcus Mietzner, *Ibid.*, hal.52.

petunjuk bahwa dia akan mundur sekaligus pidato pertanggung jawabannya ditolak Sidang. Akbar Tanjung telah menyetujui tawaran Megawati Soekarnoputri memberikan kursi wakil Presiden kepadanya, dan ini menambahkan bahkan antara 50 sampai 60 suara untuk kubu Megawati Soekarnoputri.

Dewan Pimpinan PPP dalam suatu rapat internal telah memutuskan mendukung B.J. Habibie karena Abdurrahman Wahid dipandang tidak *fit* untuk jabatan itu. PBB juga jelas-jelas condong ke B.J. Habibie malahan mempunyai pendukung di PAN dan PK pula, yang membentuk fraksi gabungan reformasi. Para perwira TNI telah menunjukkan gelagat bahwa militer akan memberikan suara untuk B.J. Habibie, dan di PKB beberapa Kyai jelas-jelas tergoda dengan iming-iming bantuan materi dari rekan-rekan B.J. Habibie, Marwah Daud, dan Jimly Asshidiqie. Selain itu, pihak yang setia kepada Matori Abdul Djali di fraksi PKB, diyakini berdiri kukuh di belakang Megawati Soekarnoputri. Peta politik dua hari menjelang pemilihan Presiden memperlihatkan bahwa dalam suatu polling yang melibatkan Megawati Soekarnoputri, B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid, Abdurrahman Wahid adalah yang paling besar kemungkinannya untuk gugur dalam putaran pertama.<sup>39</sup>

Dalam jam-jam dini tanggal 20 Oktober pagi, konstelasi politik itu berubah secara dramatis. Beberapa jam sebelumnya, Sidang Umum telah menolak pidato pertanggungjawaban B.J. Habibie dengan selisih suara tipis, hanya 33 suara. Hasil ini, sesungguhnya, masih memungkinkan B.J. Habibie ikut persaingan calon Presiden, tetapi B.J. Habibie memutuskan mundur. Pukul dua dini hari, dalam rapat di rumah B.J. Habibie di Kuningan, Presiden dan beberapa pimpinan Poros Tengah memutuskan untuk menampilkan Amien Rais ke gelanggang persaingan calon Presiden melawan Megawati Soekarnoputri dan Abdurrahman Wahid. Amien Rais menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa dia akan kehilangan kredibilitas dan bahwa hubungan NU-Muhammadiyah yang baru saja dibina akan rusak jika dia sampai menerima pencalonan itu.

Setelah Amien Rais, tawaran diajukan kepada Ketua PPP Hamzah Haz dan Akbar Tanjung, tetapi keduanya menghindar pula. Barulah setelah terjadi serangkaian penolakan, muncul nama Abdurrahman Wahid sebagai calon

---

<sup>39</sup> Marcus Mietzner, *Ibid.*, hal.52-53.



pengganti B.J. Habibie dalam mewakili unsur Islam menghadapi Megawati Soekarnoputri. Unsur-unsur dalam Golkar yang setia kepada B.J. Habibie, di bawah komando mantan Ketua DPA, A.A. Baramuli, bahkan sempat berpikir akan *abstain*. Langkah itu berpotensi mencegah pemilihan seorang Presiden baru sehingga harus ditemukan calon-calon lain lagi.<sup>40</sup>

Ketua PBB, Yusril Ihza Mahendra, telah menyatakan pencalonannya sekitar pukul empat pagi, sebagai reaksi terhadap penolakan Amien Rais dan mengantisipasi kemungkinan Abdurrahman Wahid menarik diri. Fraksi PKB mencalonkan Abdurrahman Wahid 20 menit sebelum batas akhir waktu pencalonan yang adalah pukul tujuh pagi, disusul oleh Fraksi Reformasi dan PPP. Fraksi Golkar juga tampak bingung ketika mengetahui bahwa Akbar Tanjung menolak ikut bersaing sebagai calon Presiden. Abdurrahman Wahid memanfaatkan kesempatan itu dan mengunjungi Akbar Tanjung di kamar hotelnya, untuk menawarkan kursi Wakil Presiden.

Meski Akbar Tanjung mengisyaratkan setuju dengan pengaturan ini dengan memeluk Abdurrahman Wahid, Akbar Tanjung tidak memerintahkan kelompok yang dikendalikannya agar memberikan suara bagi pemimpin dan panutan NU itu. Sebetulnya, kebanyakan di antara para anggota utusan Golkar yang menentang B.J. Habibie tetap masih akan memberikan suara kepada Megawati Soekarnoputri. Akan tetapi, sebagaimana kemudian terjadi, Abdurrahman Wahid menerima dukungan yang bahkan lebih besar dari kelompok A. A. Baramuli yang berada di kubu B.J. Habibie. Sebagai imbalan bagi sekitar seratus kursi, A.A. Baramuli menuntut representasi cukup besar dalam kabinet. Abdurrahman Wahid menjawab, keinginan A.A. Baramuli itu akan dipertimbangkan setelah dirinya terpilih. Karena alternatif yang ada hanyalah yang bersifat destruktif, yaitu menunda prosesnya dengan cara *abstain*, A.A. Baramuli mengerahkan dukungannya kepada Abdurrahman Wahid.<sup>41</sup>

TNI yang tidak pernah lelah memantau perkembangan keadaan segera mengerti perubahan peta politik ini. Ketika para anggota MPR memasuki gedung parlemen untuk berperan serta dalam pemungutan suara yang dijadwalkan pukul 10.30, mereka disambut dengan unjuk rasa yang disponsori TNI. Demonstrasi ini

<sup>40</sup> Lihat *Pidato Ditolak Kedua Kali* dalam *Media Indonesia*, 21 Oktober 1999.

<sup>41</sup> Marcus Mietzner, *Ibid.*, hal.54.

meminta duet Abdurrahman Wahid-Wiranto ditempatkan di pucuk pemerintahan. Kepala Badan Intelijen Militer, Letnan Jenderal Tyasno Sudarto, telah bertindak atas nama Wiranto ketika mendesak PDI-P menerima Wiranto sebagai wakil Presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri. Sekarang ketika anginnya berubah, Letnan Jendral Tyasno Sudarto siap dengan sebuah opsi yang sangat luwes, yaitu melihat Wiranto sebagai teman seiring Abdurrahman Wahid.<sup>42</sup>

TNI, Poros Tengah, mayoritas dari Fraksi Golkar dan PKB berpihak kepada Abdurrahman Wahid, sehingga Abdurrahman Wahid secara politik berada di depan Megawati Soekarnoputri. Sementara Megawati Soekarnoputri melihat hal itu secara pasif. Di pihak lain Yusril Ihza Mahendra tidak mendatangkan ancaman serius bagi Abdurrahman Wahid. A.A. Baramuli telah menjanjikan dukungan kelompoknya untuk Abdurrahman Wahid, sedangkan PPP maupun Fraksi Reformasi juga mencalonkan Abdurrahman Wahid. Yusril lalu menarik diri begitu persidangan dibuka. Dini hari, para pendukung Megawati Soekarnoputri dari PDI-P dan Golkar berkesimpulan bahwa Abdurrahman Wahid dapat memenangkan 380 suara melawan 314 suara untuk Megawati Soekarnoputri. Seperti dikatakan salah seorang pendukung Megawati Soekarnoputri dari Golkar, satu-satunya yang dapat mereka harapkan sekarang adalah "mukjizat".<sup>43</sup>

Pada awalnya, "mukjizat" kelihatannya akan sungguh-sungguh terjadi. Ketika suara dihitung, Megawati Soekarnoputri unggul 40 suara pada tahap pertama. Akan tetapi, kemudian Abdurrahman Wahid yang memimpin. Ketika para anggota pengawal kepresidenan mulai mengelilingi kursi Abdurrahman Wahid di baris depan tempat duduk Fraksi Golongan Fungsional, dan para warga pendukung Poros Tengah mulai menyanyikan shalawat menyanjung puji Nabi Besar Muhammad, mulai jelas bagi pendukung Megawati Soekarnoputri bahwa Abdurrahman Wahid segera disumpah sebagai Presiden keempat Indonesia. Hasil akhirnya memang tidak berbeda banyak dengan perhitungan yang telah dibuat pagi harinya: 373 suara untuk Abdurrahman Wahid dan 313 untuk Megawati Soekarnoputri.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Marcus Mietzner, *Ibid.*, hal.54.

<sup>43</sup> Marcus Mietzner, *Ibid.*, hal.54.

<sup>44</sup> Marcus Mietzner, *Ibid.*, hal.54-55.

Di tangan Abdurrahman Wahid, Indonesia menghadapi pemerintahan yang sangat heterogen<sup>45</sup>. Bukan pemerintahan yang berbasis luas dengan berbagai ideologi dan program, beserta oposisi yang punya kekuatan setimpal untuk mengontrol koalisi itu dan mengembangkan kelembagaan legislatif negeri ini. Akan tetapi, Abdurrahman Wahid beruntung bahwa Megawati Soekarnoputri akhirnya menerima tawarannya menjadi Wakil Presiden. Tawaran itu setidaknya membuat Megawati Soekarnoputri dapat mengatasi kekecewaannya yang mendalam terhadap Abdurrahman Wahid dan mengesampingkan imbauan dari partainya untuk memilih menjadi oposisi. Namun Abdurrahman Wahid yang mengomentari dirinya sebagai Wakil Presiden terkuat yang pernah dimiliki Indonesia setidaknya dapat membuat Megawati Soekarnoputri tidak siap melupakan begitu saja sesuatu yang dipandanginya sebagai tohokan dari kawan seiring. Di pihak lain, Poros Tengah khawatir bahwa Megawati Soekarnoputri, yang sekarang sangat dekat ke kursi kepresidenan, memang sengaja direngkuh oleh Abdurrahman Wahid untuk mengimbangi tuntutan dari partai-partai Islam.<sup>46</sup>

Polarisasi gerakan mahasiswa dapat dilihat dari isu yang diusung beserta momen pada saat gerakan mahasiswa dilakukan. Berkaitan dengan Sidang Tahunan MPR 2000 dan isu amandemen UUD 1945, di kalangan gerakan mahasiswa, nampak terjadi polarisasi sikap terhadap amandemen UUD 1945. KAMMI dan beberapa kesatuan aksi dan ormas mahasiswa Islam lain mendukung langkah amandemen UUD 1945 dalam Sidang Tahunan MPR 2000, namun sejumlah aksi dan elemen gerakan mahasiswa lain menolak proses amandemen pada saat itu. Nampaknya polarisasi ini berkaitan erat dengan kontroversi Piagam Jakarta.<sup>47</sup>

Hal yang paling keras mendapat reaksi dari masyarakat, khususnya gerakan mahasiswa adalah keputusan MPR yang mempertahankan keberadaan TNI/Polri di DPR/MPR hingga tahun 2009 melalui TAP MPR No.VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri. Sebenarnya, sejak menjelang dilaksanakannya ST MPR 2000, berbagai elemen gerakan mahasiswa tegas-tegas menyatakan

---

<sup>45</sup> Mengenai hal ini lihat, Arif Mudatsir Mandan, *Memilih Gus Dur Menjadi Presiden*, Jakarta; GPP Press, 2000.

<sup>46</sup> Marcus Mietzner, *Ibid.*, hal.55.

<sup>47</sup> Lihat Ahmad Syafii Ma'arif, *Antara Gincu dan Garam*, dalam *Tempo* 05 November 2001.

tuntutannya tentang dituntaskannya penghapusan Dwi Fungsi TNI/Polri. Aksi ini dilakukan oleh hampir seluruh elemen gerakan mahasiswa, dari sayap paling kanan hingga paling kiri.<sup>48</sup>

Keluarnya keputusan MPR tersebut mengundang reaksi keras dari gerakan mahasiswa. Pada Rabu, tanggal 16 Agustus 2000, misalnya, berbagai aksi unjuk rasa terus berlangsung di depan gedung DPR/MPR yang dilakukan sedikitnya enam kelompok pengunjuk rasa. Mereka secara tegas menolak keputusan MPR yang mempertahankan TNI dan Polri di MPR sampai 2009.<sup>49</sup> Dua hari berikutnya, KAMMI kembali menggelar aksi protes dan keprihatinannya, dengan membagikan bunga dukacita atas kegagalan MPR menghapus Dwi Fungsi TNI/Polri kepada para pengendara yang melintasi jalan depan gedung DPR/MPR. Sementara di depan Istana Merdeka, ribuan aktivis Jaringan Mahasiswa Indonesia (JMI) melakukan demonstrasi mengingatkan kembali pemerintah, DPR dan MPR tentang Enam Visi Reformasi dan penolakannya terhadap keberadaan TNI/Polri di DPR dan MPR. Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2000 menyisakan kekecewaan bagi gerakan mahasiswa karena MPR dianggap gagal memenuhi tuntutan agenda reformasi, ditambah lagi ketidakpuasan banyak elemen gerakan mahasiswa terhadap kinerja pemerintahan Abdurrahman Wahid.<sup>50</sup>

Sementara itu, berkaitan dengan kasus KKN Presiden Abdurrahman Wahid, aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa terjadi di Jakarta dan berbagai kota. Di Yogyakarta, sekitar 2.000 mahasiswa menggugat keterlibatan pejabat Orde Baru yang masih bercokol di dalam pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Mereka menilai, Presiden sudah teracuni oleh budaya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Para mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Penyelamat Reformasi (Depera), Dewan Mahasiswa (Dema) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Aliansi Mahasiswa-Pelajar Yogyakarta (AMPY), Aliansi Mahasiswa Penyelamat Reformasi (AMPRI), Front Rakyat Selamatkan Reformasi (FRAKSI), Aliansi Mahasiswa Islam (AMI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) itu berdemonstrasi di

---

<sup>48</sup> Mahfudz Sidiq, *Ibid.*, hal.252

<sup>49</sup> Lihat *TAP MPR Tentang TNI/Polri Harus Batal Demi Hukum* dalam *Kompas*, 19 Agustus 2000, lihat juga *TNI/Polri Tetap Ingin Berada di MPR/DPR*. Dalam *Kompas* 07 Agustus 2000.

<sup>50</sup> Mahfudz Sidiq, *Op.Cit.*, hal.252.

Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD), kemudian menuju pertigaan Kantor Pos Besar DI. Yogyakarta. Dalam aksi tersebut, para demonstran menunjukkan karakteristik Orde Baru yang berupa KKN sampai kini justru dialami oleh pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.<sup>51</sup>

Di Solo, sekitar 1.000 mahasiswa dan pemuda turun ke jalan menuntut Abdurrahman Wahid turun dari jabatannya. Mereka berasal dari Gerakan Rakyat Antikorupsi (Gerak), Aksi Bersama Mahasiswa dan Rakyat Surakarta (ABMRS), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan Komite Mahasiswa (KM) Universitas Sebelas Maret Solo. Di Semarang, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Diponegoro menyerukan Aksi Mogok Nasional, sebagai bentuk protes rakyat terhadap pemerintahan korup yang tidak komitmen menjalankan agenda-agenda reformasi.

Aksi yang digelar ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, pada 12 Maret 2001, sempat diwarnai pembacaan seruan mogok yang disiarkan secara langsung di Stasiun RRI Semarang.<sup>52</sup> Tekanan terhadap Presiden Abdurrahman Wahid juga datang dari BEM UI di Jakarta. Pada tanggal 12 Maret 2001, ribuan massa mahasiswa UI melakukan *long march* dari masjid ARH UI menuju Istana Merdeka untuk memprotes kasus *Buloggate* dan *Bruneigate*, serta menuntut Presiden Abdurrahman Wahid mundur dari jabatannya karena terlibat kasus KKN. BEM UI secara tegas menuntut MPR agar menggelar Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid dan mengancam siapapun dalam pemerintahan yang mencoba untuk menanam pohon KKN.

Dalam rentangan waktu sejak Februari hingga Juli 2001, sejumlah BEM dari UI, IKIP Jakarta, IPB, ITB dan KAMMI merupakan elemen gerakan mahasiswa yang sangat aktif menggelar aksi-aksi demonstrasi mengenai kasus *Buloggate* dan *Bruneigate*.<sup>53</sup>

Aksi serupa juga terjadi di luar Jawa. Lebih dari seribu mahasiswa dan rakyat Lampung melakukan *long march* dari kampus Universitas Lampung

---

<sup>51</sup> Lihat *KAMMI Tuntut Gus Dur Mundur* dalam *Tempo* 24 April 2001, lihat juga *Massa Anti Gus Dur Belum Loyo* dalam *Gatra* 10 Februari 2001.

<sup>52</sup> Lihat *BEM UNDIP Serukan Mogok Nasional* dalam *Tempo* 12 Maret 2001.

<sup>53</sup> Mahfudz Sidiq, *Op., Cit.*, hal.258.

menuju perempatan Tugu Adipura Bandar Lampung, sejauh Sembilan kilometer, Senin 12 Maret 2001. Sepanjang jalan, massa yang tergabung dalam Jaringan Mahasiswa Lampung (JML), Masyarakat Pendukung Reformasi (MPR), Generasi Muda Islam (Gemuis), dan Barisan Eksekutif Muda (BEM) meneriakkan yel-yel “Abdurrahman Wahid Mundur, Rakyat Makmur”.<sup>54</sup>

Hal yang penting untuk dicatat adalah bahwa dalam kasus ini, tekanan yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa bukan saja terhadap Presiden Abdurrahman Wahid dalam berbagai aksi ke Istana Merdeka, tetapi gerakan mahasiswa juga melakukan tekanan terhadap DPR/MPR, dengan menggelar aksi di depan gedung wakil rakyat, khususnya pada saat jadwal sidang paripurna DPR dan Sidang Tahunan MPR 2001, yang kemudian berubah menjadi Sidang Istimewa MPR. Misalnya, dalam aksi demonstrasi pada tanggal 12 Maret 2001, ribuan massa mahasiswa dari BEM se-Jabotabek dan dari KAMMI berhasil masuk ke gedung DPR/MPR dan bertahan di dalamnya hingga esok hari. Aksi mereka menuntut agar MPR segera menggelar Sidang Istimewa dan meminta Presiden Abdurrahman Wahid mundur dari jabatannya.<sup>55</sup>

Bila mencermati rangkaian aksi-aksi demonstrasi mahasiswa sepanjang era kekuasaan Presiden Abdurrahman Wahid, satu hal yang nampak mencolok adalah aksi-aksi tersebut didominasi oleh lembaga Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sejumlah perguruan tinggi negeri (BEM UI, BEM IKIP Jakarta, BEM IPB, KM ITB, BEM UGM, BEM UNILA, dan sejumlah BEM perguruan tinggi lain di luar Jawa) dan ormas kemahasiswaan Islam, seperti KAMMI dan HMI. Agenda tuntutan aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan mereka umumnya berkisar pada Enam Visi Reformasi, di mana terjadi penguatan isu pada Pencabutan Dwi Fungsi TNI/Polri pada Sidang Umum MPR 1999 dan Sidang Tahunan MPR 2000. Sepanjang tahun 2001, elemen-elemen gerakan mahasiswa ini mengangkat isu besar mereka yaitu pemberantasan KKN, dengan kasus *Buloggate* dan *Bruneigate* yang melibatkan Presiden Abdurrahman Wahid.<sup>56</sup>

Ada sejumlah analisis yang berkembang di beberapa kalangan pimpinan elemen gerakan mahasiswa mengapa elemen gerakan mahasiswa radikal tidak

<sup>54</sup> Lihat *Massa Lampung Tuntut Gus Dur Mundur*, dalam *Tempo*, 12 Maret 2001.

<sup>55</sup> Lihat *Ribuan Massa Bertahan di DPR* dalam *Tempo*, 13 Maret 2001.

<sup>56</sup> Mahfudz Sidiq, *Ibid.*, hal.262.

terlibat dalam aksi-aksi menuntut pengunduran Abdurrahman Wahid, antara lain: (1) elemen-elemen gerakan radikal mengambil politik kompromistik terhadap Abdurrahman Wahid yang dipandang sejak jauh-jauh hari memiliki pikiran-pikiran yang sejalan; (2) elemen-elemen gerakan mahasiswa radikal memandang isu *Buloggate* dan *Bruneigate* sebagai bentuk konflik elit politik, dan mereka tidak ingin (menahan diri) dari terperangkap pada konflik itu; (3) berkaitan dengan kedua poin analisis di atas, elemen gerakan radikal kemudian mengembangkan agenda-agendanya sendiri yang berbeda dengan *mainstream* saat itu.<sup>57</sup>

Elemen-elemen gerakan radikal mengambil politik kompromistik terhadap Abdurrahman Wahid yang dipandang sejak jauh-jauh hari memiliki pikiran-pikiran yang sejalan. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), yang merupakan *underbouw* NU, sejak era 90-an mulai banyak menyerap pemikiran-pemikiran kiri-radikal sehingga banyak aktivisnya juga aktif di elemen-elemen gerakan radikal semacam FORKOT dan FAMRED bahkan di LMND.<sup>58</sup>

Ketika Presiden Abdurrahman Wahid menghadapi kritik dari berbagai kalangan dan gempuran hebat dari BEMSI dan KAMMI, Abdurrahman Wahid mencoba melakukan kanalisasi dengan menggelar dialog dengan mahasiswa di Hotel Indonesia. Ternyata, sekitar seratus orang mahasiswa yang mengikuti dialog dengan Presiden Abdurrahman Wahid, hampir seluruhnya adalah aktivis PMII, FORKOT, FAMRED, LMND, PRD, dan beberapa elemen gerakan radikal lainnya. Sementara BEM dan KAMMI pada saat yang sama melakukan aksi demonstrasi di Bunderan HI, dan sempat terjadi bentrokan antara massa mahasiswa pendukung dan yang menentang Abdurrahman Wahid.<sup>59</sup>

Indikasi lainnya terlihat dari peristiwa aksi demonstrasi ratusan massa pendukung Abdurrahman Wahid dari Jawa Timur yang nyaris bentrok dengan massa aksi FORKOT. Pasalnya, seperti diberitakan Koran *Tempo*, ratusan massa dari Forum Kota (FORKOT) yang tiba di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu 14 Maret 2001 pukul 15.30 WIB, telah keliru diduga berasal dari BEM UI

<sup>57</sup> Wawancara dengan Adian Napitupulu Aktivis FORKOT, Tanggal 29 Mei 2010 di Jakarta.

<sup>58</sup> Uraian mengenai PMII, lihat Ootong Abdurrahman, *PMII 1960-1985*, Jakarta, PB PMII, 2003-2005. Lihat juga Fauzan Alfas, *PMII dalam Simpul-Simpul Sejarah Perjuangan*, Jakarta, PB PMII, 2006.

<sup>59</sup> Wawancara dengan Andre Rosiade, Aktivis BEMSI, Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid, Kamis, 25 Maret 2010, di Jakarta.

oleh massa pendukung Presiden Abdurrahman Wahid. Akibatnya, ratusan massa pendukung Abdurrahman Wahid yang sejak pagi melakukan aksi di depan Istana Merdeka, tanpa dikomando langsung menyerbu iring-iringan massa FORKOT. Bahkan massa yang sedang makan maupun istirahat langsung bangun. Seruan serbu langsung diteriakkan massa pendukung Abdurrahman Wahid sambil mengambil kayu, batu, dan apa saja yang dapat dilemparkan.

Elemen-elemen gerakan mahasiswa radikal memandang isu *Buloggate* dan *Bruneigate* sebagai bentuk konflik elit politik. Mereka pun menuding elemen gerakan mahasiswa BEMSI dan KAMMI telah dipakai oleh elit politik tertentu untuk menjalankan agenda mereka. Tudingan lain muncul sekitar keterlibatan sejumlah elit politik dalam aksi-aksi BEMSI mengkritisi Presiden Abdurrahman Wahid, yaitu lembaga-lembaga formal kemahasiswaan ini telah dimanfaatkan oleh KAMMI dan HMI yang memiliki koneksi dengan elit politik di DPR. Adian Napitupulu, Aktivistis FORKOT mengatakan :

“Pertama, saya tidak melihat mereka sebagai organ gerakan mahasiswa (KAMMI dan HMI). Mereka adalah gerakan politik di level mahasiswa. Kedua, mereka punya jaringan politik melalui senior-senior mereka yang sudah mapan, sudah lama dalam partai dan sebagainya, dan mereka punya logistik yang jauh lebih besar dari pada kita, mereka punya struktur organisasi yang lebih kuat dibandingkan kita. Yang mereka tidak miliki adalah independensi. Kecenderungannya adalah mereka menjalankan strategi dan taktik partai. Beda dengan kita, kita kan mikir sendiri, diskusi sendiri, aksi sendiri. Artinya, kita menang tidak dapat apa-apa, malah kita dipukulin.”<sup>60</sup>

Pada tanggal 24 Januari 2001, sepuluh BEM dari berbagai perguruan tinggi mengadakan pertemuan di Universitas Trisakti. Hadir di antaranya perwakilan dari UI, ITB, ITS Surabaya, Unibraw Malang, Unas, Politeknik Negeri Jakarta, STAN dan Universitas Mercu Buana. Mereka mengadakan *talk show* tentang *Buloggate* dan *Bruneigate*, yang kemudian diakhiri dengan pernyataan sikap dan aksi bersama. Dalam pernyataannya, mereka menuntut pelaksanaan Enam Visi Reformasi, khususnya soal penegakan supremasi hukum.<sup>61</sup>

Berkaitan dengan kedua poin analisis di atas, elemen gerakan radikal kemudian mengembangkan agenda-agendanya sendiri yang berbeda dengan

<sup>60</sup> Wawancara dengan Adian Napitupulu, Aktivistis FORKOT Tanggal 29 Mei 2010, di Jakarta

<sup>61</sup> Mahfudz Sidiq, *Ibid.*, hal.263.



*mainstream* saat itu. FORKOT, FKSMJ, LMND, dan FAMRED agaknya masih konsisten untuk menuntaskan tugas lama, yakni mengadili Soeharto dan kronikroninya. Karena itu, pada saat para mahasiswa beberapa perguruan tinggi negeri mulai menggalang massa untuk bergerak di gedung DPR/MPR, mereka tetap pada sasarannya, yaitu Cendana. Secara khusus, FORKOT mengembangkan isu baru, yaitu mahkamah rakyat. Isu ini sudah disosialisasikan, sehingga selain berhasil menggandeng kelompok-kelompok mahasiswa lain, mereka juga berhasil “mempengaruhi” Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI).

Sementara itu, meski tak segegar FORKOT, FKSMJ juga mulai menggalang massa. Kelompok yang pernah memelopori pertemuan Ciganjur ini mengkampanyekan gerakan “Potong Satu Generasi”. Untuk mengkampanyekan ide ini, FKSMJ pernah membentangkan spanduk selama 2 minggu di Semanggi, melakukan *long march* dari Gedung Pemuda ke HI pada peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 2000 dan sosialisasi ke kampus-kampus.<sup>62</sup>

Perbedaan ini ternyata menghasilkan polarisasi gerakan di lapangan, yang bahkan dalam beberapa kesempatan sempat menimbulkan bentrokan antara elemen gerakan mahasiswa. Polarisasi ini sesungguhnya kelanjutan dari polarisasi gerakan mahasiswa dan agenda perjuangannya semasa pemerintahan B.J. Habibie. Namun, kali ini polarisasi itu sempat menghadapkan dua kubu gerakan yang berbeda agenda.

Pada hari-hari terakhir kekuasaan Presiden Abdurrahman Wahid, beberapa elemen gerakan mahasiswa radikal dan sejumlah aktivis LSM secara terbuka menampakkan dukungan politiknya terhadap Abdurrahman Wahid. Artinya, kalau muncul tudingan dari mereka bahwa BEM dan KAMMI telah masuk dalam konflik elit, sesungguhnya pada saat yang sama mereka berada dalam posisi yang sama. Tetapi tampaknya, elemen gerakan mahasiswa yang menentang pemerintahan Abdurrahman Wahid tidak terlalu memperdulikan berbagai tudingan. Pandangan yang mereka kedepankan adalah pemerintahan Abdurrahman Wahid telah gagal menjalankan agenda reformasi dan bahkan

---

<sup>62</sup> Mahfudz Sidiq, *Ibid.*, hal.264.

mengembangkan pola KKN baru dalam pemerintahannya.<sup>63</sup>

Kasus *Buloggate* dan *Bruneigate* sebenarnya hanya menjadi momentum. Kasus tersebut menunjukkan masih adanya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Tidak adanya supremasi hukum membuat kasus Soeharto dan kasus-kasus pejabat Orde Baru sampai sekarang masih bebas.<sup>64</sup>

**Tabel 4.7:**  
**Konflik Fisik BEMSI dan BEMI**

Organ	Lokasi	Tanggal	Keterangan
BEMI Kontra BEMSI	Kampus Universitas Atmajaya	12 Maret 2001	Fasilitas Kampus Atma Jaya mengalami kerusakan.
BEMSI Kontra FORKOT, LMND	Jalan Diponegoro-Salemba Raya	Rabu, 14 Maret 2001	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 orang korban massa BEM SI dirawat.</li> <li>• Kantor YLBHI mengalami kerusakan</li> </ul>
BEM UI Kontra FAM UI dan beberapa aktivis BEMI	Kampus UI Salemba	2 Februari 2001	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saling Lempar batu diantara para mahasiswa dan pembakaran jaket almamater UI</li> </ul>
BEMI Kontra BEMSI	Istana Negara	14 Maret 2001	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 Orang Korban</li> </ul>
BEMI Kontra BEMSI	Bundaran HI	10 Februari 2001	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saling lempar batu dan saling mengejar</li> </ul>

**Sumber:** Diolah dari Wawancara dengan aktivis BEMI Arif Rahman, aktivis BEMSI Andre Rosiade dan Taufik Riyadi, aktivis FORKOT Adian Napitupulu dan Eli Salomo serta dari berbagai sumber media massa, Majalah *Tempo*, Majalah *Gatra*, *Kompas* dan *Detik.com*.

Dari gambaran di atas, gerakan mahasiswa pada era ini terbagi atas tiga kelompok, yaitu: (1) gerakan mahasiswa yang terkumpul dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia (BEMI). Mereka terdiri dari PMII, FORKOT, FAMRED, BEM perguruan tinggi di Jawa Timur, serta sebagian organisasi gerakan kiri lainnya. Pada waktu itu, isu yang mereka perjuangkan adalah

<sup>63</sup> Mahfudz Sidiq, *Ibid.*, hal.264.

<sup>64</sup> Mahfudz Sidiq, *Ibid.*, hal.264-265.

pembubaran Golkar, pengadilan Soeharto, dan desakan untuk percepatan pemilu. Dalam hal penurunan Abdurrahman Wahid yang terlibat *Buloggate I*, mereka cenderung tidak larut serta bahkan terkesan membelanya; (2) mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEMSI). Kelompok ini terdiri dari UI, ITB, Trisakti, UNJ, IPB, dan beberapa perguruan tinggi lainnya serta KAMMI.

Isu yang mereka usung dan perjuangkan adalah menuntut Abdurrahman Wahid untuk turun, pembersihan KKN, pengadilan Soeharto, dan pelaksanaan enam agenda reformasi. Di antara beberapa elemen gerakan mahasiswa yang ada, merekalah yang paling gegap-gempita dan bersemangat untuk menurunkan Abdurrahman Wahid; (3) kelompok yang tidak bergabung dengan mereka di atas dan berdiri membawa benderanya masing-masing. Mereka adalah HMI MPO, HMI DIPO, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Aliansi Lembaga Formal Seluruh Indonesia (ALFONSO), Himpunan Aksi Mahasiswa Muslim Antar Kampus (HAMMAS), dan lain-lain. Kelompok ini menganggap bahwa Abdurrahman Wahid hanyalah *entry point* dari seluruh desakan untuk menegakkan *clean and good governance*. Maka, yang lebih diperlukan adalah revolusi sistemik atas segala perangkat politik dan budaya Indonesia.

BEMSI menolak Abdurrahman Wahid karena kerap mengecewakan berbagai kalangan. Sejumlah kebijakan Abdurrahman Wahid yang kontroversial, seperti Kasus *Buloggate* dan Sumbangan Dana dari Sultan Brunei, keinginan membuka hubungan perdagangan dengan Israel Membuat BEMSI tidak puas.<sup>65</sup> Oleh karena itu selain konflik antara BEMSI dan BEMSI dipengaruhi oleh faktor ideologi gerakan mahasiswa; BEMSI berideologi plural dan BEMSI berideologi Islam, juga dipengaruhi kepentingan politik.

Faktor kesamaan ideologi inilah yang mengakibatkan terjadinya dukungan kepada Abdurrahman Wahid, Arif Rahman, Aktivis dan Koordinator BEMSI mengatakan :

“Kalau masalah dukungan, mendukung Gus Dur sebenarnya lebih mengarah ke pemahaman ideologi yang sama tentang demokrasi jadi Gus

<sup>65</sup> Informasi didapatkan dari Wawancara dengan Andre Rosiade, Aktivis BEMSI, Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid, Kamis, 25 Maret 2010, di Jakarta.

Dur dengan ide pluralismenya, demokrasi, otonomi daerah itulah yang membuat satu persepsi dengan kita. Dan memang saat itu kita melihat bahwa gerakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok lain itu karena kepentingan dan kita melihat sosok Gus Dur bukan hanya karena kepentingan politik dikarenakan faktor pemahaman tentang demokrasi dan ideologi tentang demokrasi yang sama dengan kita.”<sup>66</sup>

Begitu juga dengan penentang Abdurrahman Wahid bahwa faktor ideologi sangat mempengaruhi terjadinya konflik politik, Taufik Riyadi, aktivis BEMSI mengatakan:

“Pasti. Itu tidak bisa terhindarkan, itu wajar-wajar aja, seringkali agenda-agenda atau ideologi partai masuk ke agenda-agenda gerakan mahasiswa. Menurut saya sih wajar-wajar saja, tapi menurut saya, yang perlu di hindarkan adalah, konten gerakan mahasiswa itu kan gerakan moral sebenarnya, walaupun sebenarnya saya tidak terlalu sepatat, karena kan gerakan moral tanpa gerakan politik, juga gak mungkin, gerakan mahasiswa tanpa gerakan politik juga gak bisa menurut saya.”<sup>67</sup>

Selain berhadapan dengan BEMSI, BEMI juga mendukung Abdurrahman Wahid dengan cara menyerang kelompok dan elit partai politik yang ingin menjatuhkan Abdurrahman Wahid. BEMI melakukan itu dengan cara menuntut pembubaran Golkar, pembersihan Orde Baru dan pemilu dipercepat serta menyoroti praktek-praktek penipuan, korupsi dan nepotisme yang dilakukan oleh Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua Fraksi Partai Golkar Ginandjar Kartasasmita, Fuad Bawazier, dan Arifin Panigoro dan mereka inilah menurut BEMI perlu dikeluarkan dari DPR. Arif Rahman, Aktivis dan Koordinator BEMI mengatakan:

“Mereka ini adalah orang-orang yang melakukan praktek-praktek penipuan, korupsi, nepotisme bersama KKN-nya Cendana. Mereka harus dibubarkan dari DPR,”<sup>68</sup>

Pembentukan BEMI juga dianggap sebagai wujud tanggung jawab moral terhadap situasi nasional. BEMI melihat ada tiga agenda penggalangan konsolidasi nasional, konsolidasi demokrasi, dan agenda kerakyatan dari tahun 1998 lalu sampai sekarang belum terlaksana. Hal itu menurut BEMI, karena masih

<sup>66</sup> Wawancara dengan Arif Rahman, Aktivis dan Koordinator BEMI pendukung Abdurrahman Wahid, Sabtu tanggal 20 November 2010 dan Jumat 02 April 2010 di Jakarta.

<sup>67</sup> Wawancara dengan Taufik Riyadi, Aktivis BEMSI, Ketua BEM UI penentang Abdurrahman Wahid, Kamis 01 April 2010 di Jakarta.

<sup>68</sup> Lihat *Aksi Demonstrasi BEM Mendapat Tandingan* dalam *Gatra* 12 Maret 2001. Lihat juga *BEMI Kampanyekan Pemilu Dipercepat* dalam *Tempo* 28 April 2001.

kuatnya pengaruh kekuatan lama yang dimotori oleh Golkar. Polarisasi gerakan mahasiswa terjadi karena BEMI menuntut pembubaran Partai Golkar dan pembersihan Orde Baru, sedangkan BEMSI meminta Abdurrahman Wahid mundur.

Adanya BEMSI dan BEMI salah satunya disebabkan oleh perbedaan latar belakang motivasi dan orientasi politik para elit partai politik yang mendukungnya. BEMSI yang menuntut mundur Abdurrahman Wahid didukung oleh para elit partai politik yang menginginkan kejatuhan Abdurrahman Wahid, seperti Amien Rais, Akbar Tanjung, Fuad Bawazier dan Bachtiar Chamsjah. Sebaliknya, BEMI yang menolak mundur Abdurrahman Wahid didukung oleh para elit partai politik yang ingin mempertahankan Abdurrahman Wahid seperti Muhaimin Iskandar, Adhie Massardi, Effendy Choiry, Muhyidin Arubusman dan lain-lain.

Dengan demikian perseteruan antara BEMSI dan BEMI secara tidak langsung merupakan gambaran perseteruan antara elit-elit partai politik yang menentang dan mendukung Abdurrahman Wahid. Konflik antara BEMSI dan BEMI terjadi karena keduanya telah menjadi alat politik para elit partai politik yang sedang berseteru. Politisasi BEMSI dan BEMI membuatnya sulit melihat persoalan Abdurrahman Wahid secara obyektif. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Muhaimin Iskandar elit politik PKB pendukung Abdurrahman Wahid dengan mengatakan:

“Ada beberapa isu, dari Islam, Gus Dur dianggap tidak berpihak ke Islam, misalnya kasus-kasus Israel yang dianggap, Gus Dur dianggap pendiri Simon Perez Institute, tetapi KKN yang paling kencang, *Buloggate* sama *Brunaigate*. Isu korupsi itu kencang sekali. Sampai sekarang Korupsi Gus Dur itu tidak atau belum terbukti. Pengaruh ideologis islam yang anti kuat sekali, karena beberapa elit yang ketemu saya menganggap Gus Dur, meninggalkan Islam, karena banyak orang Islam yang di singkirkan, karena asumsinya dulu Gus Dur naik dari partai-partai Islam, ideologis nya mungkin itu yang di sosialisasikan ke mahasiswa anti Gus Dur yang sebagian besar Islam.”<sup>69</sup>

<sup>69</sup> Wawancara dengan Muhaimin Iskandar, Sekjen PKB pada Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid, Senin, 22 Maret 2010, di Jakarta.

BEMSI, misalnya, tidak melihat masalah internal pemerintahan Abdurrahman Wahid sebagai alasan untuk “memaafkan” Abdurrahman Wahid, sebagaimana alasan yang digunakan BEMI untuk mempertahankan Abdurrahman Wahid. BEMSI justru menjadikan kelemahan pemerintahan Abdurrahman Wahid untuk menjatuhkan Abdurrahman Wahid. Bagi BEMSI kejatuhan Abdurrahman Wahid disebabkan oleh pemerintahannya yang tidak demokratis, tidak transparan, tidak akuntabel dan tidak kredibel, serta terlibat dalam skandal *Buloggate* dan *Bruneigate*. Sebaliknya, BEMI, melihat faktor kesulitan dan beban berat Abdurrahman Wahid sebagai alasan untuk tetap mempertahankan Abdurrahman Wahid. Bagi BEMI ketidakstabilan pemerintahan Abdurrahman Wahid justru disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: (1) “Kabinet Persatuan” yang disusun dari kelompok-kelompok yang saling berhadap-hadapan; (2) manuver politik elit partai politik dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi dan politik; dan (3) krisis multidimensi yang diwarisinya dari pemerintahan sebelumnya.

Meluasnya dukungan terhadap aksi-aksi BEMSI dan BEMI seiring dengan meluasnya konflik antara elit partai politik yang menentang dan mendukung Abdurrahman Wahid di MPR/DPR. Indikasi meluasnya dukungan elit partai politik di DPR terhadap aksi massa BEMSI dapat dicermati dari rekayasa massa di luar gedung DPR untuk datang pada saat Pansus memberikan laporannya kepada rapat Paripurna DPR tanggal 29 Januari 2001.

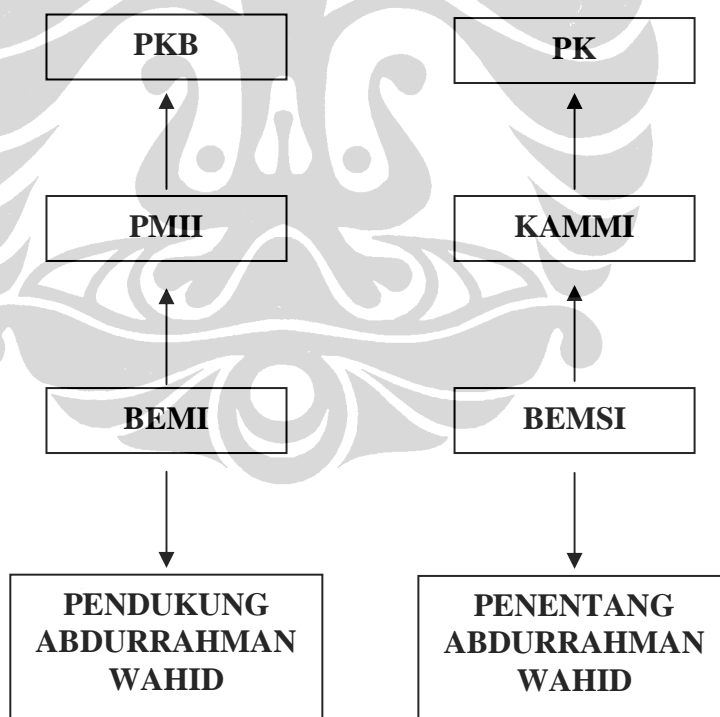
Selain elit politik partai Golkar, PDI-P dan PAN, juga elit politik Partai Keadilan (PK) berada di balik aksi-aksi BEMSI. Hal itu dikaitkan dengan kemunculan BEMSI yang difasilitasi oleh aktivis KAMMI, seperti Fachri Hamzah, Andi Rahmat, Andre Rosiade dan Taufik Riyadi. KAMMI sebagai organisasi mahasiswa ekstra universiter berafiliasi kepada PK, sehingga langsung ataupun tidak langsung aksi-aksi BEMSI yang penentang Abdurrahman Wahid banyak didukung oleh KAMMI dan PK (Lihat Skema 1). Oleh karena itu kebijakan Abdurrahman Wahid yang secara mendadak memberhentikan menteri dari PK terkait dengan maraknya aksi-aksi demonstrasi penentang Abdurrahman Wahid yang dilakukan oleh BEMSI.

Sebaliknya, akibat dari pemberhentian Menteri dari PK, aksi-aksi demonstrasi penentang Abdurrahman Wahid semakin kuat untuk menuntut

mundur Abdurrahman Wahid.

Menghadapi aksi-aksi BEMSI yang semakin intens itu, para elit NU dan elit politik PKB di DPR secara diam-diam juga mendukung langkah yang memfasilitasi kemunculan BEMI untuk mengimbangi dan menghadang aksi-aksi BEMSI. Sejak itulah konflik antara BEMSI dan BEMI semakin tajam. BEMSI yang penentang Abdurrahman Wahid memiliki basis kuat di Universitas Indonesia dan IPB, meskipun memiliki jaringan di seluruh Indonesia. Sedangkan BEMI yang mendukung Abdurrahman Wahid memiliki basis kuat di kampus swasta di Jakarta dan Jawa Timur yang basisnya diperluas hingga ke perguruan tinggi besar di luar Jakarta.

**SKEMA 1:**  
**Hubungan AKTIVIS Intra Kampus, Ekstra Kampus dan Elit Partai Politik**



PMII yang sangat dekat dengan elit NU dan PKB melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh KAMMI yang dekat dengan PK berjuang berebut pengaruh dan simpati masyarakat. Selain itu tujuan PMII membantu kemunculan BEMI adalah untuk mencegah agar kekuatan BEMSI dan KAMMI tidak meluas seperti dalam aksi-aksinya yang menentang rezim Orde Baru.<sup>70</sup>

Dalam skala yang lebih luas, konflik BEMSI dan BEMI yang saling berhadapan-hadapan itu semakin tampak sebagai miniatur konflik antara elit partai politik pendukung dan penentang Abdurrahman Wahid. Polarisasi aksi-aksi BEMSI dan BEMI juga semakin tampak sebagai produk dari ketegangan antara Presiden Abdurrahman Wahid bersama elit partai politik pendukung Abdurrahman Wahid, seperti Muhaimin Iskandar, Ali Masykur Musa dan Effendy Choiry dari PKB melawan para elit partai politik yang menentang Abdurrahman Wahid (Partai Golkar, PPP, PAN, PDI-P dan PK) baik di legislatif maupun yang di eksekutif yang berlanjut dengan kejatuhan Abdurrahman Wahid. Dengan kata lain konflik dan maraknya aksi-aksi BEMSI dan BEMI juga harus dilihat sebagai dampak dari kerjasama antara para elit partai politik dengan para aktivis gerakan mahasiswa di kampus-kampus.

---

<sup>70</sup> Kekuatan dukungan yang diperoleh KAMMI sudah terbukti seperti dalam “Rapat Umum Mahasiswa dan Rakyat Indonesia” yang menuntut reformasi total di lapangan Masjid Al-Azhar Jakarta, 10 April 1998 yang berhasil menggerakkan massa mahasiswa secara spektakuler.